

Potret Awal Pembangunan Pasca MDGs, Sustainable Development Goals (SDGs)



Potret Awal Pembangunan Pasca MDGs, Sustainable Development Goals (SDGs)



POTRET AWAL PEMBANGUNAN PASCA MDGS, SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

ISBN : 978-979-064-940-8
No. Publikasi : 07330.1601
Katalog BPS : 3102023
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xiv + 315 halaman

Naskah : Subdirektorat Indikator Statistik
Pengarah : Margo Yuwono
Editor/Editors : Ali Said

Indah Budiati
Penulis : Indah Budiati
Riyadi
Nia Setiyawati
Aprilia Ira Pratiwi
Putri Larasaty
Indah Noor Safrida
Muhammad Aja Fajrian
Nurcita Suci Firmani
Rosmeyanna Daeli
Uci Yumanda Rizki

Pengolahan Data : Aprilia Ira Pratiwi, Putri Larasaty

Penyiapan Draft : Yogi Ariawan
Zulhan Rusdyansyah
Chairul Anam

Kontributor Data : Direktorat Diseminasi Statistik
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pertanian

KATA PENGANTAR

Millennium Development Goals (MDGs) akan berakhir pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs, dikembangkan suatu konsepsi dalam konteks agenda pembangunan pasca-2015 yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsep SDGs ini diperlukan sebagai agenda pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca-2015, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu penipisan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

Publikasi Potret Awal Pembangunan Pasca MDGs, *Sustainable Development Goals* (SDGs) ini berisi tentang indikator SDGs yang diusulkan oleh *Open Working Group* (OWG) dan *Sustainable Development Solutions Network* (SDSN) berdasarkan dokumen draft rumusan indikator SDGs, versi Agustus 2015 dan ketersediaannya. Selain itu, publikasi ini juga menampilkan beberapa indikator SDGs yang tersedia di Indonesia untuk memotret kondisi awal diberlakukannya agenda pembangunan pasca-2015.

Perlu diketahui bahwa indikator-indikator yang disajikan masih bersifat usulan, sehingga masih memungkinkan adanya perubahan. Kajian ini akan dilanjutkan sejalan dengan perkembangan yang terjadi di dunia internasional dalam penyusunan indikator SDGs.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan pada publikasi yang akan datang.

Jakarta, Desember 2015

Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suryamin, M.Sc.

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Pendahuluan	1
Tujuan 1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada	7
Tujuan 2. Mengakhiri Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Peningkatan Gizi, dan Menganangkan Pertanian Berkelanjutan.....	31
Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk di Segala Usia.....	53
Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Adil dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua.....	95
Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.....	115
Tujuan 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua.....	135
Tujuan 7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan.....	153
Tujuan 8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan.....	167
Tujuan 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh.....	183
Tujuan 10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara.....	197
Tujuan 11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.....	205
Tujuan 12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.....	217
Tujuan 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.....	225
Tujuan 14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan.....	233

Tujuan 15.	Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.....	245
Tujuan 16.	Meningkatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses terhadap Keadilan bagi Semua, dan Membangun Institusi yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan.....	257
Tujuan 17.	Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.....	271
Lampiran	293
Daftar Pustaka	311

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1	Persentase Rumah Tangga yang Tercakup dalam Program Perlindungan Sosial, 2010-2014..... 14
Tabel 1.2	Jumlah Korban Bencana Alam Akibat Iklim Maupun Bukan Iklim, 2010-2015..... 19
Tabel 1.3.	Jumlah Kerusakan Rumah Akibat Bencana Alam Iklim maupun Bukan Iklim 21
Tabel 1.4.	Indikator Kepemilikan Layanan Perbankan, 2011 dan 2014..... 27
Tabel 2.1.	Persentase Anak dengan Berat Lahir Rendah, 2012 45
Tabel 3.1.	Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Obat dan Alat KIT Kesehatan, 2011 89
Tabel 16.1	Jumlah pengungsi berdasarkan jenis bencana, 2010-2015 261

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1.1. Proporsi penduduk dengan daya beli di bawah \$1.25 per hari (PPP), 2007-2011	9
Gambar 1.2. Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, 2010-2015	10
Gambar 1.3. Angka Kelahiran Total/TFR, 2010-2014.....	24
Gambar 1.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2010-2015	25
Gambar 1.5. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha, 2010-2014	28
Gambar 2.1. Persentase Penduduk dengan Asupan Kalori di bawah Tingkat Konsumsi Minimum, 2011-2014	33
Gambar 2.2. Proporsi Anemia pada Perempuan Tidak Hamil Umur ≥ 15 tahun, 2007-2013	35
Gambar 2.3. Prevalensi Status Gizi Balita TB/U, 2007-2013.....	36
Gambar 2.4. Persentase Bayi dibawah 6 Bulan dengan ASI Eksklusif, 2010-2014	37
Gambar 2.5. Kesenjangan Hasil Panen Pertanian Menurut Jenis Tanaman Pangan, 2010-2014	39
Gambar 2.6. Jumlah Penyuluh PNS Pertanian per 100.000 Petani, 2013-2014	40
Gambar 2.7. Jumlah Penyuluh Pertanian (PNS, THL-TB, Swadaya) Menurut Status Penyuluh per 100.000 Petani, 2014.....	41
Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Hasil Panen Serelia (Padi dan Jagung), 2010-2014.....	46
Gambar 2.9. Tingkat Kesenjangan Hasil Ternak, 2010-2014	47
Gambar 2.10. Proporsi Ketersediaan Kalori dari Bahan Pangan Non-Pokok, 2010-2014..	48
Gambar 2.11. Persentase Ketersediaan Total Kalori Protein terhadap Total Kalori Per Kapita, 2010-2014	49
Gambar 3.1. Rasio Kematian Ibu / Maternal Mortality Rasio (per 100.000 kelahiran hidup), 1994-2012	55
Gambar 3.2. Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita, 1991-2012.....	56
Gambar 3.3. Persentase Anak yang Menerima Imunisasi Lengkap di Indonesia, 2010-2014	57
Gambar 3.4. Prevalensi HIV/AIDS Usia 15-49 Tahun dan Tingkat Kejadian di Indonesia, 2010-2013	58
Gambar 3.5. Jumlah Kematian Akibat HIV/AIDS di Indonesia (ribu penduduk), 2010-2013	59

Gambar 3.6.	Insiden, Prevalensi, dan Angka Kematian Terkait TB, 2010-2013	60
Gambar 3.7.	Insiden dan angka kematian terkait malaria, 2000-2013	61
Gambar 3.8.	Prevalensi Kegemukan Pada Balita di Indonesia (dalam persen), 2007-2013	63
Gambar 3.9.	Prevalensi Gemuk dan Obesitas di Indonesia menurut Kelompok Umur, 2013	64
Gambar 3.10.	Rasio Kematian Lalu Lintas Per 100.000 Penduduk di Indonesia, 2010-2014	65
Gambar 3.11.	Proporsi Cakupan Pengobatan Rumah Tangga yang Memiliki ART dengan Gangguan Jiwa Berat di Indonesia, 2013.....	70
Gambar 3.12.	Tingkat Prevalensi Kontrasepsi/ <i>Contraceptive Prevalence Ratio</i> (CPR) di Indonesia, 2010-2013	71
Gambar 3.13.	Proporsi Penduduk Umur ≥ 15 Tahun yang Merokok dan Mengunyah Tembakau di Indonesia, 2007-2013.....	72
Gambar 3.14.	Persentase Kelahiran yang Dibantu Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Indonesia, 2000-2012.....	73
Gambar 3.15.	Cakupan Pelayanan Antenatal, Setidaknya 1 dan 4 Kali Kunjungan di Indonesia, 2002-2012.....	74
Gambar 3.16.	Persentase Wanita (15-49 tahun) yang Menerima Perawatan Nifas dari Tenaga Medis Pasca Melahirkan di Indonesia, 2012	74
Gambar 3.17.	Cakupan Ibu Hamil yang Mendapatkan 90 TTD (Tablet Tambah Darah) di Indonesia (dalam persen), 2010-2014.....	75
Gambar 3.18.	Insiden Diare Pada Balita Menurut Diagnosis Atau Gejala di Indonesia (dalam persen), 2013.....	76
Gambar 3.19.	Persentase Anak Berumur 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Indonesia, 2010-2013	76
Gambar 3.20.	Persentase Ibu Hamil yang Positif HIV dan Menerima PPIA di Indonesia, 2012	77
Gambar 3.21.	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir di Indonesia, 2010-2014.....	77
Gambar 3.22.	Persentase kasus tuberkulosis yang terdeteksi dan sembuh di bawah pengobatan singkat dari hasil pengamatan langsung (DOTS), 2008-2012 .	78
Gambar 3.23.	Persentase Balita dengan Demam yang Diobati dengan Obat Anti-Malaria yang Tepat di Indonesia, 2002-2012.....	79
Gambar 3.24.	Proporsi Penderita Malaria yang Melakukan Pengobatan Efektif dengan ACT di Indonesia, 2010 dan 2013	80

Gambar 3.25. Persentase Kasus Dugaan Malaria yang Menerima Tes Parasitologi di Indonesia, 2010-2014.....	81
Gambar 3.26. Jumlah Kasus Baru Kusta (Tipe MB dan PB) dan Filariasis di Indonesia, 2010-2014	82
Gambar 3.27. Prevalensi Hepatitis Menurut Diagnosis Atau Gejala di Indonesia (dalam persen), 2007 dan 2013.....	82
Gambar 3.28. Prevalensi Penyakit Hipertensi (≥ 18 Tahun) Berdasarkan Diagnosis dan Riwayat Minum Obat Hipertensi di Indonesia, 2007 dan 2013	83
Gambar 3.29. Prevalensi Kurang Aktivitas Fisik Penduduk 10 Tahun keatas di Indonesia, 2007 dan 2013.....	85
Gambar 3.30. Prevalensi Kurang Makan Buah dan Sayur, 2007 dan 2013	86
Gambar 3.31. Persentase Pengeluaran Pemerintah dan Swasta untuk Kesehatan terhadap PDB, 2010-2013	91
Gambar 3.32. Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk, 2008-2014.....	92
Gambar 3.33. Persentase Sikap Menerima Terhadap Orang yang Tinggal dengan HIV/AIDS berdasarkan Empat Indikator Sikap menurut Jenis Kelamin, 2007 dan 2012.....	93
Gambar 3.34. Angka Kematian Perinatal, 2002-2012	94
Gambar 4.1. Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Prasekolah (usia 3-5 tahun), 2011-2014	98
Gambar 4.2. Angka Kelulusan SD dan SMP, 2009/2010 – 2013/2014.....	100
Gambar 4.3. Kelulusan SMA d. Angka an SMK, 2009/2010 – 2013/2014	103
Gambar 4.4. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, 2011-2014.....	105
Gambar 4.5. Persentase Balita (0-48 bulan) Terlantar, 2006-2012.....	108
Gambar 4.6. Angka putus sekolah, 2008/2009-2009/2010 sampai dengan 2012/2013-2013/2014	109
Gambar 4.7. Persentase penduduk (15-19 tahun) yang pernah mendapatkan pelatihan kerja (dan memperoleh sertifikat), 2010-2015.....	110
Gambar 4.8. Persentase penduduk (15-24 tahun) yang melek huruf, 2010-2014	111
Gambar 4.9. Persentase penduduk (18-24 tahun) yang pernah/sedang mengikuti kursus, 2006-2012	112
Gambar 5.1. Persentase wanita 15-49 tahun yang menjadi korban kejahatan, 2010-2014	118
Gambar 5.2. Persentase wanita yang mengalami tindak kejahatan dan dilaporkan ke polisi, 2010-2014	119

Gambar 5.3.	Persentase Wanita Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin Sebelum Berusia 18 Tahun, 2010-2014.....	120
Gambar 5.4.	Rata-Rata Jam Kerja Pekerja Dibayar dan Tidak Dibayar, 2010-2015	122
Gambar 5.5.	Persentase Perempuan yang Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 1992-2014.....	124
Gambar 5.6.	Tingkat Kebutuhan Pelayanan KB yang Terpenuhi, 1991-2012	125
Gambar 5.7.	Rasio Rata-Rata Upah yang Diterima Pekerja Perempuan Terhadap Laki-Laki, 2010-2015.....	127
Gambar 5.8.	Rasio Rata-Rata Upah yang Diterima Pekerja Perempuan Terhadap Laki-Laki menurut potensi ekonomi, 2014	128
Gambar 5.9	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Kepemimpinan dan Teknisi, 2010-2015.....	129
Gambar 5.10.	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Kepemimpinan dan Teknisi menurut Gender, 2010-2015	129
Gambar 5.11.	Persentase Perempuan yang Berstatus Sebagai Kepala Rumah Tangga ataupun Istri yang Tidak Bekerja dan Menjadi Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar, 2010-2014.....	130
Gambar 5.12.	Usia Rata-Rata Ibu Saat Kelahiran Anak Pertama, 1991-2012.....	131
Gambar 5.13.	Adolescent Birth Rate per 1000 Women, 1992-2009.....	132
Gambar 5.14.	Persentase Penduduk Usia 15-24 Tahun dengan Pengetahuan Komprehensif Mengenai HIV/AIDS, 2007 dan 2012	133
Gambar 6.1.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Indonesia, 2009-2013.....	138
Gambar 6.2.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Dasar Layak di Indonesia, 2009-2014.....	140
Gambar 6.3.	Persentase Total Sumber Air yang Digunakan di Indonesia, 1990 dan 2000	145
Gambar 6.4.	Persentase Total Sumber Air yang Digunakan di Indonesia menurut sektor, 1990 dan 2000.....	146
Gambar 6.5.	Persentase Rumah Tangga dengan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Alam Terbuka di Indonesia, 2010-2014	147
Gambar 6.6.	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Cuci Tangan Dasar di Rumah, 2012	148
Gambar 6.7.	Persentase Rumah Sakit Umum/ Pemerintah Dan Puskesmas yang Memiliki Ketersediaan Air Bersih dan Memiliki Pengolahan Limbah (SPAL), 2011.....	150

Gambar 7.1.	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Bahan Bakar (Listrik, Gas/ Elpiji, Gas Kota, dan Minyak Tanah) Untuk Memasak di Indonesia, 2010-2014	156
Gambar 7.2.	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Utama Listrik PLN dan Listrik Non PLN di Indonesia, 2010-2014.....	158
Gambar 7.3.	Intensitas Konsumsi Energi Akhir per Kapita di Indonesia, 2009-2013.....	161
Gambar 7.4.	Perkembangan Penyediaan Energi Primer Menurut Jenis (Juta TOE), 2003-2013	162
Gambar 7.5.	Konsumsi Energi Final Menurut Jenisnya (Ribuan SBM), 2009-2013	163
Gambar 7.6.	Subsidi BBM dan LPG (Triliun Rupiah), 2011-2014	164
Gambar 7.7.	Proporsi Supply Energi Terbarukan Terhadap Total Supply Energi Primer (%), 2009-2013.....	165
Gambar 8.1.	Pendapatan Nasional Bruto Per Kapita (PPP, dalam US\$ saat ini dengan Metode Atlas), 2010-2014.....	170
Gambar 8.2.	Persentase Angkatan Kerja Usia 15-24 Tahun yang Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal, 2011-2015.....	174
Gambar 8.3.	Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja (US\$), 2010-2013	176
Gambar 8.4.	Rasio Pekerjaan Terhadap Penduduk (EPR) Menurut Gender, 2011-2015. .	178
Gambar 8.5.	Rasio Pekerjaan Terhadap Penduduk (EPR) Menurut Kelompok Umur, 2011-2015	179
Gambar 8.6.	Proporsi Pekerjaan Informal Terhadap Total Lapangan Kerja, 2010-2014..	180
Gambar 8.7.	Persentase Pekerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Lapangan Pekerjaan, 2010-2014.....	180
Gambar 8.8.	Persentase Penduduk Muda yang Tidak Sedang Bersekolah dan Tidak Bekerja, 2011-2015	181
Gambar 9.1.	Persentase Desa yang Terdapat Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat Sepanjang Tahun, 2008-2014.....	186
Gambar 9.2.	Persentase Desa yang Terdapat Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat, 2014	186
Gambar 9.3.	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Yang Pernah Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2011-2014	188
Gambar 9.4.	Persentase Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDB, 2010-2014	191
Gambar 9.5.	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Internet, 2011-2014..	195

Gambar 9.6.	Persentase Tenaga Kerja Sektor Industri terhadap Total Tenaga Kerja, 2010-2014	196
Gambar 10.1.	Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal, Maret 2011- Maret 2014	201
Gambar 10.2.	Perkembangan Koefisien Gini Rasio Indonesia, 2010-2014.....	202
Gambar 11.1.	Persentase Penduduk Perkotaan yang Tinggal di Daerah Kumuh, 1990-2014	208
Gambar 14.1.	Proporsi Luas Kawasan Konservasi Laut Terhadap Luas Wilayah Perairan Laut Teritorial, 2011-2014	236
Gambar 14.2.	Luasan Ekosistem Terumbu Karang tahun, 2010 – 2014	240
Gambar 14.3.	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman, 2011 - 2014.....	241
Gambar 15.1.	<i>Red List Index</i> , 2014	251
Gambar 16.1.	Persentase desa menurut adanya korban perkelahian massal (meninggal dan luka-luka), 2008-2014	260
Gambar 16.2.	Persentase balita yang memiliki akte kelahiran, 2010-2014.....	264
Gambar 16.3.	<i>Corruption Perception Index (CPI)</i> / Indeks Persepsi Korupsi, 2005-2014...	265
Gambar 16.4.	Indeks Pengalaman terkait Layanan Publik Tertentu, 2013 dan 2014	268
Gambar 17.1.	Indeks Kebahagiaan, 2013 dan 2014	283

PENDAHULUAN



<http://www.bps.go.id>

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah paradigma pembangunan global, *Millennium Development Goals (MDGs)*. MDGs dideklarasikan pada bulan September 2000 oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Deklarasi MDGs merupakan hasil kesepakatan negara-negara maju dan berkembang di dunia dalam program pembangunan global yang disepakati target pencapaiannya sampai tahun 2015. MDGs memiliki konsep jelas dan indikator pencapaian terukur dalam mencapai komitmen untuk memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, degradasi lingkungan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Komitmen Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan komitmen untuk menyejahterakan rakyat sekaligus menyumbangkan pada kesejahteraan masyarakat dunia. Dalam memenuhi komitmen tersebut Indonesia menghadapi tantangan global yang tidak ringan. Perdagangan bebas, harga minyak yang masih meningkat yang diikuti oleh subsidi BBM yang semakin membengkak, perubahan iklim dan pemanasan global serta dampaknya pada harga pangan yang semakin mahal, mewarnai dinamika sosial dan ekonomi pembangunan nasional.

Berbagai negara sudah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MDGs yang telah diimplementasikan selama empat belas tahun di seluruh dunia. Pelaksanaan MDGs di Indonesia telah memberikan perubahan yang lebih baik, meskipun masih ada beberapa target dan indikator yang masih memerlukan kerja keras untuk mencapainya. Dari 63 indikator MDGs, 13 indikator sudah memenuhi target yang diharapkan sebelum tahun 2015 dan 36 indikator diperkirakan akan tercapai pada tahun 2015, sementara 14 indikator lainnya masih memerlukan kerja keras untuk mencapainya. Pembangunan MDGs yang berhasil dicapai berdasarkan Laporan MDGs Indonesia 2014 di antaranya;

1. Rasio penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari yang turun dari 20,60 persen pada tahun 1990 menjadi 5,90 persen pada tahun 2008.
2. Ketimpangan gender di tingkat pendidikan dari SD sampai dengan perguruan tinggi, termasuk rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki umur 15-24 tahun.
3. Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria.

4. Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian, serta proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan, diobati dan disembuhkan
5. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, di daerah perkotaan.

Sebaliknya beberapa indikator yang masih memerlukan kerja keras untuk mencapainya meliputi;

1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional mencapai 11,25 persen, masih jauh dari target MDGs 7,55 persen.
2. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 1400 kkal/kapita/hari dari target 8,50 persen baru mencapai 17,39 persen (1400 kkal/kapita/hari), dan untuk dan dari target 35,32 persen baru mencapai 66,96 persen (2000 kkal/kapita/hari)
3. Angka kematian balita dan bayi, serta angka kematian ibu
4. Prevalensi HIV dan AIDS serta proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS.
5. Dari sisi lingkungan, jumlah emisi karbondioksida masih melebihi dari target yang ditetapkan MDGs.

Program MDGs yang berakhir pada tahun 2015 ini, diteruskan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang disahkan di Sidang Umum PBB akhir September di New York, USA. SDGs tidak terpisah dari MDGs dan merupakan penyempurnaan dari MDGs. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (SDGs).

Pembahasan awal tentang SDGs dilakukan pada pertemuan KTT Rio+20 tahun 2012 di mana 192 negara setuju membuat platform SDGs, antara lain mempertimbangkan berbagai aspek seperti *action oriented*, dapat diimplementasikan, dan bersifat universal. Aspek itu tetap mempertimbangkan kondisi negara masing-masing, terukur dan mudah terkomunikasikan. SDGs diharapkan menjadi suatu agenda pembangunan yang akan menyelesaikan apa yang telah ditetapkan oleh MDGs dan agenda pembangunan yang mampu menghadapi tantangan lama dan baru yang semakin meningkat, setidaknya masalah perubahan iklim. SDGs juga diharapkan menjadi suatu agenda transformasi yang akan membentuk kembali perkembangan global yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang meliputi penghapusan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan inklusif, kesehatan, kesamaan gender, kesediaan air bersih dan sanitasi untuk semua, serta akses dan kesediaan sumber energi untuk semua, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan ketersediaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur dan inovasi, mengurangi kesenjangan, mengatasi dampak perubahan iklim, pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, mendorong tatanan masyarakat yang damai, dan mendorong kerja sama global. Target-target pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan nasional (RPJMN).

Saat ini dunia masih berupaya untuk menampung masukan dan menyusun indikator-indikator pendukung masing-masing target dari 17 tujuan SDGs. Namun, ada permasalahan penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan yakni ketersediaan data yang dapat digunakan untuk mendukung, memantau dan mengimplementasikan proses pembangunan berkelanjutan. Untuk mengatasi hal ini, *High-Level Panel of Eminent Persons (HLPEP)* menyarankan untuk melakukan revolusi data. Inti dari revolusi data meliputi dua hal yakni integrasi statistik baik di sektor publik maupun swasta dan membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah melalui transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menindaklanjuti usulan tujuan dan target pembangunan berkelanjutan dengan berbagai macam indikator pemantaunya, maka publikasi ini menyajikan tentang indikator-indikator SDGs yang diusulkan oleh *Open Working Group (OWG)* dan *Sustainable Development Solutions Network (SDSN)* berdasarkan dokumen draft rumusan indikator SDGs, versi Agustus 2015 dan ketersediaannya. Selain itu, publikasi ini juga menampilkan beberapa indikator SDGs yang tersedia di Indonesia untuk memotret kondisi awal diberlakukannya agenda pembangunan pasca-2015.

1.2. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan publikasi ini diantaranya adalah

1. Menyajikan indikator-indikator SDGs yang diusulkan oleh *Open Working Group (OWG)* dan *Sustainable Development Solutions Network (SDSN)* berdasarkan dokumen draft rumusan indikator SDGs, versi Agustus 2015.
2. Mengidentifikasi indikator-indikator SDGs yang tersedia di Indonesia.
3. Menampilkan beberapa indikator SDGs yang tersedia di Indonesia untuk memotret kondisi awal diberlakukannya agenda pembangunan pasca-2015.

Diharapkan publikasi ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dalam mengembangkan sistem statistik di Indonesia, mewujudkan revolusi data dan membantu dalam menyiapkan sistem statistik yang mampu memantau perkembangan SDGs yang mulai diimplementasikan pada tahun 2016.

1.3. CAKUPAN

Publikasi ini berisi tentang penjelasan indikator-indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) usulan Sustainable Development Solutions Network (SDSN) yang tercantum dalam laporan berjudul ***“Indicators and A Monitoring Framework For Sustainable Development Goals, Launching A Data Revolution For The SDGs”*** Agustus 2015. Penjelasan tentang indikator meliputi konsep dan definisi, sumber data, level penyajian, periode data, disagregasi, *proxy* dan keterbatasan dari indikator-indikator tersebut serta mencakup semua indikator yang diusulkan baik yang berupa indikator utama maupun indikator tambahan. Publikasi juga mencakup identifikasi indikator-indikator yang tersedia di Indonesia beserta sumber datanya. Untuk mengetahui perkembangan potret awal pembangunan SDGs, disajikan juga series data dari setiap indikator Level penyajian *series* data masih pada level nasional.

MENGHAPUS SEGALA BENTUK KEMISKINAN

<http://www.bps.go.id>

1 NO
POVERTY



- INDIKATOR 1. PROPORSI PENDUDUK DENGAN DAYA BELI DI BAWAH \$1,25 PER HARI (PPP)
- INDIKATOR 2. PROPORSI PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN NASIONAL DIBEDAKAN MENURUT KOTA DESA
- INDIKATOR 3. INDEKS KEMISKINAN MULTIDIMENSI
- INDIKATOR 4. PERSENTASE PENDUDUK YANG TERCAKUP DALAM PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
- INDIKATOR 5. PERSENTASE PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DI DAERAH PEDESAAN YANG MEMILIKI HAK ATAS LAHAN, YANG DIUKUR DENGAN (i) PERSENTASE YANG MEMILIKI SERTIFIKAT TANAH, DAN (ii) PERSENTASE YANG TIDAK TAKUT AKAN PENYITAAN TERHADAP LAHANNYA
- INDIKATOR 6. KERUGIAN BENCANA ALAM AKIBAT IKLIM MAUPUN BUKAN IKLIM MENURUT DAERAH PERKOTAAN-PEDESAAN (DALAM SATUAN US\$ DAN JUMLAH KORBAN JIWA)
- INDIKATOR 7. ANGKA FERTILITAS TOTAL
- INDIKATOR 1.1. INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN
- INDIKATOR 1.2. PERSENTASE PENDUDUK YANG MENGAKSES LAYANAN PERBANKAN (TERMASUK MOBILE BANKING)

INDIKATOR 1.3 & 1.4...

TUJUAN 1. MENGHAPUS SEGALA BENTUK KEMISKINAN

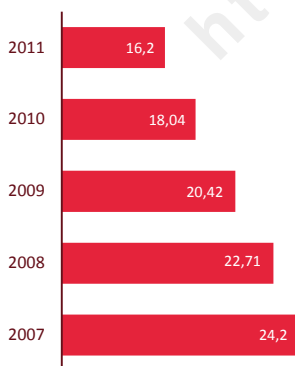
INDIKATOR 1. PROPORSI PENDUDUK DENGAN DAYA BELI DI BAWAH \$1,25 PER HARI (PPP) (INDIKATOR MDG)

Sekitar dua persen penduduk Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan daya beli di atas \$1,25 per hari per kapita. Jika penurunan ini konsisten terjadi setiap tahun, maka sesuai target 1.1 SDGs pada tahun 2030, seluruh penduduk Indonesia dapat terbebas dari kemiskinan ekstrim dengan standar biaya hidup lebih dari \$1,25 per hari

Proporsi penduduk dengan daya beli di bawah \$1,25 per hari (PPP) didefinisikan sebagai persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional, yaitu mereka yang rata-rata konsumsi hariannya kurang dari \$1,25 per orang per hari, diukur pada harga internasional tahun 2005, disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP). Ambang batas \$1,25 merupakan ukuran kemiskinan pendapatan ekstrim yang dapat dijadikan standar perbandingan antar negara ketika dikonversi dengan paritas daya beli (PPP) nilai tukar untuk konsumsi.

Sebagai indikator pengukur kemiskinan, indikator ini digunakan untuk menjawab target SDGs 1.1 (Pada 2030, memberantas kemiskinan ekstrim untuk semua orang dimanapun dengan biaya hidup kurang dari \$1,25 per hari). Sumber data dasar indikator ini yaitu dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) berupa pengeluaran per kapita penduduk. Sementara data garis kemiskinan dihitung dan dikeluarkan oleh Bank Dunia setiap setahun sekali. Namun, sejak tahun 2012 Bank Dunia tidak mengeluarkan angka garis kemiskinan untuk Indonesia sehingga data indikator ini tersaji hanya sampai tahun 2011. Daya beli dan kemiskinan memiliki hubungan yang signifikan (Hardanti, 2008). Hubungan antar keduanya adalah negatif, yaitu semakin rendah daya beli masyarakat maka semakin tinggi jumlah penduduk miskin.

Gambar 1.1 Proporsi penduduk dengan daya beli di bawah \$1.25 per hari (PPP), 2007-2011



Sumber: *Worldbank*

Daya beli masyarakat yang rendah berakibat pada ketidakmampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan daya beli masyarakat dengan cara mengontrol gejolak ekonomi nasional dengan menjaga stabilitas harga bahan pokok dan laju inflasi. Berdasarkan pencapaian MDGs Indonesia tahun 2014, pemerintah telah berhasil mencapai target penurunan hingga setengah proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015 melalui indikator proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP). Hal ini membuat Indonesia optimis dalam menghadapi target pengentasan kemiskinan SDGs.

Data proporsi penduduk dengan daya beli di bawah \$1,25 per hari (PPP) pada Gambar 1.1 memperlihatkan dari tahun 2007 hingga 2011 proporsi penduduk miskin berkurang setiap tahunnya secara signifikan dengan penurunan rata-rata dua persen per tahun. Hal ini menggambarkan bahwa sekitar dua persen penduduk Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan daya beli di atas \$1,25 per hari per kapita. Jika

penurunan ini konsisten terjadi setiap tahun, maka sesuai target 1.1 SDGs pada tahun 2030, seluruh penduduk Indonesia dapat terbebas dari kemiskinan ekstrim dengan standar biaya hidup lebih dari \$1,25 per hari.

INDIKATOR 2. PROPORSI PENDUDUK YANG HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN NASIONAL DIBEDAKAN MENURUT KOTA DESA (INDIKATOR MDG YANG DIMODIFIKASI)

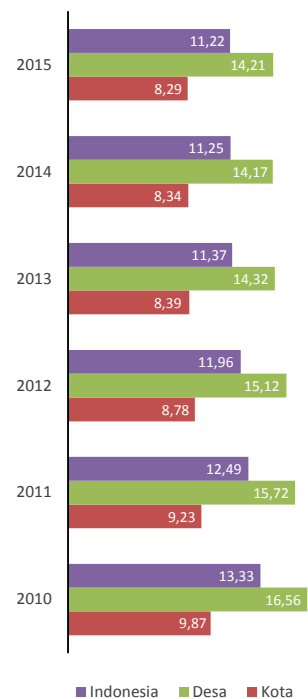
Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, yaitu mereka yang rata-rata konsumsi hariannya (atau pendapatan) kurang dari jumlah tertentu per orang per bulan. Di Indonesia, pengukuran kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS). Jadi, Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Indikator ini digunakan untuk mengukur kemiskinan dalam negeri dan menjawab target 1.2, (pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensinya sesuai dengan definisi nasional). Data untuk indikator ini tersedia di Indonesia melalui Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas). Keberlanjutan data atau series data terjamin setiap tahun. Level penyajiannya dapat disajikan sampai dengan wilayah kabupaten/kota.

Secara umum, persentase penduduk miskin terhadap jumlah seluruh penduduk Indonesia menunjukkan tren menurun secara melambat selama periode 2010-2015. Tingkat penurunan kemiskinan yang hanya mencapai 0.3 persen pada tahun 2015 adalah yang terkecil sepanjang periode empat tahun terakhir. Perlambatan ini dipicu oleh meningkatnya harga beberapa komoditas bahan pokok di pasaran dan naiknya harga bahan bakar minyak (Badan Pusat Statistik, 2015). Berdasarkan Gambar 1.2, apabila ditinjau dari daerah tempat tinggal, penduduk miskin masih didominasi oleh penduduk yang tinggal di perdesaan. Jumlah penduduk miskin di perdesaan hampir dua kali dari penduduk miskin di perkotaan. Ini menunjukkan bahwa daerah perdesaan masih menjadi kantong kemiskinan. Masalah kemiskinan di perdesaan ini umumnya disebabkan oleh kurangnya infrastruktur yang mendukung, dan keterbatasan akses penduduk terhadap sarana dan prasarana pendidikan, transportasi, dan kesehatan (Haryanto, 2012). Jika dilihat dari kondisi data saat ini, pemerintah perlu berupaya lebih untuk

Penduduk miskin masih didominasi oleh penduduk yang tinggal di perdesaan, dimana jumlah penduduk miskin di perdesaan hampir dua kali dari penduduk miskin di perkotaan

Gambar 1.2 Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, 2010-2015



Sumber: Susenas, BPS

menurunkan jumlah penduduk miskin agar pada tahun 2030 mendatang, Indonesia dapat mengurangi setidaknya setengah proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan menurut garis kemiskinan nasional.

INDIKATOR 3. INDEKS KEMISKINAN MULTIDIMENSI

Analisis kemiskinan multidimensi bertujuan untuk mengukur dimensi kemiskinan berbasis non-pendapatan, untuk memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari tingkat kemiskinan dan kekurangan (deprivasi). Indeks Kemiskinan Multidimensional (*MPI/Multidimensional Poverty Index*) mengukur kemiskinan melalui tiga dimensi yaitu kesehatan (angka kematian anak, gizi), pendidikan (lama sekolah, partisipasi), dan standar hidup (bahan bakar untuk memasak, toilet, air, listrik, lantai, aset). Indeks ini mengukur rumah tangga yang mengalami kekurangan di salah satu dimensi dengan menggabungkan pengukuran dimensi tersebut.

Pengukuran MPI ini pernah dikritik karena masalah pengelompokan (klaster) dan pembobotan sub-indikator pada tiga dimensi yang sangat luas. Hasilnya, meskipun seorang individu tidak memiliki akses terhadap air, tidak dapat dianggap miskin jika mereka memiliki tingkat pendidikan dan nutrisi yang cukup. Untuk mengatasi keterbatasan ini, SDSN mendukung terciptanya indikator baru dengan sedikit revisi. Setidaknya, indikator baru (MPI 2015) ini akan melacak kekurangan ekstrim pada gizi, pendidikan, kesehatan, air, sanitasi, akses memasak modern dan listrik yang dapat diandalkan, untuk menunjukkan kesinambungan dengan prioritas MDGs. Meskipun akan lebih baik jika kemiskinan multidimensi ditentukan berdasarkan deprivasi pada salah satu bidang saja, MPI sebelumnya telah menemukan abnormalitas jika hanya menggunakan satu deprivasi, sebagian karena penyimpangan yang ditimbulkan oleh norma-norma budaya dan sebagian karena skala deprivasi yang begitu luas. Oleh karena itu, SDSN mengusulkan penggunaan metode penghitungan Alkire dan Foster, serta menetapkan ambang batas dari dua atau lebih deprivasi, untuk menentukan siapa yang dianggap miskin atau tidak miskin.

Saat ini Indonesia belum memiliki indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan multidimensi secara keseluruhan, Indikator dapat dikembangkan melalui survei tahunan seperti Susenas

Saat ini Indonesia belum memiliki indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan multidimensi secara keseluruhan. Walaupun pengukuran indikator ini masih dijadikan perdebatan dalam kancah internasional, dilihat dari dimensi pembentuknya, indikator dapat dikembangkan di Indonesia melalui survei tahunan seperti Susenas. Penghitungan indikator ini melalui Susenas terkendala pada dimensi kesehatan yaitu pada data angka kematian anak dan gizi yang belum tercakup didalamnya. Meskipun demikian, Badan Pusat Statistik pernah melakukan perhitungan MPI khusus untuk rumah tangga usaha pertanian

melalui Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian (SPP 2013). Nilai Indeks Kemiskinan Multidimensi yang dihasilkan menggambarkan persentase rata-rata penduduk yang mengalami kekurangan multidimensi dilihat dari 10 indikator IKM, yaitu :

1. Tidak memiliki anggota keluarga yang telah menyelesaikan pendidikan 9 tahun (SMP);
2. Memiliki minimal satu anak usia sekolah (sampai kelas 9);
3. Memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang kekurangan gizi;
4. Memiliki satu atau lebih anak yang meninggal dunia;
5. Tidak memiliki listrik;
6. Tidak memiliki akses air minum bersih;
7. Tidak memiliki akses ke sanitasi yang memadai;
8. Menggunakan bahan bakar memasak dari bahan bakar arang, batubara atau kayu bakar;
9. Memiliki rumah dengan lantai tanah;
10. Tidak memiliki kendaraan bermotor dan hanya memiliki salah satu barang berikut ini : sepeda, sepeda motor, radio, kulkas, telepon, atau televisi (Badan Pusat Statistik, 2014).

Indikator ini dapat digunakan untuk menjawab target SDGs, target 1.1 (pada tahun 2030, memberantas kemiskinan ekstrim untuk semua orang dimanapun dengan biaya hidup kurang dari \$1,25 per hari) serta target 1.2 (pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensinya sesuai dengan definisi nasional).

INDIKATOR 4. PERSENTASE PENDUDUK YANG TERCAKUP DALAM PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Indikator ini mengukur persentase penduduk yang tercakup oleh jaringan perlindungan sosial. Jaringan perlindungan sosial mencakup program-program perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin, seperti bantuan beras miskin (Raskin), kredit usaha, dan kepemilikan/penerimaan jaminan sosial dan kesehatan. Indikator ini dapat memantau ketercapaian dari 5 target SDGs di 4 goals. Kelima target tersebut, yaitu:

- Target 1.1 pada tahun 2030, memberantas kemiskinan ekstrim untuk semua orang dimanapun dengan biaya hidup kurang dari \$1,25 per hari;
- Target 1.3 menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat yang mengukur semua aspek, termasuk lantai, dan pada 2030 mencakup sebagian besar kaum miskin dan

Data indikator 4 didekati dengan Persentase rumah tangga yang tercakup dalam program perlindungan sosial, data ini diperoleh dari Susenas

rentan;

- Target 5.4 mengakui dan menghargai perawatan tak dibayar dan pekerjaan domestik melalui penyediaan layanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, serta peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga secara nasional;
- Target 10.4 mengadopsi kebijakan terutama kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial dan mencapai kesetaraan yang lebih besar secara progresif;
- Target 11.1 pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua perumahan dan layanan dasar yang layak, aman dan terjangkau dan memperbaiki kawasan kumuh.

Data untuk indikator ini diperoleh dari Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas). Keberlanjutan data terjamin setiap tahunnya. Level penyajiannya dapat disajikan sampai dengan wilayah kabupaten/kota. Karena unit analisis yang digunakan adalah rumah tangga, maka indikator didekati dengan persentase rumah tangga yang tercakup dalam program perlindungan sosial. Data tidak bisa didisagregasi berdasarkan gender dan umur penerima bantuan.

Selama periode 2010-2014, rumah tangga penerima program perlindungan sosial cenderung mengalami penurunan, kecuali pada program jaminan pelayanan kesehatan dimana persentase rumah tangga yang menerima jaminan pelayanan kesehatan mencapai 50,26 persen

Program perlindungan sosial di Indonesia memegang peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan serta pembangunan ekonomi. Saat ini perlindungan sosial dipandang sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan. Padahal masyarakat kurang mampu dan rentan juga harus diberi kesempatan dalam berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang setara di Indonesia (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014). Secara umum, selama periode 2010-2014, rumah tangga penerima program perlindungan sosial cenderung mengalami penurunan, kecuali pada program jaminan pelayanan kesehatan. Peningkatan pada jaminan pelayanan kesehatan setiap tahunnya sejak 2010 dapat mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan rakyat semakin baik, karena biaya dan layanan kesehatan menjadi mudah untuk dijangkau dan dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Tahun 2014, persentase rumah tangga yang menerima jaminan pelayanan kesehatan mencapai 50,26 persen, artinya setengah dari rumah tangga di Indonesia telah tercakup dalam program jaminan kesehatan. Jika ditinjau dari daerah tempat tinggal, persentase rumah tangga yang menerima jaminan kesehatan diperkotaan lebih tinggi daripada perdesaan dengan perbedaan yang tidak besar, bahkan dapat dikatakan hampir setara pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan kesehatan telah merata diterima oleh masyarakat.

Raskin merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah berupa pemberian subsidi beras yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan. Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Berdasarkan Tabel 1.1, selama tahun 2010-2014, rumah tangga yang menerima beras miskin (raskin) cenderung fluktuatif dengan persentase yang stabil berada pada angka lebih dari 50 persen. Rumah tangga penerima raskin masih didominasi oleh rumah tangga di daerah perdesaan, persentasenya hampir dua kali lipat dibandingkan persentase rumah tangga penerima raskin daerah perkotaan.

Selain jaminan kesehatan dan bantuan raskin, pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk kredit usaha. Pemberian kredit usaha sangat bermanfaat terutama bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro dalam menopang perekonomian Indonesia. Program kredit usaha yang diberikan kepada rumah tangga miskin dibedakan dari sumbernya yang meliputi PNPM Mandiri, KUR, Koperasi, Program Perorangan, dan lainnya. Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa selama 2010 hingga 2014, secara umum presentase rumah tangga yang tercakup program kredit usaha semakin menurun. Penurunan persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha di setiap program menggambarkan

Tabel 1.1 Persentase Rumah Tangga yang Tercakup dalam Program Perlindungan Sosial, 2010-2014

Tipe Program	Tahun								
	2010			2011			2012		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jaminan Pelayanan Kesehatan	44,21	38,28	41,23	45,44	37,62	41,49	44,63	34,65	39,59
Beras Miskin (Raskin)	35,20	65,31	50,33	38,31	66,17	52,37	38,60	66,75	52,83
Kredit Usaha									
PNPM Mandiri	1,45	3,38	2,42	1,57	3,60	2,59	1,43	3,14	2,30
Program pemerintah lainnya	0,66	0,93	0,79	0,52	0,72	0,62	0,46	0,57	0,52
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	0,77	0,72	0,74	0,92	1,01	0,96	1,12	1,12	1,12
Program bank lain selain KUR	3,51	2,84	3,18	2,65	2,45	2,55	2,70	2,11	2,40
Program Koperasi	2,16	2,06	2,11	1,68	1,69	1,68	1,87	1,53	1,70
Program Perorangan	1,72	2,26	1,99	1,59	2,37	1,98	1,23	1,67	1,45
Program lainnya	0,47	0,61	0,54	0,85	1,13	0,99	0,99	1,30	1,15

Lanjutan Tabel 1.1

Tipe Program	Tahun					
	2013			2014		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jaminan Pelayanan Kesehatan	48,84	49,17	49,01	51,02	49,50	50,26
Beras Miskin (Raskin)	37,89	65,34	51,69	37,08	65,06	51,69
Kredit Usaha						
PNPM Mandiri	1,13	3,09	2,11	0,89	2,79	1,84
Program pemerintah lainnya	0,30	0,63	0,47	0,31	0,57	0,44
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	1,29	1,38	1,33	1,38	1,59	1,48
Program bank lain selain KUR	2,09	2,11	2,10	2,04	2,05	2,04
Program Koperasi	1,33	1,41	1,37	1,15	1,24	1,19
Program Perorangan	0,80	1,08	0,94	0,78	1,04	0,91
Program lainnya	1,01	1,15	1,08	0,86	1,16	1,01

Sumber : Susenas, BPS

minat masyarakat yang semakin menurun untuk memperoleh kredit usaha dari setiap program. Program kredit usaha yang paling diminati selama 4 tahun terakhir adalah program bank lain selain KUR dengan persentase sebesar 2,04 persen pada tahun 2014. Ditinjau dari daerah tempat tinggal daerah perkotaan lebih berminat pada program bank lain selain KUR, sedangkan daerah pedesaan lebih berminat pada program PNPM Mandiri.

INDIKATOR 5. PERSENTASE PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DI DAERAH PEDESAAN YANG MEMILIKI HAK ATAS LAHAN, YANG DIUKUR DENGAN (i) PERSENTASE YANG MEMILIKI SERTIFIKAT TANAH, DAN (ii) PERSENTASE YANG TIDAK TAKUT AKAN PENYITAAN TERHADAP LAHANNYA

Data untuk indikator 5 belum tersedia di Indonesia namun dapat didekati dengan indikator proksi jumlah bidang tanah yang bersertifikat serta perkembangan program legalisasi lahan oleh BPN

Indikator ini untuk melihat mampukah masyarakat miskin di pedesaan dalam mengamankan kepemilikan mereka atas lahan dan sumber daya alam yang mereka bergantung padanya memberi implikasi penting bagi pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Namun, masih banyak rumah tangga miskin di pedesaan yang akses terhadap lahan dan sumber daya alamnya terus digerogeti. Secara khusus, kontroversi yang melibatkan akuisisi lahan dalam skala besar oleh investor asing dan domestik telah menempatkan hak atas lahan dan masalah investasi pertanian yang bertanggung jawab pada agenda pembangunan global. Indikator baru ini diusulkan dengan

dua komponen yaitu (i) persentase penduduk yang memiliki sertifikat tanah, dan (ii) persentase penduduk yang tidak takut akan terjadinya perampasan tanah secara sewenang-wenang. Dokumentasi dan wawasan memberikan informasi penting dan berimbang terhadap jaminan kepemilikan serta menjadi bukti penting dan nyata di lapangan. Fokus yang diusulkan mencakup berbagai hak kepemilikan dalam konteks yang berbeda di setiap negara. Walaupun pendokumentasian merupakan indikator yang penting, hal itu tidak cukup untuk mengukur hak atas jaminan kepemilikan, ukuran persepsi memberikan informasi tambahan yang juga penting. Selain itu, ukuran persepsi lebih berguna untuk memfasilitasi keterbandingan indikator antarnegara.

Indikator ini digunakan untuk mengukur enam target SDGs, meliputi:

- Target 1.1 pada tahun 2030, memberantas kemiskinan ekstrim untuk semua orang dimanapun dengan biaya hidup kurang dari \$1,25 per hari;
- Target 1.4 pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses ke layanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk lain dari properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang layak, dan jasa keuangan termasuk keuangan mikro;
- Target 2.3 pada tahun 2030, meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, terutama perempuan, masyarakat adat, petani keluarga, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap tanah, sumber daya produktif lainnya dan input, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang untuk penambahan nilai dan pekerjaan non-pertanian;
- Target 5.1 mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di mana saja;
- Target 5.a melakukan reformasi untuk memberikan wanita hak yang sama untuk sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk lain dari properti, jasa keuangan, warisan, dan sumber daya alam sesuai dengan hukum nasional;
- Target 10.2 pada tahun 2030, memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi dan politik dari semua terlepas dari usia, jenis kelamin, cacat, ras, etnis, asal, agama atau

status ekonomi atau lainnya.

Data untuk indikator ini di Indonesia sampai sekarang belum tersedia. Namun, untuk mengetahui keadaan penduduk miskin di pedesaan atas terjaminnya lahan mereka, indikator proksi yang dapat digunakan adalah jumlah bidang tanah yang bersertifikat serta perkembangan program legalisasi lahan oleh BPN. Ketersediaan data memungkinkan indikator untuk didisagregasi berdasarkan jenis hak dan jenis program legalisasi aset. Belum tersedianya data dan informasi mengenai persepsi masyarakat tentang terjaminnya hak atas tanah menyebabkan ukuran persepsi belum bisa menjadi indikator pada tujuan ini. Oleh karena itu, data tidak bisa didisagregasi berdasarkan jenis kelamin pemilik aset.

INDIKATOR 6. KERUGIAN BENCANA ALAM AKIBAT IKLIM MAUPUN BUKAN IKLIM MENURUT DAERAH PERKOTAAN-PEDESAAN (DALAM SATUAN US\$ DAN JUMLAH KORBAN JIWA)

Indikator ini mengukur kerugian yang dialami daerah perkotaan maupun pedesaan akibat bencana alam baik jiwa maupun kerugian ekonomi, dibagi atas kejadian terkait iklim dan bukan iklim. Bencana alam yang terjadi akibat iklim ekstrim antara lain, (i) peristiwa hidrometeorologi (badai, banjir, gerakan bongkahan basah) dan (ii) kejadian iklim (suhu ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan). Bencana alam yang tidak terkait iklim terutama berkaitan dengan peristiwa geofisika (gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, gerakan massa kering). Bencana lainnya yang terkait iklim maupun bukan iklim yaitu peristiwa biologis (epidemi, gangguan serangga, *animal stampedes*). Jika ragu maka dapat dikelompokkan sebagai kejadian yang tidak terkait iklim.

Data indikator 6 didekati dengan Jumlah korban bencana alam yang meninggal dunia, Kerugian akibat bencana alam dalam rupiah dan US\$ yang diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Dimensi ekonomi dari indikator ini akan mengukur kerugian tanaman dan hewan produksi terkait dengan peristiwa iklim dan non-iklim terkait, nilai kerusakan aset fisik yang hancur secara total atau sebagian, kerugian dalam arus ekonomi yang timbul dari tidak adanya aset yang rusak secara sementara, dan dampak yang dihasilkan pada kinerja ekonomi makro pasca bencana. Sementara untuk kerugian dari sisi manusia akan diukur dengan jumlah orang meninggal atau hilang sebagai akibat langsung dari bencana alam.

Indikator ini mampu menjawab 6 target dalam 4 goals SDGs. Target-target tersebut meliputi:

- Target 1.3 menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang layak yang mengukur semua aspek, termasuk lantai, dan pada tahun 2030 mencakup sebagian besar kaum miskin dan rentan.

- Target 1.5 pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan rentan dan mengurangi keterpaparan dan kerentanan masyarakat miskin dan rentan terhadap kejadian ekstrem yang terkait dengan iklim dan guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya, dan bencana.
- Target 2.3 pada tahun 2030, meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, terutama perempuan, masyarakat adat, petani keluarga, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap tanah, sumber daya produktif lainnya dan input, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang untuk penambahan nilai dan pekerjaan non-pertanian.
- Target 2.4 pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek-praktek pertanian yang tangguh dan meningkatkan produktivitas dan produksi, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan bencana lainnya, dan semakin meningkatkan kualitas lahan dan tanah.
- Target 11.5 pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak dan penurunan sebesar % kerugian ekonomi relatif terhadap PDB yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus pada melindungi orang miskin dan orang-orang yang berada di situasi rawan.
- Target 13.1 memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptif terhadap bahaya iklim terkait dan bencana alam di semua negara.

Data indikator ini diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui basis data yang dinamakan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Melalui DIBI dapat dilihat historis kejadian bencana di Indonesia mulai tahun 1815. DIBI menyajikan data bencana mulai tanggal kejadian, lokasi, korban dan kerusakan yang ditimbulkan. Berdasarkan ketersediaan data, indikator dapat didisagregasi berdasarkan jenis bencana (terkait iklim dan bukan iklim), dengan penyajian wilayah sampai dengan level kabupaten/kota. DIBI telah menyediakan data kerugian dalam satuan rupiah dan dollar, namun angka yang ada masih ada yang kosong untuk beberapa bencana sehingga untuk dimensi ekonomi akan didekati dengan

jumlah kerusakan rumah. Berdasarkan ketersediaan data yang ada data tidak dapat diagregasi menurut daerah tempat tinggal, maka indikator ini akan didekati dengan Kerugian Bencana Alam Akibat Iklim Maupun Bukan Iklim (Dalam Jumlah Kerusakan dan Jumlah Korban Jiwa).

INDIKATOR PROXY: JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM YANG MENINGGAL DUNIA, KERUGIAN AKIBAT BENCANA ALAM DALAM RUPIAH DAN USS

Selama tahun 2010-2014, bencana alam yang sering dialami Indonesia adalah bencana akibat iklim. Tiga besar bencana alam yang rutin dialami Indonesia adalah bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor.

Selama tahun 2010-2014, bencana alam yang sering dialami Indonesia adalah bencana akibat iklim. Tiga besar bencana alam yang rutin dialami Indonesia adalah bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor. Ketiga bencana tersebut adalah bencana yang terjadi saat musim hujan, hal ini karena letak geografis terutama kerawanan bencana pada daerah yang rawan akan gerakan tanah. Selama empat tahun terakhir jumlah kejadian bencana terbanyak ada pada tahun 2014. Jika dilihat dari tren yang ada pada Tabel 1.2 jumlah kejadian bencana alam setiap tahun memang akan sulit diprediksi karena merupakan kuasa alam. Akan tetapi antisipasi terhadap bencana dapat

Tabel 1.2. Jumlah Korban Bencana Alam Akibat Iklim Maupun Bukan Iklim, 2010-2015

Kejadian Bencana	Tahun											
	2010				2011				2012			
	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Akibat iklim												
Banjir	990	445	1 066	158	554	139	257	26	540	79	40	19
Banjir dan Tanah Longsor	43	57	577	9	26	13	4	1	51	30	26	0
Gelombang Pasang/ abrasi	12	-	-	-	17	4	0	32	29	1	11	0
Gempa Bumi	15	19	247	0	11	5	21	0	15	6	694	0
Gempa Bumi dan Tsunami	1	447	498	56	-	-	-	-	1	11	4	0
Kebakaran Hutan dan Lahan	4	-	-	-	23	-	-	-	51	-	-	-
Kekeringan	40	2	0	0	221	-	-	-	264	-	-	-
Letusan Gunung Berapi	4	390	763	0	4	-	-	-	7	-	-	-
Puting Beliung	399	36	24	0	447	29	31	0	562	43	110	0
Tanah Longsor	400	234	220	27	329	169	80	2	291	112	67	3
Tsunami	-	-	-	-	1	1	0	0	-	-	-	-
Akibat bukan iklim												
Kecelakaan Industri	5	8	17	0	1	10	1	0	-	-	-	-
Kecelakaan Transportasi	22	53	110	57	23	289	301	192	21	81	28	66
Konflik/Kerusuhan Sosial	30	34	422	0	6	11	4	0	10	6	74	0
Total	1 965	1 725	3 944	307	1 663	670	699	253	1 842	369	1 054	88

Lanjutan Tabel 1.2.

Kejadian Bencana	Tahun											
	2013				2014				2015 ¹			
	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Akibat iklim												
Banjir	683	162	62	12	559	96	7	4	375	21	6	4
Banjir dan Tanah Longsor	47	47	256	1	37	39	0	4	20	1	0	2
Gelombang Pasang/ Abrasi	36	5	3	2	20	7	6	0	6	0	0	1
Gempa Bumi	9	45	2 541	0	15	-	-	-	19	0	1	0
Gempa Bumi dan Tsunami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kebakaran Hutan dan Lahan	26	2	0	0	101	3	0	0	1	0	0	0
Kekeringan	66	-	-	-	7	-	-	-	3	0	0	0
Letusan Gunung Berapi	8	5	3	0	5	24	1 423	0	6	0	0	0
Putting Beliung	503	31	27	0	621	32	49	30	354	19	75	1
Tanah Longsor	296	171	96	16	600	349	169	19	402	92	82	15
Tsunami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akibat bukan iklim												
Kecelakaan Industri	4	32	3	0	2	2	7	0	-	-	-	-
Kecelakaan Transportasi	40	211	59	58	50	205	65	106	30	19	16	51
Konflik/Kerusuhan Sosial	4	10	7	0	5	12	110	0	-	-	-	0
Total	1 722	721	3 057	89	2 022	769	1 836	163	1 216	152	180	74

Catatan : ¹ Oktober 2015

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(<http://dibi.bnpb.go.id/DesInventar/crosstab.jsp>)

ditingkatkan untuk menekan kerugian yang ditimbulkan, baik itu kerugian jiwa maupun ekonomi. Hal ini agar pada tahun 2030 mendatang Indonesia dapat memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya iklim terkait dan bencana alam sesuai target 13.1.

Ditinjau dari sisi kerugian dalam bentuk jiwa manusia, korban meninggal kebanyakan dikarenakan bencana tanah longsor, angka kematian akibat bencana ini terus tertinggi setiap tahun sejak 2010. Disamping itu angka ini berbanding lurus dengan angka kejadian bencana sehingga semakin banyak kejadian bencana semakin tinggi korban meninggal akibat tanah longsor. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan dan antisipasi terhadap bencana ini masih sangat minim. Kemudian dari sisi bukan iklim jumlah korban meninggal kebanyakan dikarenakan oleh kecelakaan transportasi terutama pada tahun

2011. Sementara untuk korban luka-luka dan hilang kebanyakan berasal dari bencana banjir akan tetapi angkanya menunjukkan pengurangan yang cukup signifikan dengan jumlah kejadian yang tinggi setiap tahunnya ini mengindikasikan bahwa penanganan dan antisipasi masyarakat terhadap bencana ini sudah baik. Akan tetapi, bencana lain seperti letusan gunung merapi dan gempa bumi disertai tsunami dengan kejadian yang jarang menimbulkan jumlah korban luka-luka dan hilang yang sangat besar hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar pada 15 tahun mendatang target 11.5 dapat dicapai. Secara keseluruhan untuk bencana banjir yang rutin terjadi Indonesia dapat optimis dalam mencapai target 11.5 akan tetapi untuk bencana besar yang memakan korban besar seperti tanah longsor, letusan gunung merapi, dan gempa bumi disertai tsunami pemerintah perlu lebih mengatur strategi penanggulangan melalui *early warning* dan sosialisasi evakuasi dan tanggap bencana.

Tabel 1.3 memperlihatkan kerugian dari sisi ekonomi dari bencana alam yang terjadi ditinjau dari kerusakan rumah

Tabel 1.3. Jumlah Kerusakan Rumah Akibat Bencana Alam Iklim maupun Bukan Iklim

Kejadian Bencana	Tahun											
	2010			2011			2012			2013 ^x		
	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Akibat iklim												
Banjir	2 910	101	1 639	2 882	224	1 883	598	1 677	2 404	1 295	1 671	7 857
Banjir dan Tanah Longsor	673	15	905	23	0	28	714	310	444	842	417	6 958
Gelombang Pasang/Abrasi	-	-	-	0	0	0	39	45	153	0	0	0
Gempa Bumi	3 190	1 128	1 098	1 588	97	478	527	311	788	7 419	3 791	8 739
Gempa Bumi dan Tsunami	517	0	204	-	-	-	0	0	0	-	-	-
Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Kekeringan	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letusan Gunung Berapi	2 465	158	296	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Puting Beliung	252	5	1 543	67	4	47	698	663	2 427	112	1 207	1 143
Tanah Longsor	364	9	156	174	2	568	134	9	202	103	11	100
Tsunami	-	-	-	17	0	17	-	-	-	-	-	-
Akibat bukan iklim												
Kecelakaan Industri	0	0	0	9	0	0	-	-	-	0	0	0
Kecelakaan Transportasi	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
Konflik/Kerusuhan Sosial	22	0	1	17	7	0	129	4	108	136	0	0
Total	10 393	1 416	5 842	4 777	334	3 021	2 847	3 019	6 526	9 907	7 097	24 797

Lanjutan Tabel 1.3

Kejadian Bencana	Tahun					
	2014			2015 ¹		
	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Akibat iklim						
Banjir	215	38	314	437	150	1 357
Banjir dan Tanah Longsor	486	63	373	58	44	124
Gelombang Pasang/ Abrasi	1	0	0	2	5	0
Gempa Bumi	-	-	-	12	19	103
Gempa Bumi dan Tsunami	-	-	-	-	-	-
Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0	0	0
Kekeringan	-	-	-	0	0	0
Letusan Gunung Berapi	3 782	0	0	7	0	1
Putting Beliung	362	1 607	1 542	1 119	1 270	4 900
Tanah Longsor	339	57	22	397	227	481
Tsunami	-	-	-	-	-	-
Akibat bukan iklim						
Kecelakaan Industri	0	0	0	-	-	-
Kecelakaan Transportasi	0	0	0	0	0	0
Konflik/Kerusuhan Sosial	11	0	0	-	-	-
Total	5 196	1 765	2 251	2 032	1 715	6 966

Catatan: ¹ Oktober 2015

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(<http://dibi.bnppb.go.id/Desinventar/crosstab.jsp>)

baik itu berat, sedang, maupun ringan. Secara umum, semua bencana yang disebabkan oleh iklim masih menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Kerugian ekonomi terbesar disebabkan oleh bencana banjir, putting beliung, gempa bumi, dan tanah longsor. Kerugian ekonomi akibat bencana akan sangat menyulitkan masyarakat dengan ekonomi rendah terutama mereka yang masuk dalam kategori miskin dan rentan. Hal ini dikarenakan diperlukan biaya tambahan untuk bencana. Selain itu, bencana juga membuat penghasilan mereka berkurang terutama penduduk miskin yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Bencana dapat mempengaruhi hasil tanaman mereka sehingga panen gagal dan merugi. Melihat masih tingginya kerusakan ekonomi akibat bencana, pemerintah perlu memperhatikan anggaran khusus untuk bencana berupa program perlindungan sosial yang diharapkan merata dan adil untuk seluruh lapisan masyarakat agar masyarakat miskin tidak

terjebak kemiskinan yang lebih dalam. Disamping itu, bantuan bagi rumah tangga pertanian juga perlu dipertimbangkan karena akan mempengaruhi ketahanan pangan negara. Apabila terjadi bencana di daerah kaya SDA pertanian yang tidak terduga dapat menyebabkan ketersediaan pangan negara menipis. Berdasarkan data yang ada, Indonesia perlu lebih berupaya dalam memenuhi capaian untuk:

- Target 1.3 menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang layak yang mengukur semua aspek, termasuk rantai, dan pada tahun 2030 mencakup sebagian besar kaum miskin dan rentan.
- Target 1.5 pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan rentan dan mengurangi keterpaparan dan kerentanan masyarakat miskin dan rentan terhadap kejadian ekstrem yang terkait dengan iklim dan guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya, dan bencana.
- Target 2.4 pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek-praktek pertanian yang tangguh dan meningkatkan produktivitas dan produksi, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan bencana lainnya, dan semakin meningkatkan kualitas lahan dan tanah.
- Target 2.5 pada tahun 2020, mempertahankan keragaman genetik benih, tanaman budidaya, hewan peternakan dan hewan peliharaan serta spesies liar yang terkait dengannya, termasuk melalui pengelolaan yang baik dan memberagamkan benih dan bank tanaman di tingkat nasional, regional, dan internasional, dan menjamin akses dan pembagian yang adil dan merata dari keuntungan yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait yang disepakati secara internasional.

Agar bencana tidak menjerumuskan mereka kepada kemiskinan dan berdampak pada ketahanan pangan Indonesia.

INDIKATOR 7 : ANGKA FERTILITAS TOTAL

Angka fertilitas total (TFR/*Total Fertility Rate*) merupakan ukuran untuk memantau rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur. Sederhananya TFR

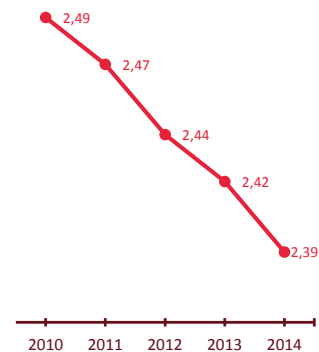
diartikan sebagai banyaknya anak yang diperkirakan dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu tanpa memperhitungkan angka kelangsungan hidup wanita. Ketersediaan data untuk Indikator ini dapat dihasilkan melalui Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dengan periode data lima tahunan dan Hasil Proyeksi Penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) atau SUPAS dengan periode data tahunan. Penyajian data dapat disajikan pada level propinsi dengan disagregasi berdasarkan umur dan daerah tempat tinggal.

TFR dipandang sebagai salah satu indikator untuk memantau pertumbuhan penduduk. Kelahiran yang tinggi dan tingginya ketergantungan anak merupakan ciri negara-negara dengan kesenjangan kemiskinan terbesar (Mason & Lee, 2004). Secara tidak langsung tingkat kelahiran akan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian per kapita melalui ketersediaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja hingga akhirnya berdampak pada kemiskinan. Pada Gambar 1.3 terlihat bahwa TFR (berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2035) sejak tahun 2010-2014 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan, yaitu hanya berkisar 0,02 setiap tahunnya. Tahun 2014 terjadi penurunan sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 0,03 dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan oleh seorang wanita hingga selesai masa reproduksinya (usia 15-49 tahun) adalah 2 anak.

Melihat tren data yang ada dengan kondisi penurunan yang konsisten maka pada 2030 dapat diprediksi rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang menjadi 1 orang dan kemiskinan di masyarakat dapat berkurang setengah dari proporsinya berdasarkan target 1.2 SDGs. Penurunan tingkat kelahiran total juga perlu ditunjang oleh program pemerintah seperti keluarga berencana sehingga pada tahun 2030 mendatang Indonesia dapat menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional (target 3.7).

Angka Fertilitas Total selama tahun 2010-2014 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan, yaitu hanya berkisar 0.02 setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan oleh seorang wanita hingga selesai masa reproduksinya (usia 15-49 tahun) adalah 2 anak

Gambar 1.3 Angka Kelahiran Total/TFR, 2010-2014



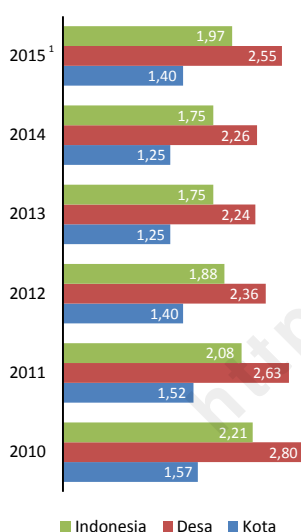
Sumber: Statistik Indonesia 2015

INDIKATOR 1.1. INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN

Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*) adalah suatu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks ini menggambarkan kemiskinan secara lebih spesifik melalui variabel pengeluaran diantara penduduk miskin. Peningkatan nilai indeks menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Semakin besar nilai dari indeks ini akan berdampak pada semakin sulit penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan

Penduduk pedesaan lebih banyak terjebak dalam kondisi miskin dibandingkan penduduk daerah perkotaan

Gambar 1.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2010-2015



Catatan : ¹ Maret 2015
 Sumber: Susenas, BPS

atau terjebak dalam kemiskinan yang terlalu dalam.

Indeks kedalaman kemiskinan yang disajikan dalam publikasi ini adalah nilai indeks berdasarkan pada rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk terhadap garis kemiskinan yang didefinisikan secara nasional, bukan menggunakan definisi Internasional yaitu \$1.25. Ketersediaan data diperoleh melalui hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) modul Konsumsi/Pengeluaran dan Pendapatan rumah tangga. Data dapat didisagregasi menurut daerah tempat tinggal dan umur serta dapat disajikan hingga level kab/kota.

Berdasarkan gambar 1.4, secara nasional indeks kedalaman kemiskinan Indonesia menurun selama periode 2010-2014, yaitu dari 2,21 menjadi 1,75. Penurunan nilai indeks ini menunjukkan adanya penurunan kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin, sehingga beberapa penduduk miskin dengan pengeluarannya jauh dibawah garis kemiskinan masih ada harapan untuk keluar dari kemiskinan. Namun, pada tahun 2015 (Maret) indeks kedalaman kemiskinan sedikit meningkat menjadi 1,97.

Jika ditinjau dari daerah tempat tinggal, nilai indeks pedesaan lebih tinggi dari perkotaan. Ini menunjukkan bahwa penduduk pedesaan lebih banyak terjebak dalam kondisi miskin “terlalu dalam” dibandingkan daerah perkotaan. Sebenarnya ada kecenderungan penurunan indeks kedalaman kemiskinan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan selama tahun 2010-2014, meskipun lambat. Namun, pada tahun 2015 kondisinya meningkat kembali. Terjadinya peningkatan indeks kedalaman kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan di tahun 2015 membuat ketercapaian akan target 1.2 (pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensinya sesuai dengan definisi nasional) memerlukan upaya lebih keras lagi. Selain itu, berdasarkan Laporan Pencapaian MDGs 2014 status dari indikator ini adalah akan tercapai dengan target berkurang setiap tahun hingga akhir penilaian capaian.

INDIKATOR 1.2. PERSENTASE PENDUDUK YANG MENGAKSES LAYANAN PERBANKAN (TERMASUK MOBILE BANKING)

Akses ke layanan perbankan, seperti rekening giro, penting bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Disagregasi dapat berdasarkan jenis kelamin, usia dan jenis layanan (*mobile banking*, keuangan mikro, perbankan formal dan lain-lain). Ketercapaian indikator ini dapat dilihat melalui data persentase penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki rekening pada lembaga keuangan, dan penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki kartu kredit dan *mobile banking*. Data terkait indikator ini disediakan oleh Bank Dunia melalui *Global Financial Inclusion*

Index (Global Findex) dan dapat didisagregasi menurut jenis kelamin dan penduduk miskin-kaya. *Global Findex* dilakukan setiap tahun, tetapi data yang ditemukan melalui website Bank Dunia, hanya tersedia untuk tahun 2011 dan 2014. Kemudian, untuk akses keuangan mikro dapat didekati dengan data yang dikumpulkan oleh Susenas yaitu persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha. Untuk data kredit usaha dapat disajikan setiap tahun dengan level penyajian terendah kabupaten/kota.

Melalui indikator ini terdapat lima target yang ingin dijawab. Target tersebut meliputi:

- Target 1.4 pada tahun 2030, memastikan bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses ke layanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk lain dari properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang layak, dan jasa keuangan termasuk keuangan mikro.
- Target 5.a melakukan reformasi kepada perempuan dengan memberikan hak yang sama untuk sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk lain dari properti, jasa keuangan, warisan, dan sumber daya alam sesuai dengan hukum nasional.
- Target 8.3 menggalakkan kebijakan berorientasi pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk akses ke layanan keuangan.
- Target 8.10 memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses ke perbankan, asuransi, dan jasa keuangan untuk semua
- Target 9.3 meningkatkan akses perusahaan industri berskala kecil dan perusahaan industri lain, terutama di negara berkembang, untuk jasa keuangan termasuk kredit terjangkau dan integrasinya ke dalam rantai nilai dan pasar.

INDIKATOR PROXY: PERSENTASE RUMAHTANGGA YANG MENERIMA KREDIT USAHA, DAN PERSENTASE PENDUDUK TERHADAP AKSES JASA KEUANGAN FORMAL/PERBANKAN

Tabel 1.4 memperlihatkan kepemilikan layanan perbankan di Indonesia yang meliputi kepemilikan akun rekening di lembaga

Indikator 1.2 dapat didekati dengan persentase rumahtangga yang menerima kredit usaha, dan persentase penduduk terhadap akses jasa keuangan formal/perbankan

keuangan, kepemilikan kartu kredit, dan kepemilikan *mobile banking*. Kepemilikan layanan perbankan penduduk Indonesia usia 15 tahun keatas selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama pada kepemilikan

Tabel 1.4. Indikator Kepemilikan Layanan Perbankan, 2011 dan 2014

Karakteristik	2011	2014
(1)	(2)	(3)
Persentase penduduk 15+ yang memiliki rekening pada lembaga keuangan	19.6	35.9
- Laki-laki	20.0	34.6
- Perempuan	19.2	37.2
- 40% penduduk termiskin	10.0	21.9
- 60% penduduk terkaya	26.0	45.3
Persentase penduduk 15+ yang memiliki kartu kredit	0.5	1.6
- Laki-laki	0.7	1.3
- Perempuan	0.3	1.9
- 40% penduduk termiskin	0.3	0.9
- 60% penduduk terkaya	0.6	2.1
Persentase penduduk 15+ yang memiliki mobile banking	-	0.4
- Laki-laki	-	0.7
- Perempuan	-	0.2
- 40% penduduk termiskin	-	0.3
- 60% penduduk terkaya	-	0.6

Sumber: *Global Findex*, Bank Dunia

Laki-laki memiliki kepemilikan layanan perbankan lebih banyak dari pada perempuan di tahun 2011, akan tetapi pada tahun 2014 kepemilikan rekening bank dan kartu kredit lebih didominasi oleh perempuan.

kartu kredit. Kepemilikan kartu kredit meningkat tajam tiga kali lipat di tahun 2014. Ditinjau dari jenis kelamin, laki-laki memiliki kepemilikan layanan perbankan lebih banyak dari pada perempuan di tahun 2011 akan tetapi pada tahun 2014 kepemilikan rekening bank dan kartu kredit lebih didominasi oleh perempuan.

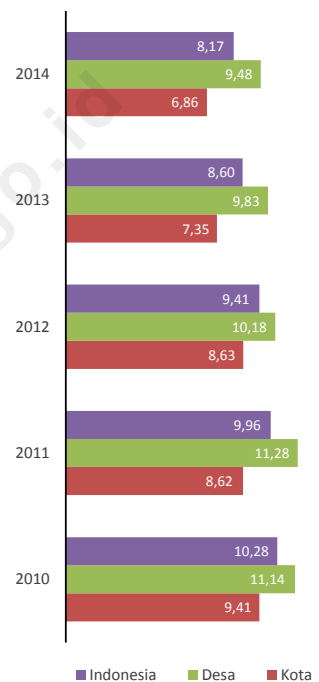
Sementara untuk 40 persen penduduk termiskin di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 21,9 persen telah memiliki rekening bank, bahkan sebesar 0,9 persen telah memiliki kartu kredit dan 0,3 persen telah menggunakan layanan mobile banking. Jika dibandingkan dengan 60 persen penduduk terkaya hal ini memang sangat jauh rentangnya, karena dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar, pengeluaran, dan pendapatan jelas berbeda antara penduduk miskin dan kaya. Berdasarkan data kepemilikan layanan perbankan saat ini pemerintah Indonesia perlu lebih berupaya dalam menerapkan kebijakan perbankan terutama perbankan milik pemerintah untuk mendukung ketercapaian pada 2030 semua penduduk laki-laki maupun perempuan terutama penduduk miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap layanan perbankan (target 1.4 dan target 5.a). Meskipun demikian peningkatan jumlah kepemilikan layanan

perbankan pada penduduk 15 tahun keatas membuat Indonesia optimis dalam mewujudkan kapasitas lembaga keuangan domestik yang kuat pada tahun 2030 (target 8.10).

Dilihat dari sisi pengembangan usaha ekonomi mikro kecil, ketercapaian di Indonesia dapat dipantau melalui persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha rakyat (Gambar 1.5). Semakin besar masyarakat mendapatkan pelayanan kredit usaha semakin mempermudah masyarakat untuk meningkatkan aktivitas usahanya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aliran dana ke masyarakat berupa kredit usaha yang berdampak kepada pergerakan ekonomi rakyat akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk pelayanan pemberian kredit usaha kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah, perbankan, lembaga keuangan lainnya maupun perorangan (Badan Pusat Statistik, 2014).

Selama 2010 hingga 2014, persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan kredit usaha menunjukkan penurunan. Demikian juga jika ditinjau dari daerah tempat tinggal penerima layanan ini terus menurun. Daerah perdesaan masih menjadi penerima kredit usaha lebih besar daripada daerah perkotaan. Hal ini mengingatkan bahwa kantong kemiskinan masih banyak berada pada daerah ini. Penurunan ini juga mengindikasikan berkurangnya minat masyarakat akan layanan kredit usaha yang ditawarkan oleh pemerintah. Melihat fenomena ini pemerintah perlu lebih gencar dalam memberikan inovasi dalam pemberian layanan kredit usaha agar pada 2030 Indonesia dapat meningkatkan akses perusahaan industri berskala kecil dan industri perusahaan lain, terutama dalam mengembangkan negara, untuk jasa keuangan termasuk terjangkau kredit dan integrasi mereka ke dalam rantai nilai dan pasar (target 9.3). Disamping itu pemerintah harus aktif dalam mempromosikan kebijakan pembangunan yang berorientasi kreativitas dan inovasi guna penciptaan lapangan kerja yang layak sehingga mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk akses ke layanan keuangan (target 8.3).

Gambar 1.5 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha, 2010-2014



Sumber: Susenas, BPS

INDIKATOR 1.3. INDIKATOR AKSES SAMA KE WARISAN (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Tim SDSN PBB mengusulkan indikator ini dikarenakan beberapa negara memiliki hukum yang memberikan akses yang berbeda pada warisan berdasarkan gender dan status sosial. Di Indonesia sendiri indikator ini belum tersedia, karena undang-undang kewarisan nasional belum ada dan hukum waris di Indonesia masih belum dikodifikasi. Terdapat 3 hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris barat/perdata (Yunus,

2014). Akses kepada warisan lebih ditentukan oleh hukum adat dan kepercayaan penduduk di setiap daerah Indonesia sehingga apabila terdapat perbedaan akses terhadap warisan dari sisi gender ataupun status sosial, mereka akan menerima dan tidak merasakan hal tersebut sebagai suatu penyimpangan karena hal tersebut berkaitan dengan sesuatu yang mereka yakini.

Indikator ini digunakan untuk melihat capaian target 1.3 SDGs, yaitu menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat yang mengukur semua aspek, termasuk lantai, dan pada tahun 2030 mencakup sebagian besar kaum miskin dan rentan, sehingga pada tahun 2030 diharapkan tercipta akses yang sama pada warisan dengan adanya program sertifikasi hak kepemilikan waris yang setara, merata, bahkan gratis untuk seluruh penduduk. Selain itu, indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 5.1 (Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di mana saja) dan 5.a (Melakukan reformasi untuk memberikan wanita hak yang sama untuk sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk lain dari properti, jasa keuangan, warisan, dan sumber daya alam sesuai dengan hukum nasional). Melalui pemetaan target dalam SDGs ini apabila dikemudian hari Indonesia telah menerapkan undang-undang kewarisan nasional, diharapkan pemerintah dapat membuat UU yang adil tanpa adanya unsur diskriminasi terhadap perempuan.

Data untuk indikator 1.3 belum tersedia di Indonesia dan masih perlu dikembangkan

INDIKATOR 1.4. INDEKS PENGURANGAN RESIKO BENCANA (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini merupakan indeks komposit yang mengukur pengurangan risiko bencana (PRB), termasuk adanya rencana pengelolaan PRB, otoritas PRB, sistem peringatan dini, dan ketersediaan dana PRB. Indikator ini merupakan indikator yang dapat dikembangkan dan untuk mengukur ketercapaian target 1.5, yaitu pada tahun 2030 membangun ketahanan masyarakat miskin dan rentan dan mengurangi keterpaparan dan kerentanan masyarakat miskin dan rentan terhadap kejadian ekstrem yang terkait dengan iklim dan guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya, dan bencana.

Saat ini Indonesia belum memiliki Indeks PRB, apabila ingin dikembangkan, ketersediaan indikator dapat bersumber dari BNPB karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab dari BNPB, selain dalam melakukan koordinasi penanggulangan bencana di tingkat nasional, juga memberikan dukungan peningkatan kapasitas bagi lembaga penanggulangan bencana di tingkat daerah, serta berbagai upaya lainnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah di dalam penanggulangan dan pengurangan risiko bencana.

Data untuk indikator 1.4 belum tersedia di Indonesia, dapat dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

**MENGAKHIRI KELAPARAN, MENCAPAI
KETAHANAN PANGAN DAN PENINGKATAN
GIZI, DAN MENCANANGKAN PERTANIAN
BERKELANJUTAN**

**2 ZERO
HUNGER**



- INDIKATOR 8. PERSENTASE PENDUDUK DENGAN KONSUMSI ENERGI DI BAWAH STANDAR MINIMUM (INDIKATOR MDG)
- INDIKATOR 9. PERSENTASE WANITA PRODUKTIF UMUR 15-49 YANG MENGALAMI ANEMIA
- INDIKATOR 10. PREVALENSI BALITA (USIA < 5 TAHUN) DENGAN KEADAAN STUNTING (TINGGI BADAN KURANG)
- INDIKATOR 11. PERSENTASE BAYI DIBAWAH 6 BULAN DENGAN ASI ESKLUSIF
- INDIKATOR 12. PERSENTASE WANITA UMUR 15-49 TAHUN YANG MENGONSUMSI PALING TIDAK 5 DARI 10 KELOMPOK MAKANAN
- INDIKATOR 13. KESENJANGAN HASIL PANEN PERTANIAN (PERSENTASE HASIL PANEN SEBENARNYA DIBANDING HASIL PANEN POTENSIAL)
- INDIKATOR 14. JUMLAH PETUGAS PENYULUH PERTANIAN PER 1000 PETANI DAN PERSENTASE PETANI YANG MENDAPATKAN PENYULUHAN
- INDIKATOR 15. EFISIENSI PENGGUNAAN PUPUK NITROGEN (%)
- INDIKATOR 16. [PRODUKTIVITAS AIR TANAMAN (HASIL PANEN (TON) PER SATUAN AIR IRIGASI)]

INDIKATOR 2.1 - 2.14...

TUJUAN 2.

MENGAKHIRI KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN PENINGKATAN GIZI, DAN MENCANANGKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

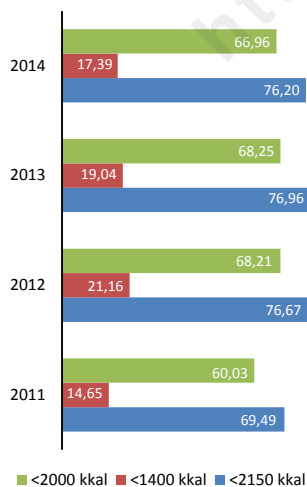
INDIKATOR 8. PERSENTASE PENDUDUK DENGAN KONSUMSI ENERGI DI BAWAH STANDAR MINIMUM (INDIKATOR MDG)

Ditinjau menurut batas minimum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG), penduduk dengan tingkat konsumsi kurang dari 2150 kkal mencapai 76,20 persen di tahun 2014, lebih tinggi dibandingkan tingkat konsumsi minimum berdasarkan konsep MDGs.

Definisikan sebagai persentase penduduk yang mengalami kelaparan atau kekurangan makanan (kalori). Parameter yang digunakan untuk menghitung indikator ini di Indonesia berdasarkan konsumsi energi minimum yang diperlukan seseorang. Tingkat konsumsi minimum yang digunakan adalah kurang dari 1400 kkal dan kurang dari 2000 kkal per kapita per hari seperti yang telah ditetapkan pada MDGs (BAPPENAS, 2015). Seseorang dikatakan rawan pangan ringan apabila tingkat konsumsinya <2000 kkal dan rawan pangan parah apabila tingkat konsumsinya <1400 kkal. Selain berdasarkan MDGs, Tingkat konsumsi minimum juga akan mengacu pada yang telah ditetapkan pada WNPG (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi) 2012 yaitu tingkat konsumsi dibawah 2150 kkal.

Indikator ini dihitung melalui Susenas modul konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumah tangga. Keterbatasan pengumpulan data menyebabkan data yang tersedia belum bisa menjelaskan ketahanan pangan intra-rumahtangga, sehingga disparitas akses pangan penduduk berdasarkan jenis kelamin tidak bisa diketahui. Indikator ini digunakan untuk menjawab target 2.1 SDGs, yaitu pada 2030 mengakhiri kelaparan dan menjamin akses untuk semua orang, khususnya orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan termasuk bayi, agar aman, bergizi dan cukup makanan sepanjang tahun.

Gambar 2.1. Persentase Penduduk dengan Asupan Kalori di bawah Tingkat Konsumsi Minimum, 2011-2014



Sumber : Susenas, BPS

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa asupan kalori penduduk dibawah tingkat konsumsi kurang dari 1400 kkal, 2000 kkal, dan 2150 kkal memiliki pola yang sama dan sejalan selama 2011 hingga 2014. Penduduk yang mengalami kekurangan makanan (rawan pangan) secara nasional cenderung meningkat. Pada tahun 2014, mencapai 66,96 persen penduduk yang masih tergolong rawan pangan ringan sedangkan penduduk yang tergolong kerawanan pangan parah hanya sebesar 17.39 persen. Jika ditinjau menurut batas minimum WNPG, penduduk dengan tingkat konsumsi kurang dari 2150 kkal mencapai 76,20 persen di tahun 2014, lebih tinggi dibandingkan tingkat konsumsi minimum berdasarkan konsep MDGs.

Melihat kondisi data yang ada serta semakin bertambahnya jumlah penduduk maka akan semakin meningkat pula kebutuhan akan pangan. Ditambah lagi dengan munculnya isu krisis pangan di Indonesia yang banyak diprediksi oleh kementerian/

lembaga akibat konversi lahan produktif menjadi tidak produktif (Tejo, 2014) membuat Indonesia perlu lebih waspada dan mempersiapkan antisipasi dan strategi peningkatan ketahanan pangan dan perbaikan gizi. Sehingga Pada 2030 Indonesia dapat mengakhiri kelaparan dan menjamin akses untuk semua orang agar aman, bergizi dan cukup makanan sepanjang tahun sesuai target 2.1 SDGs.

INDIKATOR 9. **PERSENTASE WANITA PRODUKTIF UMUR 15-49 YANG MENGALAMI ANEMIA**

Anemia merupakan suatu keadaan ketika jumlah sel darah merah atau konsentrasi pengangkut oksigen dalam darah (Hb) tidak mencukupi untuk kebutuhan fisiologis tubuh. Menurut WHO dan pedoman Kemenkes 1999, *cut-off points* anemia berbeda-beda antar kelompok umur, maupun golongan individu. Kelompok umur atau golongan individu tertentu dianggap lebih rentan mengalami anemia dibandingkan kelompok lainnya. Indikator persentase wanita produktif umur 15-49 yang mengalami anemia merupakan proporsi jumlah wanita usia subur/WUS (15-49 tahun) yang tidak hamil memiliki kadar Hb dibawah ambang batas normal (*cut-off points*) yang telah ditentukan terhadap jumlah wanita di Indonesia. Ambang batas (*cut off point*) anemia untuk WUS tidak hamil yang digunakan merujuk pada WHO yaitu apabila kadar Hb darah <12 g/dl (Balitbang Kemenkes RI, 2013). Ketersediaan data indikator ini dihasilkan melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), data tersedia setiap tahun berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan.

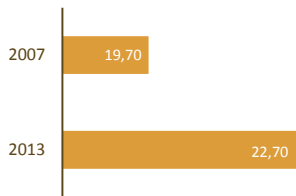
Kejadian anemia berkaitan erat dengan masalah kecukupan gizi, terutama kecukupan gizi mikro/mikronutrien. Anemia terjadi akibat kekurangan satu macam atau lebih zat-zat gizi (mikronutrien) yang diperlukan untuk pembentukan darah, seperti zat besi, asam folat, vitamin B12, dan protein. Meskipun diperlukan dalam jumlah yang sedikit bagi tubuh, kecukupan gizi mikro berperan penting dalam tubuh untuk menangkal penyakit menular seperti kematian akibat diare, campak, malaria dan paru-paru. Kecukupan gizi perlu diperhatikan terutama pada WUS untuk mengurangi resiko terjadinya kematian. Berdasarkan data Riskesdas dari tahun 2007 hingga tahun 2013 jumlah penderita anemia mengalami peningkatan.

Melalui indikator ini diharapkan target 2.1 dan 2.2 SDGs dapat terpenuhi, yaitu pada 2030, Indonesia dapat mengakhiri kelaparan dan menjamin akses untuk semua orang agar aman, bergizi dan cukup makanan sepanjang tahun (target 2.1) serta mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk *stunting* dan *wasting* pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, dan para manula (target 2.2).

Data indikator 9 belum tersedia di Indonesia, didekati dengan indikator Proporsi Anemia pada Perempuan Tidak Hamil Dewasa (umur ≥ 15 tahun) yang dihasilkan melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas).

INDIKATOR PROXY : PROPORSI ANEMIA PADA PEREMPUAN TIDAK HAMIL DEWASA (UMUR ≥ 15 TAHUN)

Gambar 2.2. Proporsi Anemia pada Perempuan Tidak Hamil Umur ≥ 15 tahun, 2007-2013



Sumber : Riskesdas, Kemenkes

Data yang diperoleh dari laporan Riskesdas adalah data proporsi anemia pada perempuan tidak hamil dewasa (umur ≥ 15 tahun), seperti yang tertera pada Gambar 2.2. Selama rentang 6 tahun terjadi peningkatan sebesar 3 persen jumlah wanita dewasa tidak hamil yang mengalami anemia. Kecukupan gizi yang diperlukan oleh tubuh sangat bergantung pada makanan yang masuk dan diserap oleh tubuh. Makanan yang baik akan mampu meningkatkan gizi masyarakat. Terjadinya peningkatan penduduk wanita dewasa yang mengalami anemia secara tidak langsung mengindikasikan bahwa masih terjadi kerawanan terhadap pangan dan terjadinya kelaparan di masyarakat. Selain itu, peningkatan jumlah wanita yang anemia ini akan menghambat ketercapaian target SDGs pada tahun 2030.

INDIKATOR 10. PREVALENSI BALITA (USIA < 5 TAHUN) DENGAN KEADAAN STUNTING (TINGGI BADAN KURANG)

Indikator ini mengukur persentase balita usia dua tahun atau lebih yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. *Stunting* atau tinggi badan pendek maupun sangat pendek merupakan salah satu cara penilaian status gizi pada anak balita. Panjang atau tinggi badan diukur menggunakan alat ukur panjang/tinggi dengan presisi 0,1 cm. Ketersediaan data indikator ini dihitung setiap tiga tahun melalui Survei Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Pada Riskesdas, data tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U, meliputi sangat pendek (Z-score < -3.0), pendek (Z-score ≥ -3.0 s.d Z-score < -2.0), dan Normal (Z-score ≤ -2.0). Data tersedia sampai dengan level provinsi. Disagregasi data dapat berdasarkan wilayah kota-desa, jenis kelamin, klasifikasi pendek-sangat pendek, dan pendapatan rumah tangga.

Prevalensi pendek (*stunting*) pada balita mengalami peningkatan cukup signifikan selama tahun 2010-2013, dimana pada tahun 2013 prevalensi pendek lebih besar dibandingkan prevalensi sangat pendek.

Indikator ini digunakan untuk menjawab target 2.1, yaitu Pada 2030 mengakhiri kelaparan dan menjamin akses untuk semua orang, khususnya orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan termasuk bayi, agar aman, bergizi dan cukup makanan sepanjang tahun; dan target 2.2, yaitu pada 2030 mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai target pada tahun 2025 yang disepakati secara internasional pada *stunting* dan *wasting* pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, dan para manula.

Indikator status gizi berdasarkan indeks TB/U memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama. Misalnya: kemiskinan, perilaku hidup tidak sehat, dan asupan makanan kurang dalam jangka

waktu lama sejak usia bayi sehingga mengakibatkan anak menjadi pendek (Balitbang Kemenkes RI, 2013). *Stunting* pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari *stunting* pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima nutrisi yang tepat. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan nutrisi yang cukup untuk anak-anak.

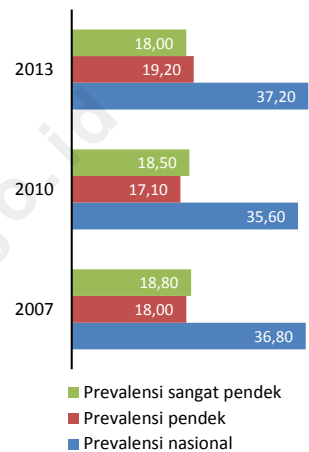
Gambar 2.3 menyajikan prevalensi pendek (*stunting*) menurut klasifikasi pendek-sangat pendek dan nasional. Secara nasional, prevalensi *stunting* pada balita mengalami peningkatan cukup signifikan selama tiga tahun terakhir. Padahal angka ini sempat mengalami penurunan pada tahun 2010 dengan prevalensi sebesar 35,6 persen. Jika diklasifikasikan lebih rinci, pada 2013 prevalensi pendek lebih besar dari prevalensi sangat pendek, dimana sebelumnya pada tahun 2010 dan 2007 keadaan ini terjadi sebaliknya. Jadi selama 2007-2013 prevalensi pendek mengalami peningkatan sedangkan prevalensi sangat pendek mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anak balita dengan status gizi sangat kronis (sangat pendek) telah berkurang.

Berdasarkan capaian indikator selama 2007 hingga 2013, pemerintah perlu menetapkan kebijakan terkait status gizi balita. Peningkatan angka indikator pada 2013 merupakan suatu peringatan dini untuk menghadapi tantangan permasalahan gizi balita kedepannya. Sosialisasi program yang telah ada seperti penyelenggaraan posyandu, pemberian ASI eksklusif dan MP ASI nampaknya belum mencapai hasil yang diinginkan dalam rangka peningkatan status gizi balita. Kenyataan di lapangan, kasus gizi buruk sering ditemukan terlambat dan atau ditangani tidak tepat. Hal ini terjadi karena belum semua Puskesmas terlatih untuk melaksanakan tata laksana gizi buruk. Selain itu, permasalahan lainnya adalah masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk menyiapkan formula khusus untuk balita gizi buruk, serta kurangnya tindak lanjut pemantauan setelah balita pulang ke rumah (Minarto, 2011). Permasalahan ini perlu ditindaklanjuti agar pada 2030 mendatang, Indonesia dapat mengakhiri kelaparan dan menjamin akses untuk semua orang, (target 2.1) serta dapat mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi (target 2.2).

INDIKATOR 11. PERSENTASE BAYI DIBAWAH 6 BULAN DENGAN ASI EKSKLUSIF

Indikator ini merupakan persentase anak-anak berusia kurang dari enam bulan yang diberi ASI saja. Indikator ini dapat diperoleh dari berbagai sumber survei di Indonesia, survei tersebut meliputi Susenas, Riskesdas, dan SDKI. Data yang akan digunakan untuk melihat perkembangan adalah

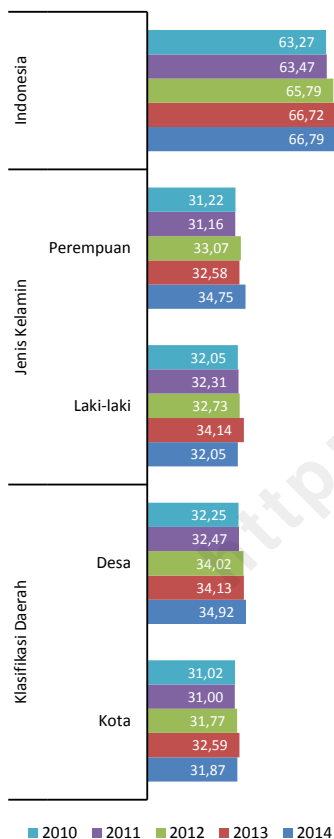
Gambar 2.3. Prevalensi Status Gizi Balita TB/U, 2007-2013



Sumber : Riskesdas, Kemenkes

Secara Nasional, jumlah bayi berusia dibawah enam bulan dengan ASI Eksklusif mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan yang signifikan pada tahun 2012 karena dicanangkan pemberian ASI eksklusif dari pemerintah

Gambar 2.4. Persentase Bayi dibawah 6 Bulan dengan ASI Eksklusif, 2010-2014



Sumber : Susenas, BPS

data yang bersumber dari Susenas. Penentuan Susenas sebagai sumber data dikarenakan datanya dapat disajikan tahunan, sedangkan Riskesdas dan SDKI masing-masing data tersaji secara tiga tahunan dan lima tahunan. Ketersediaan data dapat didisagregasi menurut daerah tempat tinggal dan jenis kelamin, level penyajian dapat tersaji hingga level wilayah Kabupaten/kota.

Indikator ini dapat digunakan untuk melihat ketercapaian dari target SDGs, yang meliputi :

- Target 2.1 Pada 2030 mengakhiri kelaparan dan menjamin akses untuk semua orang, khususnya orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan termasuk bayi, agar aman, bergizi dan cukup makanan sepanjang tahun
- Target 2.2 Pada 2030 mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai target pada tahun 2025 yang disepakati secara internasional pada stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, dan para manula.
- Target 3.2 Pada 2030 mengakhiri kematian pada bayi baru lahir dan balita.

ASI memiliki faktor protektif dan nutrien yang sesuai untuk menjamin status gizi baik seorang bayi serta menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi. Beberapa penelitian epidemiologis menyatakan bahwa ASI melindungi bayi dari penyakit infeksi, seperti diare dan infeksi saluran pernafasan akut (Pusdatin Kemenkes RI, 2014). Perkembangan pemberian ASI eksklusif diperlihatkan seperti pada Gambar 2.4. Secara Nasional, jumlah bayi berusia dibawah enam bulan dengan ASI Eksklusif mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama pada tahun 2012. Peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2012 disebabkan oleh dicanangkannya program pemberian ASI eksklusif yang ditetapkan oleh pemerintah secara serentak baik di pusat maupun di daerah melalui PP No. 33 Tahun 2012 tentang pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Situasi data yang ada memberikan harapan baru untuk mencapai keberhasilan Indonesia pada tahun 2030 dapat mengakhiri kematian pada bayi baru lahir dan balita (target 3.2), mengakhiri kelaparan dan menjamin akses untuk semua orang, termasuk bayi agar aman, bergizi dan cukup makanan sepanjang tahun (target 2.2), serta mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi dan memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan menyusui (target 2.1).

INDIKATOR 12. PERSENTASE WANITA UMUR 15-49 TAHUN YANG MENGKONSUMSI PALING TIDAK 5 DARI 10 KELOMPOK MAKANAN

Indikator ini mengukur ketersediaan energi yang berasal dari komposisi makanan yang lengkap dan cukup untuk mengatasi peningkatan masalah malnutrisi global. Keragaman makanan adalah suatu cara pengukuran yang penting, kurangnya keragaman makanan telah terbukti menjadi masalah krusial, khususnya di negara berkembang di mana pola makan porsinya lebih banyak berasal dari zat tepung atau karbohidrat, dan akses yang kurang untuk sumber makanan yang kaya nutrisi seperti protein hewani, buah-buahan dan sayuran. Dampak buruknya kecukupan nutrisi masyarakat pun tidak terpenuhi dan rentan menimbulkan masalah kelaparan dan kesehatan, terutama pada perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, indikator ini fokus mengukur keragaman konsumsi makanan dari wanita usia subur.

Indikator ini digunakan untuk melihat ketercapaian target 2.1, yaitu pada 2030 mengakhiri kelaparan dan menjamin akses untuk semua orang, khususnya orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan termasuk bayi, agar aman, bergizi dan cukup makanan sepanjang tahun. Ketersediaan data untuk indikator ini belum tersedia.

Data indikator 12 belum tersedia di Indonesia

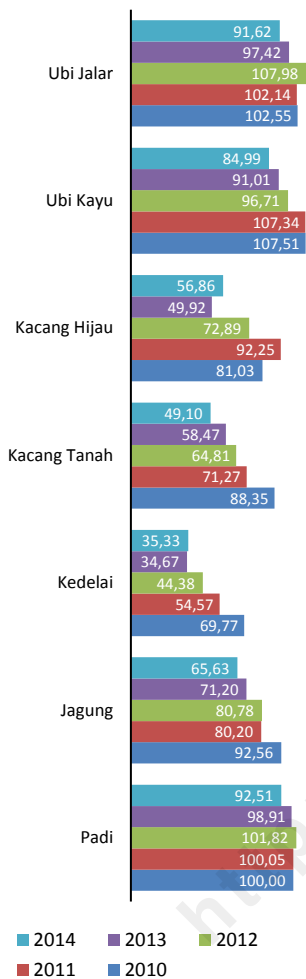
INDIKATOR 13. KESENJANGAN HASIL PANEN PERTANIAN

Indikator ini menelusuri kesenjangan hasil panen untuk komoditas utama, yaitu perbandingan jumlah panen yang dihasilkan terhadap target produksi yang akan dicapai untuk komoditas tanaman pangan. Data indikator ini diperoleh dari BPS dan Kementerian Pertanian (Kementan). Dalam buku ini, jumlah panen yang dihasilkan bersumber dari BPS, sedangkan target produksi diperoleh dari Kementan. Data tersedia setiap tahun hingga level penyajian provinsi dan dapat didisagregasi berdasarkan jenis tanaman pangan. Indikator ini secara langsung dapat membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan terkait, seperti untuk mencapai setidaknya 80 persen dari potensi hasil panen yang dapat dicapai dengan efisiensi air secara berkelanjutan, dan mengharuskan penerapan *roadmap* kebijakan dan teknologi yang tepat dalam pertanian.

Target SDGs yang dapat dipantau melalui indikator ini adalah target 2.3, yaitu pada 2030 meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, terutama perempuan, masyarakat adat, petani keluarga, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap tanah, sumber daya produktif lainnya dan input, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang untuk penambahan nilai dan pekerjaan non-pertanian; dan target 2.4, yaitu pada 2030 memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik-praktik tangguh pertanian yang meningkatkan produktivitas dan produksi, yang

Selama lima tahun terakhir terjadi kesenjangan setiap tahun pada hasil panen pertanian Indonesia. Pada tahun 2014, komoditas padi memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 92,51 persen

Gambar 2.5. Kesenjangan Hasil Panen Pertanian Menurut Jenis Tanaman Pangan, Tahun 2010-2014



Sumber : BPS dan Kementan

membantu menjaga ekosistem, yang memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan bencana lainnya, yang mana semakin meningkatkan tanah dan kualitas tanah.

Indonesia melalui Kementan telah melakukan roadmap kebijakan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian melalui rencana strategis (renstra) yang dicanangkan. Dalam renstra telah direncanakan target dan upaya untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia selama lima tahun mendatang. Meskipun telah ada renstra, upaya pemerintah serta pihak terkait dalam menerapkan restra dan meningkatkan kualitas pertanian di Indonesia jauh lebih penting. Masalah yang timbul jauh lebih besar dan menghambat kemajuan pertanian Indonesia, maraknya konversi lahan pertanian (Purmono, 2014) serta terus berkurangnya jumlah petani setiap tahun (Gera, 2014) merupakan tantangan yang harus dihadapi untuk menghindari timbulnya krisis pangan.

Hal ini terlihat dari data pada Gambar 2.5, selama lima tahun terakhir terjadi kesenjangan setiap tahun pada hasil panen pertanian Indonesia. Hampir semua jenis tanaman pangan memperlihatkan penurunan produksi dan tidak dapat mencapai target produksi yang akan dicapai. Kesenjangan produksi sangat tampak pada komoditas kacang hijau, kacang tanah, dan kedelai, bahkan pada tahun 2014 terjadi penurunan hampir setengah dari proporsi pada tahun 2010 untuk ketiga jenis komoditas tersebut. Target pemerintah akan hasil produksi pertanian sangat tinggi guna memenuhi ketersediaan pangan secara nasional untuk mengurani import. Akan tetapi kenyataan yang ada menunjukkan keadaan sebaliknya, produksi pertanian pada tahun 2014 tidak dapat memenuhi target produksi yang ditetapkan.

Kondisi dan permasalahan pertanian harus segera ditanggapi dan diatasi baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara luas. Agar pada tahun 2030 tercipta pembangunan yang berkelanjutan dengan capaian peningkatan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil (target 2.3) serta terciptanya sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik-praktik tangguh pertanian (target 2.4).

INDIKATOR 14. JUMLAH PETUGAS PENYULUH PERTANIAN PER 1000 PETANI (ATAU PERSENTASE PETANI YANG MENDAPATKAN PENYULUHAN)

Indikator ini merupakan usulan yang telah dikembangkan oleh FAO guna menelusuri jumlah profesional pertanian yang berkualitas di berbagai sektor dengan memberikan pelatihan, informasi, dan dukungan penyuluhan dan jasa lainnya kepada para petani dan usaha kecil dan menengah di pedesaan.

Indikator ini digunakan untuk memantau ketercapaian target-target berikut :

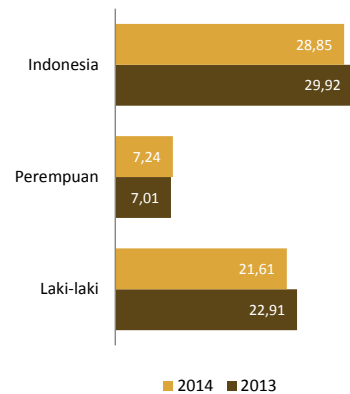
- Target 2.3 Pada 2030 meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, terutama perempuan, masyarakat adat, petani keluarga, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap tanah, sumber daya produktif lainnya dan input, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang untuk penambahan nilai dan pekerjaan non-pertanian
- Target 2.5 Pada tahun 2020 mempertahankan keragaman genetik benih, tanaman budidaya, peternakan dan hewan peliharaan serta spesies liar yang terkait, termasuk melalui pengelolaan yang baik dan keberagaman benih serta bank tanaman di tingkat nasional, regional dan internasional, dan menjamin akses dan pembagian yang adil dan merata dari keuntungan yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait yang disepakati secara internasional
- Target 2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama ditingkat internasional, infrastruktur pedesaan, penelitian dan penyuluhan pertanian, pengembangan teknologi, tanaman dan bank gen ternak untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara-negara berkembang, khususnya di negara-negara kurang berkembang.

Ada sebanyak 64 penyuluh pertanian untuk 100.000 petani pada tahun 2014, terdiri dari penyuluh PNS ditambah dengan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TB) dan tenaga swadaya.

Ketersediaan data Indikator ini didapatkan dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk jumlah penyuluh PNS dan BPS melalui Sensus Pertanian (ST2013) untuk jumlah petani. Data dapat tersaji hingga level propinsi dan dapat didisagregasi berdasarkan jenis kelamin. Sementara itu, untuk persentase petani yang mendapatkan penyuluhan Indonesia belum memiliki pendataan lengkap terkait hal tersebut.

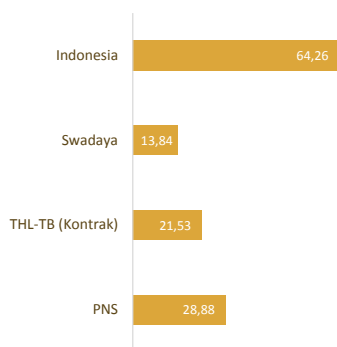
Sistem penyuluhan pertanian publik dan atau swasta berfungsi untuk meningkatkan hasil pertanian berkelanjutan di semua daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 46 ayat 4 mengamanatkan paling sedikit ada satu penyuluh dalam satu desa potensi pertanian. Penyuluh pertanian berperan penting dalam membina dan membimbing petani atau kelompok tani dalam meningkatkan produktivitasnya. Gambar 2.6 menunjukkan bahwa jumlah penyuluh pertanian berstatus PNS selama 2013 hingga 2014 mengalami penurunan.

Gambar 2.6. Jumlah Penyuluh PNS Pertanian per 100.000 Petani, 2013-2014



Sumber : BPS dan Kementan

Gambar 2.7. Jumlah Penyuluh Pertanian (PNS, THL-TB, Swadaya) Menurut Status Penyuluh per 100.000 Petani, 2014



Sumber : BPS dan Kementan

Penurunan banyak terjadi pada penyuluh PNS dengan jenis kelamin laki-laki. Data yang ada menyatakan ada sebanyak 29 orang penyuluh PNS pertanian untuk 100.000 petani di tahun 2014. Jumlah penyuluh PNS tersebut sangat tidak seimbang dengan banyaknya petani. Padahal pada tahun 2030, Indonesia harus meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil (target 2.3).

Kemudian apabila penyuluh PNS ditambah dengan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TB) dan tenaga swadaya, secara nasional ada sebanyak 64 penyuluh pertanian untuk 100.000 petani di tahun 2014 (Gambar 2.7). Angka ini masih belum seimbang terhadap jumlah petani yang ada, hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa masih banyak petani yang belum mendapatkan penyuluhan. Mengingat pentingnya keberadaan penyuluh pertanian, diharapkan pada lima belas tahun mendatang Indonesia dapat meningkatkan jumlah penyuluh dan semakin banyak petani yang mendapat penyuluhan.

Penyuluhan pertanian juga berperan dalam mensosialisasikan pengembangan teknologi di bidang pertanian berupa penggunaan bibit unggul dan pupuk, cara antisipasi terhadap bencana alam dan cara memproduksi secara maksimal dengan lahan yang ada. Banyaknya perubahan fungsi lahan pertanian dan ancaman krisis pangan membuat pemerintah dan masyarakat terkait untuk lebih merencanakan strategi upaya peningkatan penyediaan bimbingan terhadap petani. Agar pada tahun 2020, Indonesia dapat mempertahankan keragaman genetik benih, tanaman budidaya, peternakan dan hewan peliharaan serta spesies liar yang terkait (target 2.5) serta meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama ditingkat internasional, pada infrastruktur pedesaan, penelitian dan penyuluhan pertanian, pengembangan teknologi, tanaman dan bank gen ternak untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara-negara berkembang, khususnya di negara-negara kurang berkembang (target 2.a).

INDIKATOR 15. EFISIENSI PENGGUNAAN PUPUK NITROGEN (PERSEN)

Nitrogen memainkan peran penting pada produktivitas, keberlanjutan dan dampak lingkungan dari sistem pangan. Sebagian besar nitrogen antropogenik yang dihasilkan masuk ke siklus global sebagai pupuk dalam produksi pertanian. Oleh karena itu, mengoptimalkan pengelolaan sehingga tercapainya hasil panen yang tinggi dengan efisiensi pupuk nitrogen yang tinggi pula merupakan komponen inti dari ketahanan pangan serta kelestarian lingkungan. Indikator ini merupakan rasio nitrogen dalam produk tanaman yang dipanen dengan jumlah nitrogen yang diterapkan per musim tanam atau tahun. Hal ini berkaitan langsung dengan efisiensi penggunaan

Data untuk indikator 15 belum tersedia di Indonesia

pupuk di lahan pertanian, termasuk teknologi baru dan program pengelolaan para petani dan penasehat.

Saat ini data efisiensi penggunaan pupuk nitrogen belum tersedia. Apabila ingin dikembangkan, ketersediaan dan penghitungan indikator dapat bersumber dari Kementan sebagai hasil dari penerapan Permentan No.40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada padi sawah spesifik lokasi. Tersedianya data untuk indikator ini dapat digunakan untuk melihat ketercapaian 5 target SDGs. Adapun target-target tersebut meliputi :

- Target 2.3 Pada 2030 meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, terutama perempuan, masyarakat adat, petani keluarga, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap tanah, sumber daya produktif lainnya dan input, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang untuk penambahan nilai dan pekerjaan non-pertanian.
- Target 2.4 Pada 2030 memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek-praktek tangguh pertanian yang meningkatkan produktivitas dan produksi, yang membantu menjaga ekosistem, yang memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan bencana lainnya, yang mana semakin meningkatkan tanah dan kualitas tanah.
- Target 8.4 Pada tahun 2030, meningkatkan efisiensi konsumsi dan produksi terhadap sumber daya global secara progresif , dan berusaha untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan sesuai dengan program dalam kerangka kerja 10 tahunan pada bidang konsumsi berkelanjutan dan produksi dengan negara-negara maju yang memimpin.
- Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan yang ramah lingkungan dari bahan kimia dan semua limbah sepanjang siklus hidup mereka sesuai dengan kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pembebasan mereka ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan
- Target 14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi pencemaran laut dari

semua jenis, terutama dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.

INDIKATOR 16. PRODUKTIVITAS AIR TANAMAN (HASIL PANEN (TON) PER SATUAN AIR IRIGASI) (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini diusulkan secara langsung berkaitan dengan air tawar yang digunakan untuk irigasi. Pada Sistem Neraca Ekonomi-Lingkungan (SEEA), produktivitas air didefinisikan sebagai nilai tambah pertanian dibagi dengan penggunaan air oleh pertanian. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mendefinisikan indikator ini. Alternatif lain yang dapat digunakan untuk mengukur indikator ini adalah dengan mendefinisikan produktivitas air sebagai efisiensi dengan air dikonversi menjadi produk yang dipanen, yaitu rasio antara hasil panen dan pasokan air musiman, termasuk curah hujan dan irigasi. Ketersediaan data untuk indikator ini belum ada di Indonesia sehingga dapat diusulkan untuk disediakan oleh Kementan sebagai instansi utama yang mengatasi masalah pertanian didukung dengan kerjasama pada berbagai lembaga ilmu pengetahuan.

Data untuk indikator 16 belum tersedia di Indonesia (Indikator perlu dikembangkan oleh Kementerian Pertanian)

Keberadaan indikator ini digunakan untuk memantau ketercapaian tiga target pada tiga tujuan SDGs, yaitu pada tujuan 2, 3, dan 8. Adapun target-target yang akan dicapai pada 2030 meliputi :

- Target 2.3 Pada 2030 meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, terutama perempuan, masyarakat adat, petani keluarga, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap tanah, sumber daya produktif lainnya dan input, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang untuk penambahan nilai dan pekerjaan non-pertanian.
- Target 3.3 Pada 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit yang terbawa air, dan penyakit menular lainnya
- Target 8.4 Pada tahun 2030, meningkatkan efisiensi konsumsi dan produksi terhadap sumber daya global secara progresif, dan berusaha untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan sesuai dengan program dalam kerangka kerja 10 tahunan pada bidang konsumsi berkelanjutan dan produksi dengan negara-negara maju yang memimpin.

INDIKATOR 2.1. PERSENTASE PENDUDUK YANG KEKURANGAN ZAT : BESI, ZINC, YODIUM, VITAMIN A, ASAM FOLAT, VITAMIN B12, (DAN VITAMIN D)

Indikator ini berkaitan dengan mikronutrien yang penting untuk kesehatan tubuh, namun kekurangan satu atau lebih mikronutrien sering terjadi di beberapa daerah, dengan pola makan dan kemiskinan menjadi faktor pendorong kekurangan tersebut. Kekurangan mikronutrien dapat menyengsarakan ibu hamil dan anak-anak, karena kekurangan mikronutrien dapat berdampak seumur hidup. Terdapat enam mikronutrien yang paling sering terjadi kekurangan antara lain, mineral besi, seng, dan yodium, dan vitamin A, B12, dan folat. Indikator yang dapat menghitung kekurangan ini pada skala global perlu dikembangkan.

Data untuk indikator 2.1 belum tersedia di Indonesia

Struktur dan komposisi indikator perlu dikembangkan atas dasar kajian menyeluruh dari data yang tersedia tentang mikronutrien dan peluang untuk skala pengumpulan data berdasarkan MDGs. Tujuannya adalah untuk menangkap setiap orang yang menderita kekurangan mikronutrien, bukan hanya kekurangan zat besi (anemia) seperti pada MDGs. Mengingat bahwa struktur dan komposisi yang masih perlu dikembangkan, ketersediaan data indikator belum dapat dilakukan. Alternatif yang dapat disarankan untuk membentuk indikator ini adalah melalui Susenas terkait konsumsi rumah tangga. Namun, penggunaan indikator alternatif ini perlu dikaji kembali terutama bersama dengan Kemenkes sebagai instansi utama dalam mengatasi masalah kesehatan. Hal ini dikarenakan penggunaan data konsumsi makanan tidak secara langsung menyatakan seseorang kekurangan mikronutrien. Zat dan vitamin dalam makanan sangat beragam dan berbeda daya serapnya untuk setiap orang.

Ketersediaan indikator ini mampu menjawab target 2.1 dan target 2.2 SDGs, yaitu pada 2030, Indonesia dapat mengakhiri kelaparan dan menjamin akses untuk semua orang agar aman, bergizi dan cukup makanan sepanjang tahun (target 2.1) serta mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, dan para manula (target 2.2).

INDIKATOR 2.2. PROPORSI BAYI USIA 6-23 BULAN YANG MENERIMA *MINIMUM ACCEPTABLE DIET*

Indikator ini untuk menangkap anak-anak usia 6-23 bulan (menerima ASI atau tidak) yang memiliki setidaknya minimum keragaman makanan (4 kelompok makanan) dan minimum frekuensi makan (tergantung pada usia bayi) selama sehari sebelumnya (pembilang), dibagi dengan anak-anak usia 6-23 bulan (menerima ASI atau tidak) (denominator). Saat ini ketersediaan data pembentuk indikator belum ditemukan, data untuk menangkap Bayi usia kurang dari 2 tahun yang mengkonsumsi minimum 4 kelompok makanan disertai minimum

Data untuk indikator 2.2 belum tersedia di Indonesia

frekuensi makan selama sehari sebelum belum tersedia.

Pentingnya indikator ini digunakan untuk melihat capaian dari target 2.1 dan target 2.2, yaitu pada 2030, Indonesia dapat mengakhiri kelaparan dan menjamin akses untuk semua orang agar aman, bergizi dan cukup makanan sepanjang tahun (target 2.1) serta mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, dan para manula (target 2.2).

INDIKATOR 2.3. PERSENTASE ANAK DENGAN BERAT LAHIR RENDAH.

Tingkat berat lahir rendah (BBLR) indikator yang paling umum dari pertumbuhan janin. Indikator ini terbentuk dari jumlah bayi yang baru lahir dengan berat lahir kurang dari 2,500 gram. Data indikator ini dapat disediakan melalui Survei Kesehatan dan Demografi Indonesia (SDKI), dalam survei tersebut bayi yang dicatat adalah bayi dengan kelahiran dalam lima tahun sebelum periode survei. Data tersedia dengan frekuensi lima tahunan dan dapat didisagregasi menurut umur ibu saat melahirkan, urutan kelahiran, status merokok ibu, daerah tempat tinggal, pendidikan ibu, dan kuartil kekayaan. Indikator ini digunakan untuk memantau ketercapaian target 2.1 SDGs, yaitu pada 2030 mengakhiri kelaparan dan menjamin akses untuk semua orang, khususnya orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan termasuk bayi, agar aman, bergizi dan cukup makanan sepanjang tahun.

Tahun 2012, keadaan anak yang lahir dengan berat lahir rendah (2,5 gram) umumnya berasal dari ibu yang berusia kurang dari 20 tahun saat melahirkan, tinggal di daerah perdesaan, dan pendidikan ibu tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD.

Tabel 2.1. Persentase Anak dengan Berat Lahir Rendah, 2012

Karakteristik	Persentase semua kelahiran yang memiliki laporan berat lahir	Berat lahir <2.5 kg
Usia Ibu saat Melahirkan		
<20	85	10,3
20-34	90	6,8
35-49	88,4	8,6
Daerah Tempat Tinggal		
Perkotaan	96,2	6,2
Perdesaan	82,5	8,6
Urutan kelahiran		
1	92,3	7,6
2 - 3	90,6	6,8
4 - 5	81,3	8,6
6+	66,3	7,9
Pendidikan Ibu		
Tidak pernah sekolah	35,9	14,5
Tidak tamat SD	73,2	13,2
Tamat SD	85	9,7
Tidak tamat SMP	91	6,2
Tamat SMP	96,7	6,1
SMA keatas	98	4,9

Sumber : SDKI

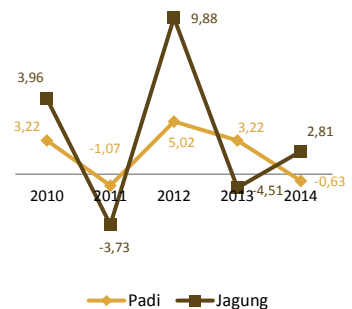
Tabel 2.1 menunjukkan keadaan anak yang lahir dengan berat lahir rendah (<2.5 gram) umumnya berasal dari ibu yang berusia kurang dari 20 tahun saat melahirkan, tinggal di daerah perdesaan, dan pendidikan ibu tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD. Rata-rata masih terdapat kurang dari 15 persen anak yang lahir dengan berat badan rendah dari sekitar 80 persen kelahiran yang memiliki laporan berat lahir pada tahun 2012. Urutan kelahiran tampak tidak terlalu berpengaruh terhadap berat lahir rendah seorang anak. Masih adanya anak dengan berat lahir rendah, walaupun dengan persentase kurang dari 15 persen, perlu untuk diperhatikan. Gizi ibu saat hamil menjadi faktor penentu dalam mengatasi permasalahan berat lahir rendah (Lubis, 2011). Gizi ibu hamil yang baik akan mendukung pada pertumbuhan janin yang baik, bahkan pertumbuhan anak hingga ia dewasa nanti. Kebijakan terkait perbaikan gizi terutama untuk ibu hamil perlu lebih digalakkan agar pada 2030 Indonesia dapat mengakhiri kelaparan dan menjamin akses untuk semua orang, khususnya orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan termasuk bayi, agar aman, bergizi dan cukup makanan sepanjang tahun (target 2.1).

INDIKATOR 2.4. TINGKAT PERTUMBUHAN HASIL PANEN SEREALIA (PERSEN PER TAHUN)

Indikator ini menggambarkan kenaikan jangka panjang dalam hasil panen, yang memberikan kontribusi penting untuk memenuhi kebutuhan pangan di masa depan. Ketersediaan data panen sereal yang digunakan adalah data komoditas utama sereal yaitu padi dan jagung yang dihasilkan oleh BPS. Capaian indikator ini mampu mengukur target 2.3 dan 2.4 SDGs, yaitu Pada 2030 meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil (target 2.3), serta memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik-praktik tangguh pertanian yang meningkatkan produktivitas dan produksi, yang membantu menjaga ekosistem, yang memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan bencana lainnya, yang mana semakin meningkatkan tanah dan kualitas tanah (target 2.4).

Selama 2010 hingga 2014, data laju pertumbuhan hasil panen sereal (padi dan jagung) menunjukkan gejala yang tinggi. Gambar 2.8 memperlihatkan tanaman padi dan jagung memiliki tren pertumbuhan hasil panen yang sama setiap tahun, kecuali pada tahun 2014. Pada tahun 2014 hasil panen jagung menunjukkan pertumbuhan yang positif sedangkan tanaman padi mengalami pertumbuhan negatif. Fakta menarik yang terjadi adalah pada tahun 2011 terjadi pertumbuhan negatif pada kedua tanaman sereal, namun pada tahun berikutnya, tahun 2012 laju pertumbuhan meningkat tajam ke arah positif. Peningkatan ini terjadi diperkirakan karena adanya peningkatan

Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Hasil Panen Sereal (Padi dan Jagung), 2010-2014



Sumber : www.bps.go.id

Serealia yang dimaksudkan di Indonesia adalah produksi padi dan jagung .

luas panen seluas 268,01 ribu hektar (2,03 persen) dan produktivitas sebesar 1,39 kuintal/hektar (2,79 persen) pada tanaman padi, serta 101,89 ribu hektar (2,64 persen) dan produktivitas sebesar 2,15 kuintal/hektar (4,71 persen) pada tanaman jagung (Badan Pusat Statistik, 2012). Bergejolaknya laju pertumbuhan hasil panen serealia merupakan peringatan dini untuk Indonesia agar segera menyusun strategi untuk menerapkan sistem produksi pangan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan dua kali lipat produksi pertanian.

INDIKATOR 2.5. KESENJANGAN HASIL TERNAK (PERSENTASE HASIL TERNAK SEBENARNYA DIBANDING HASIL PRODUKSI TERNAK YANG DAPAT DICAPAI)

Indikator ini menggambarkan kesenjangan hasil untuk komoditas ternak besar seperti susu, telur dan daging, dengan mempertimbangkan iklim, kondisi penyakit dan pemanfaatan air dan pakan yang berkelanjutan. Indikator ini harus diinterpretasi dengan indikator lain yang menyatakan efisiensi sumber daya penting seperti pakan dan air untuk memastikan solusi agro-ekologis yang berkelanjutan, serta jumlah total ternak di rumah tangga dan tingkat nasional. Data yang tersedia meliputi jumlah dan target produksi peternakan yang dapat diperoleh dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, sementara data hasil produksi hasil ternak diperoleh dari BPS. Sedangkan data menurut pertimbangan mengenai iklim, kondisi penyakit dan pemanfaatan air dan pakan berkelanjutan belum tersedia.

Indikator ini dapat mengukur target 2.3 dan target 2.4 SDGs, yaitu pada 2030 meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil (target 2.3), serta memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek-praktek tangguh pertanian yang meningkatkan produktivitas dan produksi, yang membantu menjaga ekosistem, yang memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan bencana lainnya, yang mana semakin meningkatkan tanah dan kualitas tanah (target 2.4).

Gambar 2.9 memperlihatkan bahwa terjadi kesenjangan ke arah positif untuk produksi hasil ternak selama periode tahun 2010 hingga 2014. Untuk hasil produksi peternakan berupa daging dan telur setiap tahun terus meningkat dan telah memenuhi target produksi yang ditetapkan pada tahun 2014. Produksi daging bahkan telah melebihi target produksi sejak tahun 2010, sedangkan telur telah melebihi target produksi sejak tahun 2014. Hal yang mengkhawatirkan adalah hasil produksi peternakan berupa susu, hasil produksi produk ini mengalami penurunan sejak tahun 2012. Hal ini terjadi dikarenakan target produksi yang ditetapkan selalu meningkat setiap tahun

Gambar 2.9. Tingkat Kesenjangan Hasil Ternak, 2010-2014



Catatan : * Angka sementara
Sumber : BPS dan Kementan

sedangkan produksi malah mengalami penurunan. Kondisi berdasarkan data yang ada pada tahun 2030 Indonesia dapat optimis untuk mencapai sistem produksi pangan berkelanjutan (target 2.4) untuk produk peternakan. Selain itu, dengan peningkatan yang terus terjadi pada produksi hasil ternak, 15 tahun mendatang Indonesia dapat meningkatkan dua kali lipat produksi hasil ternak ini (target 2.3).

INDIKATOR 2.6. EFISIENSI PENGGUNAAN FOSFOR DALAM SISTEM PANGAN - UNTUK DIKEMBANGKAN

Fosfor adalah nutrisi utama untuk sistem pangan dan dengan dampak terhadap lingkungan. Indikator efisiensi penggunaan fosfor ini diusulkan untuk dikembangkan analog dengan indikator penggunaan nitrogen (Indikator 15 pada Tujuan 2). Sama dengan indikator 15 saat ini data efisiensi penggunaan fosfor belum tersedia. Apabila ingin dikembangkan, ketersediaan dan penghitungan indikator dapat bersumber dari Kementan sebagai hasil dari penerapan Permentan No.40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada padi sawah spesifik lokasi. Tersedianya data untuk indikator ini dapat digunakan untuk melihat ketercapaian target 2.3 dan target 2.4, yaitu pada 2030 meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, dan memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek-praktek tangguh pertanian.

Data indikator 2.6 belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 2.7. PROPORSI KALORI DARI BAHAN PANGAN NON-POKOK

Indikator sederhana ini dapat digunakan untuk menelusuri perkembangan pola makan yang lebih beragam dan sehat. Data dikutip dari publikasi Statistik Indonesia yang diterbitkan setiap tahun berupa proporsi ketersediaan kalori dari bahan pangan non-pokok. Data diperoleh dengan membandingkan ketersediaan konsumsi kalori bahan makanan selain padi-padian dan makanan berpati terhadap seluruh konsumsi kalori bahan makanan. Indikator ini mampu menjawab target 2.5 SDGs, yaitu pada tahun 2020 mempertahankan keragaman genetik benih, tanaman budidaya, peternakan dan hewan peliharaan serta spesies liar yang terkait, termasuk melalui pengelolaan yang baik dan keberagaman benih serta bank tanaman di tingkat nasional, regional dan internasional, dan menjamin akses dan pembagian yang adil dan merata dari keuntungan yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait yang disepakati secara internasional.

Secara umum, selama 2010-2014 proporsi ketersediaan kalori dari bahan pangan non-pokok mengalami peningkatan (Gambar 2.10). Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan

Gambar 2.10. Proporsi Ketersediaan Kalori dari Bahan Pangan Non-Pokok, 2010-2014



Catatan : ^x Angka sementara
^e Angka perkiraan

Sumber : Statistik Indonesia 2015 [Hasil Pengolahan]

kalori bahan pangan non-pokok semakin tinggi untuk seluruh penduduk Indonesia. Tahun 2014 ada sebesar 0,4 ketersediaan kalori yang berasal dari bahan pangan non-pokok untuk penduduk. Melihat angka ketersediaan kalori yang semakin menaik mengindikasikan adanya konsumsi dan pola makan yang mulai beragam terhadap kelompok makanan buah-buahan, sayur-sayuran, sumber protein, minyak dan biji-bijian. Hal ini memberikan harapan pada tahun 2020 Indonesia dapat mempertahankan keragaman genetik benih, tanaman budidaya, peternakan dan hewan peliharaan serta spesies liar yang terkait (target 2.5).

INDIKATOR 2.8. PERSENTASE TOTAL ENERGI DARI PROTEIN UNTUK ORANG DEWASA

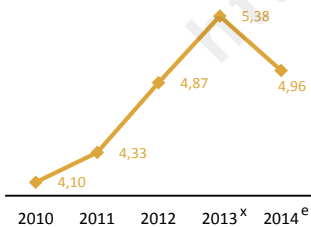
Indikator ini didefinisikan sebagai persentase kalori dari konsumsi protein pada orang dewasa. Kegunaan indikator adalah untuk menjawab target 2.2 SDGs, yaitu Pada 2030 mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai target pada tahun 2025 yang disepakati secara internasional pada *stunting* dan *wasting* pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, dan para manula.

Selama 2010-2014 persentase total kalori protein secara umum mengalami peningkatan

INDIKATOR PROXY: PERSENTASE KETERSEDIAAN TOTAL KALORI PROTEIN TERHADAP TOTAL KALORI PER KAPITA

Ketersediaan data untuk indikator ini didekati dengan persentase ketersediaan total kalori protein terhadap total kalori per kapita yang dikutip dari publikasi tahunan BPS, yaitu Statistik Indonesia. Gambar 2.11 menunjukkan perkembangan persentase ketersediaan total kalori protein untuk penduduk Indonesia. Selama 2010-2014 persentase total kalori protein secara umum mengalami peningkatan. Hanya pada tahun 2014 berdasarkan angka sementara terlihat mengalami penurunan sebesar 0,42 persen dari tahun 2013. Apabila dilihat dari peningkatan yang terjadi selama 2010-2013, dapat dikatakan bahwa keragaman pola makan penduduk Indonesia terhadap protein menunjukkan perkembangan yang baik. Fungsi protein sangat penting untuk tubuh manusia setidaknya ada 7 fungsi utama dari protein untuk manusia yang menopang kehidupan. 7 Fungsi tersebut diantaranya sebagai pembentukan otot dan sel-sel di dalam tubuh, sebagai enzim, untuk hormon, alat pengangkut dan penyimpan, pengatur pergerakan, penunjang mekanis, dan pertahanan tubuh (Qonita, 2014). Melihat fungsi vital dari protein, berdasarkan ketersediaan kalori protein yang terus meningkat, maka pada 15 tahun kedepan, Indonesia dapat mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi.

Gambar 2.11. Persentase Ketersediaan Total Kalori Protein terhadap Total Kalori Per Kapita, 2010-2014



Catatan : ^x Angka sementara

^e Angka perkiraan

Sumber : Statistik Indonesia 2015
[Hasil Pengolahan]

INDIKATOR 2.9. AKSESTERHADAP FASILITAS PENGERINGAN, PENYIMPANAN, DAN PENGOLAHAN (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Infrastruktur pengeringan dan penyimpanan hasil pertanian yang baik sangat penting untuk mengurangi kerugian akibat kontaminasi oleh mikotoksin, serangga, atau kontaminan makanan lainnya. Fasilitas pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan juga meningkatkan pendapatan petani dengan memungkinkan mereka untuk memiliki lebih banyak waktu yang dapat digunakan untuk menjual hasil panen mereka dan menunggu tingkat harga yang baik. Perluasan kapasitas pengolahan di perdesaan dapat menghasilkan kesempatan kerja, meningkatkan akses ke pasar, dan memfasilitasi nilai tambah (termasuk produksi makanan untuk meningkatkan gizi bayi/anak dan mengurangi pekerjaan ibu yang membosankan). Oleh karena itu, perlu dikembangkan indikator yang mengestimasi akses ke fasilitas pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan.

Data indikator 2.9 belum tersedia di Indonesia.

Indikator belum ditemukan di Indonesia. Apabila ingin dikembangkan, indikator dapat dibentuk melalui survei yang dikelola oleh Kementan dan kerjasama dengan BPS untuk memasukkan variabel tersebut pada survei khusus/yang terkait. Tujuan dari indikator ini adalah untuk mewujudkan pada tahun 2030, Indonesia dapat meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil (target 2.3), serta menurunkan hingga setengahnya limbah pangan global per kapita di tingkat ritel dan konsumen, dan mengurangi kerugian pangan selama proses produksi dan menyediakan jaringan produksi termasuk kerugian pasca panen (target 12.3).

INDIKATOR 2.10. INDIKATOR KERAGAMAN GENETIK DALAM PERTANIAN (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini digunakan untuk melacak benih dan keanekaragaman tanaman genetik. Benih dan keanekaragaman genetik berfungsi untuk menciptakan bibit unggul dalam pertanian yang dapat memberikan hasil produksi melimpah dengan lahan yang terbatas atau dengan kata lain untuk efisiensi lahan. Indikator ini belum tersedia dan perlu untuk dikembangkan lebih lanjut di Indonesia. Indikator ini digunakan untuk menjawab target 2.5 SDGs, yaitu pada tahun 2020 Indonesia dapat mempertahankan keragaman genetik benih, tanaman budidaya, peternakan dan hewan peliharaan serta spesies liar yang terkait, termasuk melalui pengelolaan yang baik dan keberagaman benih serta bank tanaman di tingkat nasional, regional dan internasional, dan menjamin akses dan pembagian yang adil dan merata dari keuntungan yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait yang disepakati secara internasional.

Data indikator 2.10 belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 2.11: INDIKATOR KESEJANGAN AKSES IRIGASI (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Data indikator 2.11 belum tersedia di Indonesia.

Peningkatan irigasi di suatu daerah dapat dilakukan secara berkelanjutan dan dapat meningkatkan hasil panen. Namun, saat ini sistem irigasi kurang dimanfaatkan, sehingga diperlukan indikator yang tepat untuk mengukur hal tersebut. Indikator kesenjangan akses irigasi perlu didefinisikan secara lebih spesifik agar dapat digunakan untuk memantau ketercapaian target 2.3 (meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil) dan target 2.4 (memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek-praktek tangguh pertanian) SDGs. Jika ingin dikembangkan lebih lanjut, ketersediaan data penyusun indikator dapat dikumpulkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) sebagai instansi utama dalam pencatatan infrastruktur saluran irigasi.

INDIKATOR 2.12: PETANI DENGAN ASURANSI TANAMAN YANG TEPAT SECARA NASIONAL (PERSEN) (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Data indikator 2.12 belum tersedia di Indonesia.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur ketahanan (badai, banjir, kekeringan, hama, dll) dalam sistem pertanian. Bencana alam yang sulit untuk dideteksi kejadiannya dapat berdampak besar terhadap hasil panen dan keberhasilan dalam pertanian. Kerugian yang tidak sedikit akibat bencana ini menuntut adanya asuransi tanaman untuk dapat menutupi dampak dari bencana agar petani tidak jatuh ke dalam kondisi miskin. Oleh karena itu, Indonesia perlu berupaya untuk memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek-praktek tangguh pertanian (target 2.4) sehingga produktivitas pertanian dapat meningkat dua kali lipat (target 2.3).

Pentingnya keberadaan indikator ini untuk mencapai ketahanan pangan dan sistem pertanian berkelanjutan tidak dapat disepelekan. Saat ini ketersediaan data indikator belum ditemukan, diskusi dan kerjasama lebih lanjut perlu dilakukan dengan Kementerian Pertanian terkait pemenuhan dan kemungkinan pembentukan indikator ini di Indonesia.

INDIKATOR 2.13. PENGELUARAN PEMERINTAH DAN SWASTA DI BIDANG PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN (PERSEN GNI)

Data indikator 2.13 belum tersedia.

Indikator ini menggambarkan mobilisasi sumber daya publik dan swasta untuk litbang pada sektor pertanian dan pembangunan pedesaan terhadap Pendapatan Nasional Bruto. Data pengeluaran pemerintah belum bisa dibedakan fungsinya untuk penelitian dan pengembangan sehingga indikator ini belum tersedia di Indonesia. Indikator ini digunakan untuk memantau

capaian dari target 2.4 dan 2.a SDGs, yaitu memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik-praktik tangguh pertanian, serta meningkatkan investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara-negara berkembang, khususnya di negara-negara kurang berkembang.

INDIKATOR 2.14. INDIKATOR VOLATILITAS HARGA PANGAN (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Volatilitas harga pangan yang ekstrem merupakan indikator penting dalam ketahanan pangan dan harus diketahui perkembangannya. Harga pangan di Indonesia dikumpulkan oleh BPS melalui hasil Survei Harga Konsumen (SHK) yang biasa digunakan untuk menghitung inflasi. Perlu disepakati terlebih dahulu komoditas pangan apa saja yang ingin dipantau pergerakan harganya karena banyaknya komoditas yang dikumpulkan pada survei IHK. Selain itu, definisi lebih lanjut juga perlu dilakukan untuk indikator ini. Melalui keterbatasan yang ada, data untuk indikator ini belum dapat disajikan.

Target yang ingin dicapai dengan indikator ini adalah target 2.c, yaitu diharapkan Indonesia dapat mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan berfungsinya pasar komoditas pangan dan turunannya, dan memfasilitasi akses yang tepat terhadap informasi pasar, termasuk cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga makanan ekstrim.

Data indikator 2.14 belum tersedia di Indonesia.

**MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT
DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
PENDUDUK DI SEGALA USIA**

<http://www.bps.go.id>

**3 GOOD HEALTH
AND WELL-BEING**



- INDIKATOR 17. RASIO (INDIKATOR MDG) DAN ANGKA KEMATIAN IBU
- INDIKATOR 18. ANGKA KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA (INDIKATOR MDG YANG DIMODIFIKASI)
- INDIKATOR 19. PERSENTASE ANAK YANG MENERIMA IMUNISASI LENGKAP SESUAI REKOMENDASI JADWAL IMUNISASI NASIONAL
- INDIKATOR 20. INSIDEN, ANGKA PENGOBATAN, DAN ANGKA KEMATIAN HIV (INDIKATOR MDGS YANG DIMODIFIKASI)
- INDIKATOR 21. INSIDEN, PREVALENSI DAN ANGKA KEMATIAN TERKAIT TB (INDIKATOR MDG)
- INDIKATOR 22. INSIDEN DAN ANGKA KEMATIAN TERKAIT MALARIA (INDIKATOR MDG)
- INDIKATOR 23. PROBABILITAS KEMATIAN ANTARA USIA TEPAT 30 DAN 70 TAHUN DARI SETIAP PENYAKIT JANTUNG, KANKER, DIABETES, ATAU PENYAKIT PERNAPASAN KRONIS, [ATAU BUNUH DIRI]
- INDIKATOR 24. PERSENTASE POPULASI KELEBIHAN BERAT BADAN DAN OBESITAS, TERMASUK BALITA.
- INDIKATOR 25. KEMATIAN DI LALU LINTAS PER 100 000 PENDUDUK

INDIKATOR 26. - 3.35...

TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK DI SEGALA USIA

INDIKATOR 17 : RASIO (INDIKATOR MDG) DAN ANGKA KEMATIAN IBU

Rasio kematian ibu/*Maternal Mortality Ratio* adalah jumlah kematian ibu per tahun dari penyebab yang berkaitan dengan atau diperburuk oleh kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk sebab-sebab karena kecelakaan atau alasan insidental) yang terjadi selama kehamilan dan persalinan atau dalam 42 hari dari terminasi kehamilan, per 100.000 kelahiran per tahun. Indikator ini mencerminkan kapasitas sistem kesehatan untuk mencegah dan mengatasi komplikasi yang terjadi selama kehamilan dan persalinan secara efektif. Indikator ini juga menyoroti kurangnya asupan gizi reproduksi mereka sehingga menyebabkan kehamilan yang buruk dan berulang. Sementara itu, angka kematian ibu (AKI)/*Maternal Mortality Rate* adalah jumlah kematian ibu di suatu populasi dibagi dengan jumlah wanita usia reproduksi. AKI menangkap kemungkinan hamil dan meninggal selama kehamilan (termasuk kematian sampai enam minggu setelah melahirkan).

Angka kematian ibu dalam tahap kehamilan dan kelahiran cenderung mengalami penurunan selama tahun 1994-2012, namun pada tahun 2012 jumlah kematian menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 228 menjadi 359 per 100.000 kelahiran.

Kedua indikator ini dapat digunakan untuk menjawab target 3.1 SDGs, yaitu, pada 2030 mengurangi rasio kematian ibu global menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Ketersediaan data indikator ini diperoleh dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilaksanakan setiap 5 tahunan. Disagregasi data dapat dilakukan berdasarkan umur, wilayah (perkotaan dan perdesaan), dan tingkat pendapatan. Data dapat tersaji sampai dengan level provinsi. Khusus rasio kematian ibu, indikator telah digunakan untuk mengukur ketercapaian MDGs. Berdasarkan hasil laporan pencapaian tujuan MDGs tahun 2014, Indonesia belum mampu memenuhi target menurunkan kematian ibu hingga 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Oleh karena itu, indikator ini masih menjadi perhatian khusus.

Gambar 3.1. Rasio Kematian Ibu / *Maternal Mortality Ratio* (per 100.000 kelahiran hidup), 1994-2012



Sumber : SDKI

Dalam SDKI, angka kematian ibu dengan rasio kematian ibu memiliki hubungan linier atau searah karena angka kematian ibu bisa dikonversikan menjadi rasio kematian ibu dan disajikan per 100.000 kelahiran hidup, dengan membagi angka kematian ibu dengan angka fertilitas umum (*General Fertility Rate*). Berdasarkan Gambar 3.1, jumlah kematian ibu dalam tahap kehamilan dan kelahiran cenderung mengalami penurunan selama tahun 1994-2012. Namun, pada tahun 2012 jumlah kematian menunjukkan peningkatan yang signifikan. Walaupun angka kematian ibu terlihat meningkat pada SDKI 2012, diperlukan kehati-hatian dalam menginterpretasikan hasil dari tren tersebut. Menurut publikasi SDKI 2012, angka ini

belum tentu menunjukkan kegagalan dalam mengurangi peran kematian ibu terhadap kematian wanita secara keseluruhan. Perlu diperhatikan kesalahan sampling yang berhubungan dengan responden terpilih, dan kesalahan nonsamplingnya. Dalam publikasi SDKI disebutkan bahwa survei sampel seperti SDKI dianggap tidak tepat digunakan untuk memantau kemajuan menuju target MDGs akibat adanya kesalahan sampling dan nonsampling pada pemilihan responden wanita. Melihat fenomena ini akan sulit bagi Indonesia untuk dapat memenuhi target 3.1 pada SDGs kedepannya.

INDIKATOR 18. ANGKA KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA (INDIKATOR MDG YANG DIMODIFIKASI)

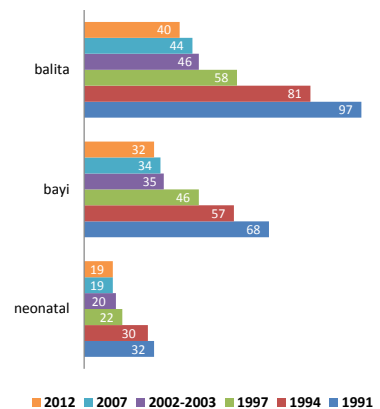
Angka kematian balita adalah kemungkinan seorang Anak meninggal sebelum mencapai usia lima tahun, jika merujuk pada angka kematian spesifik usia saat ini. Indikator ini mengukur kesehatan dan kelangsungan hidup anak dan dinyatakan sebagai jumlah kematian per 1.000 kelahiran hidup. Indikator ini menggambarkan lebih dari 90 persen kematian global di antara anak-anak di bawah usia 18 tahun. Data kejadian penyakit seringkali tidak tersedia, sehingga yang digunakan adalah data angka kematian. Indikator digunakan untuk melihat ketercapaian dari target 3.2, yaitu pada 2030 mengakhiri kematian pada bayi baru lahir dan balita.

Ketersediaan data Indikator ini dapat diperoleh dari SDKI, SP, dan Supas. Data bisa disajikan berdasarkan usia kematian bayi yaitu neonatal (0-1 bulan), bayi (0-1 tahun), dan balita (0-4 tahun), serta daerah tempat tinggal. Data dapat disajikan sampai wilayah provinsi dan dapat diproyeksi setiap tahunnya. Gambar 3.2 memperlihatkan selama 1991 hingga 2012 kematian neonatal, bayi, dan balita mengalami penurunan yang cenderung melambat. Kematian banyak terjadi pada usia balita dan bayi, dari 1.000 balita pada tahun 2012, 40 diantaranya tidak akan berhasil mencapai umur lima tahun dan 32 diantaranya tidak dapat mencapai umur satu tahun.

Meskipun pada MDGs ketercapaian indikator ini masih perlu mendapat perhatian khusus, penurunan angka kematian neonatal, bayi, dan balita merupakan suatu perkembangan yang positif. Turunnya angka kematian tersebut menunjukkan bahwa program penurunan kematian bayi dan balita cukup berhasil (BAPPENAS, 2015). Melihat dari pola penurunan angka kematian yang cenderung melambat, mengakhiri kematian pada bayi baru lahir dan balita di Indonesia akan memerlukan waktu yang cukup lama. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesehatan anak, namun strategi percepatan perlu dilakukan agar pada 2030 Indonesia dapat mencapai target mengakhiri kematian pada bayi dan balita.

Selama 1991 hingga 2012 kematian neonatal, bayi, dan balita mengalami penurunan yang cenderung melambat. Kematian banyak terjadi pada usia balita dan bayi, dari 1.000 balita pada tahun 2012, 40 diantaranya tidak akan berhasil mencapai umur lima tahun dan 32 diantaranya tidak dapat mencapai umur satu tahun

Gambar 3.2. Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita, 1991-2012



Sumber : SDKI

INDIKATOR 19. PERSENTASE ANAK YANG MENERIMA IMUNISASI LENGKAP (SESUAI JADWAL IMUNISASI NASIONAL)

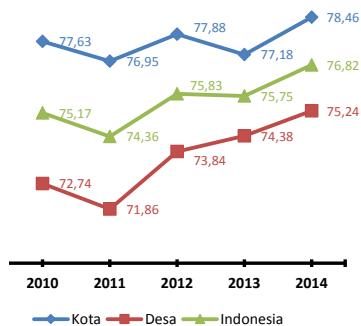
Di Indonesia pada tahun 2014, persentase anak yang menerima imunisasi lengkap sudah mencapai 76,82 persen. Pada umumnya persentase lebih tinggi pada wilayah perkotaan

Hampir setiap negara saat ini memiliki jadwal khusus dalam penerimaan vaksin. Pada tingkat global, WHO merekomendasikan bahwa semua anak menerima vaksinasi terhadap BCG, Hepatitis B, Polio, DTP, *Haemophilus influenza* tipe b, *Pneumococcal (Conjugate)*, *Rotavirus*, Campak, *Rubella*, dan bahwa gadis remaja (usia 9-13) menerima vaksinasi terhadap HPV. Indikator ini mengukur persentase anak-anak dan remaja yang telah menerima semua imunisasi pada usia yang tepat, seperti yang dianjurkan oleh jadwal nasional tiap negara atau, jika tidak adanya jadwal vaksinasi nasional, maka dapat menggunakan jadwal WHO. Negara juga mungkin dapat memasukkan vaksinasi tambahan, seperti tetanus, demam kuning, dll, seperti yang direkomendasikan oleh program *Global Vaccine Action Plan* oleh WHO.

Keberadaan indikator 19 dapat digunakan untuk menjawab target dalam SDGs, yaitu:

- Target 3.2 Pada tahun 2030 mengakhiri kematian pada bayi baru lahir dan balita
- Target 3.3 Pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit yang terbawa air, dan penyakit menular lainnya
- Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal (UHC), termasuk perlindungan risiko keuangan, akses ke pelayanan kesehatan utama yang berkualitas, dan akses ke obat-obatan dan vaksin utama yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau untuk semua.

Gambar 3.3. Persentase Anak yang Menerima Imunisasi Lengkap di Indonesia, 2010-2014



Sumber : Susenas, BPS

Ketersediaan data indikator 19 dapat diperoleh dari BPS, melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data indikator ini dapat didisagregasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan wilayah, selanjutnya disagregasi data masih dapat dikembangkan. Indikator ini harus didukung oleh data pada semua vaksin yang diterima oleh individu dimana tidak mungkin negara akan memenuhi kebutuhan imunisasi lengkap. Selain itu, di sebagian besar negara memiliki jadwal nasional mencakup vaksin kurang dari yang WHO rekomendasikan. Di negara-negara ini, Departemen Kesehatan harus bekerja sama dengan WHO untuk memastikan mereka memiliki jadwal yang tepat.

Gambar 3.3 menunjukkan bahwa persentase anak yang menerima imunisasi lengkap di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Pada umumnya persentase lebih tinggi pada wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah perdesaan, persentase di perkotaan bahkan lebih tinggi dibandingkan persentase secara nasional di setiap

tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlu peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya imunisasi lengkap bagi anak di wilayah perdesaan. Meskipun demikian, peningkatan persentase secara nasional di tahun 2014 membuat Indonesia optimis dalam pencapaian target SDGs pada tahun 2030.

INDIKATOR 20. INSIDEN, ANGKA PENGOBATAN, DAN ANGKA KEMATIAN HIV (INDIKATOR MDGS YANG DIMODIFIKASI)

Indikator ini mengukur jumlah individu dengan kelompok usia yang hidup dengan HIV, yang dinyatakan dengan persentase terhadap total penduduk pada kelompok usia, serta tingkat pengobatan dengan terapi anti-retroviral menurut kelompok usia tertentu. Indikator ini menggambarkan kemajuan dalam mengurangi infeksi HIV dan meningkatkan akses terhadap pengobatan. Indikator pengobatan menggambarkan persentase penduduk di setiap kelompok umur dengan HIV saat ini yang menerima terapi antiretroviral (ART), yang terdiri dari penggunaan setidaknya tiga antiretroviral (ARV), yang secara maksimal menekan HIV dan menghentikan perkembangan penyakit. Indikator ini juga menambahkan gambaran kematian yang disebabkan oleh HIV/ AIDS.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 3.3 yaitu tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit yang terbawa air, dan penyakit menular lainnya. Indikator ini dapat didisagregasi berdasarkan jenis kelamin dan umur.

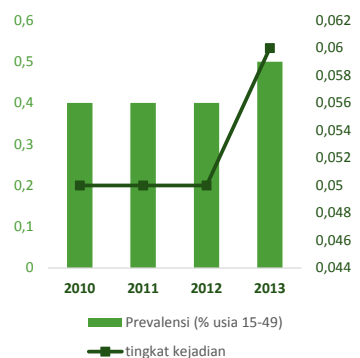
Prevalensi HIV pada kelompok usia tertentu adalah contoh acuan yang lebih baik untuk memantau kejadian HIV secara keseluruhan karena kecenderungan prevalensi HIV biasanya berbeda bagi setiap kelompok umur. Prevalensi kasus HIV AIDS dihitung dengan menggunakan informasi data kasus baru dan kasus kumulatif HIV AIDS.

Indikator perkembangan kasus AIDS ini dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan yang terdeteksi dari berbagai sarana kesehatan di seluruh Indonesia setiap tahunnya. Indikator dapat dirinci berdasarkan umur dan jenis kelamin penderita HIV/AIDS dan tersedia sampai dengan level kabupaten/kota. Berdasarkan survei STBP, prevalensi dapat didisagregasi menurut kelompok penduduk berisiko tinggi.

Indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pengobatan HIV dan tersedia di Indonesia adalah proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral (ARV). Data dikumpulkan oleh Kemenkes dari berbagai sarana kesehatan setiap tahun. Indikator dapat dirinci berdasarkan jenis terapi ARV (ART lini 1 dan lini 2), wilayah (kabupaten/kota), umur, dan jenis kelamin. Data kematian AIDS yang dilaporkan tercatat di berbagai sarana kesehatan di

Indikator 20 didekati dengan prevalensi HIV/AIDS, tingkat kejadian, dan jumlah kematian akibat HIV/AIDS dengan menggunakan data dari *Worldbank*.

Gambar 3.4. Prevalensi HIV/AIDS Usia 15-49 Tahun dan Tingkat Kejadian di Indonesia, 2010-2013

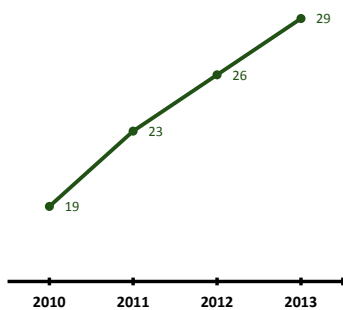


Sumber : *Worldbank* dan MDGs *United Nation*

Indonesia. Indikator dapat dirinci berdasarkan umur dan jenis kelamin penderita HIV/AIDS dan tersedia sampai dengan level kabupaten/kota.

Berdasarkan gambar 3.4, prevalensi HIV/AIDS usia 15-49 tahun konstan setiap tahun hingga 2012 sebesar 0,4 persen dan meningkat menjadi 0,5 persen pada tahun 2013. Pola yang sama juga terjadi pada tingkat kejadian HIV. Menurut *United Nations* (UN), tingkat kejadian HIV adalah jumlah infeksi HIV baru dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu. Pada tahun 2010 sampai 2012, tingkat kejadian HIV konstan sebesar 0,05 persen dan meningkat menjadi 0,06 persen pada tahun 2013.

Gambar 3.5. Jumlah Kematian Akibat HIV/AIDS di Indonesia (ribu penduduk), 2010-2013



Sumber : MDGs, *United Nation*

Berdasarkan gambar 3.5, jumlah kematian akibat HIV/AIDS di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010, jumlah kematian akibat HIV/AIDS sebesar 19 ribu kematian meningkat tajam hingga tahun 2013 mencapai 29 ribu kematian. Hal ini disebabkan karena perilaku yang tidak sehat seperti melalui hubungan seksual (homoseksual maupun heteroseksual), penggunaan pada jarum suntik pengguna narkotika, dan transfusi darah dari ibu yang mengidap HIV kepada bayi yang dilahirkannya.

INDIKATOR 21. INSIDEN, PREVALENSI DAN ANGKA KEMATIAN TERKAIT TB (INDIKATOR MDG)

Angka kejadian TB adalah jumlah kasus baru TB per 100.000 orang per tahun. Prevalensi adalah jumlah kasus TB dalam suatu populasi pada suatu titik waktu tertentu per 100.000. Angka kematian TB adalah jumlah kematian yang disebabkan oleh TB per 100.000 dalam satu tahun. Mendeteksi dan menyembuhkan TB merupakan tindakan yang penting untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Prevalensi dan kematian merupakan penanda yang lebih sensitif dari beban tuberkulosis yang berubah-ubah dari kasus baru, namun data insiden TB lebih komprehensif dan memberikan gambaran terbaik dari dampak penanggulangan TB di dunia.

Data untuk indikator kasus TB di atas diperoleh dari laporan TB Global oleh WHO pada level nasional setiap tahun. WHO mengestimasi indikator tersebut berdasarkan data kasus TB yang dilaporkan dengan melakukan konsultasi bersama negara yang bersangkutan. Pada indikator tersebut diperoleh informasi pengidap TB yang juga terinfeksi HIV. Data Prevalensi TB Paru juga dapat diperoleh dari Riskesdas. Data prevalensi dari Riskesdas tersedia sampai level provinsi dan dapat dirinci berdasarkan wilayah kota-desa, dan karakteristik penderita seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan kuintil pendapatan. Data harus dipisahkan berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, kota/desa, dan pendapatan, serta jenis TB, dengan perhatian khusus pada varietas yang resistan terhadap obat. Selain itu, harus dipisahkan berdasarkan penyakit (paru/

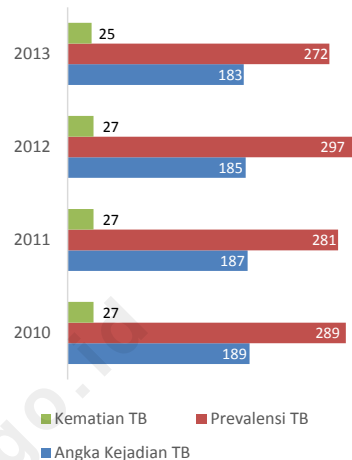
Angka kejadian TB rata-rata menurun 2 kasus per tahun selama 2010-2013

ekstra-paru), jenis konfirmasi laboratorium (biasanya BTA), dan riwayat pengobatan sebelumnya.

Informasi mengenai kasus TB dapat juga diperoleh dengan menggunakan indikator Proporsipasian TB Paru BTA+ di antara suspek yang diperiksa, Angka penemuan kasus TB Paru BTA+(Case Detection Rate (CDR)), dan Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate (SR)) yang dikumpulkan Kemenkes secara pencatatan yang tersedia sampai wilayah kabupaten/kota tetapi tidak bisa dirinci secara lengkap berdasarkan karakteristik penderita. Indikator ini digunakan untuk mengukur salah satu target SDGs yaitu target 3.3 pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit yang terbawa air, dan penyakit menular lainnya.

Gambar 3.6 memperlihatkan bahwa terjadi penurunan angka kejadian TB rata-rata 2 kasus per tahun selama 2010-2013 yang berarti ada kemajuan positif untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sehat, begitu pula prevalensi TB yang cenderung menurun selama tahun 2010-2013 hanya pada tahun 2012 sedikit meningkat. Sementara Angka kematian TB cenderung stagnan dengan 27 kasus setiap tahunnya selama tahun 2010-2012, hanya terjadi penurunan 2 kasus pada tahun 2013.

Gambar 3.6. Insiden, Prevalensi, dan Angka Kematian Terkait TB, 2010-2013



Sumber : *Global Tuberculosis Report 2014, 2013, 2011 dan Global Tuberculosis Control 2011*

INDIKATOR 22. INSIDEN DAN ANGKA KEMATIAN TERKAIT MALARIA (INDIKATOR MDG)

Angka kejadian malaria adalah jumlah kasus malaria baru per 100.000 orang per tahun. Angka kematian malaria adalah jumlah kematian yang disebabkan oleh malaria per 100.000 orang per tahun. Indikator ini digunakan untuk mengukur salah satu target SDGs yaitu target 3.3 pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit yang terbawa air, dan penyakit menular lainnya.

Insiden malaria dan prevalensi kasus malaria dapat diperoleh dari Riskesdas. Data tersedia sampai level provinsi dan dapat dirinci berdasarkan wilayah (kota-desa) dan karakteristik penderita seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan kuintil pendapatan. Selain melalui Riskesdas, data insiden malaria juga dapat diperoleh dari Kementerian Kesehatan berupa pendataan setiap tahunnya dari berbagai sarana kesehatan. Sayangnya Publikasi Riskesdas tidak menghasilkan angka kematian akibat malaria.

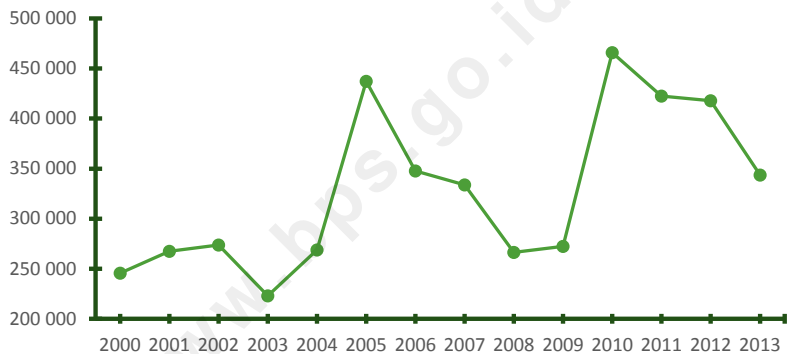
Kualitas data sangat bergantung pada kelengkapan pelaporan fasilitas kesehatan. Selain itu, karena gejala malaria mirip dengan penyakit lain, insiden dan kematian kadang-kadang mengalami salah pelaporan di negara-negara yang memiliki sumber daya yang kurang.

Insiden dan angka kematian terkait malaria cenderung menurun dari 465.764 kasus pada tahun 2010 menjadi 343.527 kasus pada tahun 2013.

Penemuan pengujian diagnostik malaria yang cepat harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas data. Data harus dipisahkan berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, lokasi geografi (kota-desa), pendapatan, serta oleh agen penyebab malaria.

Tidak tersedianya data mengenai kematian penduduk akibat malaria baik dari pendataan maupun Riskesdas, maka untuk melihat perkembangan insiden dan angka kematian terkait malaria disajikan data bersumber dari Website WHO. Berdasarkan Gambar 3.7 secara umum jumlah insiden dan angka kematian terkait malaria yang dilaporkan cenderung berfluktuatif tiap tahunnya dengan jumlah tertinggi tahun 2010 sebanyak 465.764 kasus dan terendah tahun 2003 sebanyak 223.075 kasus yang dilaporkan.

Gambar 3.7. Insiden, Prevalensi, dan Angka Kematian Terkait TB, 2010-2013



Sumber : World Health Organization (WHO)

Masih cenderung tingginya insiden dan angka kematian terkait malaria selama beberapa tahun terakhir menjadi bahan masukan bagi pemerintah untuk lebih memerhatikan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas dari fasilitas kesehatan dan tentunya didukung oleh kesadaran dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menjaga kesehatan.

INDIKATOR 23. PROBABILITAS KEMATIAN ANTARA USIA TEPAT 30 DAN 70 TAHUN DARI SETIAP PENYAKIT JANTUNG, KANKER, DIABETES, ATAU PENYAKIT PERNAPASAN KRONIS, (ATAU BUNUH DIRI)

Beban penyakit akibat penyakit tidak menular (PTM) atau *Non-Communicable Disease* (NCD) di antara orang dewasa meningkat karena faktor usia dan transisi kesehatan. Mengukur risiko kematian akibat PTM merupakan hal yang penting dilakukan untuk menilai beban dari kematian akibat PTM dalam suatu populasi. Indikator ini mengukur risiko kematian dini akibat PTM yang paling umum. Merupakan persentase orang berumur 30 tahun yang akan mati sebelum ulang tahun ke-70

mereka dari penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis, dengan asumsi bahwa ia akan mengalami tingkat kematian saat ini di setiap usia dan ia tidak akan mati dari penyebab kematian lain, seperti kecelakaan atau HIV/ AIDS.

Sebagai Indikator pengukur resiko kematian, indikator ini digunakan untuk menjawab target SDGs 3.4, pada tahun 2030 mengurangi angka kematian premature sepertiga dari penyakit tidak menular (NCD) melalui pencegahan dan pengobatan, dan mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan. Ketersediaan data indikator ini belum tersedia. Hal ini disebabkan karena pengukuran kejadian PTM di Indonesia tidak dapat mengukur probabilitas kematian antara usia 30-70 tahun.

Ketersediaan data indikator 23 belum tersedia, karena pengukuran kejadian penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia tidak dapat mengukur probabilitas kematian antara usia 30-70 tahun

INDIKATOR 24. **PERSENTASE POPULASI KELEBIHAN BERAT BADAN DAN OBESITAS, TERMASUK BALITA.**

Indikator ini menggambarkan proporsi penduduk suatu negara yang kelebihan berat badan atau obesitas. Obesitas di semua usia memiliki efek yang signifikan pada kesehatan, bahkan berdampak sangat buruk untuk anak-anak yang mengalami obesitas hingga dewasa. IMT atau Indeks Massa Tubuh (*Body Mass Index/BMI*) adalah ukuran lemak tubuh berdasarkan tinggi dan berat badan yang dihitung dengan membagi berat badan seseorang dengan tinggi badan yang dikuadratkan. Menurut WHO, kelebihan berat badan untuk orang dewasa yaitu seseorang yang memiliki IMT lebih besar dari atau sama dengan 25. Seseorang dengan IMT yang lebih besar dari atau sama dengan 30 didefinisikan sebagai orang yang obesitas. Kelebihan berat badan pada anak didefinisikan oleh *Child Growth Standards* (Standar Pertumbuhan Anak) WHO sebagai persentase anak usia 0-5 tahun yang proporsi berat terhadap tinggi badan berstandar deviasi +2 di atas median *Child Growth Standards* (Standar Pertumbuhan Anak) WHO. Prevalensi kelebihan berat badan pada remaja adalah persentase remaja yang memiliki berstandar deviasi satu di atas IMT dan dapat dibedakan berdasarkan usia dan jenis kelamin.

Indikator ini dapat mengukur target 3.4, yaitu pada tahun 2030 mengurangi angka kematian premature sepertiga dari penyakit tidak menular (NCD) melalui pencegahan dan pengobatan, dan mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan.

Data untuk indikator ini dapat diperoleh dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Menurut Riskesdas, untuk menilai status gizi anak balita, perhitungan dilakukan dengan cara mengonversikan angka berat badan dan tinggi badan setiap anak balita ke dalam nilai standar (*Z-score*) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Kemudian salah satu penentuan status gizi dilakukan klasifikasi status gizi berdasarkan indikator BB/TB,

Indikator 24 disajikan berdasarkan kelompok umur

dengan batasan sebagai berikut:

Sangat kurus	: Z-score < -3,0
Kurus	: Z-score \geq -3,0 s.d. Z-score < -2,0
Normal	: Z-score \geq -2,0 s.d. Z-score \leq 2,0
Gemuk	: Z-score > 2,0

Indikator ini dapat diukur dari angka prevalensi balita yang mengalami kegemukan. Definisi dari angka prevalensi balita yang mengalami kegemukan adalah banyaknya balita yang kegemukan dari 100 balita.

Pada tahun 2013, prevalensi kegemukan balita menurun menjadi 11,8 persen

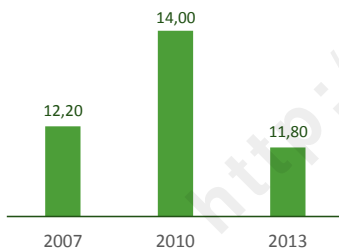
Selanjutnya, status gizi untuk kelompok remaja (5-18 tahun) menggunakan hasil pengukuran antropometri berat badan dan tinggi badan yang disajikan dalam bentuk salah satunya indeks massa tubuh menurut umur (IMT/U). Berdasarkan baku antropometri WHO, nilai Z-score IMT/U setiap remaja dikategorikan sebagai berikut:

Sangat kurus	: Z-score < -3,0
Kurus	: Z-score \geq -3,0 s.d. Z-score < -2,0
Normal	: Z-score \geq -2,0 s.d. Z-score \leq 1,0
Gemuk	: Z-score > 1,0 s.d. Z-score \leq 2,0
Obesitas	: Z-score > 2,0

Kemudian, status gizi dewasa (>18 tahun) dinilai berdasarkan IMT. Penghitungan IMT adalah berat badan (kg) dibagi tinggi badan (m) dikuadratkan, dengan batasan sebagai berikut:

Kurus	: IMT < 18,5
Normal	: IMT \geq 18,5 - < 24,9
Berat badan lebih	: IMT \geq 25,0 - < 27,0
Obesitas	: IMT \geq 27,0

Gambar 3.8. Prevalensi Kegemukan Pada Balita di Indonesia (dalam persen), 2007-2013



Sumber : Riskesdas, Kemenkes

Ketiga indikator tersebut dapat dilakukan disagregasi berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan, pekerjaan, dan kuintil pendapatan.

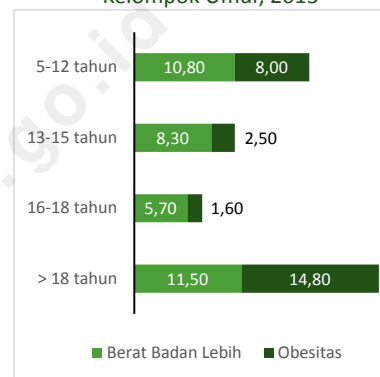
Kegemukan harus dideteksi pada usia dini. Kegemukan pada balita akan berisiko terkena penyakit metabolik dan degeneratif pada saat dewasa. Prevalensi gemuk pada balita di Indonesia meningkat dari tahun 2007 ke tahun 2010, kemudian menurun cukup signifikan dari tahun 2010 ke tahun 2013. Selama tahun 2010-2013, penurunan prevalensi gemuk pada balita di Indonesia menurun rata-rata sebesar 0,73 persen setiap tahunnya. Penurunan tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan kegemukan sejak dini sudah mulai meningkat. Namun demikian, prevalensi gemuk pada balita lebih tinggi dibandingkan prevalensi kurus dan sangat kurus pada balita. Prevalensi kegemukan pada balita tersebut harus diupayakan untuk terus menurun. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan gaya hidup sehat dalam lingkungan keluarga. Pola makan yang teratur serta nutrisi yang cukup dan seimbang akan memperkecil risiko kegemukan pada balita.

Kemudian, kejadian kegemukan pada anak, remaja, dan penduduk dewasa juga perlu diperhatikan. Pada tahun 2013, jumlah penduduk usia 5-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun lebih banyak yang mengalami berat badan lebih dibandingkan yang mengalami obesitas. Di sisi lain, penduduk usia lebih dari 18 tahun yang mengalami obesitas lebih banyak dibandingkan yang mengalami berat badan lebih. Selain itu, Gambar 3.9 juga menunjukkan bahwa kecenderungan penduduk usia lebih dari 18 tahun untuk mengalami berat badan lebih dan obesitas lebih besar dibandingkan kelompok umur lainnya. Pada tahun 2013, prevalensi berat badan lebih pada penduduk usia lebih dari 18 tahun di Indonesia sebesar 11,5 persen dan prevalensi obesitas mencapai sebesar 14,8 persen.

Tingginya prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia lebih dari 18 tahun erat kaitannya dengan perubahan gaya hidup. Banyak masyarakat yang bergantung dengan keberadaan industri makanan. Padahal makanan yang dihasilkan oleh industri tersebut mengandung kalori, karbohidrat, dan lemak yang tinggi. Tidak hanya itu, harga makanan tersebut juga cenderung mudah dijangkau sehingga kebiasaan masyarakat untuk memakan camilan (*snack*) semakin besar. Selain itu, kejadian obesitas juga diakibatkan dari aktivitas fisik masyarakat yang berkurang. Teknologi yang berkembang mengakibatkan masyarakat yang lebih banyak menggunakan mobil dibanding berjalan kaki. Kemudian, kurangnya waktu tidur juga berdampak pada berat badan berlebih dan obesitas. Tingginya jam kerja dan seringnya menghabiskan waktu untuk menonton televisi yang dapat menyebabkan kurangnya waktu tidur. Oleh karena itu, pencegahan berat badan lebih dan obesitas harus dilakukan dengan perubahan gaya hidup dan pola makan yang sehat, terutama bagi anak-anak. Orang tua harus memperhatikan pola makan anaknya, tidak hanya di rumah tetapi juga di lingkungan luar (sekolah dan tempat bermain).

Penduduk usia >18 tahun memiliki prevalensi gemuk dan obesitas paling tinggi diantara kelompok umur lainnya, yaitu sebesar 26,3 persen pada tahun 2013.

Gambar 3.9. Prevalensi Gemuk dan Obesitas di Indonesia menurut Kelompok Umur, 2013



Sumber : Risesdas, Kemenkes

INDIKATOR 25. KEMATIAN DI LALU LINTAS PER 100.000 PENDUDUK

Indikator ini mengukur keselamatan berkendara dan tingkat kematian di lalu lintas akibat luka fatal yang dihitung per 100.000 penduduk. Kecelakaan berkendara di lalu lintas adalah tantangan utama bidang kesehatan dan pembangunan karena merupakan penyebab kedelapan dari keseluruhan kematian secara global, dan penyebab utama kematian bagi remaja berusia 15-29 tahun. Data tren terkini menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat menjadi penyebab utama kematian kelima pada tahun 2030.

Indikator ini dapat mengukur empat target, yaitu sebagai berikut:

Target 2.3 Pada 2030 meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan

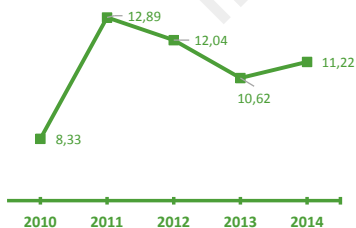
produsen makanan skala kecil, terutama perempuan, masyarakat adat, petani keluarga, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap tanah, sumber daya produktif lainnya dan input, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang untuk penambahan nilai dan pekerjaan non-pertanian,

- Target 3.4 Pada tahun 2030 mengurangi angka kematian premature sepertiga dari penyakit tidak menular (NCD) melalui pencegahan dan pengobatan, dan mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan,
- Target 3.6 Pada 2030 mengurangi separuh kematian global akibat kecelakaan lalu lintas jalan, dan
- Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses sistem transportasi yang aman, terjangkau, dapat diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan jalan, terutama dengan memperluas transportasi umum, dengan perhatian khusus kepada kebutuhan mereka pada saat situasi rentan, wanita, anak-anak, penyandang cacat dan orang tua.

Selama 2013-2014, rasio kematian lalu lintas di Indonesia mengalami peningkatan menjadi 11,22 persen pada tahun 2014.

Data kecelakaan lalu lintas dicatat oleh Kepolisian RI. Data dapat dipilah berdasarkan usia, jenis kelamin, akibat kecelakaan, dan jenis kendaraan setiap tahunnya. WHO memilah indikator ini berdasarkan kematian pejalan kaki, pengendara sepeda, pengemudi kendaraan roda empat, pengendara dari kendaraan roda dua atau roda tiga, dan lainnya.

Gambar 3.10. Rasio Kematian Lalu Lintas Per 100.000 Penduduk di Indonesia, 2010-2014



Sumber : BPS dan KORLANTAS Polri dan Polda

Rasio kematian lalu lintas adalah perbandingan jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk diperoleh dari proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 (Badan Pusat Statistik). Selama tahun 2010-2014, rasio kematian lalu lintas per 100.000 penduduk di Indonesia cenderung fluktuatif. Rasio kematian lalu lintas meningkat pada tahun 2011, kemudian terus menurun hingga tahun 2013, dan meningkat kembali pada tahun 2014. Gambar 3.10 menunjukkan bahwa rasio kematian lalu lintas tertinggi terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 12 atau 13 kematian akibat kecelakaan lalu lintas dari 100.000 penduduk di Indonesia. Kemudian rasio tersebut menurun sebesar 1,67 pada tahun 2014, yaitu menjadi 11 atau 12 kematian akibat kecelakaan lalu lintas dari 100.000 penduduk Indonesia.

Kecelakaan lalu lintas merupakan isu penting di dunia. Di negara berkembang, kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab kematian yang lebih besar dibandingkan HIV/AIDS, malaria, TBC, dan penyakit pembunuh lainnya. Pembunuh global yang paling mengancam dalam lalu lintas adalah kendaraan bermotor

(Amanda, 2014). Peningkatan kematian kecelakaan lalu lintas selama tahun 2013-2014 dapat disebabkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang terus meningkat. Selain itu, kecelakaan lalu lintas juga dapat terjadi karena faktor kelalaian dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Tingginya rasio kecelakaan lalu lintas di Indonesia harus mendapat perhatian lebih. Hal tersebut dikarenakan kecelakaan juga dapat memberikan dampak pada keadaan ekonomi keluarga.

INDIKATOR 26. KONSULTASI DENGAN PENYEDIA KESEHATAN BERLISENSI DI FASILITAS KESEHATAN ATAU DALAM MASYARAKAT PER ORANG, PER TAHUN (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Akses ke pelayanan perawatan kesehatan dasar, termasuk fasilitas perawatan kebidanan darurat (*Emergency Obstetric Care/ EmOC*), diperlukan untuk mencapai target-target bidang kesehatan. Secara luas, pelayanan kesehatan dasar didefinisikan mencakup pencegahan, pengobatan, dan perawatan paliatif dari penyakit menular dan tidak menular, pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, keluarga berencana, imunisasi rutin, dan kesehatan mental. Semua elemen ini sama-sama penting untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan yang baik.

Indikator diukur dengan menghitung jumlah rata-rata konsultasi (termasuk jasa preventif dan kuratif) dengan penyedia berlisensi. Penyedia berlisensi di fasilitas kesehatan adalah semua personil terlatih terdaftar dan terintegrasi dalam suatu sistem kesehatan nasional. Diantaranya juga termasuk konsultasi dengan petugas kesehatan masyarakat (kader kesehatan masyarakat) tetapi tidak termasuk apoteker.

Indikator ini dapat mengukur target 3.8, yaitu mencapai cakupan kesehatan universal (UHC), termasuk perlindungan risiko keuangan, akses ke pelayanan kesehatan utama yang berkualitas, dan akses ke obat-obatan dan vaksin utama yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau untuk semua dan target 11.1, yaitu pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua perumahan dan layanan dasar yang layak, aman dan terjangkau, serta membenahi permukiman kumuh.

Data untuk indikator ini masih belum tersedia di Indonesia. Ketersediaan data mungkin menjadi faktor penghambat untuk menerapkan indikator ini di daerah perdesaan dan beberapa negara berpenghasilan rendah. Namun, teknologi informasi dan komunikasi modern memungkinkan untuk mengumpulkan data tersebut secara efektif dan dengan biaya rendah. Hal tersebut dikarenakan data yang sama dapat digunakan untuk menilai kinerja sistem kesehatan dan berbagai fasilitas, pengumpulan data tersebut harus dilakukan. Pengumpulan data untuk indikator ini dapat dilakukan oleh Kemenkes untuk mendapatkan gambaran mengenai ketersediaan fasilitas kesehatan sebagai rekomendasi

Data indikator 26 belum tersedia di Indonesia.

kebijakan. Indikator ini, misalnya, dapat ditambahkan pada Risfaskes dan Riskesdas. Keterbatasan lain dari indikator ini yaitu mengukur jumlah rata-rata konsultasi di seluruh populasi. Rata-rata tersebut tidak memberikan informasi tentang penduduk yang tidak dapat melakukan konsultasi.

Ukuran alternatif untuk akses ke layanan kesehatan dinyatakan dengan persentase penduduk yang memiliki jarak tempat tinggal ke tempat pelayanan dalam kilometer. Tempat pelayanan biasanya didefinisikan sebagai setiap lokasi yang terdapat penyedia berlisensi (termasuk kader kesehatan masyarakat tetapi tidak termasuk apoteker) yang menyediakan pelayanan kesehatan. Pada fasilitas EmOC, WHO mendefinisikan akses kesehatan yang layak adalah memiliki lima fasilitas kesehatan (termasuk setidaknya satu fasilitas lengkap) untuk setiap 500.000 penduduk. Kesulitan dari indikator geospasial tersebut adalah indikator tidak cukup memberikan gambaran pemanfaatan dan akses layanan di luar daerah yang mudah dijangkau oleh penduduk.

INDIKATOR 27. PERSENTASE PENDUDUK TANPA PERLINDUNGAN KEUANGAN YANG EFEKTIF UNTUK PERAWATAN KESEHATAN (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Sebuah komponen utama Cakupan Kesehatan Universal/*Universal Health Coverage* (UHC) adalah keterjangkauan dan transparansi finansial untuk pelayanan kesehatan preventif dan kuratif. Upaya untuk memberantas kemiskinan dan mempromosikan inklusi sosial harus didukung dengan murahnya biaya pelayanan kesehatan, sehingga keluarga tidak mampu juga dapat menerima pelayanan kesehatan. Untuk alasan ini, kerangka monitoring untuk SDGs harus menyertakan indikator inti pada perlindungan keuangan untuk perawatan kesehatan.

Namun, pengukuran keterjangkauan keuangan dan perlindungan untuk berbagai layanan kesehatan cenderung sulit. Indikator untuk keterjangkauan keuangan dan perlindungan membutuhkan data yang akurat dari sejumlah sumber, termasuk aturan pembiayaan kesehatan masyarakat dan survei rumah tangga. Sebaiknya terdapat ketersediaan data yang cukup di negara-negara yang melaksanakan perawatan kesehatan universal (UHC) tetapi hal ini menjadi tantangan di negara lain.

Di bawah ini dilampirkan dua pilihan terbaik untuk data mengenai indikator ini serta batasan-batasan utamanya. Keterbatasan ini dapat diatasi nantinya, tetapi untuk saat ini SDSN menyajikan *placeholder* untuk indikator ini. WHO dan *World Bank* telah bekerja sama untuk mengembangkan indikator mengenai perlindungan keuangan ini. SDSN berharap untuk dapat bekerja sama dengan mereka dan organisasi yang berminat untuk mengidentifikasi indikator yang tepat dan

Data indikator 27 belum tersedia di Indonesia.

mempromosikannya sebagai bagian dari kerangka indikator untuk SDGs.

Kedua pilihan terbaik yang tersedia untuk mendefinisikan suatu indikator utama pada perlindungan keuangan di sektor kesehatan antara lain:

1. Persentase rumah tangga yang mengalami pengeluaran kesehatan yang sangat besar (biasanya didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan bersih rumah tangga tahunan atas kebutuhan-kebutuhan hidup), dan
2. Jumlah rumah tangga yang jatuh di bawah garis kemiskinan (atau menjadi lebih miskin) karena indikator-indikator tersebut dapat disusun secara terbalik, misalnya bagian dari populasi yang tidak mengalami pengeluaran kesehatan yang sangat besar.

Laporan terakhir dari WHO dan Bank Dunia merekomendasikan kedua indikator tersebut. Ketersediaan data telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir sehingga indikator ini dapat dihitung untuk sejumlah besar negara. Namun, indikator ini tidak cukup mampu untuk mengukur kondisi umum dari rumah tangga miskin yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan sama sekali karena kendala biaya pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, indikator ini cenderung terjadinya *under-counting*. Selain itu, indikator-indikator ini tidak memberikan indikasi yang jelas dari dampak pengeluaran untuk kesehatan terhadap situasi kesehatan dan ekonomi rumah tangga.

Pada akhirnya, juga terdapat kemungkinan untuk mengevaluasi perlindungan keuangan sistem perawatan kesehatan dengan cara yang lebih sintetis, berdasarkan aturan pembiayaan publik untuk layanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan laboratorium, dan obat-obatan. Sistem dengan pembiayaan publik penuh akan mendapatkan skor tinggi; sementara sistem yang membutuhkan biaya yang tinggi akan mendapatkan skor rendah. Perhitungan sintetis yang dilakukan setiap tahun berdasarkan aturan kesehatan dapat diperiksa dan divalidasi oleh perbandingan dengan pengeluaran dari uang sendiri dan dengan pertanyaan survei (misalnya, apakah Anda dan anggota keluarga tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan atau obat-obatan karena kurangnya pendapatan keluarga?).

Indikator ini dapat mengukur tiga target yaitu sebagai berikut:

- Target 3.3 Pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit yang terbawa air, dan penyakit menular lainnya
- Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal (UHC),

termasuk perlindungan risiko keuangan, akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan akses ke obat-obatan dan vaksin utama yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau untuk semua, dan

Target 5.1 Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di mana saja

Data untuk indikator ini belum tersedia di Indonesia. Indikator ini dapat dibangun dengan menambahkan informasi terkait pada survei yang berbasis rumah tangga seperti Susenas pada keterangan kesehatan rumahtangga. Hal tersebut dapat ditentukan setelah indikator dispesifikasi.

INDIKATOR 28. PROPORSI ORANG DENGAN GANGGUAN MENTAL PARAH (PSIKOSIS, GANGGUAN AFEKTIF BIPOLAR, ATAU DEPRESI SEDANG-BERAT) YANG MENGGUNAKAN JASA

Kebutuhan akan pelayanan kesehatan mental yang komprehensif menjadikan hal tersebut harus menjadi bagian dalam perawatan kesehatan universal/*Universal Health Care (UHC)*. *The World Health Organization's Mental Health Action Plan/Rencana Aksi Organisasi Kesehatan Mental Dunia* mengusulkan sejumlah indikator kesehatan mental, termasuk indikator yang mengukur cakupan layanan sejumlah gangguan mental yang parah. Indikator ini dihitung dengan membagi jumlah kasus gangguan jiwa berat (psikosis, gangguan afektif bipolar, depresi atau sedang-berat) yang menerima pelayanan kesehatan dengan jumlah total kasus gangguan jiwa berat.

Indikator 28 digambarkan dengan proporsi cakupan pengobatan ruta dengan ART gangguan jiwa berat

Namun demikian, target dalam indikator ini masih belum ditentukan secara jelas. Selain itu, pandangan terhadap orang-orang yang menderita gangguan mental berat dapat menyebabkan kemungkinan data tidak tercakup seluruhnya. Data yang dikumpulkan dari survei dan catatan administrasi (rumah sakit) harus dibandingkan untuk mengurangi *under-counting*.

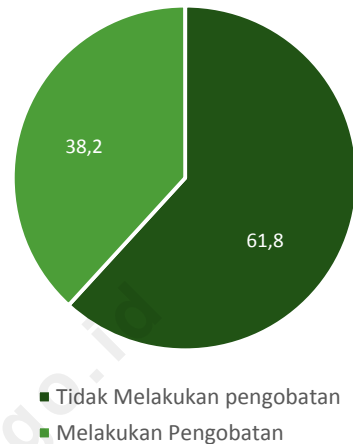
Salah satu pilihan adalah untuk mengumpulkan data ini dengan menjadikannya bagian dari survei rutin, seperti survei DHS. Atau, data kasus dapat dikumpulkan dari rumah sakit dan klinik catatan administrasi, sedangkan data untuk populasi dapat didasarkan pada tingkat prevalensi nasional atau sub-nasional. Tingkat prevalensi nasional psikosis, gangguan afektif bipolar, dan depresi sedang-berat diperkirakan setiap tahun sebagai bagian dari beban global penyakit untuk semua negara.

Indikator ini dapat mengukur target 3.4, yaitu pada tahun 2030 mengurangi angka kematian premature sepertiga dari penyakit tidak menular (NCD) melalui pencegahan dan pengobatan, dan mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan. Data

untuk indikator ini dapat diperoleh dari Riskesdas, Kemenkes. Riskesdas mengumpulkan data mengenai indikator proporsi cakupan pengobatan gangguan jiwa berat (psikosis/skizofrenia).

Gangguan jiwa berat adalah gangguan jiwa yang ditandai oleh terganggunya kemampuan menilai keadaan yang buruk. Gejala pada gangguan jiwa berat antara lain halusinasi, ilusi, waham, gangguan proses pikir, kemampuan berpikir, serta tingkah laku aneh, misalnya agresivitas atau katatonik. Gangguan jiwa berat dikenal dengan sebutan psikosis dan salah satu contoh psikosis adalah skizofrenia. Pada tahun 2013, proporsi cakupan ruta yang membawa ART gangguan jiwa berat ke fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan ada sebesar 61,8 persen. Namun demikian, masih banyak ruta yang tidak membawa ART gangguan jiwa berat ke pengobatan. Hal tersebut dikarenakan biaya kesehatan untuk pengobatan gangguan jiwa cukup besar. Dengan demikian, kejadian pemasangan terhadap pasien gangguan jiwa berat masih banyak terjadi di Indonesia. Padahal pemasangan tersebut merupakan perlakuan yang salah dan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi pasien gangguan jiwa berat.

Gambar 3.11. Proporsi Cakupan Pengobatan Rumah Tangga yang Memiliki ART dengan Gangguan Jiwa Berat di Indonesia, 2013



Sumber : Riskesdas, Kemenkes

INDIKATOR 29. TINGKAT PREVALENSI KONTRASEPSI/CPR (INDIKATOR MDG)

Tingkat prevalensi kontrasepsi didefinisikan sebagai persentase wanita usia subur (atau pasangannya) yang menggunakan kontrasepsi pada titik waktu tertentu. Perempuan usia reproduksi biasanya didefinisikan sebagai wanita berusia 15 hingga 49, namun remaja yang aktif secara seksual di bawah 15 juga harus disertakan. Peningkatan prevalensi kontrasepsi juga merupakan determinan penting untuk mengetahui perbedaan antar negara dalam kesuburan dan penurunan kesuburan yang sedang berlangsung di negara-negara berkembang.

Prevalensi kontrasepsi dipengaruhi oleh keinginan kesuburan seseorang, ketersediaan produk dan layanan berkualitas tinggi, norma-norma sosial dan nilai-nilai, tingkat pendidikan, dan faktor-faktor lain, seperti pola perkawinan dan praktik jarak-kelahiran. Indikator ini merupakan sebuah indikator kependudukan dan kesehatan, khususnya akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Tingkat penggunaan kontrasepsi memiliki efek langsung yang kuat pada tingkat fertilitas total (TFR) dan TFR terhadap tingkat pertumbuhan penduduk. Indikator ini juga berfungsi sebagai ukuran pendekatan terhadap akses layanan kesehatan reproduksi yang penting untuk memenuhi banyak target kesehatan, terutama yang berkaitan dengan target kematian anak, kesehatan ibu, HIV/AIDS, dan kesetaraan gender.

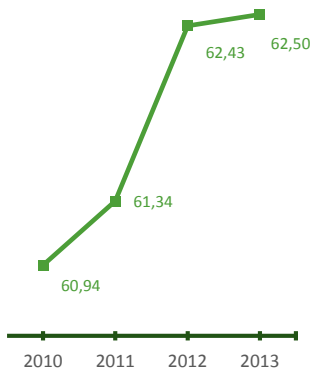
Indikator ini dapat mengukur target 3.7, yaitu pada 2030 menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan

CPR di Indonesia terus mengalami peningkatan dan sudah mencapai 62,50 persen pada tahun 2013.

pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional dan target 5.6, yaitu menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak reproduksi yang telah disepakati sesuai dengan Program Aksi ICPD dan Platform Beijing Aksi dan dokumen hasil peninjauan konferensi mereka

Di Indonesia, CPR diperoleh dari Susenas dan SDKI. Data dapat didisagregasi berdasarkan umur dan status perkawinan (kawin, cerai hidup, atau cerai mati). Data yang dikumpulkan melalui Susenas belum mencakup remaja belum menikah yang aktif secara seksual, hanya pada wanita berstatus kawin, cerai hidup, dan cerai mati saja, sedangkan SDKI dapat menggambarkan pemakaian kontrasepsi pada wanita belum kawin. Keterbatasan indikator ini diantaranya yaitu penggunaan keseluruhan yang *under-reporting* dan *under-estimate*, referensi waktu yang samar-samar, dan kurang akurat.

Gambar 3.12. Tingkat Prevalensi Kontrasepsi/*Contraceptive Prevalence Ratio (CPR)* di Indonesia, 2010-2013



Sumber : Susenas, BPS

Selama tahun 2010-2013, tingkat prevalensi kontrasepsi/*Contraceptive Prevalence Ratio (CPR)* di Indonesia terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi rata-rata sebesar 0,52 persen setiap tahunnya. Bahkan sudah lebih dari setengah pasangan usia subur (PUS) di Indonesia yang menggunakan alat kontrasepsi. Pada tahun 2014, CPR di Indonesia sebesar 62,50 persen yang berarti bahwa 62 atau 63 PUS dari 100 PUS di Indonesia sedang menggunakan alat/cara KB. Kemudian, terus meningkatnya nilai CPR tersebut menunjukkan bahwa peran KB dalam pengendalian fertilitas semakin besar. Tingginya nilai CPR tersebut juga mengindikasikan kebijakan program KB yang dilakukan pemerintah telah berhasil.

Pada laporan capaian MDGs, target MDGs untuk angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49 (semua cara) berada dalam status akan tercapai pada tahun 2015. Dengan demikian, tercapainya target SDGs pada indikator tersebut optimis tercapai dengan terus mengupayakan peningkatan pemakaian kontrasepsi pada PUS di Indonesia. Hal tersebut juga akan mendukung terjaminnya akses universal untuk pelayanan keluarga berencana.

INDIKATOR 30. PENGGUNAAN PRODUK TEMBAKAU SAAT INI (TINGKAT STANDARDISASI-UMUR)

Penggunaan tembakau merupakan penyebab utama kematian yang dapat dicegah di banyak negara maju, dan merupakan masalah yang berkembang dan menjadi penyumbang beban penyakit di negara berkembang. Indikator ini mengukur prevalensi merokok saat ini (harian, non-harian, atau sesekali) dari setiap produk tembakau, termasuk rokok, cerutu, pipa, dan lain-lain, untuk orang dewasa berusia lebih dari dan sama dengan 15 tahun. Indikator ini dikembangkan untuk memenuhi rekomendasi WHO untuk lebih menggambarkan penggunaan

produk tembakau tanpa asap (termasuk mengunyah tembakau, dan rokok elektronik). Tingkat prevalensi usia-standar penggunaan tembakau (d disesuaikan dengan metode regresi WHO) memungkinkan untuk perbandingan lintas negara dan lintas periode waktu untuk menentukan tren.

Indikator ini dapat mengukur tiga target yaitu sebagai berikut:

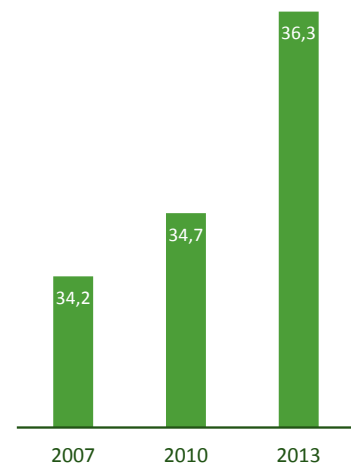
- Target 3.4 Pada tahun 2030 mengurangi angka kematian prematur sepertiga dari penyakit tidak menular (NCD) melalui pencegahan dan pengobatan, dan mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan,
- Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba narkotika dan penggunaan berbahaya alkohol, dan
- Target 3.a Memperkuat pelaksanaan Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau di semua negara sebagaimana mestinya.

Informasi perilaku penggunaan tembakau dalam Riskesdas tahun 2013 dikumpulkan dalam bentuk perilaku merokok dan perilaku penggunaan tembakau dengan mengunyah. Data tersedia sampai level kota-desa dan dapat dirinci berdasarkan karakteristik penderita seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan kuintil pendapatan. Selain itu indikator ini juga dapat dilakukan disagregasi menurut kebiasaan merokok dan mengunyah tembakau (setiap hari dan kadang-kadang).

Selama tahun 2007-2013, proporsi penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok dan mengunyah tembakau di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, proporsi penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok dan mengunyah tembakau sebesar 34,2 persen, kemudian meningkat sebesar 0,5 persen pada tahun 2010, yaitu menjadi 34,7 persen, dan meningkat lebih tajam (sebesar 1,6 persen), yaitu menjadi 36,3 persen pada tahun 2013. Peningkatan penggunaan tembakau yang terus menerus ini sangat membahayakan bagi penduduk Indonesia, tidak hanya yang merokok tetapi juga yang tidak merokok. Rokok juga memberikan dampak bagi masyarakat sekitar yang tidak merokok atau yang biasa sering disebut perokok pasif. Perilaku merokok dapat merusak kesehatan penduduk. Oleh karena itu, kebijakan mengenai perilaku merokok tidak cukup dengan pelarangan merokok di tempat publik. Pemerintah dapat mengupayakannya dengan mengurangi peredaran rokok secara bebas atau dengan meningkatkan pajak untuk industri rokok/tembakau.

Penggunaan produk tembakau digambarkan dengan proporsi penduduk yang merokok dan mengunyah tembakau.

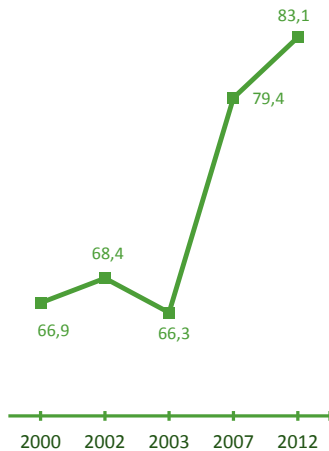
Gambar 3.13. Proporsi Penduduk Umur ≥ 15 Tahun yang Merokok dan Mengunyah Tembakau di Indonesia, 2007-2013



Sumber : Riskesdas, Kemenkes

INDIKATOR 3.1. PERSENTASE KELAHIRAN YANG DIBANTU OLEH TENAGA KESEHATAN TERLATIH (INDIKATOR MDG)

Gambar 3.14. Persentase Kelahiran yang Dibantu Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Indonesia, 2000-2012



Sumber : SDKI

Indikator ini merupakan persentase proses persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan kebidanan yang terlatih dengan tujuan mengurangi risiko kematian ibu dan bayi. Indikator ini dapat mengukur target 3.1, yaitu pada 2030 mengurangi rasio kematian ibu global menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup dan target 3.2, yaitu pada 2030 mengakhiri kematian pada bayi baru lahir dan balita.

Selama tahun 2000-2012, persentase kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih cenderung terus meningkat. Selama tahun tersebut, peningkatan terjadi sebesar rata-rata 1,35 persen setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2012, sebagian besar kelahiran telah dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih, yaitu sebesar 83,1 persen. Dengan demikian, kejadian kematian ibu dan bayi dapat diminimalisasi. Tidak hanya itu, kesehatan ibu dan bayi juga akan lebih terjamin dengan adanya tenaga kesehatan terlatih dalam proses kelahiran.

Indikator ini juga telah menjadi target dalam MDGs dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu. Target MDGs di tahun 2015 untuk proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih adalah akan tercapai. Dengan demikian, tren dalam Gambar 3.13 dan upaya meningkatkan akses pelayanan tenaga terlatih untuk menolong kelahiran yang terus menerus akan memberikan optimisme tercapainya target SDGs, terkait kematian ibu dan bayi baru lahir.

INDIKATOR 3.2. CAKUPAN PELAYANAN ANTENATAL (SEDIKITNYA SATU KALI KUNJUNGAN DAN SETIDAKNYA EMPAT KALI KUNJUNGAN) (INDIKATOR MDG)

Indikator ini merupakan persentase wanita usia 15-49 tahun dengan kelahiran hidup pada periode waktu tertentu yang menerima perawatan antenatal, yang disediakan oleh tenaga kesehatan terampil, setidaknya sekali selama kehamilan mereka dan setiap empat kali atau lebih selama kehamilan mereka. Indikator ini dapat mengukur target 3.1, yaitu pada 2030 mengurangi rasio kematian ibu global menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup dan target 3.2, yaitu pada 2030 mengakhiri kematian pada bayi baru lahir dan balita.

Indonesia menganjurkan agar ibu hamil melakukan paling sedikit empat kali kunjungan untuk pemeriksaan selama kehamilan menurut jadwal 1-1-2 yaitu: paling sedikit sekali kunjungan dalam trimester pertama, paling sedikit sekali kunjungan pada trimester kedua, dan paling sedikit dua kali kunjungan dalam trimester ketiga. Sumber data indikator ini adalah SDKI dan dapat dirinci berdasarkan jumlah kunjungan

pemeriksaan, daerah (perkotaan dan perdesaan), dan umur kandungan saat kunjungan.

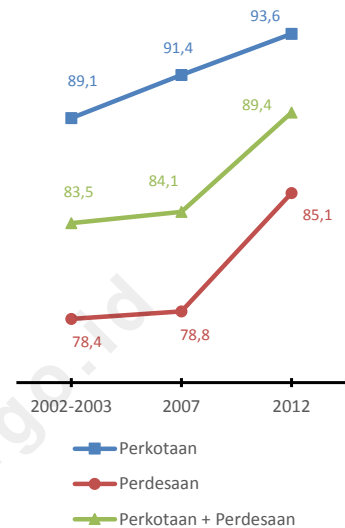
Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil. Selama tahun 2002-2012, cakupan pelayanan antenatal (setidaknya 1 dan 4 kali kunjungan) di Indonesia terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut juga terjadi jika dilihat berdasarkan tipe daerah (perkotaan dan perdesaan). Pelayanan antenatal yang meningkat menunjukkan bahwa kesehatan ibu hamil dan atau janin lebih terjamin. Dengan pelayanan tersebut, faktor risiko dapat dideteksi dini serta komplikasi kehamilan dapat dicegah dan ditangani dini. Akan tetapi, cakupan pelayanan antenatal di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan di daerah perkotaan. Pada tahun 2012, cakupan antenatal di daerah perkotaan sebesar 93,6 persen sedangkan cakupan antenatal di daerah perdesaan sebesar 85,1 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesehatan ibu hamil dan janin di daerah perkotaan lebih terlindungi dibandingkan di daerah perdesaan.

Dalam MDGs, indikator ini digunakan untuk mengukur target meningkatkan kesehatan ibu. Status indikator cakupan pelayanan antenatal (1 kunjungan atau 4 kunjungan) dalam MDGs adalah akan tercapai di tahun 2015. Dengan demikian, target SDGs untuk mengurangi rasio kematian ibu dan mengakhiri kematian pada bayi juga optimis akan tercapai dengan tetap mempertahankan peningkatan pelayanan antenatal dari tahun ke tahun. Tidak hanya itu, upaya peningkatan pelayanan antenatal di daerah perdesaan harus lebih besar.

INDIKATOR 3.3. CAKUPAN PELAYANAN PASCA PERSALINAN (SATU KUNJUNGAN) (INDIKATOR MDG)

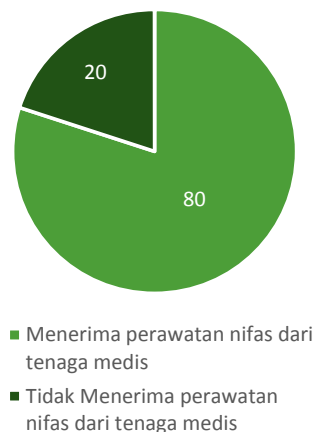
Hampir sama dengan cakupan perawatan antenatal, indikator ini merupakan persentase wanita usia 15-49 dengan kelahiran hidup pada periode waktu tertentu yang menerima perawatan pasca persalinan (biasanya untuk ibu dan anak) oleh tenaga kesehatan terlatih setidaknya sekali setelah kelahiran anak mereka dan penyedia lain, empat kali atau lebih setelah melahirkan. Pelayanan pasca persalinan atau perawatan nifas memberikan kesempatan untuk mengobati komplikasi yang timbul dalam persalinan dan untuk memberikan informasi penting kepada ibu tentang cara merawat dirinya dan bayinya. Masa nifas didefinisikan sebagai waktu antara keluarnya ari-ari (plasenta) sampai 42 hari (6 minggu) setelah persalinan. Untuk ketersediaan informasi ini, indikator mengenai cakupan pelayanan pasca persalinan dapat diperoleh dari SDKI. SDKI mengumpulkan informasi wanita berusia 15-49 tahun yang melahirkan pada lima tahun sebelum survei dan menerima perawatan nifas dalam dua hari pasca persalinan. Indikator ini dapat mengukur target 3.1, yaitu pada 2030 mengurangi

Gambar 3.15. Persentase Cakupan Pelayanan Antenatal, Setidaknya 1 dan 4 Kali Kunjungan di Indonesia, 2002-2012



Sumber : SDKI

Gambar 3.16. Persentase Wanita (15-49 tahun) yang Menerima Perawatan Nifas dari Tenaga Medis Pasca Melahirkan di Indonesia, 2012



Sumber : SDKI, BPS

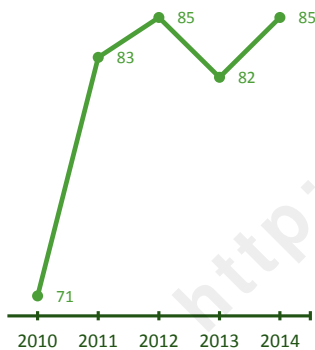
Informasi pelayanan pasca persalinan digambarkan dengan perawatan nifas dari tenaga medis pasca persalinan.

rasio kematian ibu global menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup dan target 3.2, yaitu pada 2030 mengakhiri kematian pada bayi baru lahir dan balita.

Masa nifas adalah waktu antara keluarnya plasenta sampai 42 hari (6 minggu) setelah persalinan. Perawatan nifas merupakan perawatan paling dini setelah melahirkan. Apalagi dua hari pertama setelah melahirkan adalah masa krusial karena kematian ibu dan neonatal paling banyak terjadi dalam dua hari pertama pasca melahirkan. Pada tahun 2012, 80 persen ibu telah mendapatkan perawatan nifas untuk bayi yang dilahirkan pada periode kritis (1-2 hari setelah melahirkan). Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar ibu telah tercakup dalam perawatan nifas yang penting bagi kesehatan ibu dan bayi.

INDIKATOR 3.4. CAKUPAN SUPLEMEN ASAM FOLAT-BESI UNTUK IBU HAMIL (DALAM PERSEN)

Gambar 3.17. Persentase Cakupan Ibu Hamil yang Mendapatkan 90 TTD (Tablet Tambah Darah) di Indonesia (dalam persen), 2010-2014



Sumber : Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan

Cakupan suplemen asam folat-besi untuk ibu hamil merupakan persentase ibu hamil yang secara teratur meminum dosis suplemen asam folat-besi yang dianjurkan. Indikator ini dapat mengukur target 3.1, yaitu pada 2030 mengurangi rasio kematian ibu global menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini tersedia di Indonesia berupa persentase pemberian Fe3 (zat besi) atau dikenal sebagai TTD (tablet tambah darah) kepada ibu hamil. Data dikumpulkan Kemenkes tiap tahun dan sampai level kabupaten/kota.

Selama tahun 2010-2014, cakupan ibu hamil di Indonesia yang mendapatkan 90 TTD cenderung terus meningkat walaupun sempat menurun pada tahun 2013. Peningkatan tersebut juga merupakan indikasi dari peningkatan pelayanan antenatal bagi ibu hamil. Pada tahun 2014, sebagian besar ibu hamil di Indonesia telah mendapatkan 90 TTD, yaitu sebesar 85 persen. Namun demikian, besarnya persentase cakupan ibu hamil yang mendapatkan TTD bukan berarti tingginya pula konsumsi obat tersebut pada ibu hamil. Kepatuhan ibu hamil untuk meminum TTD yang telah diberikan masih rendah (Syarifah, 2014). Padahal TTD dapat menurunkan resiko melahirkan prematur dan berat badan lahir rendah pada bayi.

INDIKATOR 3.5. INSIDEN DIARE PADA BALITA

Insiden diare pada balita di Indonesia sudah jarang ditemukan, yaitu sebesar 6,7 persen pada tahun 2013.

Diare didefinisikan sebagai Buang Air Besar (BAB) dengan konsistensi tinja cair sebanyak tiga kali atau lebih dalam jangka waktu kurang dari dan sama dengan 24 jam. Indikator ini dapat mengukur target 3.2, yaitu pada 2030 mengakhiri kematian pada bayi baru lahir dan balita dan target 3.3, yaitu pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit yang terbawa air, dan penyakit menular lainnya.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) mengumpulkan informasi insiden diare pada balita sebagai dasar rumusan kebijakan. Data bisa dipilah menurut kelompok umur balita, jenis kelamin, wilayah kota-desa, dan pendapatan rata.

Diare merupakan penyebab kematian bagi balita yang imunitasnya masih rendah, dan jika tidak segera diatasi akan mengakibatkan dehidrasi yang berujung pada kematian. Pada tahun 2013, insiden diare pada balita di Indonesia berdasarkan diagnosis dan gejala terdapat sebesar 6,7 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa insiden diare pada balita Indonesia sudah cukup sedikit. Dengan demikian, upaya penurunan kematian balita akibat diare sudah cukup berhasil.

INDIKATOR 3.6. PERSENTASE ANAK BERUMUR 1 TAHUN YANG DIIMUNISASI CAMPAK (INDIKATOR MDG)

Indikator ini merupakan persentase anak di bawah satu tahun yang telah menerima setidaknya satu dosis yang mengandung vaksin campak. Indikator ini dapat mengukur target 3.3, yaitu pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit yang terbawa air, dan penyakit menular lainnya. Data indikator ini dikumpulkan melalui Susenas dan SDKI.

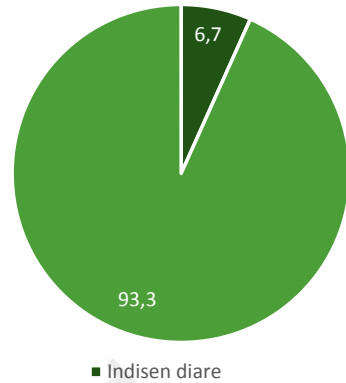
Selama tahun 2010-2013, persentase anak umur 1 tahun yang diimunisasi campak di Indonesia sangat fluktuatif. Pada tahun 2011, persentase anak umur 1 tahun yang diimunisasi campak menurun sebesar 1,91 persen, kemudian meningkat sebesar 2,98 persen pada tahun 2012, dan menurun kembali sebesar 0,07 persen pada tahun 2013. Tren indikator tersebut yang fluktuatif juga terjadi di daerah perdesaan. Akan tetapi, tren untuk daerah perkotaan cenderung terus menurun selama tahun 2010-2013. Di sisi lain, persentase anak umur 1 tahun yang diimunisasi campak di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan.

Indikator ini juga menjadi ukuran dalam target MDGs untuk menurunkan kematian anak. Dalam MDGs, status target untuk indikator persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak akan tercapai pada tahun 2015. Dengan demikian, target SDGs juga optimis akan tercapai dengan tetap mengupayakan kemudahan akses imunisasi campak bagi anak usia 1 tahun, sehingga penyakit yang menular seperti campak dapat dicegah.

INDIKATOR 3.7. PERSENTASE IBU HAMIL YANG POSITIF HIV DAN MENERIMA PMTCT (PENCEGAHAN PENULARAN HIV DARI IBU KE ANAK/PPIA)

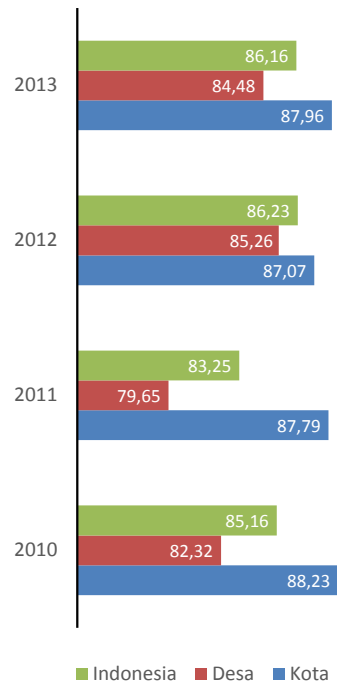
Indikator ini melacak persentase ibu hamil yang mengidap HIV pada suatu resimen untuk pencegahan penularan HIV

Gambar 3.18. Insiden Diare Pada Balita Menurut Diagnosis Atau Gejala di Indonesia (dalam persen), 2013



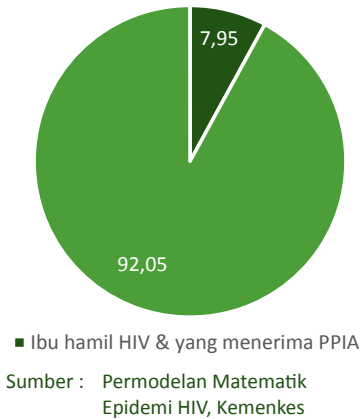
Sumber : Riskesdas, Kemenkes

Gambar 3.19. Persentase Anak Berumur 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Indonesia, 2010-2013



Sumber : Susenas, BPS

Gambar 3.20. Persentase Ibu Hamil yang Positif HIV dan Menerima PPIA di Indonesia, 2012

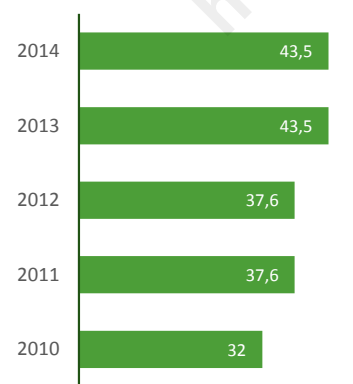


dari ibu ke anak (prevention of mother-to-child HIV transmission/ PMTCT). Dengan tidak adanya intervensi, 15-45 persen ibu hamil yang mengidap HIV menularkan virus kepada anak-anak mereka. Angka anak tertular HIV dari ibu dapat dikurangi sampai di bawah lima persen dengan adanya intervensi (PPIA). Indikator ini dapat mengukur target 3.3, yaitu pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit yang terbawa air, dan penyakit menular lainnya. Data mengenai ibu hamil yang positif HIV dan menerima PPIA (Pencegahan Penurunan HIV dari Ibu ke Anak) dikumpulkan oleh Kemenkes tiap tahun.

HIV dapat ditularkan ibu yang positif virus tersebut ke anaknya selama masa kehamilan, saat persalinan, dan menyusui. Pada tahun 2012, persentase ibu hamil yang positif HIV dan menerima PPIA masih sangat kecil, yaitu sebesar 7,95 persen. Kecilnya persentase tersebut mengindikasikan kemungkinan penularan HIV dari ibu ke anak semakin besar. Padahal PPIA dapat menjadi intervensi yang sangat efektif sebagai pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Dengan demikian, pemerintah perlu bekerja keras untuk meningkatkan pelayanan PPIA agar lebih optimal dan terjangkau di semua wilayah. Peningkatan pelayanan PPIA juga perlu diintegrasikan ke dalam kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), keluarga berencana (KB), serta kesehatan remaja (PKPR) di setiap jenjang fasilitas layanan kesehatan dasar dan rujukan.

INDIKATOR 3.8. PENGGUNAAN KONDOM PADA HUBUNGAN SEKS BERISIKO TINGGI TERAKHIR (INDIKATOR MDG)

Gambar 3.21. Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir di Indonesia, 2010-2014



Sumber : Survei Terpadu Biologi dan Perilaku (STBP), Kemenkes

Indikator ini digambarkan dalam persentase laki-laki dan perempuan (15-24 tahun) yang menggunakan kondom pada saat berhubungan seks terakhir dengan pasangan yang tidak tetap dalam 12 bulan terakhir. Indikator ini dapat mengukur target 3.3, yaitu pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit yang terbawa air, dan penyakit menular lainnya.

Populasi berisiko tinggi tertular/menularkan HIV adalah penduduk perempuan dan laki-laki dewasa yang merupakan Pengguna Napza Suntik (Penasun), Wanita Penjaja Seks (WPS), Waria, Pelanggan Penjaja Seks, dan Laki-laki seks dengan laki-laki (LSL), serta kelompok yang berpotensi berperilaku risiko (pelajar SLTA). Selama tahun 2010-2014 penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi meningkat perlahan. Penggunaan kondom pada hubungan seksual berisiko tinggi merupakan upaya preventif mengendalikan laju penularan HIV/AIDS. Akan tetapi penggunaan kondom pada populasi berisiko masih rendah. Pada tahun 2013, penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi mencapai 43,5 persen. Rendahnya kesadaran

penggunaan kondom pada populasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah harus memberikan pengetahuan akan pentingnya penggunaan kondom pada populasi beresiko saat berhubungan seks.

Indikator ini merupakan salah satu indikator dalam target MDGs yang mengukur tujuan memerangi HIV dan AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Status indikator penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir dalam target MDGs adalah akan tercapai (meningkat) pada tahun 2015. Dengan demikian, target SDGs juga akan tercapai dengan terus mengupayakan peningkatan penggunaan kondom pada populasi beresiko.

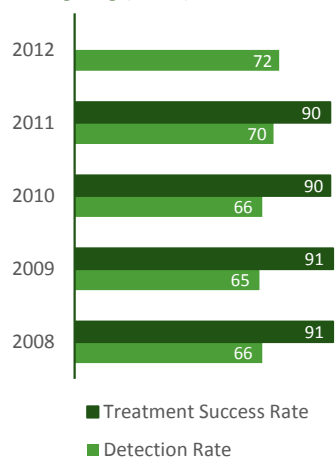
INDIKATOR 3.9. PERSENTASE KASUS TUBERKULOSIS YANG TERDETEKSI DAN SEMBUH DI BAWAH PENGOBATAN SINGKAT DARI HASIL PENGAMATAN LANGSUNG (DOTS) (INDIKATOR MDG)

Indikator ini merupakan persentase kasus tuberkulosis (TB) yang terdeteksi dan sembuh, juga dikenal sebagai tingkat keberhasilan pengobatan TB, adalah jumlah kasus TB baru pada tahun tertentu yang sembuh atau menyelesaikan pengobatan penuh dari *Directly Observed Treatment Short* (DOTS). Indikator ini dapat mengukur target 3.3, yaitu pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit yang terbawa air, dan penyakit menular lainnya. Data mengenai kasus tuberkulosis yang terdeteksi dan sembuh di bawah pengobatan singkat dari hasil pengamatan langsung (DOTS) dikumpulkan oleh Kemenkes setiap tahun.

Selama tahun 2008-2012, *Case Detection Rate* di Indonesia mengalami peningkatan. *Case Detection Rate* (CDR) adalah persentase pasien baru tuberkulosis paru BTA positif yang ditemukan dibanding jumlah pasien baru TB Paru BTA positif yang diperkirakan dalam satu wilayah. Pada tahun 2012, CDR di Indonesia sudah cukup tinggi, yaitu mencapai 72 persen. Namun angka tersebut masih dapat ditingkatkan lagi. Peningkatan CDR dapat mendorong peningkatan pelayanan pemerintah dalam penyembuhan/pengobatan TB. Upaya penemuan kasus TB ini dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kinerja pencatatan dan pelaporan di wilayah dan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terlibat layanan DOTS.

Sementara itu, selama tahun 2008-2011, *Treatment Success Rate* di Indonesia cenderung stabil. *Treatment Success Rate* (TSR) adalah angka yang menunjukkan persentase pasien baru TB Paru terkonfirmasi bakteriologis yang menyelesaikan pengobatan (baik sembuh maupun pengobatan lengkap) di antara pasien baru TB paru terkonfirmasi bakteriologis yang tercatat. TSR di Indonesia sudah sangat tinggi. Pada tahun 2011, TSR di Indonesia telah mencapai 90 persen. Tingginya TSR

Gambar 3.22. Persentase kasus tuberkulosis yang terdeteksi dan sembuh di bawah pengobatan singkat dari hasil pengamatan langsung (DOTS), 2008-2012



Sumber : MDGs, UNSTAT

menunjukkan adanya kepatuhan dari pasien, kinerja yang baik dari Faktor Pengawas Menelan Obat (PMO), serta kualitas dan penyediaan obat anti TB yang memadai.

Kedua indikator ini juga merupakan indikator dalam MDGs. Status target untuk indikator proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi dalam program DOTS dalam MDGs adalah sudah tercapai pada tahun 2015. Sama halnya dengan indikator proporsi kasus TB yang diobati dan sembuh dalam program DOTS berada dalam status sudah tercapai pada tahun 2015. Dengan demikian, target SDGs untuk mengurangi epidemi tuberkulosis pada tahun 2030 juga optimis akan tercapai dengan terus meningkatkan pelayanan kesehatan terkait penyakit TB.

INDIKATOR 3.10. PERSENTASE BALITA DENGAN DEMAM YANG DIOBATI DENGAN OBAT ANTI-MALARIA YANG TEPAT (INDIKATOR MDG)

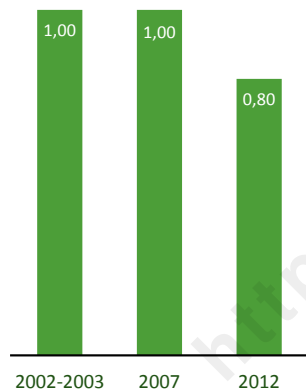
Indikator ini merupakan persentase anak usia 0-59 bulan yang menderita sakit dengan demam dua minggu sebelum survei dan yang menerima obat anti malaria selama survei dilakukan. Indikator ini dapat mengukur target 3.2, yaitu pada 2030 mengakhiri kematian pada bayi baru lahir dan balita dan target 3.3, yaitu pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit yang terbawa air, dan penyakit menular lainnya. Data mengenai informasi balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria dapat diperoleh dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) oleh Badan Pusat Statistik.

Indonesia merupakan negara endemis malaria, dimana malaria merupakan penyakit yang menyebabkan malnutrisi berat dan morbiditas pada anak dan balita. Selama tahun 2002-2012, persentase balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Obat anti malaria diberikan kepada balita yang sedang demam dengan maksud mencegah penyakit malaria menyerang balita tersebut. Akan tetapi, cakupan balita anak yang demam dan diberi obat anti malaria masih sangat rendah, yaitu sebesar 0,8 persen pada tahun 2012. Dengan begitu, pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan pemberian obat anti malaria kepada balita yang demam. Hal tersebut didukung dengan status target MDGs untuk indikator ini adalah perlunya perhatian khusus untuk mencapai target di tahun 2015.

INDIKATOR 3.11. PERSENTASE PENDUDUK DI DAERAH ENDEMIS MALARIA YANG TIDUR DI BAWAH KELAMBU INSEKTISIDA (INDIKATOR MDG YANG DIMODIFIKASI).

Indikator ini merupakan persentase orang yang tidur di bawah kelambu berinsektisida pada malam sebelum survei, dibedakan berdasarkan usia. Indikator ini dapat mengukur

Gambar 3.23. Persentase Balita dengan Demam yang Diobati dengan Obat Anti-Malaria yang Tepat di Indonesia, 2002-2012



Sumber : SDKI

target 3.3, yaitu pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit yang terbawa air, dan penyakit menular lainnya. Informasi mengenai penduduk yang tidur di bawah kelambu insektisida dapat diperoleh dari Riskesdas, Kementerian Kesehatan. Namun, ketersediaan data untuk indikator ini belum tersedia. Data yang diperoleh dari Riskesdas harus diintegrasikan dengan data daerah yang termasuk ke dalam endemis malaria.

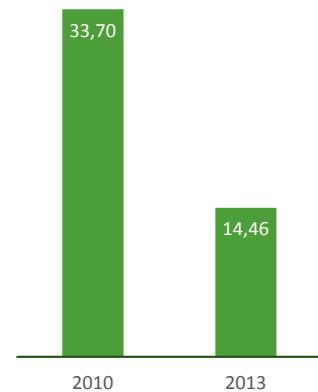
Data untuk indikator 3.11 belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 3.12. PERSENTASE KASUS MALARIA YANG MENERIMA TERAPI ANTIMALARIA LINI PERTAMA SESUAI DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL YANG TELAH DIKONFIRMASI

Indikator ini merupakan persentase kasus positif malaria yang diobati dengan obat yang tepat. Indikator ini dapat mengukur target 3.3, yaitu pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit yang terbawa air, dan penyakit menular lainnya. Lini pertama program pengobatan malaria adalah dengan *Artemisin Combination Therapy* (ACT) yang dikumpulkan melalui Riskesdas. Pengobatan yang tepat pada Riskesdas adalah pengobatan yang efektif yaitu harus memenuhi tiga kategori yaitu jenis obat yang diperoleh adalah ACT, obat tersebut diperoleh penderita maksimum 24 jam setelah sakit, dan dosis obat diperoleh untuk 3 hari dan diminum seluruhnya.

Proporsi penderita malaria yang melakukan pengobatan efektif dengan ACT di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, yaitu dari 33,7 persen pada tahun 2010 menjadi 14,46 persen pada tahun 2013. Padahal ACT merupakan salah satu upaya untuk mengurangi resistensi pengobatan malaria terhadap obat lama. WHO (2006) memberikan rekomendasi penggunaan derivat artemisinin salah satunya untuk meningkatkan efikasi dan menghambat resistensi terhadap derivat artemisinin harus dikombinasi dengan obat malaria lain, dengan pengecualian. Pengobatan ACT untuk pasien malaria sangat tepat, karena artemisinin dapat menurunkan *biomass parasite* dengan cepat, menghilangkan simptom dengan cepat, efektif terhadap *parasite resisten multi drug*, dan kemampuan lainnya.

Gambar 3.24. Proporsi Penderita Malaria yang Melakukan Pengobatan Efektif dengan ACT di Indonesia, 2010 dan 2013

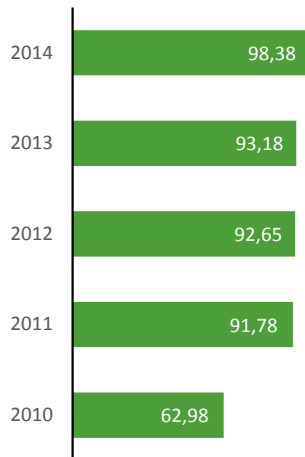


Sumber : Riskesdas, Kemenkes

INDIKATOR 3.13. PERSENTASE KASUS DUGAAN MALARIA YANG MENERIMA TES PARASITOLOGI

Di daerah endemik malaria, semua orang dengan demam yang mencari perawatan medis harus menjalani tes diagnostik sebelum pengobatan untuk malaria. Alat tes

Gambar 3.25. Persentase Kasus Dugaan Malaria yang Menerima Tes Parasitologi di Indonesia, 2010-2014



Sumber : Profil Kesehatan Indonesia, Kemenkes

Data untuk indikator 3.14 belum tersedia di Indonesia.

Data untuk indikator 3.15 di-proxy-kan dengan indikator jumlah kasus baru kusta (tipe MB dan PB) dan filariasis.

diagnostik yang cepat dan terjangkau memungkinkan diagnosa definitif untuk semua kasus malaria. Indikator ini dapat mengukur target 3.3, yaitu pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit yang terbawa air, dan penyakit menular lainnya. Data tersedia oleh Kemenkes setiap tahunnya.

Tes parasitologi dalam gambar 3.25 adalah pemeriksaan darah, seperti pemeriksaan mikroskopik dan *rapid diagnostic test*. Selama tahun 2010-2013, persentase kasus dugaan malaria yang menerima tes parasitologi terus mengalami peningkatan, bahkan peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011 sangat tajam. Pada tahun 2014, persentase kasus dugaan malaria yang menerima tes parasitologi terdapat sebesar 98,38 persen. Tingginya persentase tersebut menunjukkan bahwa keakuratan diagnosa penyakit malaria semakin besar. Diagnosa yang cepat dan tepat akan memberikan kesembuhan kepada pasien malaria.

INDIKATOR 3.14. PERSENTASE WANITA HAMIL YANG MENERIMA MALARIA//PREGNANT TREATMENT (IPT) DI DAERAH ENDEMIK

Indikator ini merupakan malaria pada kehamilan mempengaruhi ibu dan janin. Pengobatan pencegahan intermiten pada kehamilan (IPT) secara efektif dapat mencegah malaria pada ibu hamil; semua wanita hamil di daerah dengan transmisi malaria yang rendah sampai tinggi harus menerima IPT. Indikator ini dapat mengukur target 3.3, yaitu pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit yang terbawa air, dan penyakit menular lainnya. Data mengenai indikator ini masih belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 3.15. ANGKA KESEMBUHAN PENYAKIT TROPIS TERABAIKAN//NEGLECTED TROPICAL DISEASE (NTD)

Sangat penting bagi miliaran orang yang terkena penyakit tropis terabaikan (NTD) setiap tahun untuk mendapatkan perawatan yang memadai untuk menyembuhkan penyakit ini. Cara yang pasti untuk mengukur angka ini masih perlu didefinisikan. Indikator ini dapat mengukur target 3.3, yaitu pada tahun 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit yang terbawa air, dan penyakit menular lainnya. Indikator angka kesembuhan penyakit tropis terabaikan belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR PROXY: JUMLAH KASUS BARU KUSTA (TIPE MB DAN PB) DAN FILARIASIS DI INDONESIA

Kesembuhan penyakit tropis terabaikan didekati dengan indikator proxy, yaitu jumlah penderita baru kusta Pausi Bacillary (PB), baru kusta Multi Bacillary (MB), dan filariasis. Data dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan.

Selama tahun 2010-2014, jumlah kasus baru kusta (tipe MB dan PB) di Indonesia cenderung fluktuatif. Akan tetapi, jumlah klinis filariasis di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Penurunan jumlah kasus baru kusta terjadi selama tahun 2011-2013 dan merupakan salah satu hasil upaya pemerintah. Kemudian selama tahun 2013-2014, jumlah kasus baru kusta meningkat sebesar 1,00 persen. Pemerintah telah melakukan upaya proses sosialisasi terhadap pengenalan kusta sejak dini. Sementara itu, peningkatan jumlah kasus klinis filariasis tidak terlepas dari kurangnya peran dan kesadaran masyarakat dalam mencegah penularan penyakit filariasis. Oleh karena itu, penyuluhan merupakan program yang sangat penting dalam program mengurangi/eleminasi filariasis.

INDIKATOR 3.16. TINGKAT KEJADIAN DAN KEMATIAN TERKAIT DENGAN HEPATITIS.

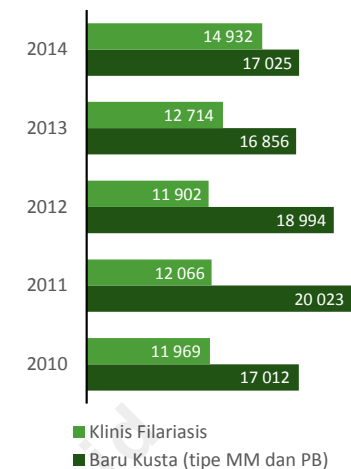
Indikator ini merupakan angka prevalensi dan mortalitas untuk berbagai jenis hepatitis (A, B, E, dan lain-lain). Indikator ini belum digunakan untuk mengukur target manapun di SDGs. Data hepatitis yang tercatat hanya data prevalensi hepatitis yang dikumpulkan melalui Riskesdas. Data tersedia menurut kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan, dan kuintil pendapatan, serta wilayah kota-desa.

Prevalensi hepatitis menurut diagnosis atau gejala di Indonesia meningkat sebesar dua kali lipat, yaitu sebesar 0,6 persen pada tahun 2007 menjadi 1,2 persen pada tahun 2013. Peningkatan prevalensi hepatitis ini dapat disebabkan oleh pelayanan atau pengobatan pasien hepatitis yang kurang optimal. Kemudian penyakit tersebut tertular ke lingkungan sekitar. Penularan hepatitis terjadi melalui makanan, air, dan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan terkait penyakit hepatitis.

INDIKATOR 3.17. PERSENTASE WANITA DENGAN SCREENING/PEMERIKSAAN KANKER SERVIKS

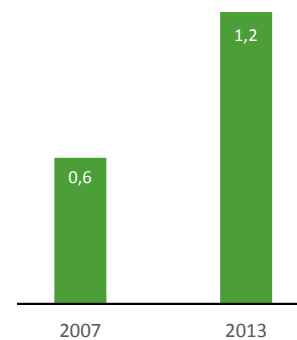
Indikator ini merupakan persentase perempuan yang menerima pemeriksaan untuk kanker serviks. Kerangka Monitoring Global di WHO untuk PTM merekomendasikan indikator ini. Indikator ini dapat mengukur target 3.4, yaitu pada tahun 2030 mengurangi angka kematian pre-mature sepertiga

Gambar 3.26. Jumlah Kasus Baru Kusta (Tipe MB dan PB) dan Filariasis di Indonesia, 2010-2014



Sumber : Profil Kesehatan Indonesia, Kemenkes

Gambar 3.27. Prevalensi Hepatitis Menurut Diagnosis Atau Gejala di Indonesia (dalam persen), 2007 dan 2013



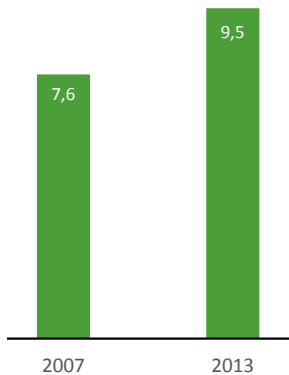
Sumber : Riskesdas, Kemenkes

Data untuk indikator 3.17 belum tersedia di Indonesia.

dari penyakit tidak menular (NCD) melalui pencegahan dan pengobatan, dan mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan. Namun, ketersediaan data untuk indikator ini belum dicakup oleh Kementerian Kesehatan secara lengkap.

INDIKATOR 3.18. PERSENTASE PENDERITA HIPERTENSI YANG DIDIAGNOSA DAN MENERIMA PENGOBATAN

Gambar 3.28. Prevalensi Penyakit Hipertensi (≥ 18 Tahun) Berdasarkan Diagnosis dan Riwayat Minum Obat Hipertensi di Indonesia, 2007 dan 2013



Sumber : Riskesdas, Kemenkes

Kerangka Monitoring Global WHO untuk PTM menghimbau pengurangan sebesar 25 persen pada hipertensi (tekanan darah yang meningkat); untuk mencapai tujuan ini sebaiknya dilakukan pelacakan jumlah orang yang didiagnosa dengan hipertensi dan orang yang menerima pengobatan. Indikator ini belum digunakan untuk mengukur target manapun di SDGs. Prevalensi hipertensi diperoleh melalui Riskesdas dengan pengukuran tekanan darah pada penduduk berumur 18 tahun ke atas. Prevalensi didapat melalui jawaban pernah atau tidak pernah didiagnosis tenaga kesehatan dan apakah sedang meminum obat hipertensi sendiri.

Prevalensi penyakit hipertensi pada penduduk usia ≥ 18 tahun berdasarkan diagnosis dan riwayat minum obat hipertensi di Indonesia mengalami peningkatan, yaitu sebesar 7,6 persen pada tahun 2007 menjadi 9,5 persen pada tahun 2013. Peningkatan hipertensi ini dapat terjadi karena besarnya kejadian obesitas pada penduduk umur lebih dari 18 tahun. Penduduk yang obesitas memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena hipertensi. Untuk menghindari penyakit hipertensi, penduduk harus menjaga pola makan yang sehat.

INDIKATOR 3.19. PENGGUNAAN ALKOHOL YANG BERBAHAYA

WHO merekomendasikan pengurangan penggunaan berbahaya dari alkohol sebagai bagian dari Kerangka Monitoring Global untuk PTM. Dua dimensi yang direkomendasikan WHO terkait penggunaan alkohol berlebihan/penyalahgunaan alkohol adalah jumlah konsumsi alkohol (dicatat dan tidak tercatat) dalam satu tahun kalender alkohol murni dalam liter (untuk menilai konsumsi jangka panjang), dan prevalensi usia-standar kebiasaan minum alkohol berat atau *Heavy Episodic Drinking* (HED) di kalangan remaja dan orang dewasa. HED didefinisikan sebagai konsumsi 60 atau lebih gram alkohol pada satu kesempatan setidaknya sekali dalam 30 hari terakhir.

Indikator ini memberikan informasi mengenai pola konsumsi alkohol di negara tertentu, dan menyoroti populasi yang memiliki risiko lebih tinggi akibat alkohol, seperti keracunan alkohol dan kecelakaan mobil, serta komplikasi kesehatan kronis, seperti kanker hati dan hipertensi. Indikator ini digunakan untuk menjawab target 3.5, yaitu memperkuat pencegahan dan

Data indikator ini dapat diperoleh dari Riskesdas, Kementerian Kesehatan. Namun Riskesdas tahun 2010 dan 2013 tidak mempublikasikan hasil indikator ini.

pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba, narkotika, dan penggunaan berbahaya alkohol.

Pengumpulan data mengenai kebiasaan meminum alkohol dilakukan pada Riskesdas 2007. Pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah apakah minum minuman beralkohol dalam 12 bulan terakhir. Untuk penduduk yang menjawab “ya” ditanyakan dalam 1 bulan terakhir, termasuk frekuensi, jenis minuman dan rata-rata satuan minuman standar. Namun, Riskesdas tahun 2010 dan 2013 tidak mempublikasikan hasil indikator ini.

INDIKATOR 3.20. ANGKA HARAPAN HIDUP SEHAT SAAT LAHIR

Indikator ini mengukur rata-rata jumlah tahun dimana seseorang dapat berharap untuk hidup dalam kesehatan penuh dengan memperhatikan tahun hidup dengan keadaan kurang sehat karena penyakit dan/atau cedera. Indikator ini dapat mengukur Target 3.8, yaitu mencapai cakupan kesehatan universal (UHC), termasuk perlindungan risiko keuangan, akses ke layanan kesehatan yang berkualitas penting, dan akses yang aman, efektif, berkualitas, dan obat-obatan penting dengan harga terjangkau dan vaksin untuk semua.

Indikator ini belum tersedia di Indonesia, hanya ada indikator Angka Harapan Hidup saat lahir yang tidak dapat memberikan informasi tentang taraf dan kualitas hidup dari penduduk di suatu wilayah. Penghitungan indikator angka harapan hidup sehat ini memungkinkan dilakukan oleh BPS karena BPS telah mengumpulkan beberapa variabel terkait mortalitas dan morbiditas seperti keluhan kesehatan dan rata-rata lama sakit yang dikumpulkan melalui Susenas. Kejelasan konsep dan rumus perhitungan perlu ditetapkan dan didiskusikan untuk dapat menyajikan data ini sehingga dapat menjawab target 3.8 SDGs.

Indikator 3.20 belum tersedia di Indonesia, hanya ada indikator Angka Harapan Hidup saat lahir yang tidak dapat memberikan informasi tentang taraf dan kualitas hidup dari penduduk di suatu wilayah.

INDIKATOR 3.21. MASA TUNGGU OPERASI ELEKTIF

Indikator ini mengukur berapa lama pasien harus menunggu untuk memiliki prosedur elektif. Masa tunggu dapat membantu mengukur ketersediaan layanan kesehatan. Operasi katarak adalah salah satu contoh dari prosedur elektif yang bisa diukur. Ketersediaan indikator ini belum tersedia di Indonesia. Padahal melalui indikator ini target 3.4 dan 3.8 dapat terlihat capaiannya. Target 3.4, yaitu pada tahun 2030 mengurangi angka kematian prematur sepertiga dari penyakit tidak menular (NCD) melalui pencegahan dan pengobatan, dan mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan; dan target 3.8, mencapai cakupan kesehatan universal (UHC), termasuk perlindungan risiko keuangan, akses ke layanan kesehatan yang berkualitas

penting, dan akses yang aman, efektif, berkualitas, dan obat-obatan penting dengan harga terjangkau dan vaksin untuk semua

INDIKATOR 3.22. PREVALENSI KETIDAKAKTIFAN FISIK

Persentase penduduk yang tidak mencapai standar aktivitas fisik rekomendasi dari WHO. Data dikumpulkan oleh Riskesdas mengenai frekuensi beraktivitas fisik dalam seminggu terakhir untuk penduduk umur 10 tahun ke atas. Aktivitas fisik berat adalah kegiatan yang secara terus menerus melakukan kegiatan fisik minimal 10 menit sampai meningkatnya denyut nadi dan napas lebih cepat dari biasanya (misalnya menimba air, mendaki gunung, lari cepat, menebang pohon, mencangkul dan lainnya) selama minimal tiga hari dalam satu minggu dan total waktu beraktivitas ≥ 1500 MET *minute*. MET *minute* aktivitas fisik berat adalah lamanya waktu (menit) melakukan aktivitas dalam satu minggu dikalikan bobot sebesar 8 kalori. Aktivitas fisik sedang apabila melakukan aktivitas sedang (menyapu, mengepel dan lainnya) minimal lima hari atau lebih dengan total lamanya beraktivitas 150 menit dalam seminggu. Selain dari dua kondisi tersebut termasuk ke dalam kategori aktivitas fisik ringan.

Dalam Riskesdas 2013, kriteria aktivitas fisik aktif adalah individu yang melakukan aktivitas fisik berat atau sedang, atau keduanya, sedangkan kriteria kurang aktif adalah individu yang tidak melakukan aktivitas fisik sedang maupun berat. Oleh karena itu, indikator 3.22 didekati dengan Kriteria aktivitas kurang aktif. Selain dari Riskesdas, Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan juga mengumpulkan data ini.

Keberadaan indikator 3.22 dapat digunakan untuk menjawab target dalam SDGs yaitu mengukur target 3.4, pada tahun 2030 mengurangi angka kematian prematur sepertiga dari penyakit tidak menular (NCD) melalui pencegahan dan pengobatan, dan mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan.

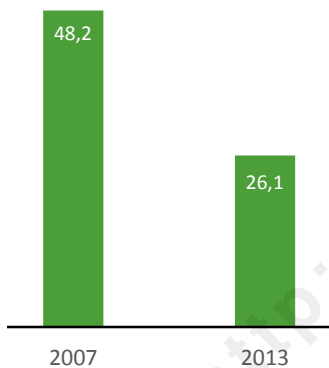
Gambar 3.29 memperlihatkan bahwa terjadi penurunan prevalensi kurang aktivitas fisik penduduk 10 tahun ke atas di Indonesia dari 48,2 pada tahun 2007 menjadi 26,1 pada tahun 2013. Dengan adanya penurunan ini, diharapkan di tahun-tahun selanjutnya indikator ini juga dapat memberikan hasil yang positif sehingga target 3.4 dalam SDGs dapat tercapai di tahun 2030.

INDIKATOR 3.23. FRAKSI KALORI DARI LEMAK JENUH DAN GULA TAMBAHAN (PERSEN)

Indikator ini merupakan indikator pola makan yang sehat, yaitu persentase dari asupan kalori yang berasal dari lemak jenuh dan gula tambahan. Indikator ini dapat digunakan untuk

Data indikator 3.22 didekati dengan prevalensi kurang aktivitas fisik yang bersumber dari Riskesdas, Kementerian Kesehatan.

Gambar 3.29. Prevalensi Kurang Aktivitas Fisik Penduduk 10 Tahun keatas di Indonesia, 2007 dan 2013



Sumber : Riskesdas, Kemenkes

Di Indonesia data untuk indikator 3.23 belum tersedia.

mengukur target 3.4 yaitu pada tahun 2030, mengurangi angka kematian prematur sepertiga dari penyakit tidak menular (NCD) melalui pencegahan dan pengobatan, dan memajukan kesehatan mental dan kesejahteraan. Indikator ini dapat dihitung dengan menggunakan data Susenas tetapi BPS belum menganalisis indikator ini.

INDIKATOR 3.24. RATA-RATA POPULASI BERUSIA STANDAR DENGAN KONSUMSI GARAM (NATRIUM Klorida) PER HARI DALAM GRAM PADA ORANG BERUSIA 18 TAHUN KE ATAS

Indikator ini merupakan indikator jumlah garam yang dikonsumsi per hari. Konsumsi garam berlebihan dapat mendorong hipertensi dan penyakit tidak menular lainnya. Jumlah konsumsi garam dapat diperoleh dengan mengolah data Susenas, tetapi BPS belum menganalisis indikator ini. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 3.4 yaitu pada tahun 2030, mengurangi angka kematian prematur sepertiga dari penyakit tidak menular (NCD) melalui pencegahan dan pengobatan, dan memajukan kesehatan mental dan kesejahteraan.

Di Indonesia data untuk indikator 3.24 belum tersedia.

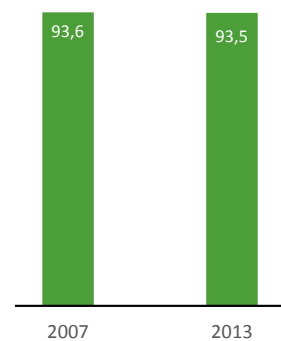
INDIKATOR 3.25. PREVALENSI ORANG (USIA 18+ TAHUN) YANG MENGONSUMSI KURANG DARI LIMA PORSI (400 GRAM) BUAH DAN SAYUR PER HARI

Konsumsi buah-buahan dan sayuran sangat penting baik untuk menjaga kesehatan maupun untuk menjaga berat badan yang ideal. Indikator ini digunakan untuk mengetahui persentase orang yang kekurangan makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Indikator ini dapat mengukur target 3.4 yaitu pada tahun 2030 dapat mengurangi angka kematian prematur sepertiga dari penyakit tidak menular (NCD) melalui pencegahan dan pengobatan, dan mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan.

Data dari indikator ini dapat diperoleh dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Karena keterbatasan data, konsep yang digunakan pada indikator ini mengikuti konsep Riskesdas, yaitu menggunakan orang usia 10+ tahun, berbeda dengan konsep indikator SDSN (usia 18+tahun).

Pada tahun 2007, penduduk umur 10 tahun ke atas di Indonesia yang kurang makan buah dan sayur mencapai 93,6 persen, dan pada tahun 2013 persentasenya tidak mengalami perubahan jauh, hanya turun 0,01 persen. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi buah dan sayur penduduk di Indonesia sudah lumayan tercukupi. Konsumsi buah dan sayuran yang tercukupi akan menghasilkan bangsa yang sehat.

Gambar 3.30. Prevalensi Kurang Makan Buah dan Sayur Penduduk 10 tahun ke atas di Indonesia, 2007 dan 2013



Sumber : Riskesdas, Kemenkes

INDIKATOR 3.26. PERSENTASE PERUBAHAN KONSUMSI DAGING MERAH PER KAPITA TAHUN DASAR 2015

Di Indonesia data untuk indikator 3.26 belum tersedia.

Konsumsi yang berlebihan terhadap daging merah merupakan faktor risiko berbagai penyakit tidak menular. Indikator ini melacak perubahan konsumsi daging merah per kapita, dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi yang berlebihan di beberapa negara. Indikator ini memungkinkan diukur di Indonesia melalui Susenas tetapi belum dapat dilakukan karena data susenas 2015 sebagai acuan tahun dasar belum siap tersedia. Indikator ini berfungsi untuk menjawab target 3.4, yaitu pada tahun 2030 mengurangi angka kematian prematur sepertiga dari penyakit tidak menular (NCD) melalui pencegahan dan pengobatan, dan mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan.

INDIKATOR 3.27. PERSENTASE USIA TERSTANDAR (TERHADAP DISTRIBUSI USIA POPULASI DUNIA) PENDERITA DIABETES (SEBAIKNYA BERDASARKAN HBA1C), HIPERTENSI, PENYAKIT KARDIOVASKULAR, DAN PENYAKIT PERNAPASAN KRONIS

Di Indonesia data untuk indikator 3.27 belum tersedia.

Selain melacak tingkat kematian dari penyakit tidak menular, pelacakan tingkat prevalensi sangat penting untuk dilakukan. Saat orang yang menderita PTM menerima perlakuan yang lebih baik dan hidup lebih lama, tingkat kematian mungkin tidak lagi menjadi ukuran yang memadai untuk menangani penyakit ini. Indikator ini akan membantu menilai pengelolaanj angka panjang dari kondisi ini.

Penyakit tidak menular (PTM) menurut Riskesdas merupakan penyakit kronis yang tidak ditularkan dari orang ke orang. Data PTM dalam Riskesdas 2013 meliputi asma, penyakit paruobstruksi kronis (PPOK), kanker, DM, hipertiroid, hipertensi, jantung koroner, gagal jantung, stroke, gagal ginjal kronis, batu ginjal, penyakit sendi/rematik. Data penyakit asma/mengi/bengek dan kanker diambil dari responden semua umur, PPOK dari umur ≥ 30 tahun, DM, hipertiroid, hipertensi/tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, penyakit gagal jantung, penyakit ginjal, penyakit sendi/rematik/encok, dan stroke ditanyakan pada responden umur ≥ 15 tahun.

Data prevalensi penyakit ditentukan berdasarkan hasil wawancara berupa gabungan kasus penyakit yang pernah didiagnosis dokter/tenaga kesehatan atau kasus yang mempunyai riwayat gejala PTM (berdasarkan diagnosis atau gejala). Prevalensi kanker, gagal ginjal kronis, dan batu ginjal ditentukan berdasarkan informasi pernah didiagnosis dokter saja. Untuk hipertensi, selain berdasarkan hasil wawancara, prevalensi juga disampaikan berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah. Data yang tersedia dapat didisagregasi sampai level kota-desa dan dapat dirinci berdasarkan karakteristik penderita seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan,

dan pendapatan.

Indikator ini digunakan untuk mengukur salah satu target SDGs yaitu target 3.4 pada tahun 2030 mengurangi sepertiga angka kematian prematur dari penyakit tidak menular (NCD) melalui pencegahan dan pengobatan, dan mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan.

INDIKATOR 3.28. KEMATIAN DISEBABKAN POLUSI UDARA DALAM RUANGAN (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini melacak kematian dari penyakit disebabkan oleh polusi udara rumah tangga (sering disebabkan oleh memasak dengan bahan bakar padat) termasuk pneumonia, stroke, penyakit jantung, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), dan kanker paru-paru. Manfaat dari indikator ini dapat mengukur target 3.4 SDGs, pada tahun 2030 mengurangi angka kematian prematur sepertiga dari penyakit tidak menular (NCD) melalui pencegahan dan pengobatan, dan mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan. Ketersediaan data untuk indikator ini belum tersedia di Indonesia.

Di Indonesia data untuk indikator 3.28 belum tersedia.

INDIKATOR 3.29. PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN SESUAI PERSYARATAN KECUKUPAN PELAYANAN TERTENTU

Indikator ini digunakan untuk melihat perkembangan proporsi fasilitas kesehatan yang menawarkan layanan khusus dan kapasitas untuk menyediakan layanan tersebut. Indikator ini diukur melalui *WHO Service Availability and Readiness Assessment* untuk melihat staf, fasilitas, perlengkapan, kemampuan diagnosis, dan obat-obat yang perlu serta barang-barang keperluan lainnya. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 3.8 yaitu mencapai cakupan kesehatan universal (UHC), termasuk perlindungan risiko keuangan, akses ke pelayanan kesehatan utama yang berkualitas, dan akses ke obat-obatan dan vaksin utama yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau untuk semua.

Di Indonesia data untuk indikator 3.29 belum tersedia.

INDIKATOR 3.30. PERSENTASE PENDUDUK DENGAN AKSES KE OBAT-OBATAN PENTING DENGAN HARGA TERJANGKAU DAN AKSES KOMODITAS SECARA BERKELANJUTAN

Indikator ini mengukur persentase penduduk yang memiliki akses fisik dan keuangan yang dapat diandalkan untuk obat-obatan esensial (misalnya vaksin, antibiotik, anti-retroviral) dan komoditas (peralatan non-farmasi dan perlengkapan). Pengukuran akan akses fisik dan keuangan untuk obat-obatan belum tersedia dan terukur di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai pengganti, ketersediaan data dapat didekati dengan data

Indikator 3.30 didekati dengan Persentase Puskesmas menurut Ketersediaan Obat Umum, Obat Gigi, Obat/Alat KB, obat khusus Puskesmas PONED, dan Alat KIT Puskesmas Keliling.

puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau oleh penduduk. Untuk mengetahui perkembangan akses dari sisi ketersediaan fasilitas, Riset Fasilitas Kesehatan (Risfaskes) dari Kementerian Kesehatan dapat memberi informasi mengenai persentase Puskesmas menurut ketersediaan obat umum, obat gigi, obat/alat KB, obat khusus Puskesmas PONED, vaksin, dan alat kesehatan dalam dan luar gedung.

Ketersediaan indikator ini digunakan untuk melihat capaian target 3.b SDGs dan target 3.c, yaitu mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat-obatan untuk penyakit menular dan tidak menular yang terutama memengaruhi negara-negara berkembang, menyediakan akses ke obat-obatan penting dengan harga terjangkau dan vaksin, sesuai dengan Deklarasi Doha yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan ketentuan penuh dalam perjanjian TRIPS mengenai fleksibilitas untuk melindungi kesehatan masyarakat dan, khususnya, menyediakan akses ke obat-obatan untuk semua (target 3.b); serta mencapai cakupan kesehatan universal (UHC), termasuk perlindungan risiko keuangan, akses ke pelayanan kesehatan utama yang berkualitas, dan akses ke obat-obatan dan vaksin utama yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau untuk semua (target 3.c).

INDIKATOR PROXY: PERSENTASE PUSKESMAS MENURUT KETERSEDIAAN OBAT UMUM, OBAT GIGI, OBAT/ALAT KB, OBAT KHUSUS PUSKESMAS PONED, DAN ALAT KIT PUSKESMAS KELILING

Kondisi ketersediaan obat dan alat KIT di puskesmas masih minim kelengkapannya, rata-rata kelengkapan obat dan alat KIT di setiap puskesmas kurang dari 40 persen lengkap.

Berdasarkan Tabel 3.1, secara umum kondisi ketersediaan obat dan alat KIT di puskesmas masih minim kelengkapannya, rata-rata kelengkapan obat dan alat KIT di setiap puskesmas kurang dari 40 persen lengkap. Ketersediaan obat umum terlihat 60-79 persen lengkap tersedia di 65,9 persen puskesmas. Sementara untuk Obat Gigi, Obat/Alat KB, PONED dan Alat KIT puskesmas keliling ketersediaannya masih minim Tabel 3.1. Persentase Puskesmas Menurut Ketersediaan Obat dan Alat KIT Kesehatan, 2011

Ketersediaan	Obat Umum	Obat Gigi	Obat/Alat KB	PONED	Alat KIT Puskesmas Keliling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
>80 % lengkap	19,9	21	8,2	0,6	0,7
60-79% lengkap	65,9	15,4	6,9	1,5	1,2
40-59% lengkap	13	12	22,5	5,4	2
20 - 39% lengkap	0,7	11	36,9	15,7	5,2
<20% lengkap	0,5	40,6	25,5	76,8	91

Sumber : Risfaskes, Kementerian Kesehatan

(<20 persen lengkap) di lebih dari setengah jumlah seluruh puskesmas. Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan

dasar berfungsi dalam memberikan akses ke pengobatan dengan harga terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Melihat kondisi ketersediaan obat dan alat KIT puskesmas yang masih minim kelengkapannya membuat ketercapaian target 3.b dan target 3.c menjadi suatu tantangan besar bagi Indonesia. Pemerintah dan pihak terkait perlu lebih memerhatikan pelayanan dasar kesehatan sebagai akses utama untuk mendapatkan obat-obatan, agar 15 tahun mendatang Indonesia dapat menyediakan akses ke obat-obatan penting dengan harga terjangkau (target 3.b) dan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas untuk semua (target 3.c).

INDIKATOR 3.31. PERSENTASE FASILITAS PERAWATAN KESEHATAN YANG BARU DIBANGUN SESUAI DENGAN KODE DAN STANDAR BANGUNAN

Indikator ini mengukur apakah fasilitas kesehatan baru sesuai dengan standar nasional untuk kesehatan dan keselamatan manusia, serta sesuai dengan standar untuk menahan bencana alam (banjir, gempa bumi, dan topan), yang merupakan komponen kunci dari kesiapan terhadap bencana. Indikator ini digunakan untuk melihat capaian cakupan kesehatan universal (UHC), termasuk perlindungan risiko keuangan, akses ke pelayanan kesehatan utama yang berkualitas, dan akses ke obat-obatan dan vaksin utama yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau untuk semua (target 3.8). Saat ini kesediaan indikator ini belum tersedia di Indonesia.

Data untuk indikator 3.31 belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 3.32. PENGELUARAN PEMERINTAH DAN SWASTA UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PADA KESEHATAN (PERSEN TERHADAP PNB)

Indikator ini menelusuri mobilisasi sumber daya pemerintah dan swasta untuk penelitian dan pengembangan pada kesehatan sebagai bagian dari Produk Nasional Bruto (PNB). Penelitian dan pengembangan kesehatan bertujuan untuk memberikan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengetahuan lain yang diperlukan untuk menunjang pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal (Samsudrajat, 2011). Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan biaya.

Indikator 3.32 didekati dengan indikator Persentase Pengeluaran Pemerintah dan Swasta untuk Kesehatan terhadap PDB.

Indikator ini dapat memantau ketercapaian target-target SDGs berikut :

Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat-obatan untuk penyakit menular dan tidak menular yang terutama memengaruhi negara-negara berkembang, menyediakan akses ke obat-obatan penting dengan harga terjangkau dan vaksin, sesuai dengan Deklarasi Doha yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan

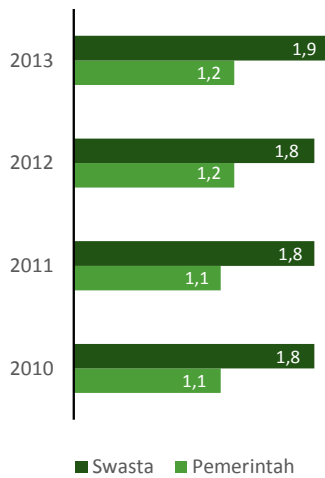
Persentase pengeluaran pemerintah maupun swasta untuk kesehatan tergolong masih kecil, tidak sampai 2 persen dari produk domestik bruto (tahun 2010-2013).

ketentuan penuh dalam perjanjian TRIPS mengenai fleksibilitas untuk melindungi kesehatan masyarakat dan, khususnya, menyediakan akses ke obat-obatan untuk semua.

Target 3.c Meningkatkan secara substansial pembiayaan dan rekrutmen kesehatan, pengembangan dan pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara-negara berkembang, terutama di LDCs dan SIDS

Target 3.d Memperkuat kapasitas semua negara, terutama negara-negara berkembang, untuk peringatan dini, pengurangan risiko, dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.

Gambar 3.31. Persentase Pengeluaran Pemerintah dan Swasta untuk Kesehatan terhadap PDB, 2010-2013



Sumber : Worldbank

Pengeluaran pemerintah yang rutin didata tidak menyajikan pengeluaran litbang terpisah sehingga indikator ini tidak tersedia datanya. Namun, untuk dapat tetap melihat ketercapaian ketiga target SDGs di atas indikator dapat didekati dengan persentase pengeluaran pemerintah dan swasta untuk kesehatan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang diperoleh dari Bank Dunia.

INDIKATOR PROXY: PERSENTASE PENGELUARAN PEMERINTAH DAN SWASTA UNTUK KESEHATAN TERHADAP PDB

Selama 2010 hingga 2013 besaran proporsi pengeluaran pemerintah dan swasta untuk kesehatan mengalami peningkatan (Gambar 3.31). Meskipun mengalami peningkatan, persentase pengeluaran pemerintah maupun swasta untuk kesehatan tergolong masih kecil, tidak sampai 2 persen dari produk domestik bruto. Padahal, peningkatan layanan kesehatan dasar dan penelitian serta pengembangan bidang kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Redaksi Kata Data, 2015). Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan terlihat lebih kecil dibandingkan pengeluaran swasta.

INDIKATOR 3.33. RASIO TENAGA KESEHATAN TERHADAP PENDUDUK (ORTHOPAEDI, BIDAN PERAWAT, PERAWAT, PEKERJA KESEHATAN MASYARAKAT, PENGASUH EMOC)

Indikator ini menghitung rasio keseluruhan tenaga kesehatan profesional dan terlatih untuk melayani keluhan kesehatan penduduk. WHO saat ini hanya menghitung rasio dokter, perawat, dan bidan, tetapi Tenaga Kesehatan Masyarakat (kader kesehatan masyarakat) tidak dimasukkan dalam perhitungan. Padahal kader kesehatan masyarakat perlu dimasukkan dalam perhitungan dengan pertimbangan spesifikasi yang relevan.

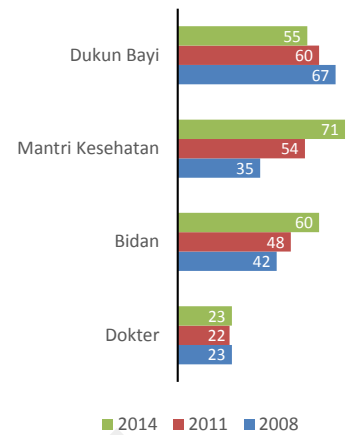
Data rasio tenaga kesehatan diperoleh melalui Pendataan Potensi Desa (Podes) berupa jumlah tenaga kesehatan yang meliputi dokter, bidan, tenaga kesehatan lain, dan dukun bayi.

Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk digunakan untuk menjawab target 3.8, yaitu mencapai cakupan kesehatan universal/*Universal Health Coverage (UHC)*, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses ke pelayanan kesehatan utama yang berkualitas, dan akses ke obat-obatan dan vaksin utama yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau untuk semua; dan target 3.c, yaitu meningkatkan secara substansial pembiayaan dan rekrutmen kesehatan, pengembangan dan pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara-negara berkembang, terutama di LDCs dan SIDS.

Data rasio tenaga kesehatan dapat diperoleh melalui Pendataan Potensi Desa (Podes) berupa jumlah tenaga kesehatan yang meliputi dokter, bidan, tenaga kesehatan lain, dan dukun bayi. Data pada podes dapat tersaji hingga level wilayah terkecil desa/kelurahan, namun tidak dapat didisagregasi menurut jenis kelamin tenaga kesehatan karena data dikumpulkan agregat pada unit desa. Selain Podes, Riset Fasilitas Kesehatan (Risfaskes) juga memberikan informasi mengenai penyusunan indikator ini berdasarkan fasilitas kesehatannya (RS Pemerintah dan Puskesmas). Tenaga kesehatan yang tercakup pada Risfaskes lebih lengkap dari Podes yang meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, bidan, perawat, tenaga farmasi, kesehatan masyarakat, keterampilan fisik, keteknisian medis, dan tenaga gizi. Namun, dalam publikasi ini data yang tersedia dan akan digunakan adalah data yang bersumber dari Podes.

Gambar 3.32 memperlihatkan peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan mantri kesehatan) terhadap 100.000 penduduk Indonesia selama 2008-2014. Peningkatan tenaga kesehatan yang cukup signifikan berimplikasi kepada semakin menurunnya jumlah dukun bayi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam perbaikan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat berupa penyediaan tenaga kesehatan yang terdidik dan terlatih memperlihatkan kemajuan yang positif. Melihat capaian yang bagus dari indikator ini, selama 15 tahun mendatang Indonesia yakin bisa mencapai *Universal Health Coverage (UHC)* dan meningkatkan secara substansial pembiayaan dan rekrutmen kesehatan, pengembangan dan pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan sesuai target 3.8 dan 3.c SDGs.

Gambar 3.32. Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk



Sumber : Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015

INDIKATOR 3.34. PERSENTASE PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI BERUSIA 15-49 YANG MELAPORKAN SIKAP DISKRIMINATIF TERHADAP PENDERITA HIV

Indikator ini digunakan untuk mengukur pandangan negatif dan diskriminasi terhadap penderita HIV. Epidemi HIV-AIDS telah memberikan rasa takut, cemas, dan prasangka terhadap orang yang hidup dengan HIV sehingga memunculkan stigma yang luas dan diskriminasi terhadap penderita HIV. Pengurangan stigma dan diskriminasi merupakan faktor penting

Indikator 3.34 didekati dengan persentase sikap menerima terhadap penderita HIV/AIDS.

dalam pencegahan, manajemen dan pengendalian epidemi HIV. Sebagai indikator untuk pengendalian epidemi HIV, indikator ini dapat digunakan untuk mengukur Target 3.3 SDGs, yaitu pada 2030 mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit yang dibawa air, dan penyakit menular lainnya.

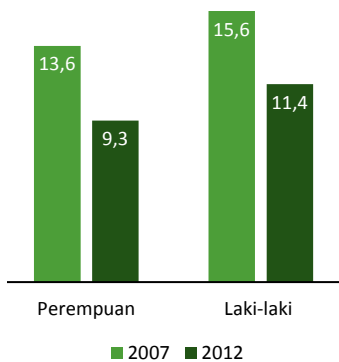
INDIKATOR PROXY: PERSENTASE SIKAP MENERIMA TERHADAP PENDERITA HIV/AIDS

Di Indonesia data untuk mengukur indikator ini dapat ditemukan pada SDKI berupa sikap menerima terhadap penderita HIV/AIDS. Data tersaji hingga level provinsi dan dapat didisagregasi berdasarkan jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, daerah tempat tinggal, dan kuartil kekayaan. Sikap menerima terhadap penderita HIV/AIDS diukur dengan empat indikator sikap responden, yaitu :

1. Bersedia merawat anggota keluarga yang terinfeksi virus AIDS di rumah,
2. Mau membeli sayuran segar dari penjual yang terinfeksi virus AIDS,
3. Guru wanita yang terinfeksi virus AIDS dan tidak sakit diperbolehkan terus mengajar,
4. Tidak akan merahasiakan anggota keluarga yang terinfeksi virus AIDS.

Gambar 3.33 memperlihatkan sikap menerima penduduk usia 15-54 tahun terhadap penderita HIV/AIDS berdasarkan empat indikator sikap menurut jenis kelamin. Dari tahun 2007 ke 2012, tampak terjadi penurunan persentase sikap penerimaan penduduk usia 15-54 terhadap penderita HIV, baik itu dari sisi perempuan dan laki-laki. Penurunan yang cukup signifikan sebesar 4 persen secara tidak langsung menunjukkan bahwa pencegahan, manajemen, dan pengendalian epidemi HIV telah menunjukkan kemajuan. Jika hal ini terus dipertahankan hingga 15 tahun kedepan dengan kondisi data yang terus menurun secara konsisten, maka pada 2030 Indonesia optimis dapat mengakhiri epidemi AIDS dan penyakit menular lainnya.

Gambar 3.33. Persentase Sikap Menerima Terhadap Orang yang Tinggal dengan HIV/AIDS berdasarkan Empat Indikator Sikap menurut Jenis Kelamin



Sumber : SDKI

INDIKATOR 3.35 : ANGKA LAHIR MATI/KEMATIAN JANIN (STILLBIRTH RATE)

Angka Lahir Mati/Kematian Janin didefinisikan sebagai bayi yang lahir tanpa tanda-tanda kehidupan pada atau setelah usia kehamilan 28 minggu. Indikator ini digunakan untuk melihat banyaknya bayi yang lahir mati selama persalinan. Sebagai indikator pengukur kesehatan, angka lahir mati dapat dicegah dengan akses ke pelayanan persalinan yang berkualitas. Indikator ini belum digunakan untuk mengukur target manapun di SDGs.

Ketersediaan data diperoleh dari *World Health Organization* (WHO) melalui *Global Health Observatory Data Repository*

Indikator 3.35 didekati dengan indikator Angka Kematian Perinatal / *Perinatal Mortality Rate* (PMR)

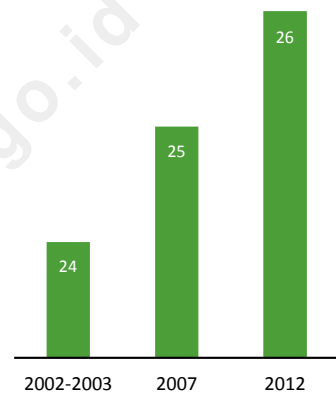
(GHO Data). Meskipun tidak digunakan untuk menjawab target manapun, keberadaan indikator ini penting dalam menggambarkan keadaan kesehatan masyarakat terutama kesehatan ibu hamil dan bayi (Budiarto & Anggraeni, 2003). Data bersumber dari WHO ditemukan hanya data tahun 2009. Berdasarkan data WHO, ada sebesar 15 kasus kematian janin yang dilahirkan pada kelahiran 28 minggu atau lebih dari 1.000 kelahiran hidup dan lahir mati pada tahun 2009.

INDIKATOR PROXY: ANGKA KEMATIAN PERINATAL / PERINATAL MORTALITY RATE (PMR)

Selain *stillbirth rate* dari WHO, Indonesia juga memiliki PMR sebagai ukuran untuk melihat keadaan kesehatan masyarakat yang bersumber dari SDKI. Data dapat didisagregasi menurut usia ibu, jarak kehamilan, daerah tempat tinggal, pendidikan ibu, dan kuartil pendapatan. Angka kematian perinatal/PMR adalah jumlah kematian janin yang dilahirkan pada usia kehamilan berumur 28 minggu atau lebih ditambah kematian bayi yang berumur kurang dari 7 hari yang dicatat dalam 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama (Budiarto & Anggraeni, 2003). Walaupun memiliki lingkup yang lebih luas dari definisi kematian janin dari data GHO, indikator ini sangat mendekati *stillbirth rate* untuk menjawab keadaan kesehatan ibu hamil dan bayi serta pelayanan persalinan.

Secara nasional, angka kematian perinatal mengalami peningkatan selama 2002/2003-2012 (Gambar 3.33). Hal ini mengindikasikan bahwa keadaan kesehatan ibu hamil dan bayi Indonesia mengalami penurunan kualitas. Selain itu, peningkatan angka ini juga memberikan indikasi bahwa pelayanan persalinan yang ada di masyarakat kurang optimal dalam memberikan pelayanannya. Kondisi terakhir tahun 2012 memperlihatkan bahwa ada sebanyak 26 janin yang meninggal dari 1.000 kelahiran di Indonesia.

Gambar 3.34. Angka Kematian Perinatal



Sumber : SDKI

**MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN
YANG ADIL DAN INKLUSIF SERTA
MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR
SEUMUR HIDUP UNTUK SEMUA**

**4 QUALITY
EDUCATION**



- INDIKATOR 31. PERSENTASE ANAK (36-59 BULAN) YANG MENERIMA SETIDAKNYA SATU TAHUN DARI PROGRAM PENDIDIKAN PRA-DASAR YANG BERKUALITAS
- INDIKATOR 32. INDEKS PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI
- INDIKATOR 33. ANGKA KELULUSAN PENDIDIKAN DASAR UNTUK ANAK PEREMPUAN DAN ANAK LAKI-LAKI
- INDIKATOR 34. PERSENTASE ANAK PEREMPUAN DAN ANAK LAKI-LAKI YANG MENGUASAI BERBAGAI KETERAMPILAN DASAR, TERMASUK KEMAMPUAN DALAM MEMBACA DAN KETERAMPILAN MENDASAR DALAM MATEMATIKA PADA AKHIR SIKLUS SEKOLAH DASAR (BERDASARKAN TOLAK UKUR NASIONAL YANG DIBENTUK SECARA KREDIBEL) [INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN]
- INDIKATOR 35. ANGKA KELULUSAN SEKOLAH MENENGAH UNTUK ANAK PEREMPUAN DAN ANAK LAKI-LAKI
- INDIKATOR 36. PERSENTASE ANAK PEREMPUAN DAN ANAK LAKI-LAKI YANG MENCAPAI KECAKAPAN DI BERBAGAI HASIL BELAJAR, TERMASUK DALAM MATEMATIKA PADA AKHIR SIKLUS SEKOLAH MENENGAH. [INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN]
- INDIKATOR 37. ANGKA PARTISIPASI PERGURUAN TINGGI BAGI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI

INDIKATOR 4.1-4.11...

TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG ADIL DAN INKLUSIF SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEUMUR HIDUP UNTUK SEMUA

INDIKATOR 31. PERSENTASE ANAK (36-59 BULAN) YANG MENERIMA SETIDAKNYA SATU TAHUN DARI PROGRAM PENDIDIKAN PRA-DASAR YANG BERKUALITAS

Indikator ini untuk mengukur persentase anak-anak kelompok usia 36-59 bulan yang terdaftar dalam program anak usia dini. Program didefinisikan cukup luas mulai dari perawatan/pengasuhan privat atau berkelompok sampai program pra-sekolah yang formal. Pendidikan anak usia dini bermanfaat bagi semua anak, tidak peduli latar belakang ekonomi mereka.

Indikator 31 belum tersedia tetapi bisa didekati dengan persentase anak yang mengikuti pendidikan pra sekolah (usia 3-5 tahun) menggunakan data anak yang mengikuti pendidikan pra sekolah mencakup anggota rumah tangga usia 0-6 tahun berdasarkan hasil Susenas mulai tahun 2011 sampai tahun 2014.

Pengembangan potensi anak di bawah usia 5 tahun melalui akses ke program dan kebijakan pengembangan anak usia dini yang berkualitas memiliki efek yang konsisten dan positif bagi perkembangan anak. Dalam jangka pendek, anak-anak memiliki keterampilan kognitif awal seperti keterampilan membaca dan berhitung. Manfaat jangka panjang dapat dilihat dalam kehidupan bermasyarakat yang berefek positif seperti berkurangnya kejahatan, mengurangi kehamilan dini, dan meningkatkan pendapatan. Pendidikan anak usia dini bermanfaat bagi semua anak, tidak peduli latar belakang ekonomi mereka.

Mendidik anak sejak dini bukan sekedar menjadi tugas orangtua semata, akan tetapi perlu melibatkan masyarakat umum. Karena pada usia ini anak dengan mudah menyerap berbagai informasi melalui obyek yang dilihat dan diamati. Pelajaran yang diberikan pada sistem pendidikan pra sekolah juga tidak hanya melalui perkataan saja, namun justru lebih mementingkan pada bentuk-bentuk permainan edukatif dan kandungan moral yang tinggi.

Indikator 31 ini dapat digunakan untuk mengukur target-target SDGs seperti;

Target 4.2: Pada tahun 2030 memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses perkembangan anak usia dini yang berkualitas, perawatan dan pendidikan anak usia dini sehingga mereka siap untuk mendapatkan pendidikan utama

Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama pada semua tingkat pendidikan

Pada tahun 2014, tingkat partisipasi anak usia 3 sampai 5 tahun yang mengikuti pendidikan pra sekolah mencapai 97,19 persen.

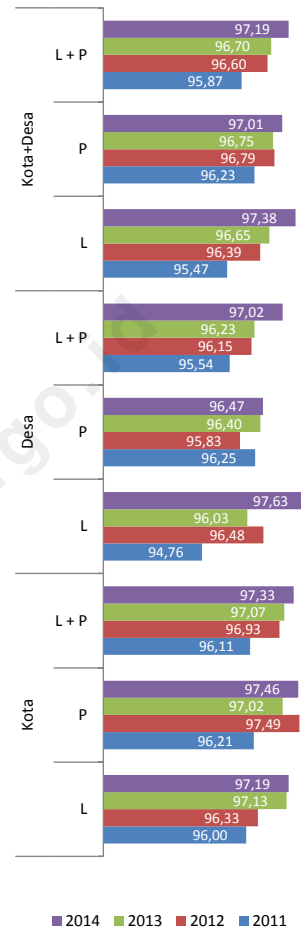
dan pelatihan kejuruan, termasuk penyandang cacat, penduduk pribumi, dan anak-anak yang rentan.

INDIKATOR PROXY: PERSENTASE ANAK YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Dari sisi konsep khususnya terkait dengan kualitas pendidikan pra-sekolah dasar, di Indonesia ketersediaan data untuk indikator ini belum tersedia. Ketersediaan data untuk indikator tersebut hanya sebatas mengukur akses yaitu indikator persentase anak yang mengikuti pendidikan pra sekolah (usia 3-5 tahun). Indikator ini dihasilkan dari Susenas. Secara cakupan, pengumpulan data anak yang mengikuti pendidikan pra sekolah dalam Susenas mencakup anggota rumah tangga usia 0-6 tahun. Secara konsep, yang dimaksud dengan pendidikan pra-sekolah mencakup TK/BA/RA, kelompok bermain, taman penitipan anak, PAUD terintegrasi BKB/ Posyandu, dan lembaga lainnya. Data bisa didisagregasi berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, wilayah, dan pendapatan rumah tangga.

Untuk saat ini, pendidikan pra sekolah yang diperoleh melalui bangku sekolah sudah dinikmati oleh sebagian besar anak usia 3 sampai dengan 5 tahun di Indonesia. Hal ini terlihat dari persentase anak yang mengikuti pendidikan pra sekolah yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2011, tingkat partisipasi anak usia 3 sampai 5 tahun yang mengikuti pendidikan pra sekolah mencapai 95,87 persen dan meningkat menjadi 97,19 persen pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan kepedulian orang tua khususnya dan masyarakat pada umumnya akan pentingnya pendidikan anak pra sekolah dan usia dini bagi perkembangan kognitif anak. Dilihat dari sisi gender, tidak ada perbedaan yang signifikan antara partisipasi pendidikan usia dini antara laki-laki dan perempuan. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, juga tidak nampak adanya perbedaan yang signifikan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Persentase anak yang mengikuti pendidikan prasekolah di perkotaan dan di pedesaan masing-masing tercatat sebesar 97,02 persen dan 97,33 persen pada tahun 2014.

Gambar 4.1 Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Prasekolah (usia 3-5 tahun), 2011-2014



Sumber: Susenas, BPS

INDIKATOR 32. INDEKS PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI

Potensi perkembangan anak usia dini diukur sebagai indeks, saat ini diwakili dengan *Multiple Indicator Cluster Survey* (MICS) yang menilai anak-anak berusia 36-59 bulan dalam empat domain: bahasa/ melek huruf, berhitung, fisik, sosial-emosional, dan pengembangan kognitif. Masing-masing domain diukur dengan instrumen berdasarkan pengamatan *real-time*. Survei MICS menghitung skor Indeks Keseluruhan sebagai persentase anak usia 36-59 bulan yang setidaknya memiliki tiga dari empat domain. Indikator ini bisa didisagregasi menurut jenis kelamin dan umur.

Data indikator 32 belum tersedia di Indonesia.

Ukuran lain tumbuh kembang anak yang dilaporkan orangtua atau pengasuh telah atau sedang dalam tahap perkembangan, termasuk Instrumen Perkembangan Anak Usia Dini dan Indeks Kapabilitas Anak Usia Dini, yang menggabungkan item yang mewakili masing-masing domain dan sedang digunakan di negara berpendapatan tinggi, sedang, dan rendah. Komplemen penting bentuk pengukuran ini adalah penilaian yang dapat menangkap pembangunan di daerah tertentu dari waktu ke waktu (misalnya perkembangan linguistik atau keterampilan emosional).

Indeks ini belum tersedia di Indonesia dan merupakan indeks global yang menggunakan data beberapa negara di dunia. Data untuk mendukung indikator tersebut dapat diperoleh melalui MICS putaran ke empat pada tahun 2011 karena pada putaran ini ditambahkan item kuesioner pendidikan baru untuk menghitung indeks tersebut. BPS bekerja sama dengan UNICEF mengumpulkan data MICS baru di enam kabupaten yaitu Merauke, Jayawijaya, Biak Numfor (Papua), Kaimana, Manokwari dan Sorong (Papua Barat).

INDIKATOR 33. ANGKA KELULUSAN PENDIDIKAN DASAR UNTUK ANAK PEREMPUAN DAN ANAK LAKI-LAKI

Indikator ini mengukur persentase anak-anak yang masuk kelas 1 dan telah menamatkan sekolah dasar. Penyelesaian pendidikan dasar diukur dengan Angka Masukan Kasar terhadap Kelas Akhir pendidikan dasar yaitu angka total pendatang baru di kelas akhir pendidikan dasar (berdasarkan ISCED97 atau *International Standard Classification of Education*), tanpa memandang umur, yang dinyatakan dengan persentase penduduk pada usia yang sesuai dengan kelas terakhir di sekolah dasar (*Gross Intake Ratio to Last Grade of Primary School*). Pendidikan dasar didefinisikan oleh ISCED97 sebagai program yang didesain pada unit atau proyek dasar yang diberikan pada siswa sebagai sebuah pendidikan dasar dalam membaca, menulis dan matematika bersama dengan pemahaman dasar mata pelajaran lain seperti sejarah, geografi, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan musik.

Menurut konsep dari Kemendikbud, pendidikan dasar meliputi pendidikan anak di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Ukuran kelulusan siswa yang dimaksud adalah pertama kali menyelesaikan pendidikan dasar, karena tidak termasuk siswa mengulang kelas terakhir. Tingginya Rasio Masukan Kasar kelas terakhir menunjukkan tingginya penyelesaian pendidikan dasar. Karena perhitungan ini mencakup semua pendatang baru untuk kelas terakhir (tanpa memandang usia), Rasio Masukan Kasar dapat melebihi 100 persen, karena memasukkan murid yang di atas atau di bawah umur yang memasuki kelas terakhir sekolah dasar untuk pertama kalinya.

Indikator 33 ini dapat dijadikan acuan untuk mengukur keberhasilan target SDGs seperti;

Target 4.1: Pada tahun 2030, memastikan seluruh anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang layak dan berkualitas yang mengarah ke pembelajaran yang relevan dan hasil efektif

Target 4.5: Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama pada semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi para rentan, termasuk penyandang cacat, penduduk pribumi, dan anak-anak yang rentan

Target 4.6: Pada tahun 2030 memastikan bahwa semua pemuda dan setidaknya x persen dari orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan sudah melek huruf dan dapat berhitung

Target 5.1: Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di mana saja

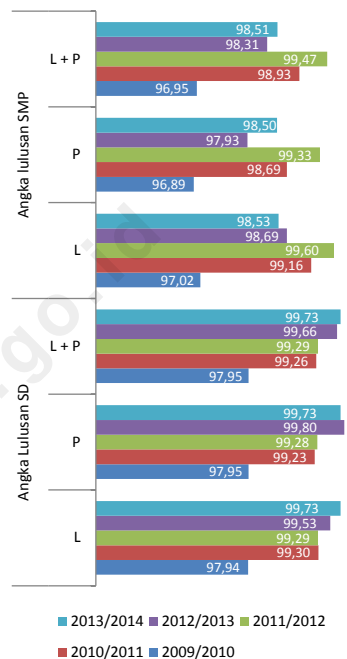
Data untuk indikator ini diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional (Kemendikbud). Menurut konsep dari Kemendikbud, pendidikan dasar meliputi pendidikan anak di tingkat SD dan SMP. Data hasil registrasi ini hanya dapat dirinci berdasarkan jenis kelamin, tidak dapat dirinci berdasarkan pendapatan, dan disabilitas.

Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat besar dalam memastikan anak-anak yang duduk di bangku pendidikan dasar mendapatkan pendidikan yang layak. Sekitar 96 persen (Susenas, 2014) dari anak-anak berusia 7 sampai 12 tahun di seluruh negeri dapat berpartisipasi bersekolah di Sekolah Dasar (SD) dan sederajat. Demikian halnya dengan anak-anak yang berusia 13 sampai 15 tahun, ada sekitar 94 persen dapat berpartisipasi bersekolah di SMP dan sederajat. Tidak ada kesenjangan antara anak laki-laki maupun perempuan, masing-masing menunjukkan angka partisipasi yang cenderung sama.

Jika dilihat angka kelulusan pada pendidikan dasar, sekitar 99,7 persen anak usia SD sudah menamatkan sekolah pada tahun 2013/2014. Setiap tahun dari tahun ajaran 2010/2011 sampai dengan 2014/2015 angka kelulusan SD cenderung meningkat. Disparitas gender sudah tidak terlihat pada level pendidikan dasar ini. Persentase kelulusan SD antara murid laki-laki dan perempuan sama, sekitar 99,7 persen. Kondisi angka kelulusan SMP hampir sama dengan angka kelulusan SD. Hanya sedikit lebih rendah dari kelulusan SD, sekitar 98,5 persen pada tahun 2013/2014. Disparitas gender juga sudah tidak terlihat pada level pendidikan SMP ini.

Melihat perkembangan data angka kelulusan SD dan SMP dari tahun 2009/2010 sampai dengan 2013/2014, Indonesia optimis dapat memenuhi salah satu Target 4.1 yang memastikan seluruh anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan

Gambar 4.2 Angka Kelulusan SD dan SMP, 2009/2010 – 2013/2014



Sumber: Pusdatin Kemendikbud

Angka kelulusan pendidikan dasar mencapai sekitar 99,7 persen di tingkat SD dan sekitar 98,5 persen di tingkat SMP pada tahun 2013/2014.

pendidikan dasar pada tahun 2030. Pada Target 4.5 dan Target 5.1, menghilangkan disparitas gender dan mengakhiri diskriminasi pada level pendidikan dasar. Target 4.6 juga dapat terpenuhi, karena anak yang sudah lulus pendidikan dasar pasti sudah melek huruf dan dapat berhitung.

INDIKATOR 34. PERSENTASE ANAK PEREMPUAN DAN ANAK LAKI-LAKI YANG MENGUASAI BERBAGAI KETERAMPILAN DASAR, TERMASUK KEMAMPUAN DALAM MEMBACA DAN KETERAMPILAN MENDASAR DALAM MATEMATIKA PADA AKHIR SIKLUS SEKOLAH DASAR (BERDASARKAN TOLAK UKUR NASIONAL YANG DIBENTUK SECARA KREDIBEL) (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini merupakan indikator yang perlu dikembangkan. Indikator ini dirancang untuk mengukur proporsi anak-anak yang cakap dalam membaca dan memahami teks dalam bahasa utama mereka, serta memahami berbagai instruksi yang ada, seperti, menghitung dan memahami operasi dan konsep matematika inti, sebagai proporsi total anak-anak yang berada pada siklus akhir pendidikan dasar di negara tersebut. Kecakapan ini perlu disajikan pada level nasional, namun harus dapat mencakup kemampuan membaca, merumuskan, memahami dan menganalisis berbagai instruksi dalam bahasa utama mereka. Indikator ini merupakan indikator agregat baru yang diusulkan untuk dapat menangkap kecakapan dalam berbahasa sebagai bagian dalam pembelajaran kemampuan matematika dasar yang memiliki hubungan yang kuat dalam pendidikan akademik berikutnya.

Data indikator 34 belum tersedia di Indonesia.

Data untuk menyusun indikator saat ini belum tersedia di Indonesia. Lembaga-lembaga internasional sedang membahas domain dan tolok ukur internasional untuk indikator ini. Di dalam negeri, hal ini menjadi tantangan bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat mengukur kualitas pendidikan dasar secara nasional baik berbasis sekolah maupun rumah tangga dan mendefinisikan standar nasional untuk keterampilan dasar tersebut.

Indikator 34 ini dapat dijadikan acuan untuk mengukur keberhasilan Target 4.1 (Pada tahun 2030 yakni memastikan seluruh anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang layak dan berkualitas yang mengarah ke pembelajaran yang relevan dan hasil efektif) dan Target 4.6 (Pada tahun 2030 memastikan bahwa semua pemuda dan setidaknya x persen dari orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan sudah melek huruf dan dapat berhitung).

INDIKATOR 35. ANGKA KELULUSAN SEKOLAH MENENGAH UNTUK ANAK PEREMPUAN DAN ANAK LAKI-LAKI

Indikator ini mengukur persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang masuk kelas pertama sekolah menengah setelah menyelesaikan kelas akhir pendidikan sekolah dasar. Dihitung dengan membagi jumlah siswa di kelas akhir sekolah menengah yang telah dikurangi dengan siswa tinggal kelas, dengan jumlah total siswa usia lulus resmi. Indikator ini bertujuan untuk menangkap angka putus sekolah selama sekolah menengah dan selama transisi sekolah dasar ke sekolah menengah dengan menggunakan pembagiannya yaitu jumlah total siswa dengan usia lulus resmi.

Angka kelulusan sekolah menengah penting untuk diukur karena angka putus sekolah tertinggi berada pada kelas menengah pertama. Sebab pada usia-usia tersebut, biaya aktual dan biaya pendidikan menjadi lebih tinggi sementara sistem pendidikan masih berjuang memperbaiki kualitas pendidikan. Serta terdapat perbedaan gender dimana keinginan anak perempuan untuk sekolah sangat ditentukan oleh pendapatan dan biaya pendidikan yang berbeda perlakuannya dengan anak laki-laki, dan masih banyak rumah tangga yang tidak mau berinvestasi untuk pendidikan anak perempuan disebabkan keuntungan (*return*) ekonomi yang tidak akan setara dan tidak langsung. Selain itu, paradigma masyarakat masih terpusat pada peran anak perempuan yang hanya akan dianggap sebagai istri dan ibu.

Indikator 35 ini dapat dijadikan acuan untuk mengukur keberhasilan target-target di SDGs seperti;

- Target 4.1 Pada tahun 2030, memastikan seluruh anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang layak dan berkualitas yang mengarah ke pembelajaran yang relevan dan hasil efektif
- Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan sebesar x persen jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk mendapatkan kedudukan, pekerjaan dan kewirausahaan yang layak
- Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama pada semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi para rentan, termasuk penyandang cacat, penduduk pribumi, dan anak-anak yang rentan
- Target 4.6 Pada tahun 2030 memastikan bahwa semua pemuda dan setidaknya x persen dari orang

Indikator angka kelulusan sekolah menengah dapat dilihat melalui lulusan siswa Sekolah Menengah (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

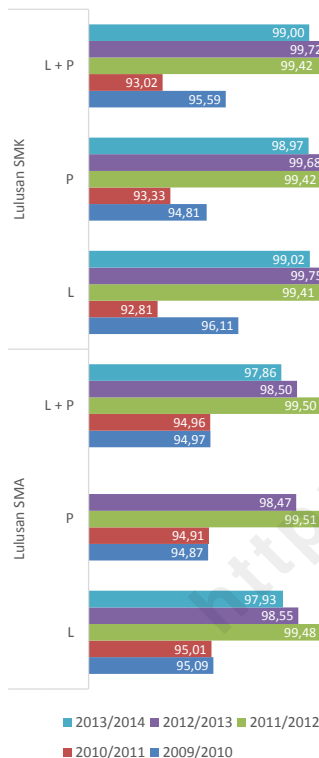
dewasa, baik laki-laki maupun perempuan sudah melek huruf dan dapat berhitung

Target 8.6 Pada tahun 2020, mengurangi proporsi pemuda yang tidak sedang bekerja, dalam pendidikan atau pelatihan secara substansial.

Pada tahun 2013/2014, angka kelulusan sekolah SMA mencapai 97,9 persen dan angka kelulusan sekolah SMK mencapai 99 persen.

Data untuk indikator ini diperoleh dari hasil registrasi Kemendiknas. Data yang didapatkan saat ini hanya dapat dirinci berdasarkan jenis kelamin. Akan lebih baik jika data ini dapat disgregasi berdasarkan pendapatan, disabilitas, dan kuintil pendapatan rumah tangga. Perlu juga dipisahkan menurut wilayah terutama di wilayah konflik, karena anak-anak di wilayah tersebut beresiko besar mengalami putus sekolah. Kelemahan dari indikator angka kelulusan sekolah menengah ini tidak dengan mudah dibandingkan antar negara, karena struktur sekolah yang sangat bervariasi, dan adanya perbedaan kelompok umur. Angka kelulusan sekolah menengah hanya dapat dihitung pada level nasional dengan mengacu pada jumlah tahun sekolah di negara tersebut.

Gambar 4.3 Kelulusan SMA dan SMK, 2009/2010 – 2013/2014



Sumber: Pusdatin Kemendikbud

Indikator angka kelulusan sekolah menengah dapat dilihat melalui lulusan siswa Sekolah Menengah (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Menurut informasi dari hasil registrasi Kemendiknas, perkembangannya angka kelulusan sekolah menengah SMA dan SMK dari tahun ajaran 2009/2010 sampai dengan 2013/2014 menunjukkan peningkatan setiap tahun. Angka kelulusan siswa berpendidikan SMA meningkat dari 94,97 persen menjadi 97,86 persen. Sementara angka kelulusan siswa berpendidikan SMK pada tahun meningkat dari 95,59 persen menjadi 99 persen.

Melihat perkembangan indikator kelulusan SMA dan SMK serta angka kelulusan yang mendekati 100 persen, cukup optimis untuk memenuhi target 4.1 dan 4.6 pada tahun 2030 pada pendidikan tingkat menengah. Tingginya angka kelulusan pada pendidikan SMK juga dapat mewakili pemenuhan Target 4.4, karena lulusan SMK mencetak siswa yang memiliki keterampilan teknis dan kejuruan, sehingga siap mendapatkan kedudukan, pekerjaan dan kewirausahaan yang layak. Indikator ini juga dapat memenuhi Target 8.6, minimal mengurangi proporsi pemuda yang tidak mendapatkan pendidikan atau pelatihan secara substansial.

Untuk memenuhi Target 4.6 tentang penghilangan disparitas gender dalam pendidikan menengah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Angka kelulusan baik di SMA maupun di SMK tidak ada perbedaan yang berarti antara lulusan laki-laki dan perempuan. Pada tahun ajaran 2013/2014 angka kelulusan siswa SMA baik laki-laki maupun perempuan masing-masing sekitar 98 persen, sementara lulusan siswa SMK baik laki-laki maupun perempuan masing-masing sekitar 99 persen.

INDIKATOR 36. PERSENTASE ANAK PEREMPUAN DAN ANAK LAKI-LAKI YANG MENCAPAI KECAKAPAN DI BERBAGAI HASIL BELAJAR, TERMASUK DALAM MATEMATIKA PADA AKHIR SIKLUS SEKOLAH MENENGAH. (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini mengukur persentase anak perempuan dan anak laki-laki usia 14 tahun yang pandai dalam hasil belajar, setidaknya dalam membaca dan matematika. Kecakapan ini perlu didefinisikan melalui standar level nasional, namun harus mencakup kemampuan membaca, merumuskan, memahami, dan menganalisis berbagai instruksi dalam bahasa utama mereka, dan mampu memahami konsep, alasan dan penyelesaian masalah rumit matematika lanjutan.

Pengukuran matematika lebih mudah untuk dibandingkan antar negara, setiap negara perlu mengidentifikasi paket standar kecakapan ini. Upaya serius diperlukan menyejajarkan standar nasional sehingga dapat dibandingkan dengan standar internasional. Indikator ini juga dianjurkan diukur melalui penilaian berbasis sekolah atau rumah tangga setiap tahun untuk menelusuri progres sistem pendidikan. Kelemahan mendasar indikator berbasis kemampuan yaitu hanya dapat menangkap bagian kecil kompetensi-kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa, penilaian pada subset tersebut sering kali hanya terfokus pada subset itu saja sehingga mengabaikan kompetensi lain yang jauh lebih luas. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dasar yang seharusnya diperoleh siswa pada siklus akhir sekolah menengah pertama. Indikator lebih luas perlu dirancang untuk memastikan kompetensi-kompetensi lainnya tidak lagi diabaikan.

Ketersediaan data saat ini di Indonesia belum tersedia. Lembaga-lembaga internasional sedang membahas domain dan tolak ukur internasional untuk indikator ini. Di dalam negeri, hal ini merupakan tantangan untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat mengukur kualitas pendidikan menengah secara nasional baik berbasis sekolah maupun rumah tangga dan mendefinisikan standar nasional untuk keterampilan dasar tersebut.

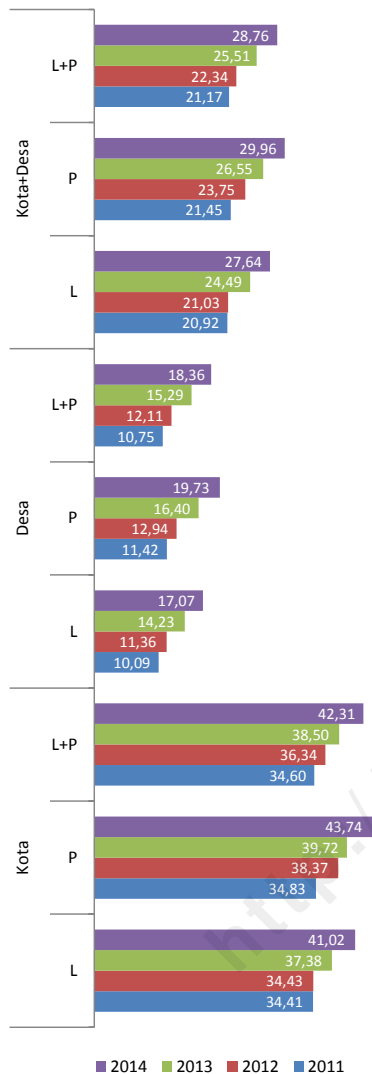
Ketersediaan data saat ini di Indonesia belum tersedia. Lembaga-lembaga internasional sedang membahas domain dan tolak ukur internasional untuk indikator ini

INDIKATOR 37. ANGKA PARTISIPASI PERGURUAN TINGGI BAGI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI

Angka partisipasi perguruan tinggi adalah indikasi dari kualitas angkatan kerja di negara ini. Kesenjangan yang besar antara angka partisipasi perguruan tinggi dan tingkat pengangguran mengindikasikan apakah ketidakmampuan ekonomi dalam menyerap lulusan yang terlatih, atau “kelayakan kerja” para lulusan yang menunjukkan ketidaksesuaian antara keterampilan yang disampaikan melalui sistem perguruan tinggi dengan keterampilan yang dituntut oleh pasar.

Data indikator 37 bisa didekati dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi.

Gambar 4.4 Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, 2011-2014



Sumber: Susenas, BPS

APK Perguruan Tinggi di Indonesia baru mencapai 28,76 persen pada tahun 2014.

Sebagai salah satu indikator pendidikan, indikator ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan target SDGs seperti;

- Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan pria dengan teknik kualitas terjangkau, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk perguruan tinggi
- Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan sebesar x% jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk mendapatkan kedudukan, pekerjaan dan kewirausahaan yang layak
- Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama pada semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi para rentan, termasuk penyandang cacat, penduduk pribumi, dan anak-anak yang rentan)
- Target 8.6 Pada tahun 2020, mengurangi proporsi pemuda yang tidak sedang bekerja, dalam pendidikan atau pelatihan secara substansial.

Untuk menentukan indikator ini, didekati dengan angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi yang diperoleh dari hasil Susenas. Secara konsep Susenas, APK perguruan tinggi merupakan jumlah murid perguruan tinggi/ sederajat dibagi dengan jumlah penduduk usia 19-24 tahun. Manfaat indikator ini untuk mengetahui tingkat partisipasi penduduk secara umum pada tingkat pendidikan perguruan tinggi. Data dapat disagregasi berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan serta jenis kelamin. Level penyajiannya dapat disajikan sampai ke tingkat kabupaten/kota.

Menurut data dari Susenas, APK Pendidikan Tinggi untuk jenjang pendidikan tinggi di Indonesia pada tahun 2014 baru mencapai 28,76 persen. Artinya, jumlah penduduk yang melanjutkan ke perguruan tinggi/ sederajat hanya sekitar 29 persen, selebihnya belum memiliki kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi. Dalam empat tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berhasil memperluas akses pendidikan tinggi melalui berbagai program, yang tercermin dalam peningkatan angka partisipasi kasar (APK) yang signifikan dari 21,17 persen di tahun 2011. Kendati sudah meningkat, APK ini masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia (60 persen di tahun 2013), Thailand (47,7 persen di tahun 2011), Korea Selatan (90 persen di tahun 2013), dan Philipina sudah lebih dari 50 persen (UNESCAP). Salah satu penyebab rendahnya APK pendidikan tinggi adalah terbatasnya kapasitas perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Masalah lain yang cukup serius adalah terbatasnya jumlah

dosen pendidik yang berkualitas, terutama di daerah-daerah di luar pulau Jawa atau bahkan kota-kota kecil di pulau Jawa.

Untuk memenuhi target 4.4 dan target 8.6 dibutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah terhadap peningkatan partisipasi masyarakat memasuki pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Semakin tinggi APK perguruan tinggi diharapkan semakin banyak tenaga kerja berpotensi di dunia kerja, sehingga menghasilkan output lebih baik. Meskipun kenaikan APK perguruan tinggi bukan jaminan penurunan tingkat pengangguran kaum muda, namun pendidikan harus dapat menghasilkan tenaga yang mampu mengembangkan potensi masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa termasuk cara-cara memasarkannya. Kemampuan ini amat penting dalam rangka memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha. Dengan demikian, lulusan sistem pendidikan tinggi tidak bergantung hanya kepada lapangan kerja yang telah ada yang pada dasarnya sangat terbatas, akan tetapi dapat mengembangkan kesempatan kerja yang masih potensial.

Jika dilihat menurut wilayah, penduduk perkotaan lebih banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi/sederajat dibandingkan penduduk di pedesaan. APK perguruan tinggi di perkotaan mencapai sekitar 2 kali APK perguruan tinggi penduduk di pedesaan. Hal ini berkaitan dengan kemudahan akses dan kesempatan penduduk pedesaan yang masih kurang dalam mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi.

Antara APK perguruan tinggi penduduk laki-laki dan perempuan tidak terlalu banyak perbedaan, hanya selisih sekitar 2 persen lebih tinggi laki-laki dibandingkan perempuan. Oleh karena itu target SDGs 4.3 (Menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan pria masuk dalam perguruan tinggi) dan Target 4.5 (Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama pada semua tingkat pendidikan tinggi) hampir terpenuhi. Hanya saja perlu dicermati lagi akses bagi para penyandang cacat, penduduk pribumi, dan anak-anak yang rentan.

INDIKATOR 4.1 PERSENTASE ANAK PEREMPUAN DAN ANAK LAKI-LAKI YANG MEMPEROLEH KETERAMPILAN DAN NILAI-NILAI YANG DIPERLUKAN UNTUK KEWARGANEGARAAN GLOBAL DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TOLAK UKUR NASIONAL PERLU DIKEMBANGKAN) PADA AKHIR SEKOLAH MENENGAH. (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini mengukur persentase anak-anak yang memperoleh keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan bagi mereka untuk menjadi “warga dunia” produktif, mengakui bahwa di luar karya akademis dasar, ada nilai-nilai dan keterampilan yang memungkinkan anak-anak untuk tumbuh menjadi tanggung jawab sosial, matang secara emosional, dan

Data indikator 4.1 belum tersedia di Indonesia, Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) dapat menjadi sumber data untuk membangun indikator ini

anggota masyarakat yang produktif. Di Indonesia data ini belum tersedia, Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) dapat menjadi sumber data untuk membangun indikator ini.

Indikator ini digunakan untuk mengukur dua target SDGs, meliputi target 4.7 (Pada tahun 2030 memastikan semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global, dan penghargaan dari keragaman budaya dan kontribusi budaya untuk pembangunan berkelanjutan) dan target 12.8 (Pada tahun 2030 memastikan bahwa orang di mana-mana memiliki informasi yang relevan dan kesadaran untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup selaras dengan alam).

INDIKATOR 4.2: PERSENTASE BALITA YANG MEMPEROLEH PENGASUHAN YANG RESPONSIF DAN STIMULATIF DI LINGKUNGAN YANG AMAN

Indikator 4.2 ini merupakan indikator tambahan yang berguna untuk mengukur persentase anak-anak di bawah 5 tahun yang terlibat dalam empat atau lebih kegiatan dengan didampingi orang dewasa untuk mendorong pembelajaran dan kesiapan sekolah dalam 3 hari terakhir. Indikator ini diperoleh melalui MICS. Hasil MICS terbatas pada cakupan wilayah, karena hanya dilakukan pada sebagian kecil wilayah di Indonesia.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 4.2, yaitu pada tahun 2030 memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses perkembangan anak usia dini yang berkualitas, perawatan dan pendidikan anak usia dini sehingga mereka siap untuk mendapatkan pendidikan utama.

INDIKATOR PROXY: PERSENTASE BALITA (0-48 BULAN) TERLANTAR

Ketersediaan indikator ini di Indonesia belum ada sehingga untuk memenuhinya menggunakan proxy indikator yang bersifat berlawanan (negatif), yaitu Persentase balita (0-48 bulan) terlantar. Data dari indikator proxy ini diperoleh dari Susenas modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP). Data dapat dirinci menurut wilayah dan jenis kelamin, level penyajian sampai ke tingkat kabupaten/kota. Karena keterbatasan sumber data, terjadi perbedaan cakupan umur pada indikator asli dan indikator proxy. Cakupan umur pada indikator asli balita, sedangkan pada indikator proxy cakupan umur 0-48 bulan.

Definisi terlantar pada survei MSBP adalah balita yang ditinggal sendiri saat bekerja atau melakukan aktivitas rutin di luar rumah oleh ibunya atau yang bertanggungjawab. Sementara menurut konsep/definisi Kementerian Sosial RI, Balita terlantar

Data indikator 4.2 belum tersedia di Indonesia, didekati dengan persentase balita (0-48 bulan) terlantar.

Terjadi penurunan persentase balita (0-48 bulan) terlantar dari 1,06 persen pada tahun 2006 menjadi 0,55 persen pada tahun 2012.

adalah anak yang berusia 0-4 tahun karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukannya (karena beberapa kemungkinan: miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya, meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani dan sosial.

Perkembangan kondisi balita (0-48 tahun) yang terlantar selama periode tahun 2006-2012 cukup menggembirakan. Hal ini ditandai dengan penurunan balita (0-48 bulan) yang terlantar dari 1,06 persen pada tahun 2006 menjadi 0,55 persen pada tahun 2012. Balita terlantar laki-laki lebih tinggi dibandingkan balita perempuan.

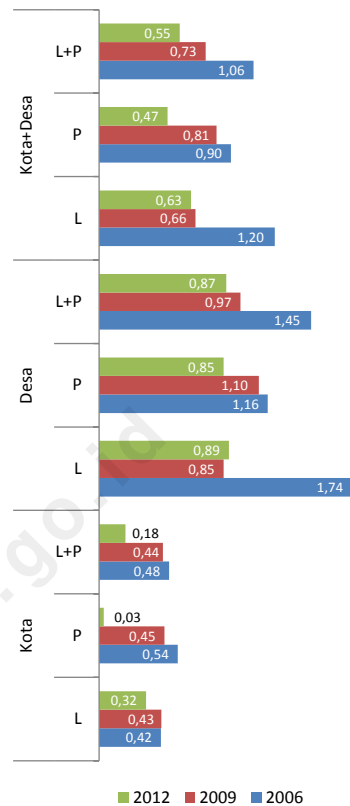
Balita terlantar di daerah perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Namun demikian, dari sisi jenis kelamin polanya sama antara daerah perdesaan dan perkotaan, yaitu bayi terlantar laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan balita perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini belum semua dan tidak sama antara anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses perkembangan anak usia dini yang berkualitas, perawatan dan pendidikan anak usia dini sehingga mereka siap untuk mendapatkan pendidikan utama sebagaimana target 4.2. Ketimpangan juga masih terjadi antara daerah perdesaan dan perkotaan.

INDIKATOR 4.3 JUMLAH ANAK YANG PUTUS SEKOLAH

Indikator 4.3 merupakan Indikator UNESCO untuk mengukur jumlah usia sekolah anak keluar dari sekolah. Perhatian khusus harus diberikan kepada anak-anak di daerah konflik atau terkena bencana. Indikator ini lebih dapat diukur dengan menggunakan indikator angka putus sekolah, yaitu proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun jenjang pendidikan yang dimaksud adalah jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK.

Indikator ini merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur keberhasilan target 4.1 (Pada tahun 2030, memastikan seluruh anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang layak dan berkualitas yang mengarah ke pembelajaran yang relevan dan hasil efektif) dan target 4.5 (Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama pada semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, termasuk penyandang cacat, penduduk pribumi, dan anak-anak yang rentan). Sayangnya data yang diperoleh belum terinci menurut jenis kelamin, sehingga belum dapat digunakan untuk mengukur target 4.5.

Gambar 4.5 Persentase Balita (0-48 bulan) Terlantar, 2006-2012



Sumber: Susenas MSBP, BPS

Terjadi penurunan angka putus sekolah selama tahun pelajaran 2008/2009-2009/2010 sampai dengan 2012/2013-2013/2014. Di tingkat SD turun dari 1,65 persen menjadi 1,10 persen, di tingkat SMP turun dari 2,06 persen menjadi 1,42 persen, di tingkat SMA turun signifikan dari 3,27 persen menjadi 0,98 persen, terakhir di tingkat SMK turun dari 5,52 persen menjadi 3,08 persen.

Gambar 4.6 Angka putus sekolah, 2008/2009-2009/2010 sampai dengan 2012/2013-2013/2014



Sumber: Pusdatin Kemendikbud

Menurut Kemendiknas angka putus sekolah di Indonesia masih cukup tinggi. Paling tinggi angka putus sekolah di SMK. Tingginya angka putus sekolah ini cukup memprihatinkan dan membutuhkan semua pihak untuk mengatasi masalah ini. Menurut Penelitian BPS tahun 2009 terhadap anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah/putus sekolah menunjukkan bahwa ada 5 faktor utama penyebab anak putus sekolah yaitu : masalah finansial, harus membantu orang tua bekerja, perasaan puas dengan tingkat pendidikan yang sudah diraih, harus menikah dan mengurus anak, serta Jarak sekolah yang jauh. Di antara berbagai penyebab tersebut, penyebab utamanya adalah masalah ekonomi, baik berupa kesulitan biaya sekolah maupun karena diharuskan membantu orang tua bekerja. Oleh karena itu kelompok anak-anak yang paling rentan terkena dampak putus sekolah sebagian besar berasal dari keluarga miskin.

Jika dilihat perkembangannya selama tahun pelajaran 2008/2009-2009/2010 sampai dengan 2012/2013-2013/2014, angka putus sekolah di semua tingkat pendidikan menunjukkan titik cerah. Di tingkat SD turun dari 1,65 persen menjadi 1,10 persen, di tingkat SMP turun dari 2,06 persen menjadi 1,42 persen, di tingkat SMA turun signifikan dari 3,27 persen menjadi 0,98 persen, terakhir di tingkat SMK turun dari 5,52 persen menjadi 3,08 persen. Meskipun angka putus sekolah di tingkat SMK masih cukup tinggi, namun dengan terjadinya penurunan angka setiap tahun ajaran memunculkan harapan baik bagi keberhasilan pemerintah untuk meminimalkan anak yang putus sekolah, khususnya di tingkat SMK.

Indonesia sudah memiliki program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun. Program ini mewajibkan anak bangsa bisa melanjutkan sekolah hingga SMA atau SMK. Pemerintah melalui Kemendikbud juga telah meluncurkan program ini pada tahun pelajaran 2015/2016. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan program ini salah satunya adalah tingginya angka putus sekolah di tingkat sekolah menengah.

INDIKATOR 4.4 PERSENTASE REMAJA (15-19 TAHUN) YANG MEMILIKI AKSES PROGRAM TRANSISI SEKOLAH KE BEKERJA

Indikator ini mengukur persentase remaja yang mendapat tawaran program yang memungkinkan mereka untuk transisi dari sekolah ke kerja dan pekerjaan, baik melalui keterampilan kerja, atau program pelatihan magang.

INDIKATOR PROXY :PERSENTASE PENDUDUK (15-19 TAHUN) YANG PERNAH MENDAPATKAN PELATIHAN KERJA (DAN MEMPEROLEH SERTIFIKAT)

Indikator 4.4 belum tersedia di Indonesia, sehingga didekati dengan indikator persentase remaja yang pernah mendapatkan pelatihan kerja dan memperoleh sertifikat ini dapat diperoleh melalui Sakernas yaitu. Pelatihan kerja adalah

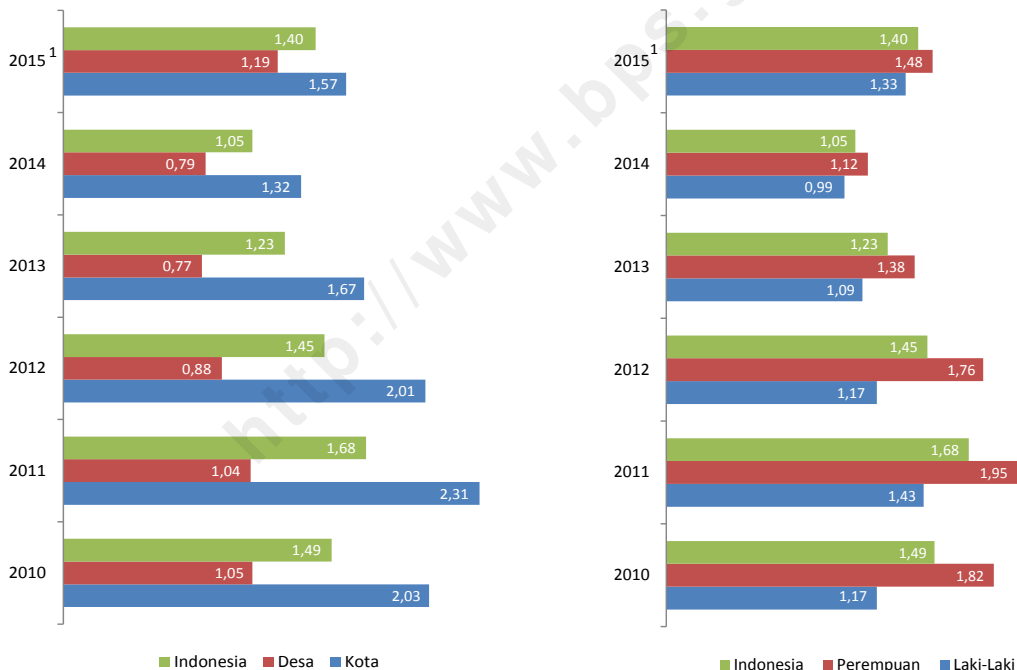
pendidikan/pelatihan yang memberikan suatu keterampilan tertentu yang sifatnya khusus pada batas waktu tertentu dan memperoleh tanda lulus/sertifikat baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Termasuk pelatihan yang dilakukan di tempat kerja atau berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh responden. Data juga dapat memberi informasi mengenai jenis pelatihan kerja utama.

Indikator ini digunakan untuk mengukur salah satu target SDGs yaitu target 4.3, pada tahun 2030 menjamin akses yang sama bagi semua wanita dan pria untuk pendidikan teknis, kejuruan dan tersier kualitas terjangkau, termasuk universitas. Data untuk indikator ini tersedia di Indonesia melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Keberlanjutan data atau series data terjamin setiap tahun. Level penyajiannya dapat disajikan sampai dengan wilayah kabupaten/kota.

Secara umum, Persentase penduduk (15-19 tahun) yang pernah mendapatkan pelatihan kerja (dan memperoleh

1. Indikator 4.4 belum tersedia di Indonesia, sehingga didekati dengan indikator persentase penduduk (15-19 tahun) yang pernah mendapatkan pelatihan kerja (dan memperoleh sertifikat).
2. Terjadi penurunan persentase penduduk (15-19 tahun) yang pernah mendapatkan pelatihan kerja (dan memperoleh sertifikat) di Indonesia dari tahun 2010 (1,49 persen) sampai dengan tahun 2014 (1,05 persen).

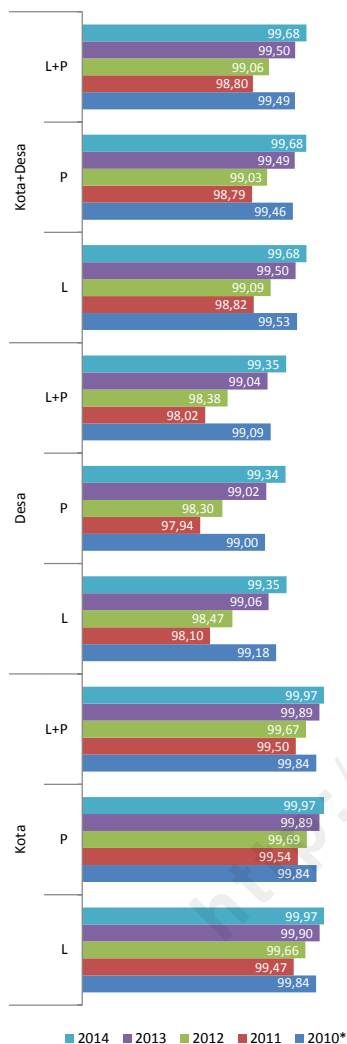
Gambar 4.7 Persentase penduduk (15-19 tahun) yang pernah mendapatkan pelatihan kerja (dan memperoleh sertifikat), 2010-2015



Ket : desa/kota belum ada
 Catatan: ¹Februari 2015
 Sumber: Sakernas, BPS

sertifikat) ada kenaikan dari tahun 2010-2011, namun sejak tahun 2011 menunjukkan tren menurun secara melambat sampai dengan tahun 2014. Persentase pada tahun 2014 adalah yang terkecil sepanjang periode lima tahun terakhir, kemudian meningkat pada Februari tahun 2015 yang menunjukkan bahwa

Gambar 4.8 Persentase penduduk (15-24 tahun) yang melek huruf, 2010-2014



* penimbang lama
Sumber: Susenas, BPS

Secara nasional tingkat melek huruf penduduk usia 15-24 tahun meningkat dari 99,49 persen pada tahun 2010 menjadi 99,68 persen pada tahun 2014 berdasarkan data Susenas.

tingkat partisipasi penduduk untuk memperoleh pelatihan kerja meningkat.

Berdasarkan Gambar 4.7, apabila ditinjau dari daerah tempat tinggal, penduduk perkotaan lebih banyak mendapatkan pelatihan kerja. Jumlah penduduk perkotaan yang pernah mendapatkan pelatihan kerja (dan memperoleh sertifikat) hampir dua kali lebih banyak dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah harus lebih banyak menyelenggarakan pelatihan kerja khususnya untuk masyarakat desa, dengan begitu akan meningkatkan sumber daya manusia sehingga akan mengurangi pengangguran karena mereka yang telah memiliki pengalaman pelatihan kerja akan berpeluang untuk mendapat pekerjaan. Apabila ditinjau berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan lebih banyak mendapatkan pelatihan kerja dibandingkan laki-laki.

INDIKATOR 4.5 PERSENTASE PENDUDUK (15-24 TAHUN) YANG MELEK HURUF (INDIKATOR MDG)

Indikator ini mengukur proporsi wanita dewasa muda dan laki-laki yang melek huruf sebagai proporsi dari total populasi dalam kelompok usia tersebut. Indikator ini dapat diperoleh melalui Susenas, selain itu juga dari Sensus Penduduk (SP), SUPAS, dan Sakernas. Indikator ini biasanya disajikan menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal. Indikator ini juga merupakan indikator MDGs yang pencapaiannya hingga tahun 2014 sudah dikatakan tercapai karena persentasenya sudah mendekati 100 persen.

Indikator melek huruf dapat digunakan untuk mengukur target 4.4 (Pada tahun 2030, meningkatkan sebesar x persen jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk mendapatkan kedudukan, pekerjaan dan kewirausahaan yang layak) dan target 4.6 (Pada tahun 2030 memastikan bahwa semua pemuda dan setidaknya x persen dari orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan sudah melek huruf dan dapat berhitung).

Untuk mengetahui perkembangan indikator ini menggunakan data bersumber dari Susenas. Konsep penduduk melek huruf menurut Susenas adalah penduduk yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf hijaiyah (arab), dan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya.

Data Susenas menunjukkan terjadinya perbaikan tingkat melek huruf di Indonesia. Secara nasional tingkat melek huruf penduduk usia 15-24 tahun meningkat dari 99,49 persen pada tahun 2010 menjadi 99,68 persen pada tahun 2014. Namun kesenjangan tingkat melek huruf antara penduduk laki-laki dan

perempuan semakin kecil. Kesenjangan baru melebar ketika usia 25 tahun ke atas diperhitungkan.

Tingkat melek huruf penduduk usia 15-24 tahun di pedesaan tidak memiliki perbedaan yang berarti dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Hal ini ditunjukkan oleh angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun yang hanya sedikit lebih tinggi di perkotaan dibanding di pedesaan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kesenjangan antara penduduk melek huruf usia 15-24 tahun laki-laki dan perempuan di perkotaan dan pedesaan juga menurun, malahan pada tahun 2014 angkanya sama antara melek huruf penduduk laki-laki dan perempuan, yaitu 99,97 persen.

INDIKATOR 4.6 PROPORSI ORANG DEWASA MUDA (18-24 TAHUN) YANG MEMILIKI AKSES PROGRAM PEMBELAJARAN. (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini mengukur persentase wanita dewasa muda dan laki-laki yang mendaftarkan diri dan belajar keterampilan baru atau kursus untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi.

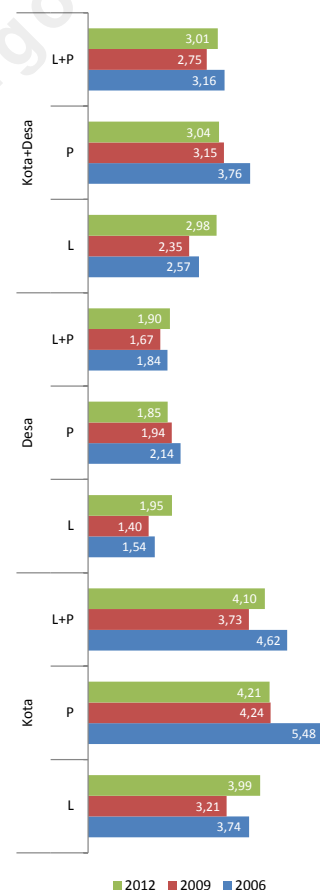
INDIKATOR PROXY: PERSENTASE PENDUDUK (18-24 TAHUN) YANG PERNAH/SEDANG MENGIKUTI KURSUS

Indikator 4.6 belum tersedia di Indonesia, sehingga didekati dengan indikator Persentase penduduk (18-24 tahun) yang pernah/ sedang mengikuti kursus yang diperoleh dari Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP). Keterangan yang dikumpulkan adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang telah selesai dan sedang mengikuti kursus selama 2 tahun terakhir. Untuk penghitungan indikator ini umur disesuaikan menjadi 18-24 tahun. Data dapat dirinci menurut jenis kursus (bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, dan lain-lain), kursus utama, dan jangka waktu kursus. Namun indikator ini tidak dapat disajikan setiap tahun, karena Susenas modul MSBP hanya dilakukan tiga tahun sekali.

Indikator ini dapat mengukur capaian target 4.3 (Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan pria dengan teknik kualitas terjangkau, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk perguruan tinggi) dan 4.5 (Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama pada semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi para rentan, termasuk penyandang cacat, penduduk pribumi, dan anak-anak yang rentan).

Secara umum penduduk (18-24 tahun) yang pernah dan atau sedang mengikuti kursus selama tahun 2006-2012 menurut hasil Susenas MSBP berada pada kisaran 3 persen. Meskipun ada penurunan hanya sedikit sekali, sekitar 0,15 persen. Untuk peserta kursus ini ternyata sedikit lebih tinggi penduduk

Gambar 4.9 Persentase penduduk (18-24 tahun) yang pernah/ sedang mengikuti kursus, 2006-2012



Sumber: Susenas MSBP, BPS

perempuan yang pernah/sedang mengikuti kursus dibandingkan peserta laki-laki, namun kesenjangannya tidak terlalu besar dan semakin berkurang. Peserta kursus laki-laki lebih berminat bidang komputer/IT, sedangkan peserta kursus perempuan ada dua pilihan bidang kursus yang banyak diminati yaitu komputer/IT dan bahasa asing.

Secara umum penduduk (18-24 tahun) yang pernah dan atau sedang mengikuti kursus selama tahun 2006-2012 berada pada kisaran 3 persen. Baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, penduduk (18-24 tahun) yang pernah dan atau sedang mengikuti kursus lebih banyak penduduk perempuan, meskipun seiring waktu perbedaannya menyempit.

Jika dilihat menurut wilayah, penduduk (18-24 tahun) yang pernah dan atau sedang mengikuti kursus selama tahun 2006-2012 di perkotaan lebih banyak dibandingkan di daerah pedesaan. Selama periode yang sama, penduduk (18-24 tahun) yang pernah dan atau sedang mengikuti kursus di perkotaan mencapai sekitar 4 sampai 5 persen, sedangkan di daerah pedesaan hanya sekitar 2 persen. Hal ini terjadi karena di daerah perkotaan lebih banyak tersedia tempat kursus yang bersifat peningkatan keahlian ditambah dengan kemudahan akses untuk mencapai tempat kursus. Sebaliknya di daerah pedesaan sangat jarang tersedia tempat kursus, sehingga untuk mendapatkan kesempatan kursus harus melakukan perjalanan jauh ke daerah perkotaan. Baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, penduduk (18-24 tahun) yang pernah dan atau sedang mengikuti kursus selama tahun 2006-2012 lebih banyak penduduk perempuan, meskipun seiring waktu perbedaannya menyempit. Oleh karena itu target 4.3 dan 4.5 tentang disparitas gender sebenarnya sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi.

INDIKATOR 4.7 **INDIKATOR SAHAM FASILITAS PENDIDIKAN YANG MENYEDIAKAN LINGKUNGAN BELAJAR YANG EFEKTIF. (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)**

Data indikator 4.7 belum tersedia di Indonesia dan masih dalam tahap pengembangan

Indikator ini mengukur kualitas dan sumber daya yang memadai pada fasilitas pendidikan. Indikator ini digunakan untuk mengukur salah satu target SDGs yaitu target 4.a, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang anak, cacat dan sensitif gender dan memberikan aman, non-kekerasan, inklusif dan efektif lingkungan belajar untuk semua.

INDIKATOR 4.8 **RASIO SISWA TERHADAP KOMPUTER PADA SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH**

Data indikator 4.8 belum tersedia di Indonesia

Indikator 4.8 ini merupakan indikator UNESCO yang digunakan untuk mengukur akses terhadap teknologi digital di sekolah dasar dan sekolah menengah. Namun sampai sekarang ketersediaan indikator ini belum ditemukan di Indonesia dan belum ada *proxy* yang dapat menggantikan. Indikator ini digunakan untuk mengukur salah satu target SDGs yaitu target 4.4, pada tahun 2030, meningkat sebesar x persen jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.

INDIKATOR 4.9 INDIKATOR BEASISWA UNTUK SISWA DARI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG. (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini digunakan untuk mengukur salah satu target SDGs yaitu target 4.b, pada tahun 2020 tumbuh sebesar x persen secara global jumlah beasiswa bagi negara khususnya LDCs, SIDS dan negara-negara Afrika berkembang untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, TIK, teknis, teknik dan program ilmiah di negara maju dan negara berkembang lainnya.

Data indikator 4.9 belum tersedia di Indonesia dan indikator masih perlu dikembangkan

INDIKATOR 4.10 INDIKATOR UNTUK TENAGA GURU/PENGAJAR YANG BERKUALITAS. (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini menggambarkan ketersediaan guru yang berkualitas. Setelah indikator ditentukan, indikator ini dapat disajikan oleh Balitbang Kemendiknas dengan mengacu pada ketentuan internasional tersebut.

Indikator ini digunakan untuk mengukur salah satu target SDGs yaitu target 4.c, pada tahun 2030 meningkat x persen pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya LDCs dan SIDS.

Indikator ini belum tersedia di Indonesia, dapat disajikan oleh Balitbang Kemendiknas dengan mengacu pada ketentuan internasional

Indikator 4.11 Adanya kerangka hukum yang menjamin hak atas pendidikan bagi semua anak untuk anak usia dini dan pendidikan dasar, dan yang menjamin usia minimal masuk ke lapangan kerja tidak di bawah tahun pendidikan dasar

Indikator ini menggambarkan jaminan hukum dari hak pendidikan. Indikator ini digunakan untuk mengukur salah satu target SDGs yaitu target 4.5, pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan untuk rentan, termasuk penyandang cacat, masyarakat adat, dan anak-anak dalam situasi rentan.

Aturan hukum terkait jaminan hak atas pendidikan dasar sudah dibuat pemerintah Indonesia yaitu Pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Sementara terkait dengan usia minimal masuk lapangan kerja diatur dalam Pasal 68 UU No 13 Tahun 2003 tentang larangan pengusaha mempekerjakan anak. Ketentuan dalam undang-undang tersebut, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Berarti 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja.

**MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN
MEMBERDAYAKAN SEMUA PEREMPUAN
DAN ANAK PEREMPUAN**

<http://www.bps.go.id>

**5 GENDER
EQUALITY**



- INDIKATOR 38. PREVALENSI WANITA 15-49 TAHUN YANG MENGALAMI KEKERASAN FISIK ATAU SEKSUAL OLEH PASANGAN INTIMNYA DALAM 12 BULAN TERAKHIR
- INDIKATOR 39. PERSENTASE KASUS KEKERASAN SEKSUAL DAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG DILAPORKAN, DISELIDIKI DAN DIJATUHI HUKUMAN
- INDIKATOR 40. PERSENTASE WANITA BERUSIA 20-24 TAHUN YANG TELAH MENIKAH SEBELUM BERUSIA 18 TAHUN
- INDIKATOR 41. PERSENTASE ANAK PEREMPUAN DAN WANITA BERUSIA 15-49 TAHUN YANG TELAH MENJALANI FEMALE GENITAL MUTILATION/CUTTING (FGM/C)
- INDIKATOR 42. JUMLAH RATA-RATA JAM PEKERJA DIBAYAR DAN TIDAK DIBAYAR (BEBAN KERJA TOTAL), BERDASARKAN JENIS KELAMIN
- INDIKATOR 43. PERSENTASE KURSI YANG DIDUDUKI PEREMPUAN DAN MINORITAS DI PARLEMEN NASIONAL DAN/ATAU KANTOR DAERAH (INDIKATOR MDG YANG DIMODIFIKASI)
- INDIKATOR 44. TINGKAT KEBUTUHAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB YANG TERPENUHI (INDIKATOR MDG YANG DIMODIFIKASI)
- INDIKATOR 5.1. KESENJANGAN GENDER DALAM UPAH, MENURUT SEKTOR KEGIATAN EKONOMI
- INDIKATOR 5.2. PROPORSI PEREMPUAN DI DEWAN PERUSAHAAN NASIONAL ATAU MULTINASIONAL

INDIKATOR 5.3-5.5...

TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN SEMUA PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN

INDIKATOR 38. PREVALENSI WANITA 15-49 TAHUN YANG MENGALAMI KEKERASAN FISIK ATAU SEKSUAL OLEH PASANGAN INTIMNYA DALAM 12 BULAN TERAKHIR

Data indikator 38 belum tersedia secara kontinyu, sehingga didekati dengan indikator Persentase wanita 15-49 tahun yang menjadi korban kejahatan

Mengetahui insiden dan prevalensi kekerasan menjadi langkah awal untuk memastikan kebijakan pencegahan tepat sasaran. Indikator ini mengukur terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual dan ancaman kekerasan terhadap perempuan. Karena sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh suami atau pasangan intim, maka indikator ini tepat untuk menangkap sebagian besar kasus kekerasan yang dialami perempuan. Pengukuran kekerasan terhadap perempuan lebih cocok menggunakan *time lag* 12 bulan, karena dapat menggambarkan perubahan level dan resiko kekerasan dari waktu ke waktu dibanding dengan pengukuran menggunakan *time lag* seumur hidup. Indikator ini dapat disagregasi berdasarkan frekuensi, usia, status perkawinan, perkotaan/pedesaan, jenis dan tingkat keparahan kekerasan.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 5.2, yaitu menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua wanita dan anak perempuan di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan manusia serta seksual serta jenis-jenis eksploitasi

Untuk melihat gambaran kekerasan, BPS bekerja sama dengan Kementerian PPA pernah melakukan survei berbasis rumah tangga yang terintegrasi dengan susenas. Namun Survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tersebut bersifat *ad-hoc*. Responden adalah semua perempuan yang berusia 18 tahun ke atas atau perempuan berusia di bawah 18 tahun yang pernah menikah. Hasil survei dapat menyajikan data secara nasional maupun pada level provinsi. Kekerasan terhadap perempuan tersebut dapat dirinci berdasarkan usia, status perkawinan, wilayah kota/desa, dan jenis tindak kekerasan yang dialami (kekerasan penghinaan, penganiayaan, penelantaran, seksual, dan lainnya).

INDIKATOR PROXY: PERSENTASE WANITA 15-49 TAHUN YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN

Saat ini, data prevalensi wanita 15-49 tahun yang mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intimnya dalam 12 bulan terakhir belum tersedia secara kontinyu, sehingga didekati dengan indikator "Persentase wanita 15-49 tahun yang menjadi korban kejahatan". Data prevalensi kekerasan yang rutin

Wanita 15-49 tahun yang menjadi korban kejahatan selama tahun 2010-2014 secara umum mengalami pengurangan dari 2,34 persen menjadi 1,74.

dikumpulkan oleh BPS menggunakan pendekatan persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan (pencurian, perampokan, pembunuhan, penipuan, perkosaan, dan lainnya). Pendekatan tersebut kurang spesifik pada korban kekerasan fisik atau seksual sehingga belum begitu tepat menjadi proxy untuk indikator 38 ini dan kurang tepat mengukur target 5.2.

Kejahatan tidak akan terjadi tanpa ada pelaku dan korban. Korban kejahatan lebih banyak terjadi pada wanita karena wanita dianggap makhluk yang memiliki fisik dan psikis lemah. Korban wanita sendiri juga memiliki peran penting dalam mendorong timbulnya kejahatan terhadap dirinya. Pada Gambar 5.1 terlihat bahwa wanita 15-49 tahun yang menjadi korban kejahatan selama tahun 2010-2014 secara umum mengalami pengurangan dari 2,34 persen menjadi 1,74. Pengurangan juga nampak baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. wanita 15-49 tahun yang menjadi korban kejahatan di daerah perkotaan lebih dominan dibandingkan di daerah pedesaan.

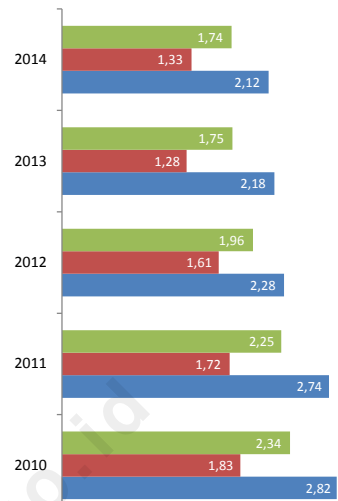
INDIKATOR 39. PERSENTASE KASUS KEKERASAN SEKSUAL DAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG DILAPORKAN, DISELIDIKI DAN DIJATUHI HUKUMAN

Kekerasan terhadap gender dan seksual terus meluas, dan sering berakhir kebal hukum. Indikator ini, direkomendasikan sebagai ukuran berdasarkan UNSCR 1325 mengenai perempuan, perdamaian dan keamanan, menilai bagaimana sistem kepolisian dan proses peradilan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Tiga proses penting yang dapat dilakukan ketika terjadi kekerasan antara lain : pelaporan, penyelidikan, dan hukuman. Pelaporan menunjukkan kepercayaan terhadap sistem hukum, penyelidikan menunjukkan komitmen polisi/pembentukan hukum, sedangkan hukuman menunjukkan keadilan yang dapat dicapai.

Indikator ini merupakan pendekatan yang baik untuk ukuran kualitas penegakan hukum dan akses terhadap keadilan di negara tertentu. Untuk mengetahui apakah sistem peradilan berjalan dengan baik, beberapa aspek harus diukur: kemampuan untuk memperbaiki kejahatan, apakah warga percaya dengan sistem kepolisian dan pengadilan, dan harga ganti rugi. Masing-masing dari potongan-potongan informasi memberikan gambaran penting dan fokus terhadap kelompok rentan dapat menjadi pengujian yang tepat bagi sistem peradilan secara keseluruhan.

Keterbatasan yang ada mencakup kekurangan data dan inkonsistensi dalam pelaporan di berbagai negara; kurangnya kepekaan gender, kapasitas dan sumber daya polisi dan sistem peradilan; praktik dan sikap diskriminatif yang terus-menerus, dan penyelesaian kejahatan secara informal yang sering terjadi

Gambar 5.1 Persentase wanita 15-49 tahun yang menjadi korban kejahatan, 2010-2014

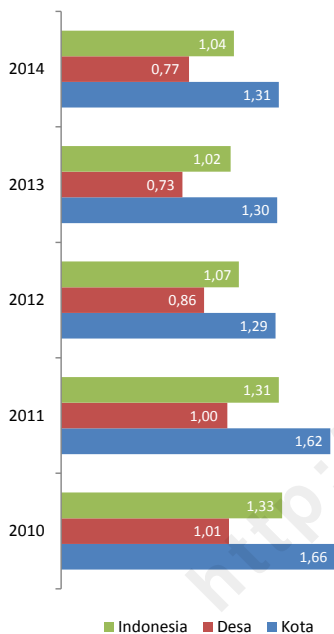


Sumber: Susenas, BPS

Indikator terkait yang tersedia di Indonesia adalah persentase wanita yang mengalami tindak kejahatan dan dilaporkan ke polisi. Indikator dikumpulkan oleh BPS secara rutin melalui Susenas. Namun, indikator tersebut masih terbatas karena tidak memberi informasi apakah kasus tersebut ditindaklanjuti dan diputuskan.

Selama tahun 2010-2014 wanita yang menjadi korban kejahatan dan kemudian melaporkan ke pihak polisi mengalami penurunan dari 1,66 persen menjadi 1,06 persen.

Gambar 5.2 Persentase wanita yang mengalami tindak kejahatan dan dilaporkan ke polisi, 2010-2014



Sumber: Susenas, BPS

dalam masyarakat merupakan tantangan utama yang sedang berlangsung.

Indikator ini dapat mengukur target 5.2 (menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua wanita dan anak perempuan di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan manusia dan seksual serta jenis-jenis eksploitasi), dan target 16.3 (mempromosikan aturan hukum di tingkat nasional dan internasional, serta menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua).

INDIKATOR PROXY: PERSENTASE WANITA YANG MENGALAMI TINDAK KEJAHATAN DAN DILAPORKAN KE POLISI

Indikator terkait yang tersedia di Indonesia adalah persentase wanita yang mengalami tindak kejahatan dan dilaporkan ke polisi. Indikator dikumpulkan oleh BPS secara rutin melalui Susenas. Namun, indikator tersebut masih terbatas karena tidak memberi informasi apakah kasus tersebut ditindaklanjuti dan diputuskan. Data dapat dirinci menurut kelompok umur. Pada dasarnya perolehan indikator ini sama dengan indikator 38, bedanya hanya di kelompok umur dan ada tambahan kegiatan, setelah menjadi korban kemudian dilaporkan ke polisi.

Kejahatan tidak bisa dihilangkan, karena selama manusia masih hidup tentu masalah-masalah sosial akan selalu ada di masyarakat. Satu masalah sosial dapat ditanggulangi maka masalah sosial lainnya akan muncul. Namun demikian agar tindak kejahatan itu dapat ditekan baik kuantitas maupun kualitasnya perlu ada pencegahan kejahatan, tidak saja merupakan kewajiban setiap warga negara baik sebagai warga masyarakat sipil maupun sebagai anggota POLRI dan juga didukung penegak hukum lainnya. Sering terjadi wanita yang menjadi korban kejahatan terutama korban perkosaan lebih memilih tidak melaporkan ke pihak yang berwajib karena khawatir terkuak aibnya. Demikian juga dalam proses peradilan, orang yang menjadi korban sering menjadi pihak yang kalah. Oleh karena itu sepatutnya perempuan akibat korban kejahatan terutama perkosaan mendapat perlindungan hukum.

Kasus wanita yang menjadi korban kejahatan dan kemudian melaporkan ke pihak polisi lebih sedikit daripada kasus wanita yang menjadi korban kejahatan (secara total). Dalam perkembangannya, selama tahun 2010-2014 wanita yang menjadi korban kejahatan dan kemudian melaporkan ke pihak polisi mengalami penurunan dari 1,66 persen menjadi 1,06 persen. Hal yang sama juga terjadi di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Kasus wanita yang menjadi korban kejahatan dan kemudian melaporkan ke pihak polisi lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan.

INDIKATOR 40. PERSENTASE WANITA BERUSIA 20-24 TAHUN YANG TELAH MENIKAH SEBELUM BERUSIA 18 TAHUN

Indikator ini bermanfaat untuk mengukur prevalensi pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pelanggaran HAM dan dapat menimbulkan kerusakan seumur hidup. Bukti menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah cepat banyak yang meninggalkan pendidikan formal dan sering mengalami kehamilan berisiko tinggi. Pengantin perempuannya juga berisiko mengalami pelecehan, eksploitasi dan pemisahan oleh keluarga dan teman-teman yang dapat berdampak besar pada kesehatan dan kesejahteraan.

Indikator 40 menjadi salah satu indikator untuk mengukur target 5.3 yaitu menghapuskan semua praktek-praktek berbahaya, seperti anak, pernikahan dini dan pernikahan paksa, serta mutilasi alat kelamin perempuan.

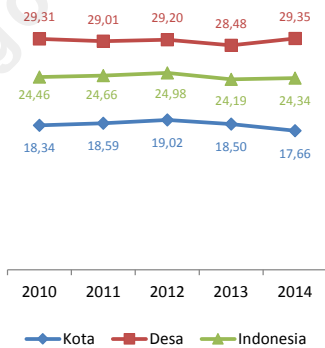
Indikator ini dapat diperoleh dari Susenas maupun SDKI. Data dihitung dengan menggunakan informasi umur responden wanita pada saat perkawinan pertama. Data dapat dirinci berdasarkan umur, wilayah kota-desa, dan berdasarkan kuintil pendapatan. Namun untuk mengetahui perkembangan indikator saat ini disajikan dari susenas. Konsep yang diambil dari susenas adalah persentase wanita umur 20-24 tahun yang berstatus kawin/hidup bersama atau berstatus kawin/ hidup bersama sebelum berusia 18 tahun.

Menurut data susenas, persentase wanita umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum berusia 18 tahun masih cukup tinggi. Angkanya berfluktuasi sekitar 24 sampai 25 persen tahun 2010-2014. Usia kawin pertama yang dilakukan setiap wanita memiliki resiko pada persalinannya. Semakin muda kawin pertama seorang wanita semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu dan anak. Pendewasaan usia perkawinan merupakan salah satu upaya untuk memperkecil resiko tersebut. Umumnya faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia dini adalah faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Dari ketiga faktor tersebut, ekonomi merupakan faktor yang dominan. Hal ini dilatarbelakangi oleh alasan kemiskinan sehingga orang tua tidak mampu membiayai sekolah anaknya, maka alternatif lain dengan menikahkannya.

Di pedesaan, persentase wanita umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum berusia 18 tahun lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Pada tahun 2014, di pedesaan jumlahnya mencapai 29,35 persen sedangkan di perkotaan 17,66 persen.

Indikator ini dapat diperoleh dari Susenas maupun SDKI

Gambar 5.3 Persentase Wanita Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin Sebelum Berusia 18 Tahun, 2010-2014



Sumber: Susenas, BPS

INDIKATOR 41. PERSENTASE ANAK PEREMPUAN DAN WANITA BERUSIA 15-49 TAHUN YANG TELAH MENJALANI FEMALE GENITAL MUTILATION/ CUTTING (FGM/C)

Saat ini indikator 41 belum dapat disajikan di Indonesia

Praktek mutilasi kelamin perempuan atau *Female Genital Mutilation* (FGM) diukur sebagai persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang merespon positif survei yang menanyakan apakah mereka telah melakukan FGM. FGM mengacu pada semua prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau semua kelamin eksternal perempuan atau cedera lain pada organ kelamin perempuan karena alasan non-medis. FGM belum diketahui manfaatnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Praktek ini mencerminkan ketidaksetaraan gender yang telah mengakar kuat dan merupakan bentuk diskriminasi ekstrim terhadap perempuan. Indikator dapat disagregasi menurut umur, etnis dan tingkat pendapatan. WHO membedakan FGM ke dalam 4 kategori : Tipe I, II, III dan IV.

Indikator 41 dapat mengukur target 5.3 dan target 5.6, yaitu menghapuskan semua praktek-praktek membahayakan, seperti pernikahan anak secara dini yang dipaksakan, serta mutilasi alat kelamin perempuan (target 5.3), dan menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak reproduksi yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action ICPD dan Beijing Platform for Action serta hasil dari ulasan dokumen konferensinya (target 5.6).

Di Indonesia FGM lebih dikenal dengan sunat perempuan. Untuk merespon polemik mengenai sunat perempuan, pada tahun 2013 variabel tersebut dicantumkan pada SDKI. Namun variabel yang dikumpulkan adalah persentase anak perempuan umur 0-11 tahun yang pernah disunat dan persentase kategori umur ketika disunat. Kelompok umur yang ditanyakan berbeda dengan SDSN. Data bisa didisagregasi berdasarkan umur, pendidikan dan pekerjaan kepala rumah tangga, wilayah kota-desa, kuintil pendapatan, dan umur ketika disunat. Indikator tidak bisa dirinci berdasarkan empat kategori FGM. Sehingga untuk saat ini indikator ini belum dapat disajikan di Indonesia.

INDIKATOR 42. JUMLAH RATA-RATA JAM PEKERJA DIBAYAR DAN TIDAK DIBAYAR (BEBAN KERJA TOTAL), BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Rata-rata penduduk Indonesia bekerja selama 40 jam dalam seminggu. Hal ini terjadi hampir setiap tahun selama tahun 2010-2015, kecuali di tahun 2010 dan 2013.

Indikator 42 ini menangkap beban kerja individu, baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar. Berdasarkan rekomendasi Komisi Stiglitz (2007) dan indikator gender minimum yang diusulkan oleh *Inter-agency and Expert Group on Gender Statistic* (IAEG-GS).

Pengukuran pekerjaan yang tidak dibayar dapat menggambarkan kontribusi ekonomi, termasuk barang dan jasa yang diproduksi rumah tangga dan juga menggambarkan beban

kerja perempuan tak dibayar yang tidak proporsional. Misalnya, di Nepal dan Kenya, ketika pekerja dibayar dan tak dibayar digabungkan, perempuan bekerja 1,4 jam untuk setiap 1 jam bekerja laki-lakinya. Pengukuran pekerjaan tak dibayar ini juga penting untuk menjamin keefektifan program pemberdayaan perempuan. Waktu yang dihabiskan perempuan dan anak perempuan untuk mengumpulkan air misalnya, atau pada aktivitas rumah tangga dapat dikurangi secara signifikan dengan analisis dampak gender terhadap penyediaan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, seperti listrik, jalan sekolah di pedesaan dan air.

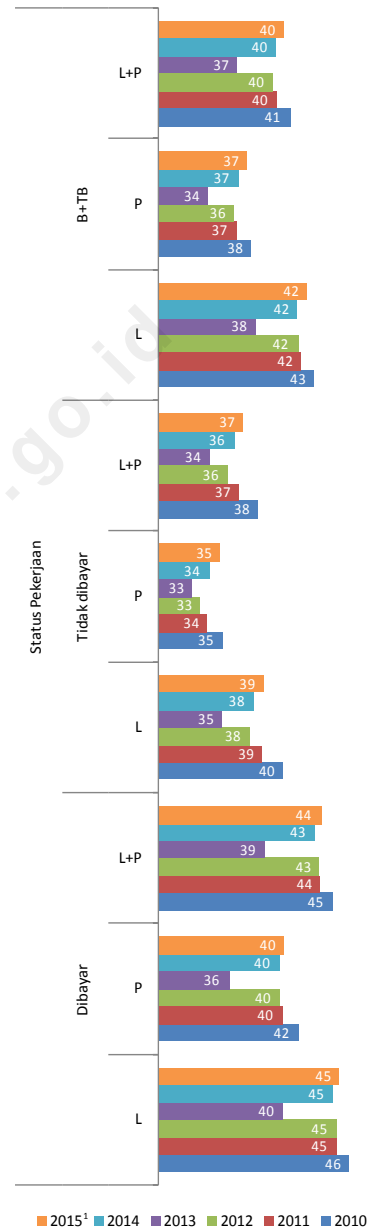
Data dapat diperoleh melalui Sakernas. Informasi yang diperoleh adalah jumlah jam kerja individu dari seluruh pekerjaan setiap hari selama seminggu yang lalu. Data bisa dirinci menurut jenis kelamin dan umur dengan level penyajian sampai dengan provinsi. Namun dalam penyajian kali ini hanya dirinci menurut jenis kelamin dan level nasional. Konsep pekerja dibayar di sakernas meliputi berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, dan pekerja bebas di non pertanian. Sementara pekerja tak dibayar meliputi berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, dan pekerja keluarga/tak dibayar.

Indikator ini menjadi salah satu indikator untuk mengukur Target 5.4 yaitu mengakui dan menghargai perawatan tak dibayar dan pekerjaan domestik melalui penyediaan layanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, serta peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga secara nasional

Gambar 5.4 memperlihatkan bahwa rata-rata total penduduk Indonesia bekerja selama 40 jam dalam seminggu. Hal ini terjadi hampir setiap tahun selama tahun 2010-2015, kecuali di tahun 2010 dan 2013. Jam kerja 40 jam ini termasuk jam kerja yang cukup panjang jika dibandingkan dengan negara-negara eropa seperti Belanda, Norwegia, Irlandia, Jerman, dan seterusnya. Di negara-negara eropa tersebut rata-rata penduduk hanya bekerja berkisar antara 29 sampai dengan 36 jam seminggu (<http://bisnis.liputan6.com/read/650809/10-negara-dengan-jam-kerja-tersingkat-di-dunia>).

Kesetaraan gender muncul karena sebagian masyarakat berpendapat wanita selalu diposisikan di nomor dua. Namun pendapat ini mulai berubah seiring menyempitnya perbedaan tingkat pendidikan dan tingkat pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan kesetaraan gender telah berjalan dengan baik. Secara umum wanita Indonesia sudah mencapai kemajuan yang nyata dalam pendidikan, kesempatan kerja, dan keterlibatan dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. Namun demikian kondisi fisik perempuan secara kodrat lebih rentan dibandingkan dengan laki-laki, sehingga berpengaruh

Gambar 5.4 Rata-Rata Jam Kerja Pekerja Dibayar dan Tidak Dibayar, 2010-2015



Catatan : ¹ Februari 2015

Sumber : Sakernas, BPS

ke lamanya melakukan aktifitas pekerjaan. Oleh karena itu rata-rata jam kerja disesuaikan dengan kemampuan fisik perempuan. Hal ini dapat dilihat dari hasil Sakernas yang menjelaskan bahwa rata-rata jam kerja pekerja perempuan selama tahun 2010-2015 berkisar antara 34 sampai dengan 38 jam seminggu, lebih pendek dibandingkan rata-rata jam kerja pekerja laki-laki, berkisar antara 38 sampai dengan 43 jam seminggu.

Jika dibedakan berdasarkan status pekerjaan, perempuan yang bekerja mendapatkan upah menghabiskan waktu bekerja lebih panjang dibandingkan dengan perempuan yang bekerja dengan tidak mendapatkan upah/imbalan. Perempuan dengan status pekerja dibayar rata-rata menghabiskan waktu bekerja antara 36 sampai 42 jam seminggu, sedangkan perempuan dengan status pekerja tak dibayar rata-rata bekerja sekitar 33 sampai 35 jam seminggu. Hal ini menunjukkan peran perempuan yang selama ini dianggap hanya menghabiskan waktunya pada kegiatan rumah tangga, sudah menghabiskan sebagian waktunya pada kegiatan yang bersifat menghasilkan pendapatan. Menghasilkan pendapatan di sini dalam arti secara langsung mendapatkan penghasilan maupun secara tidak langsung membantu mendapatkan penghasilan.

INDIKATOR 43. **PERSENTASE KURSI YANG DIDUDUKI PEREMPUAN DAN MINORITAS DI PARLEMEN NASIONAL DAN/ATAU KANTOR DAERAH (INDIKATOR MDG YANG DIMODIFIKASI)**

Indikator MDG yang dimodifikasi ini digunakan untuk mengukur rasio persentase kursi yang diduduki perempuan dan kaum minoritas (termasuk masyarakat adat) di badan legislatif (nasional, regional, lokal) dibagi berdasarkan populasi masing-masing. Kaum minoritas yang dimaksud adalah kelompok yang secara jumlah lebih sedikit dibanding jumlah seluruh penduduk di suatu negara, berada dalam posisi non-dominan, yang anggotanya menjadi warga negara di suatu negara, memiliki karakteristik etnis khusus, agama atau bahasa yang berbeda dari penduduk seluruh populasi serta menunjukkan secara implisit rasa solidaritas, yang ditujukan untuk melestarikan budaya, tradisi, agama atau bahasa mereka.

Hal ini menunjukkan sejauh mana perempuan dan kaum minoritas memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang perempuan dan kaum minoritas dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya. Keikutsertaan mereka di badan pengambil keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan bagi perempuan dan kaum minoritas.

Indikator ini tidak dapat mengukur kekuatan pengambil keputusan politik yang sebenarnya. Perempuan dan kaum

Data untuk indikator 43 didekati dengan persentase perempuan yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

minoritas masih mengalami kendala dalam membawa mandat politik yang diberikan kepada mereka. Selain itu, kehadiran perempuan dan kaum minoritas di parlemen bukan berarti secara otomatis menunjukkan dukungan terhadap isu perempuan dan kaum minoritas.

Indikator 43 ini dapat digunakan untuk mengukur target SDGs seperti:

- Target 5.1 Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di mana saja
- Target 5.5 Menjamin partisipasi perempuan secara penuh dan efektif serta kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di setiap tingkat pengambilan keputusan dalam bidang politik, ekonomi, dan Kehidupan bermasyarakat
- Target 5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan suara dan undang-undang diberlakukan untuk promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan gadis-gadis di semua tingkatan

Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPR tingkat nasional memiliki tren meningkat walaupun berfluktuasi, dimana puncak keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPR dicapai pada pemilu tahun 2009 (17,86 persen).

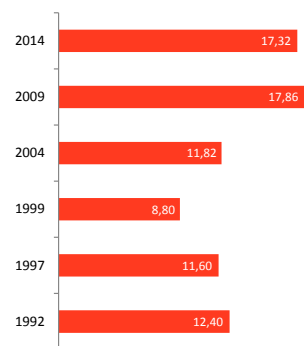
INDIKATOR PROXY: PERSENTASE PEREMPUAN YANG MENJADI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

Data untuk indikator ini belum tersedia, sehingga didekati dengan persentase perempuan yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Data diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dikutip melalui Publikasi Statistik Indonesia, BPS.

Keterwakilan perempuan di keanggotaan DPR menjadi salah satu tolok ukur dalam mengakomodasi isu kesetaraan jender di dunia politik. Sejak penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kemudian diikuti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Partai politik yang isinya harus menyertakan keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya di tingkat pusat jika ingin menjadi peserta Pemilu, maka pintu peluang bagi perempuan untuk berpolitik semakin terbuka lebar.

Sejak pemilu legislatif periode tahun 1950 dilaksanakan, perempuan sudah menduduki kursi di DPR. Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPR tingkat nasional memiliki trend meningkat, walaupun berfluktuasi (Gambar 5.5). Puncak keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPR dicapai pada pemilu tahun 2009 (17,86 persen). Undang-undang nomor 12 tahun 2013 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang menerapkan kebijakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam susunan daftar calon anggota legislatif hanya mampu menempatkan perempuan di DPR sebesar 17,32 persen pada pemilu tahun 2014. Dalam

Gambar 5.5 Persentase Perempuan yang Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 1992-2014



Sumber: Statistik Indonesia 2015

pencapaian MDGs, indikator ini merupakan salah indikator yang optimis dapat dicapai (*on track*). Dalam agenda pembangunan selanjutnya (SDGs), jika keterwakilan perempuan di DPR mengikuti trend yang selalu meningkat, maka target 5.1, 5.5, dan 5.c akan dapat terpenuhi.

INDIKATOR 44. TINGKAT KEBUTUHAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) YANG TERPENUHI (INDIKATOR MDG YANG DIMODIFIKASI)

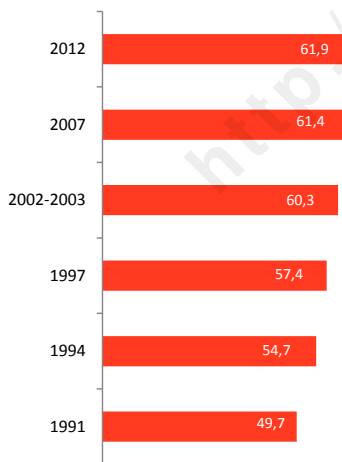
Indikator ini merupakan perbaikan indikator MDG *unmet need* yaitu kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (persentase pasangan berstatus menikah yang tidak ingin menambah anak atau menunda mendapatkan anak lagi, tetapi tidak menggunakan cara-cara pencegahan kehamilan). Indikator ini dihitung menggunakan persentase semua wanita yang berada pada usia reproduksi yang telah menikah. Indikator 44 ini menggambarkan proporsi terpenuhinya kebutuhan KB, yaitu persentase perempuan yang tidak ingin memiliki anak lagi atau menunda anak berikutnya dan sedang menggunakan metode kontrasepsi modern. Indikator ini dapat diterima secara luas karena merefleksikan sejauh mana pasangan, masyarakat dan sistem kesehatan dalam mendukung perempuan untuk bertindak atas pilihan mereka dan memantau apakah keinginan perempuan untuk menggunakan kontrasepsi telah terpenuhi.

Indikator ini mendapat perhatian lebih terhadap ketidakadilan dalam akses layanan dan digunakan untuk mendukung HAM dalam kesehatan reproduksi. Perempuan memiliki hak untuk menentukan untuk memiliki anak atau tidak, begitupun dengan pilihan berapa jumlah anak atau memberi jarak kehamilan, dan KB merupakan dimensi utama kesehatan reproduksi. Di negara kurang berkembang, terdapat seperempat hingga seperlima kehamilan yang tidak diinginkan.

Indikator 44 ini dapat digunakan untuk mengukur target 3.7 (pada 2030 menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional) dan target 5.6 (Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak reproduksi yang telah disepakati sesuai dengan Program Aksi ICPD dan latform Beijing Aksi dan dokumen hasil peninjauan konferensi mereka)

Informasi mengenai kebutuhan pelayanan KB dapat diperoleh melalui SDKI. Menurut SDKI, persentase kebutuhan KB yang terpenuhi dengan metode modern adalah pemakaian alat/ cara kontrasepsi modern dibagi total dari *unmet need* dan jumlah pemakaian kontrasepsi modern (*met need*). Kebutuhan ber-KB yang terpenuhi dapat dirinci menurut fungsinya (untuk menjarangkan kelahiran dan membatasi kelahiran). Data dapat dirinci menurut kelompok umur, daerah kota-desa, pendidikan,

Gambar 5.6 Tingkat Kebutuhan Pelayanan KB yang Terpenuhi, 1991-2012



Sumber: SDKI

jumlah anak yang masih hidup, dan kuintil pendapatan dan lain-lain. Namun untuk analisis saat ini hanya disajikan secara total nasional.

Program KB di Indonesia sejauh ini merupakan salah satu program yang cukup sukses. Keberhasilan program KB ini berdampak baik pada penurunan angka fertilitas. Hal yang paling mendasar dari keberhasilan pelayanan KB adalah ketersediaan alat-alat kontrasepsi, karena tanpa ketersediaan alat kontrasepsi yang memadai, maka pelayanan KB yang berkualitas sulit untuk terwujud.

Pemerintah memegang peranan penting dalam penyediaan subsidi alat-alat kontrasepsi bagi setiap pasangan usia subur. Pemenuhan kebutuhan akan alat kontrasepsi ini bukan sesuatu yang mudah, mengingat jumlah peserta KB untuk setiap daerah berbeda dan besarnya tidak dapat ditentukan. Kendala lainnya adalah akses pelayanan, kualitas petugas pelayanan, dana, tidak seimbang antara jumlah petugas layanan dengan jumlah klien, serta ketersediaan alat kontrasepsi di suatu tempat layanan yang terbatas. Karena jumlah alat kontrasepsi yang terbatas maka konsumen tidak dapat memilih sesuai dengan keinginannya. Sehingga terjadi hubungan positif antara ketersediaan alat kontrasepsi dengan kinerja keluarga berencana.

Menurut SDKI, pasangan usia subur yang terpenuhi kebutuhan pelayanan KB pada tahun 2012 baru mencapai sekitar 62 persen (Gambar 5.6). Berarti masih ada sekitar 38 persen pasangan usia subur yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya. Namun jika dilihat perkembangannya, sejak tahun 1991 sampai dengan 2012 pasangan usia subur yang terpenuhi kebutuhan pelayanan KB selalu meningkat. Peningkatan pemenuhan kebutuhan alat kontrasepsi ini berakibat pada semakin menurunnya angka kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi (indikator MDGs). Untuk memenuhi target 3.7 dan 5.6, terkait akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk KB ini, dibutuhkan peran pemerintah untuk mewujudkannya, terutama dalam hal penyediaan alat kontrasepsi dan kemudahan masyarakat dalam mengaksesnya.

Menurut SDKI, pasangan usia subur yang terpenuhi kebutuhan pelayanan KB baru mencapai 62 persen Pada tahun 2012

INDIKATOR 5.1. KESENJANGAN GENDER DALAM UPAH, MENURUT SEKTOR KEGIATAN EKONOMI

Indikator ini untuk mengetahui kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan, dinyatakan sebagai persentase dari pendapatan laki-laki. Indikator ini mengukur kesetaraan dan diskriminasi gender, dan dipisahkan berdasarkan sektor kegiatan.

Indikator 5.1 ini dapat digunakan untuk mengukur target SDGs, antara lain;

Target 5.1 Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap

perempuan dan anak perempuan di mana saja

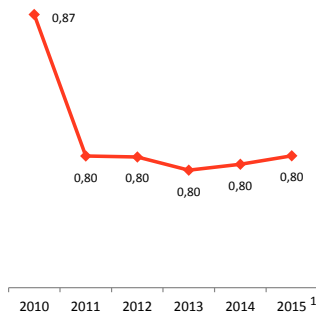
Target 5.5 Menjamin partisipasi perempuan secara penuh dan efektif serta kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di setiap tingkat pengambilan keputusan dalam bidang politik, ekonomi, dan kehidupan bermasyarakat

Target 5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan suara dan undang-undang diberlakukan untuk promosi kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan gadis-gadis di semua tingkatan

Target 8.5 Tahun 2030, mencapai pekerjaan yang penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang cacat, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya

Target 10.4 Mengadopsi kebijakan terutama kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial dan mencapai kesetaraan yang lebih besar secara progresif.

Gambar 5.7 Rasio Rata-Rata Upah yang Diterima Pekerja Perempuan Terhadap Laki-Laki, 2010-2015



Catatan: ¹ Februari 2015
Sumber: Sakernas, BPS

Di Indonesia, indikator kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan menggunakan rasio upah yang diterima pekerja perempuan terhadap upah yang diterima pekerja laki-laki yang diperoleh dari Sakernas dan dapat dipisahkan berdasarkan sektor lapangan usaha. Pendapatan yang dimaksud di sini adalah upah/gaji/pendapatan bersih yang diterima selama sebulan yang lalu dari pekerjaan utama baik berupa uang maupun barang. Indikator ini juga merupakan komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG).

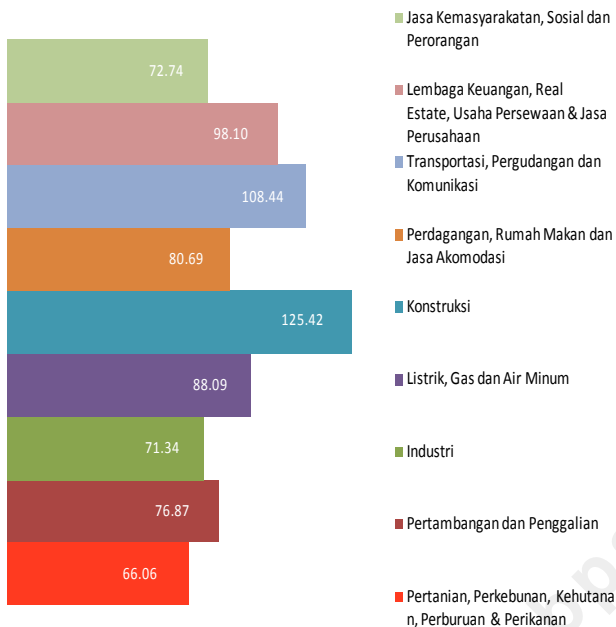
Disparitas upah gender ini penting karena akan sangat berdampak pada kehidupan pekerja perempuan dan seluruh keluarganya terutama ketika perempuan tersebut adalah pencari nafkah tunggal dan orang tua tunggal yang harus bisa membagi waktu kerjanya dengan mengurus rumahtangga dan anak. Data Sakernas menunjukkan bahwa secara umum pada tahun 2010 rasio rata-rata upah yang diterima pekerja perempuan terhadap laki-laki mencapai sekitar 0,87 (Gambar 5.7). Hal ini berarti upah yang diterima pekerja perempuan nilainya sekitar 87 persen dari upah yang diterima pekerja laki-laki, atau ada kesenjangan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki sekitar 13 persen. Kesenjangan upah pada tahun berikutnya sedikit melebar menjadi sekitar 20 persen dan bertahan hingga tahun 2015.

Pada tahun 2014 kesenjangan upah pekerja perempuan dan pekerja laki-laki terjadi pada semua sektor ekonomi. Posisi upah pekerja perempuan di sebagian besar sektor masih di bawah upah pekerja laki-laki, kecuali di sektor konstruksi (sektor 5) dan sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi (sektor 7).

Hampir semua negara di dunia sudah melakukan kajian yang menitikberatkan pada disparitas upah secara gender dan hasilnya menunjukkan adanya disparitas antargender baik di negara maju maupun di negara berkembang. Kesenjangan upah antar gender tertinggi terjadi di Azerbaijan yaitu sebesar 46 persen, dan terendah adalah Paraguay dengan 4 persen.

Sedangkan rata-rata jumlah kesenjangan antar gender di dunia masih mencapai angka 18 persen. Artinya kesenjangan upah

Gambar 5.8 Rasio Rata-Rata Upah yang Diterima Pekerja Perempuan Terhadap Laki-Laki menurut potensi ekonomi, 2014



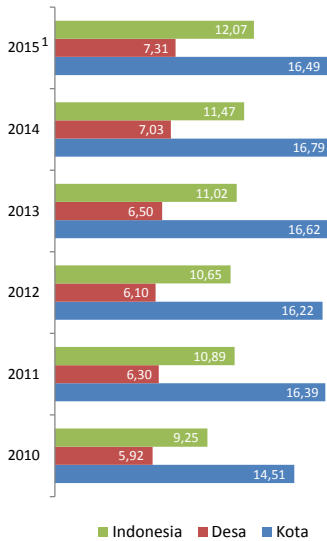
Sumber: Sakernas, BPS

antar gender di Indonesia masih di atas rata-rata kesenjangan di dunia. Masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target 5.1, 5.5, 5.c, 8.5, dan 10.4.

Jika dilihat menurut sektor, kesenjangan upah pekerja perempuan dan pekerja laki-laki terjadi pada semua sektor ekonomi. Posisi upah pekerja perempuan di sebagian besar sektor masih di bawah upah pekerja laki-laki, kecuali di sektor konstruksi (sektor 5) dan sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi (sektor 7) (Gambar 5.8). Di sektor 5 dan sektor 7 rata-rata upah pekerja perempuan lebih tinggi dibandingkan rata-rata upah pekerja laki-laki. Upah pekerja perempuan lebih tinggi sekitar 25 persen di sektor 5 dan sekitar 8 persen di sektor 7. Kondisi seperti ini terjadi karena jika ditelusuri jenis pekerjaan yang diduduki pada sektor 5 dan sektor 7, ternyata jenis pekerjaan tenaga kerja perempuan mayoritas menjadi tenaga profesional/teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta pejabat pelaksana dan tenaga tata usaha (Sakernas, 2014). Sebaliknya tenaga kerja laki-laki yang bekerja di sektor 5 dan sektor 7 lebih dominan menduduki jenis pekerjaan sebagai tenaga produksi operator alat angkutan, dan pekerja kasar. Perbedaan jenis pekerjaan ini berkaitan dengan pendapatan, dimana pendapatan tenaga kerja perempuan lebih tinggi dibandingkan pendapatan tenaga kerja laki-laki.

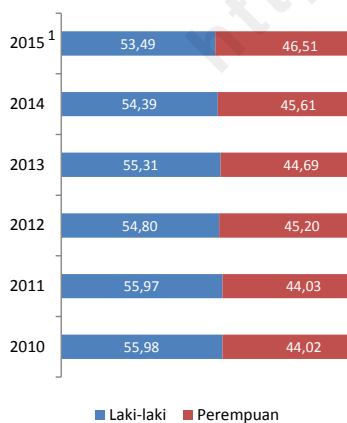
Data indikator 5.2. belum tersedia, didekati dengan data persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, kepemimpinan, dan teknisi

Gambar 5.9 Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Kepemimpinan dan Teknisi, 2010-2015



Catatan: ¹ Februari 2015
 Sumber: Sakernas, BPS

Gambar 5.10 Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Kepemimpinan dan Teknisi menurut Gender, 2010-2015



Catatan: ¹ Februari 2015
 Sumber: Sakernas, BPS

INDIKATOR 5.2. PROPORSI PEREMPUAN DI DEWAN PERUSAHAAN NASIONAL ATAU MULTINASIONAL

Indikator tambahan ini adalah persentase seluruh perempuan di dewan perusahaan nasional/ multinasional dan merupakan ukuran kesetaraan gender.

INDIKATOR PROXY: PERSENTASE PEREMPUAN SEBAGAI TENAGA MANAGER, PROFESIONAL, KEPEMIMPINAN DAN TEKNISI

Di Indonesia indikator ini didekati dengan persentase perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, kepemimpinan, dan teknisi, yang diperoleh melalui Sakernas. Indikator ini menunjukkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan pada masalah pemerintahan, kehidupan ekonomi dan sosial. Keterlibatan perempuan pada posisi ini memberi gambaran kemajuan peranan perempuan. Indikator ini juga merupakan komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Indikator 5.2 ini dapat digunakan untuk mengukur target 5.5 (Menjamin partisipasi perempuan secara penuh dan efektif serta kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di setiap tingkat pengambilan keputusan dalam bidang politik, ekonomi, dan kehidupan bermasyarakat) dan 5.c (Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang tepat dan undang-undang yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan).

Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, swasta, dan organisasi sosial lainnya masih relatif rendah, mengingat masih terbatasnya perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan/managerial, administrasi, dan teknisi. Namun dilihat perkembangannya (Gambar 5.9), ada kecenderungan peningkatan partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional dari 9,25 persen di tahun 2010 menjadi 12,07 persen pada tahun 2015.

Jika ditinjau berdasarkan wilayah, keterwakilan perempuan sebagai tenaga manager, profesional, kepemimpinan dan teknisi di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Hal ini mengingat di perkotaan kesempatan menjadi tenaga profesional lebih banyak dibandingkan di pedesaan. Sejak tahun 2011 jumlahnya mencapai 16 persen lebih, sebaliknya di pedesaan masih di bawah 8 persen.

Dilihat berdasarkan gender (Gambar 5.10), perempuan yang menjadi tenaga profesional masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Namun kesenjangan tidak terlalu lebar, jumlahnya sudah lebih dari 44 persen terhadap seluruh jumlah tenaga profesional (laki-laki+perempuan). Merujuk pada perkembangan

selama tahun 2010-2015, persentase perempuan yang menjadi tenaga profesional cenderung meningkat dari 44 persen menjadi 47 persen. Melihat perkembangan keterwakilan perempuan sebagai tenaga profesional ini, cukup optimis untuk mencapai target 5.5 dan target 5.C.

INDIKATOR 5.3 PERSENTASE PEREMPUAN TANPA PENDAPATAN SENDIRI

Indikator tambahan ini mengukur kepala rumah tangga perempuan atau istri yang tidak memiliki pendapatan mandiri. Indikator ini menunjukkan indikasi ketergantungan ekonomi perempuan dalam rumah tangga. Indikator ini dapat diperoleh melalui Sakernas yaitu perempuan yang berstatus sebagai kepala rumah tangga ataupun istri yang tidak bekerja dan menjadi pekerja keluarga/ tidak dibayar.

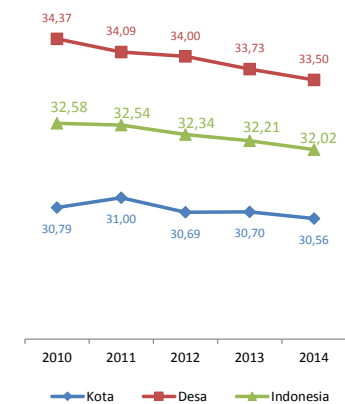
Indikator 5.3 ini dapat digunakan untuk mengukur target 5.5 (Menjamin partisipasi perempuan secara penuh dan efektif serta kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di setiap tingkat pengambilan keputusan dalam bidang politik, ekonomi, dan kehidupan bermasyarakat) dalam SDGs.

Dalam kehidupannya perempuan membutuhkan kemandirian ekonomi dan kemandirian untuk meningkatkan kesempatan mereka dalam menjalani kebebasan hidup dan bebas dari kekerasan pasangan hidup. Kemandirian ekonomi mengacu pada suatu kondisi di mana perempuan memiliki akses sendiri ke berbagai peluang ekonomi dan sumber daya agar dapat memenuhi kebutuhan sendiri serta orang-orang yang menjadi tanggungannya. Perempuan menjadi mandiri secara ekonomi jika memiliki kesempatan mengembangkan potensi dirinya dengan mempunyai pendapatan sendiri. Kemandirian perempuan dalam bidang ekonomi akan membebaskan perempuan dari ketergantungan ekonomi terhadap laki-laki, sekaligus sebagai perisai atas kekerasan dengan latar belakang ketergantungan ekonomi.

Kemandirian ekonomi perempuan ini bukan dalam rangka memunculkan otoritas perempuan terhadap laki-laki, namun menjadi bagian dari implementasi konsep perempuan dan pembangunan. Konsep ini secara umum bertujuan untuk mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan. Menurut data Sakernas, persentase perempuan yang berstatus sebagai kepala rumah tangga ataupun istri yang tidak bekerja dan menjadi pekerja keluarga/ tidak dibayar pada tahun 2010 ada sekitar 33 persen dan turun menjadi sekitar 32 persen pada tahun 2014. Artinya di Indonesia ada sekitar 68 persen perempuan memiliki pendapatan sendiri, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pasangannya dan kemungkinan sudah mandiri secara ekonomi. Meskipun ada peningkatan selama tahun 2010-2014, namun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Dalam hal ini pencapaian target 5.5 untuk partisipasi perempuan di bidang

Persentase perempuan yang berstatus sebagai kepala rumah tangga ataupun istri yang tidak bekerja dan menjadi pekerja keluarga/ tidak dibayar sekitar 32 persen pada tahun 2014.

Gambar 5.11 Persentase Perempuan yang Berstatus Sebagai Kepala Rumah Tangga ataupun Istri yang Tidak Bekerja dan Menjadi Pekerja Keluarga/ Tidak Dibayar, 2010-2014



Sumber: Sakernas, BPS

ekonomi pada potret awal SDGs baru sekitar 68 persen.

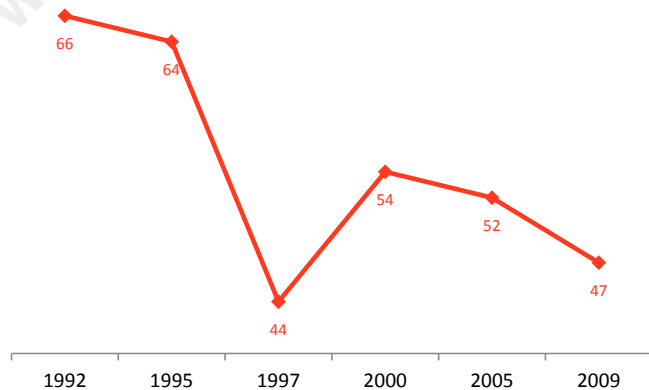
Perempuan yang tidak berpendapatan sendiri di pedesaan lebih banyak dibandingkan di daerah perkotaan, namun selisihnya tidak terlalu besar, hanya sekitar 3 persen. Pertumbuhan angkatan kerja perempuan yang tinggi di pedesaan tidak terserap penuh dalam pasar kerja di pedesaan yang mayoritas berada di sektor pertanian, sehingga pertumbuhan angka pengangguran perempuan di desa tinggi. Sebagian perempuan berusaha untuk bekerja mendapatkan penghasilan di daerah perkotaan.

INDIKATOR 5.4 ADOLESCENT BIRTH RATE (INDIKATOR MDG)

Indikator tambahan ini merupakan indikator jumlah kelahiran per 1.000 wanita usia 15-19 tahun dan bertujuan untuk mengetahui perkembangan kehamilan remaja. Untuk mengetahui perkembangan kehamilan remaja dapat didekati dengan indikator usia rata-rata ibu saat kelahiran anak pertama. Data dapat dirinci menurut daerah kota dan desa, pendidikan, serta kuintil kekayaan. Namun penyajian saat ini hanya sampai daerah kota dan desa.

Indikator 5.4 ini dapat digunakan untuk memenuhi target 3.7 yaitu pada 2030 menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan

Gambar 5.13. Adolescent Birth Rate per 1000 Women, 1992-2009



Sumber: SDKI, BPS

reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

Fertilitas remaja merupakan isu penting dari segi kesehatan dan sosial karena berhubungan dengan tingkat morbiditas serta mortalitas ibu dan anak. Ibu melahirkan berusia remaja, terutama di bawah usia 18 tahun, lebih berpeluang untuk mengalami masalah pada bayinya atau bahkan mengalami kematian yang berkaitan dengan persalinan dibandingkan

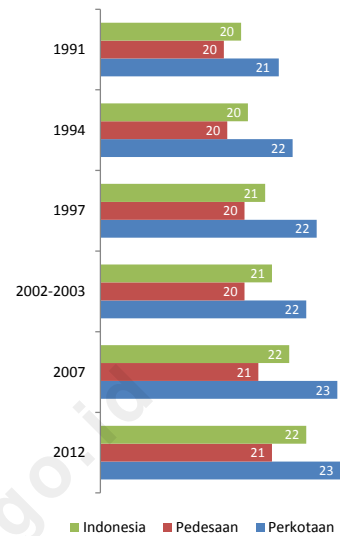
Pada tahun 2012, usia rata-rata ibu saat kelahiran anak pertama yaitu umur 22 tahun

Jumlah kelahiran per 1.000 wanita usia 15-19 tahun masih cukup tinggi, meskipun trennya menurun dari 1992-2009. Jumlah kelahiran per 1000 remaja (usia 15-19 tahun) di Indonesia masih mencapai 47 kelahiran pada tahun 2009

dengan wanita yang lebih tua. Selain itu, melahirkan pada usia muda mengurangi kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan atau mendapat pekerjaan. Secara umum menurut hasil SDKI menunjukkan bahwa usia rata-rata ibu saat kelahiran anak pertama mengalami kenaikan dari umur 20 tahun pada tahun 1991 menjadi 22 tahun pada tahun 2012 (Gambar 5.12). Hal ini berarti rata-rata usia perempuan Indonesia pada saat melahirkan pertama kali sudah mencukupi dan melewati masa-masa rawan, karena dalam kondisi siap melakukan persalinan. Hal ini berlaku juga di baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, usia rata-rata ibu melahirkan anak pertama sudah 20 tahun lebih.

Namun demikian, jika diperhatikan dari jumlah kelahiran per 1.000 wanita usia 15-19 tahun masih cukup tinggi, meskipun trennya menurun dari 1992-2009. Jumlah kelahiran per 1000 remaja (usia 15-19 tahun) di Indonesia masih mencapai 47 kelahiran pada tahun 2009. Biasanya perempuan berisiko tinggi mengalami fertilitas pada usia remaja adalah mereka yang tinggal di pedesaan, berpendidikan rendah, tidak bekerja dan berstatus ekonomi rendah. Di tingkat sosial masyarakat, ada hubungan yang kuat antara melahirkan pada usia remaja dengan rendahnya tingkat pendidikan, karena membawa dampak negatif pada posisi sosial mereka di masyarakat.

Gambar 5.12 Usia Rata-Rata Ibu Saat Kelahiran Anak Pertama, 1991-2012



Sumber: SDKI

INDIKATOR 5.5 PERSENTASE ANAK MUDA YANG MENERIMA PENDIDIKAN SEKSUALITAS YANG KOMPREHENSIF

Pendidikan seksualitas yang komprehensif meliputi program yang sesuai dengan usia baik di dalam dan di luar sekolah yang memungkinkan anak muda untuk membuat keputusan tentang seksualitas mereka. Program-program ini mencakup informasi ilmiah tentang pembangunan manusia, anatomi, dan kehamilan, serta informasi tentang kontrasepsi dan infeksi menular seksual (IMS). UNFPA memonitor jenis program. Mereka merekomendasikan kurikulum yang harus menangani masalah-masalah sosial sekitar seksualitas dan reproduksi, “termasuk norma-norma budaya, kehidupan keluarga dan hubungan interpersonal.”

Indikator ini dapat mengukur Target 3.7 (pada 2030 menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional) dan Target 5.6 (menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak reproduksi yang telah disepakati sesuai dengan Program Aksi ICPD dan latform Beijing Aksi dan dokumen hasil peninjauan konferensi mereka).

INDIKATOR PROXY: PERSENTASE PENDUDUK USIA 15-24 TAHUN DENGAN PENGETAHUAN KOMPREHENSIF MENGENAI HIV/AIDS

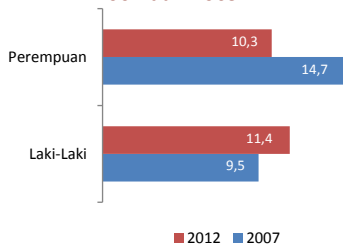
Data indikator 5.5. belum tersedia, didekati dengan data persentase penduduk usia 15-24 tahun dengan pengetahuan komprehensif mengenai HIV/AIDS

Indikator 5.5 belum tersedia di Indonesia, sehingga didekati dengan Indikator Persentase penduduk usia 15-24 tahun dengan pengetahuan komprehensif mengenai HIV/AIDS.

Menurut data dari Survei Kesehatan Ibu dan Anak (SDKI) 2012 terkait dengan pengetahuan komprehensif HIV dan AIDS penduduk (14-25 thn) tentang AIDS masih minim, yaitu 11,4 persen untuk remaja laki-laki dan 10,3 remaja perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa capaian target MGDs pada 2015 untuk Pengetahuan Komprehensif penduduk (15-24 tahun) masih jauh untuk mencapai 95 persen.

Untuk mendorong upaya peningkatan Pengetahuan Komprehensif pada kategori HIV dan AIDS tersebut, pemerintah mengeluarkan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 5 Menteri terdiri dari Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Sosial, dan Menteri Agama untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan upaya melalui berbagai lingkup seperti penyuluhan, pengembangan kurikulum, *Training of Trainers* (TOT), pembiayaan hingga Monitoring dan evaluasinya. SKB ini dibuat pada tahun 2012 dan berlaku untuk 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing kementerian. SKB ini menjadi pengingat untuk peningkatan aspek pendidikan, dan pemaparan Informasi untuk masyarakat umum yang dari status epidemi HIV dan AIDS sudah mengarah ke populasi umum, dengan semakin meningkatnya prevalensi HIV pada kategori usia 15-24 tahun.

Gambar 5.14. Persentase Penduduk Usia 15-24 Tahun dengan Pengetahuan Komprehensif Mengenai HIV/AIDS, 2007 dan 2009



Sumber: SDKI

**MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN
MANAJEMEN AIR DAN SANITASI SECARA
BERKELANJUTAN**

<http://www.bps.go.id>

**6 CLEAN WATER
AND SANITATION**



- INDIKATOR 45. PERSENTASE PENDUDUK YANG MENGGUNAKAN AIR MINUM DASAR, MENURUT PERKOTAAN/ PEDESAAN
- INDIKATOR 18. ANGKA KEMATIAN NEONATAL, BAYI DAN BALITA (INDIKATOR MDG YANG DIMODIFIKASI)
- INDIKATOR 46. PERSENTASE PENDUDUK YANG MENGGUNAKAN SANITASI DASAR, MENURUT PERKOTAAN/ PEDESAAN (INDIKATOR MDG YANG DIMODIFIKASI)
- INDIKATOR 47. PERSENTASE PENGOLAHAN AIR LIMBAH SESUAI STANDAR NASIONAL, MENURUT SUMBER RUMAH TANGGA DAN INDUSTRI
- INDIKATOR 48. [INDIKATOR PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR] - UNTUK DIKEMBANGKAN
- INDIKATOR 49. PERSENTASE TOTAL SUMBER AIR YANG DIGUNAKAN (INDIKATOR MDG)
- INDIKATOR 6.1. PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMBUANG KOTORANNYA DI ALAM TERBUKA
- INDIKATOR 6.2. PERSENTASE PENDUDUK DENGAN FASILITAS CUCI TANGAN DI RUMAH
- INDIKATOR 6.3. PROPORSI PENDUDUK YANG TERHUBUNG KE SALURAN PEMBUANGAN KOLEKTIF ATAU KE PENYIMPANAN TEMPAT SEMUA AIR LIMBAH DOMESTIK
- INDIKATOR 6.4. PERSENTASE SISWA YANG MENDAFTAR MASUK SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH YANG MENYEDIAKAN AIR MINUM, SANITASI YANG MEMADAI, DAN LAYANAN KESEHATAN YANG MEMADAI.

INDIKATOR 6.5. - 6.9....

TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN MANAJEMEN AIR DAN SANITASI SECARA BERKELANJUTAN

INDIKATOR 45. PERSENTASE PENDUDUK YANG MENGGUNAKAN AIR MINUM DASAR, MENURUT PERKOTAAN/ PERDESAAN (INDIKATOR MDG YANG DIMODIFIKASI)

Indikator ini mengukur persentase penduduk perkotaan dan perdesaan yang mengakses pelayanan dasar untuk air minum yang aman, seperti yang didefinisikan oleh *Joint Monitoring Programme* (Program Pemantauan Gabungan) WHO/UNICEF. Indikator ini menjelaskan keadaan air minum yang lebih rinci dibandingkan indikator “air minum dasar” yang telah dirancang sebelumnya dengan menggabungkan penilaian terhadap kualitas dan keamanan air yang digunakan masyarakat.

Rumah tangga dianggap dapat mengakses pelayanan air minum yang dikelola secara aman ketika mereka mendapatkan air langsung dari sumbernya. Istilah ‘aman dikelola’ diusulkan untuk menggambarkan standar pelayanan air minum. Standar tersebut termasuk langkah-langkah untuk melindungi persediaan dan memastikan air aman untuk diminum.

Air minum yang kurang aman merupakan penyebab utama penyakit dan kematian, sebagai akibat dari infeksi virus, polusi kimia, dan kebersihan yang buruk. Sulitnya rumah tangga mengakses air minum akan berdampak pada keadaan ekonominya. Hal tersebut dikarenakan mereka harus menghabiskan banyak tenaga dan biaya untuk mengambil dan membawa air yang layak untuk minum.

Sumber air minum yang layak adalah sumber air atau penampungan air yang berasal dari alam dan terlindung dari kontaminasi luar/kotoran. Sumber air minum yang layak dapat berupa pipa pasokan air minum lokal, keran umum/*stand posts* (tabung penampung air yang berasal dari sumur galian), sumur bom/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, dan air minum kemasan (ketika sumber air lainnya digunakan untuk mencuci tangan, memasak, atau tujuan kebersihan lainnya).

Indikator ini dapat mengukur tiga target. Ketiga target tersebut adalah sebagai berikut:

- Target 6.1 Pada tahun 2030, tercapainya kemudahan dan keadilan bagi seluruh penduduk untuk mendapat air minum yang aman,
- Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, handal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk

Pada tahun 2013, persentase rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum yang layak sebesar 67,73 persen.

Rumah tangga yang memiliki akses air minum layak di daerah perkotaan lebih banyak dibandingkan rumah tangga di daerah perdesaan.

infrastruktur regional dan trans perbatasan, untuk mendukung ekonomi pengembangan dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua, dan

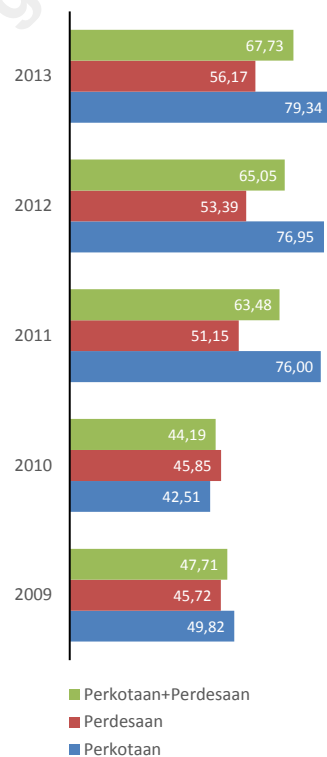
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua perumahan dan layanan dasar yang layak, aman, dan terjangkau, serta membenahi permukiman kumuh.

BPS menyediakan indikator sumber air minum layak yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sumber air minum layak adalah sumber-sumber air minum yang layak untuk dikonsumsi dan baik untuk kesehatan. Menurut konsep Susenas, yang tergolong dalam sumber air minum layak adalah air minum yang terlindung meliputi air leding eceran/meteran, air hujan, dan pompa/sumur terlindung/mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja ≥ 10 m. Penghitungan indikator ini didasarkan pada konsep air minum yang berkelanjutan (sustainable), sehingga tidak termasuk air kemasan dan air isi ulang. Indikator yang digunakan adalah persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak yaitu perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Indikator dapat dirinci menurut daerah tempat tinggal (perkotaan-perdesaan).

Selama tahun 2009-2013, persentase rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum yang layak terus meningkat. Secara agregat (perkotaan+perdesaan), persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak meningkat rata-rata sebesar 5,00 persen per tahun. Dengan angka persentase rumah tangga dengan akses air minum yang mencapai 67,73 persen pada tahun 2013 menunjukkan bahwa capaian MDGs untuk tahun 2015, yaitu sebesar 68,87 persen optimis tercapai. Dengan peningkatan yang konsisten, target SDGs untuk memberikan kemudahan bagi seluruh penduduk dan menjamin akses perumahan dengan pelayanan dasar yang layak pada tahun 2030 juga optimis akan tercapai.

Kemudian, selama tahun tersebut, untuk daerah perkotaan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak meningkat rata-rata sebesar 7,38 persen setiap tahunnya. Daerah perkotaan di Indonesia menunjukkan kondisi perumahan dengan pelayanan dasar yang lebih layak. Pada tahun 2013, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sudah mencapai 79,34 persen dan sudah melebihi target MDGs yaitu sebesar 75,29 persen pada tahun 2015. Dengan demikian, upaya pemerintah untuk memenuhi pelayanan air minum yang aman bagi penduduk perkotaan sudah tepat dan telah mencapai target MDGs. Tingginya persentase rumah tangga dengan akses

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak di Indonesia, 2009-2013



Sumber: Susenas, BPS

air minum yang layak juga memberikan optimisme tercapainya target SDGs dengan tetap mengupayakan mempertahankan dan meningkatkan pelayanan dasar untuk air minum yang aman bagi rumah tangga perkotaan.

Di sisi lain, persentase rumah tangga di daerah perdesaan yang memiliki akses air minum layak meningkat rata-rata hanya sebesar 2,61 persen setiap tahunnya. Tidak hanya itu, pada tahun 2013, rumah tangga daerah perdesaan yang memiliki akses air minum layak hanya sebanyak 56,09 persen. Oleh karena itu, akses air minum layak di daerah perdesaan memerlukan perhatian khusus terlebih lagi target MDGs yang harus mencapai 65,81 persen pada tahun 2015. Akses air minum layak dan aman di daerah perdesaan jauh tertinggal dibandingkan daerah perkotaan. Dengan demikian, pemerintah perlu kerja keras dalam meningkatkan pelayanan air minum layak bagi rumah tangga perdesaan agar dapat mencapai target SDGs, yaitu memberikan kemudahan untuk mendapatkan air minum yang aman dan memberikan pelayanan dasar yang layak pada tahun 2030.

Air bersih memiliki nilai ekonomi yang penyediaannya memerlukan “ongkos produksi” karena cara mendapatkannya memerlukan teknologi pengolahan (Maryono, 2007). Oleh karena itu, biaya untuk mengakses air minum layak dan aman sangat berkorelasi dengan penghasilan bagi masyarakat miskin di Indonesia. Masih banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum layak ini juga erat kaitannya dengan kemiskinan di daerah perdesaan. Pada September tahun 2013, persentase penduduk miskin di perdesaan mencapai 17,92 juta orang atau 14,42 persen sedangkan persentase penduduk miskin di perkotaan terdapat 10,63 juta orang atau 8,52 persen (Badan Pusat Statistik).

CGI tahun 2000 menyatakan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh pada upaya penyediaan air bersih adalah kemiskinan (Masduqi, Endah, Soedjono, & Hadi, 2007). Keberhasilan pelayanan dasar air minum yang layak dan aman sangat berkaitan dengan keadaan ekonomi penduduk. Selain pembangunan pelayanan sumber air minum yang bersih dan layak, pemerintah juga perlu memperhatikan pelayanan yang merata, terutama untuk penduduk miskin di daerah perkotaan tanpa memberatkan keadaan finansialnya.

INDKATOR 46. PERSENTASE PENDUDUK YANG MENGGUNAKAN SANITASI DASAR LAYAK, MENURUT PERKOTAAN/ PEDESAAN (INDIKATOR MDG YANG DIMODIFIKASI)

Indikator ini mengukur persentase penduduk di daerah perkotaan dan perdesaan yang memiliki akses ke fasilitas

sanitasi layak, seperti yang didefinisikan oleh *Joint Monitoring Programme* (Program Pemantauan Gabungan) WHO/UNICEF. Indikator ini perkembangan dari indikator “sanitasi” pada sebelum tahun 2015.

Fasilitas sanitasi layak adalah sanitasi dengan pembuangan tinja yang jauh dari kontak manusia dan tinja tersebut tidak berada di lingkungan terdekat. Hal tersebut berarti bahwa tinja rumah tangga diekstraksi dan diangkut ke lokasi tempat pembuangan yang sesuai dan aman bagi rumah tangga. Fasilitas sanitasi yang memadai adalah fasilitas sanitasi yang tidak berbagi dengan rumah tangga lain dan dapat berupa jamban cemplung yang dibangun diatas lubang yang kokoh, jamban jongkok yang dibuat dari bahan tahan lama (jamban kompos, jamban *pour-flush*, dll), toilet yang terhubung ke tangki septik, atau toilet terhubung ke saluran pembuangan.

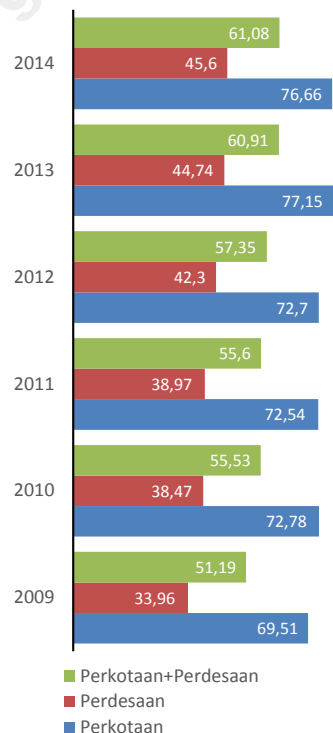
Akses ke fasilitas pembuangan tinja yang memadai merupakan dasar untuk mengurangi resiko penyakit yang ditimbulkan dari tinja. Penggunaan fasilitas sanitasi layak dapat mengurangi kejadian diare pada anak-anak dan juga membantu mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara dengan sanitasi yang buruk. Hal tersebut dikarenakan sanitasi yang buruk dapat menimbulkan penyakit yang merupakan penyebab utama kehilangan pekerjaan dan ketinggalan pelajaran di sekolah. Selain itu, Indikator ini universal dan berperan penting terhadap pembangunan manusia karena berkaitan dengan karakteristik sosial ekonomi (pendidikan dan pendapatan) dan memiliki kontribusi terhadap kebersihan dan kualitas hidup manusia.

Indikator ini dapat mengukur target 6.2, yaitu pada tahun 2030, tercapainya akses sanitasi dan kesehatan yang mudah dan merata bagi seluruh penduduk, dan tempat pembuangan akhir tinja yang terbuka, serta memberikan perhatian khusus kepada wanita, anak perempuan, dan penduduk rentan.

Indikator dalam menentukan layak dan tidaknya sanitasi adalah fasilitas jamban/kakus dan tempat pembuangan akhir tinja yang digunakan oleh rumah tangga yang bersangkutan. Menurut Susenas, sanitasi dikatakan layak jika memiliki fasilitas jamban sendiri atau jamban bersama, dengan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik. Indikator ini diperoleh melalui Susenas pada karakteristik perumahan dan dapat dirinci menurut daerah perkotaan-perdesaan.

Selama tahun 2009-2014, persentase rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses sanitasi layak mengalami peningkatan. Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak meningkat rata-rata 1,99 persen per tahun. Angka persentase rumah tangga dengan sanitasi layak yang mencapai 61,08 persen pada tahun 2014 menunjukkan bahwa capaian

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Dasar Layak di Indonesia, 2009-2014



Sumber: Susenas, BPS

MDGs pada tahun 2015, yaitu sebesar 62,41 persen berstatus akan tercapai. Dengan peningkatan yang konsisten, target SDGs untuk memberikan akses sanitasi dan kesehatan yang mudah dan merata bagi seluruh penduduk pada tahun 2030 juga optimis akan tercapai.

Pada periode yang sama, persentase rumah tangga daerah perkotaan yang memiliki sanitasi layak meningkat rata-rata sebesar 1,43 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2014, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak sudah mencapai 76,66 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa target MDGs, yaitu proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak mencapai 76,82 persen pada tahun 2015 juga optimis akan tercapai. Dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan meningkatkan pelayanan akses sanitasi yang layak, optimisme tercapainya target SDGs juga cukup besar sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Untuk daerah perdesaan, persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak meningkat rata-rata hanya sebesar 2,33 persen per tahun, selama tahun 2009-2014. Walaupun peningkatannya lebih besar dibandingkan daerah perkotaan, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di daerah perdesaan masih sangat rendah, yaitu sebanyak 45,6 persen pada tahun 2014. Masih banyaknya rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak mengharuskan pemerintah untuk memberikan perhatian khusus atas pelayanan sanitasi tersebut terkait dengan target MDGs yang harus mencapai 55,55 persen pada tahun 2015. Dengan demikian, pemerintah juga harus kerja keras untuk mencapai target SDGs pada tahun 2030, yaitu tercapainya akses sanitasi dan kesehatan yang mudah dan merata bagi seluruh penduduk, tanpa melihat tipe daerahnya (perkotaan atau perdesaan).

Minimnya fasilitas sanitasi layak di daerah perdesaan harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan sanitasi yang buruk sangat berkontribusi terhadap kematian anak akibat diare. Di Indonesia, angka kematian (CFR) pada Kejadian Luar Biasa (KLB) diare pada tahun 2013 sudah cukup rendah yaitu sebesar 1,08 persen (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). Akan tetapi, angka tersebut masih belum target program untuk CFR pada KLB yang diharapkan mampu dibawah satu persen.

INDIKATOR 47. **PERSENTASE PENGOLAHAN AIR LIMBAH SESUAI STANDAR NASIONAL (DAN PENGGUNAAN KEMBALI) (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)**

Kurangnya pengelolaan limbah domestik dan industri menimbulkan bahaya kesehatan dan lingkungan, terutama di negara-negara berkembang. Di negara berkembang, sebesar 80-90 persen dari air limbah perkotaan tidak ditangani

dengan tepat. Bahkan di negara maju, limbah belum ditangani secara keseluruhan. Tingkat limbah terus meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk urbanisasi. Besarnya volume limbah yang tidak ditangani dengan tepat banyak yang dibuang begitu saja ke sumber-sumber air. Kebiasaan tersebut dapat mengancam kesehatan manusia, ekosistem, keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, dan keberlanjutan sumber daya air.

Oleh karena itu, indikator pengelolaan limbah ditambahkan ke kerangka pemantauan pasca 2015. Ada banyak cara untuk mendefinisikan limbah. Secara luas, air limbah adalah kombinasi dari satu atau lebih dari sebagai berikut:

1. Limbah domestik yang terdiri dari air hitam (kotoran, urin, dan lumpur tinja) dan air abu-abu (dapur dan mandi air limbah)
2. Air dari institusi dan perusahaan komersial, termasuk rumah sakit,
3. Limbah industri, air hujan dan limbah kota lainnya, dan
4. Limbah pertanian, hortikultura dan perikanan, baik dilarutkan maupun diendapkan.

Penangan limbah dilakukan dengan memisahkan limbah tersuspensi dan terlarut baik terkontaminasi bahan fisika, kimia, maupun biologi untuk menghasilkan: (a) air yang aman untuk dibuang ke lingkungan atau dapat digunakan kembali dan (b) lumpur padat yang dapat dibuang atau digunakan kembali (misalnya sebagai pupuk). Penggunaan teknologi yang canggih memungkinkan untuk menggunakan kembali air yang telah diolah untuk pertanian, industri, atau bahkan sebagai air minum.

Indikator ini dapat mengukur enam target. Keenam target tersebut adalah sebagai berikut:

- Target 6.1 Pada tahun 2030, tercapainya kemudahan dan keadilan bagi seluruh penduduk untuk mendapat air minum yang aman,
- Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan dumping dan meminimalkan pelepasan bahan kimia dan material yang berbahaya, mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak dapat didaur ulang, dan meningkatkan daur ulang yang aman dan penggunaan kembali dengan x% secara global,
- Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, akuifer dan danau,
- Target 9.4 Pada tahun 2030 meningkatkan industri infrastruktur dan retrofit untuk membuat

mereka berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih besar dari teknologi dan proses produksi yang bersih dan ramah lingkungan, semua negara mengambil tindakan sesuai dengan kemampuan masing-masing,

Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan yang merugikan per kapita dari kota, termasuk dengan membayar perhatian khusus untuk kualitas udara, kota dan pengelolaan limbah lainnya, dan

Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.

Data untuk indikator ini belum tersedia di Indonesia. Penyajian datanya merupakan wewenang Kementerian Lingkungan Hidup sebagai ukuran yang dapat digunakan untuk memantau setiap industri maupun instansi/badan usaha untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatannya, berdasarkan UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, data pengolahan limbah masih minim sehingga dibutuhkan data yang lengkap dan tersedia secara nasional maupun regional sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Data indikator ini akan lebih menarik jika disediakan berdasarkan limbah industri dan limbah kota menurut wilayah.

INDIKATOR 48. INDIKATOR PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Di Indonesia data untuk indikator 48 belum tersedia.

The *Integrated Water Resources Management (IWRM)*/Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu bertujuan untuk mengkoordinasikan pengembangan dan pengelolaan air, tanah, dan sumber daya terkait untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang adil, tanpa merusak ekosistem. IWRM berperan penting dalam pengelolaan sumber daya air dan mencakup perlindungan ekosistem terkait, efisiensi penggunaan air, dan kelangkaan air. Kebijakan dan rencana IWRM harus dilaksanakan secara nasional, regional, dan adanya kerjasama antar wilayah dan sektor.

Indikator ini dapat mengukur target sebagai berikut:

Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan dumping dan meminimalkan pelepasan bahan kimia dan material yang berbahaya, mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak dapat didaur ulang, dan meningkatkan daur ulang yang aman dan penggunaan kembali dengan x%

secara global,

Target 6.5, Pada tahun 2030, melaksanakan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan termasuk melalui kerjasama lintas batas yang sesuai, dan

Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, akuifer dan danau.

Indikator ini masih perlu dikembangkan. Penyajian untuk indikator ini masih memerlukan kajian menyeluruh agar dapat menggambarkan pengelolaan air dan sumber daya terkait. Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air (SDA), cakupan pengelolaan SDA meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka upaya konservasi SDA, pendayagunaan SDA, pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta pemanfaatan sistem informasi. Proses pengelolaan SDA harus melibatkan semua stakeholders, memperhatikan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, serta menjamin terjalinnnya keseimbangan antara fungsi-fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi. Indikator ini juga dapat dikembangkan agar dapat menyediakan informasi mengenai kualitas dan kuantitas sumber daya air.

INDIKATOR 49. PERSENTASE TOTAL SUMBER AIR YANG DIGUNAKAN (INDIKATOR MDG)

Indikator MDGs ini didefinisikan sebagai total volume air tanah dan air permukaan yang digunakan manusia (seperti dalam sektor pertanian, industri, atau perkotaan) dan dinyatakan sebagai persentase dari total sumber daya air terbarukan setiap tahunnya. Kemudian, indikator ini juga menunjukkan pasokan sumber daya air yang berkelanjutan pada suatu negara. Hal ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemajuan dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, terpadu, dan transparan.

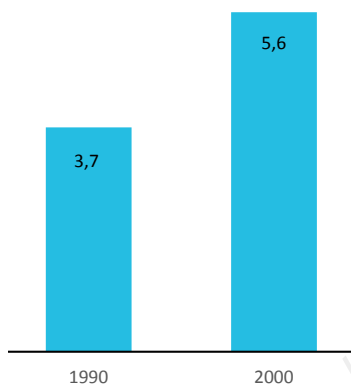
Indikator ini dapat mengukur tujuh target. Ketujuh target tersebut adalah sebagai berikut:

Target 6.1 Pada tahun 2030, tercapainya kemudahan dan keadilan bagi seluruh penduduk untuk mendapat air minum yang aman,

Target 6.4 Pada tahun 2030, meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor secara substansial dan memastikan penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara substansial mengurangi jumlah orang yang mengalami

Data indikator 49 tersedia di Indonesia dengan sumber data dari UNSTAT dan survei AQUASTAT yang dilakukan oleh FAO.

Gambar 6.3 Persentase Total Sumber Air yang Digunakan di Indonesia, 1990 dan 2000



Sumber: MDGs, United Nation

kelangkaan air,

- Target 6.5 Pada tahun 2030, melaksanakan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang sesuai,
- Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, akuifer dan danau,
- Target 8.4 Pada tahun 2030, meningkatkan efisiensi konsumsi dan produksi terhadap sumber daya global secara progresif, dan berusaha untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan sesuai dengan program dalam kerangka kerja 10 tahunan pada bidang konsumsi berkelanjutan dan produksi dengan negara-negara maju yang memimpin,
- Target 12.2 Pada tahun 2030 mencapai pengelolaan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan efisien, dan
- Target 15.1 Pada tahun 2020 memastikan konservasi, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem air tawar dan darat pedalaman dan layanan mereka, khususnya hutan, lahan basah, gunung dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

Indikator ini merupakan indikator yang secara internasional dihitung oleh FAO. FAO telah mengumpulkan dan menganalisis data tentang sumber daya air dan penggunaannya di tiap negara termasuk Indonesia melalui survei AQUASTAT sejak tahun 1992. Periodisitas survei negara adalah sekitar 10 tahun karena kendala anggaran, tetapi bisa dikurangi menjadi 5 tahun relatif mudah, jika lebih banyak sumber daya akan tersedia. Indikator ini diperkirakan oleh FAO berdasarkan informasi dari tiap negara, dilengkapi dengan dataset global yang tersedia, dan tersedia untuk semua negara.

Banyak negara tidak memiliki penilaian yang baik dari volume akuifer dan resapan/debit, sehingga upaya-upaya penting perlu dilakukan untuk meningkatkan pengumpulan data. Idealnya indikator harus dihitung untuk cekungan air individu karena permintaan dan kebutuhan pasokan harus seimbang pada tingkat cekungan. Karena indikator dapat dipisahkan untuk menunjukkan abstraksi berdasarkan sektor (juga menunjukkan penggunaan efisiensi untuk masing-masing sektor), hal itu dapat membantu mengidentifikasi dan mengelola klaim persaingan sumber daya air oleh pengguna yang berbeda.

Indonesia merupakan negara dengan limpahan sumber daya

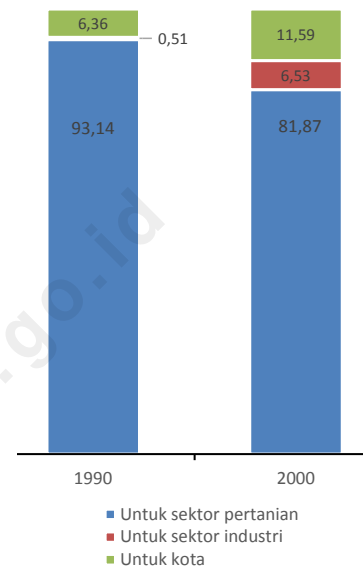
air yang sangat besar. Indonesia memiliki potensi sumber daya air yang sangat berlimpah dengan jumlah total sekitar 3.200 milyar m³/ tahun. Potensi sumber daya air tersebut merupakan nomor lima terbesar di dunia, disamping jumlah penduduk kita yang nomor empat besar di dunia (Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, 2012). Proporsi dari total sumber daya air yang diambil dari tanah dan permukaan untuk digunakan oleh masyarakat Indonesia sangatlah kecil, namun jika dilihat dari trennya meningkat dari 3,7 persen pada tahun 1990 menjadi 5,6 persen pada tahun 2000.

Peningkatan penggunaan sumber daya air selama 10 tahun sebesar 1,9 persen tersebut berkaitan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan penduduk Indonesia selama tahun 1990-2000 sebesar 1,49 persen, sehingga kebutuhan manusia akan sumber daya air semakin banyak.

Sebagian besar sumber daya air di Indonesia digunakan untuk sektor pertanian, yaitu sebesar 93,14 persen pada tahun 1990 menjadi 81,87 persen pada tahun 2000. Penurunan penggunaan air rata-rata sebesar 1,13 persen per tahun ini dapat dikarenakan menurunnya keberadaan pertanian di Indonesia. Selama tahun 1990-2000, penggunaan sumber air untuk sektor industri meningkat rata-rata sebesar 0,60 persen per tahun dan penggunaan sumber air untuk kota meningkat sebesar rata-rata sebesar 0,52 persen per tahun.

Selama tahun tersebut, penduduk Indonesia mengalami pergeseran lapangan usaha dari sektor pertanian ke pada sektor industri. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya persentase tenaga kerja pada lapangan usaha industri mulai meningkat sedangkan pada sektor pertanian menurun. Persentase tenaga kerja pada sektor pertanian menurun dari 50,40 persen pada tahun 1990 menjadi 45,28 persen pada tahun 2000. Di sisi lain, persentase tenaga kerja pada sektor pertanian menurun dari 11,53 persen pada tahun 1990 menjadi 12,96 persen pada tahun 2000. Selain itu, hal tersebut juga didukung oleh turunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional, yaitu sebesar 19,6 persen pada tahun 1990 menjadi 15,60 persen pada tahun 2000. Namun demikian, pengelolaan sumber daya air sangat penting untuk menghindari masalah kuantitas penggunaan air pada ketiga sektor tersebut.

Gambar 6.4 Persentase Total Sumber Air yang Digunakan di Indonesia menurut sektor, 1990 dan 2000



Sumber: UNSTAT, FAO

INDIKATOR 6.1. PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMBUANG KOTORANNYA DI ALAM TERBUKA

Indikator ini menunjukkan penduduk yang tidak menggunakan fasilitas sanitasi apapun dan merupakan ukuran yang kuat yang mendefinisikan kemiskinan. Indikator ini dapat mengukur target 6.2, yaitu pada tahun 2030, tercapainya

Pada tahun 2014, rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir tinja di alam terbuka di Indonesia sebesar 35,43 persen.

akses sanitasi dan kesehatan yang mudah dan merata bagi seluruh penduduk, dan tempat pembuangan akhir tinja yang terbuka, serta memberikan perhatian khusus kepada wanita, anak perempuan, dan penduduk rentan. Untuk ketersediaannya, indikator ini dapat diperoleh dari Susenas dengan menggunakan informasi rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir tinja di alam terbuka (yang tidak memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki/SPAL).

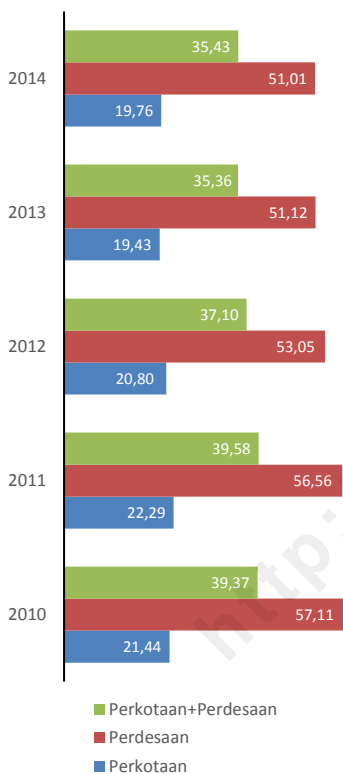
Dalam Susenas, rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir tinja di alam terbuka dapat didefinisikan sebagai rumah tangga yang membuang tinja di kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, dan tempat terbuka lainnya.

Selama tahun 2010-2014, rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir tinja di alam terbuka di Indonesia cenderung menurun, yaitu 39,37 persen pada tahun 2010 menjadi 35,43 persen pada tahun 2014. Hal tersebut menunjukkan rata-rata penurunan sebesar 0,99 persen per tahun. Untuk daerah perkotaan, rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir tinja di alam terbuka menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 0,42 persen per tahun. Untuk daerah perdesaan, rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir tinja di alam terbuka menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 1,53 persen per tahun.

Akan tetapi persentase rumah tangga daerah perkotaan dengan tempat pembuangan akhir tinja di alam terbuka meningkat dari 19,43 persen di tahun 2013 menjadi 19,76 persen di tahun 2014. Peningkatan tersebut dapat dikarenakan meningkatnya permukiman kumuh di daerah perkotaan. Jumlah permukiman kumuh di perkotaan seluruh Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga saat ini mencapai luas sekitar 59.000 hektar (Alexander, 2014). Pertumbuhan penduduk dan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi tidak diimbangi dengan pembangunan dan penyediaan perumahan. Dengan demikian, banyak masyarakat yang membangun permukiman kumuh dimana kondisi tempat tinggal sangat tidak layak. Fasilitas pembuangan air kotor/tinja di permukiman kumuh masih sangat minim. Banyak rumah tangga di permukiman kumuh yang membuang tinjanya di saluran air, atau bahkan ke sungai terdekat.

Penurunan rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir tinja di alam terbuka di perdesaan sudah cukup signifikan. Namun, pada tahun 2014, persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar dan tidak memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki/SPAL di perdesaan masih cukup besar, yaitu sebesar 51,01 persen jauh diatas persentase perkotaan yang sebesar 19,76 persen. Tidak tersedianya fasilitas buang air besar dapat mengakibatkan perilaku membuang air besar sembarangan. Padahal kebiasaan

Gambar 6.5 Persentase Rumah Tangga dengan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Alam Terbuka di Indonesia, 2010-2014



Sumber: Susenas, BPS

buruk tersebut dapat menimbulkan penyakit, serta berdampak pada keadaan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dampak sanitasi yang buruk terhadap ekonomi di Asia Tenggara menyebabkan kerugian ekonomi minimal US\$9 miliar per tahun (Muliarta, 2012). Tidak adanya fasilitas buang air besar atau perilaku buang air sembarangan tersebut dapat dikarenakan rendahnya tingkat pengetahuan dan tingkat ekonomi masyarakat yang tidak mampu untuk membangun fasilitas sanitasi. Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya untuk meminimalisir perilaku buang air besar sembarangan dengan membangun MCK gratis, terutama di daerah perdesaan.

INDIKATOR 6.2. PERSENTASE PENDUDUK DENGAN FASILITAS CUCI TANGAN DI RUMAH

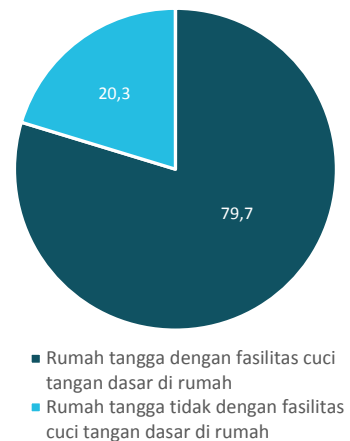
Indikator ini menunjukkan adanya akses fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun di rumah, sesuai dengan definisi WHO-UNICEF JMP. Indikator ini harus diukur dengan mempertimbangkan lokasi rumah, yaitu dekat dengan daerah persiapan makanan atau dekat fasilitas sanitasi. Indikator ini dapat mengukur target 6.1, yaitu pada tahun 2030, tercapainya kemudahan dan keadilan bagi seluruh penduduk untuk mendapat air minum yang aman dan target 6.2, yaitu pada tahun 2030, tercapainya akses sanitasi dan kesehatan yang mudah dan merata bagi seluruh penduduk, dan tempat pembuangan akhir tinja yang terbuka, serta memberikan perhatian khusus kepada wanita, anak perempuan, dan penduduk rentan.

Indikator yang diperoleh dari SDKI ini juga merupakan indikator tambahan pada tujuan 6. Informasi yang dikumpulkan oleh SDKI adalah ketersediaan tempat khusus untuk mencuci tangan dalam rumah tangga dan penggunaan air serta bahan pembersih untuk mencuci tangan, menurut wilayah kota-desa, dan kuintil kekayaan.

Pada tahun 2012, rumah tangga di Indonesia yang memiliki fasilitas cuci tangan dasar di rumah terdapat sebanyak 79,7 persen. Persentase tersebut menunjukkan sudah baiknya fasilitas mencuci tangan di rumah. Kebiasaan mencuci tangan harus dibangun mulai dari tempat tinggal. Rumah tangga tersebut disarankan untuk memiliki tempat khusus untuk mencuci tangan serta tersedianya air dan bahan pembersih untuk mencuci tangan. Pentingnya fasilitas mencuci tangan dikarenakan mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun merupakan salah satu perilaku hidup dan sehat yang harus dipraktikkan dalam rumah tangga.

Dalam SDKI, data rumah tangga dengan ketersediaan tempat mencuci tangan dapat dianalisis menurut daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan) dan kuintil kekayaan. Pada tahun 2012, proporsi rumah tangga yang memiliki tempat mencuci tangan di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan daerah perdesaan, yaitu sebesar 87 persen untuk perkotaan dan 72

Gambar 6.5. Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Cuci Tangan Dasar di Rumah, 2012



Sumber: SDKI

persen untuk daerah perdesaan. Kemudian, rumah tangga yang berada dalam kuintil kekayaan lebih tinggi cenderung memiliki fasilitas cuci tangan dibandingkan rumah tangga yang berada dalam kuintil kekayaan yang lebih kecil. Sebanyak 96 persen rumah tangga pada kuintil kekayaan tertinggi memiliki fasilitas cuci tangan sedangkan rumah tangga pada kuintil terendah yang memiliki fasilitas cuci tangan ada sebanyak 54 persen.

INDIKATOR 6.3. PROPORSI PENDUDUK YANG TERHUBUNG KE SALURAN PEMBUANGAN KOLEKTIF ATAU KE PENYIMPANAN TEMPAT SEMUA AIR LIMBAH DOMESTIK

Di Indonesia data untuk indikator 6.3 belum tersedia.

Indikator ini mengukur penduduk yang menggunakan tempat penyimpanan limbah yang aman atau saluran pembuangan. Indikator ini dapat mengukur target 6.2, yaitu pada tahun 2030, tercapainya akses sanitasi dan kesehatan yang mudah dan merata bagi seluruh penduduk, dan tempat pembuangan akhir tinja yang terbuka, serta memberikan perhatian khusus kepada wanita, anak perempuan, dan penduduk rentan dan target 14.1, yaitu pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi pencemaran laut dari semua jenis, terutama dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.

Indikator yang menjelaskan mengenai informasi penduduk yang terhubung ke pembuangan atau penyimpanan air limbah domestik ini belum tersedia di Indonesia. Indikator ini merupakan salah satu informasi mengenai pengelolaan limbah. Data pengelolaan limbah di Indonesia masih sangat minim.

INDIKATOR 6.4. PERSENTASE SISWA YANG MENDAFTAR MASUK SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH YANG MENYEDIAKAN AIR MINUM, SANITASI YANG MEMADAI, DAN LAYANAN KESEHATAN YANG MEMADAI.

Di Indonesia data untuk indikator 6.4 belum tersedia.

Indikator ini mengukur akses terhadap air minum, toilet yang terpisah antara pria dan wanita, dan fasilitas cuci tangan di sekolah-sekolah, sesuai dengan definisi WHO/UNICEF JMP. Indikator ini dapat mengukur target sebagai berikut:

- Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan bagi anak-anak, penyandang disabilitas dan sensitif gender serta memberikan rasa aman, non-kekerasan, inklusif dan lingkungan belajar efektif untuk semua,
- Target 6.1 Pada tahun 2030, tercapainya kemudahan dan keadilan bagi seluruh penduduk untuk mendapat air minum yang aman, dan
- Target 6.2 Pada tahun 2030, tercapainya akses sanitasi dan kesehatan yang mudah dan merata bagi seluruh

penduduk, dan tempat pembuangan akhir tinja yang terbuka, serta memberikan perhatian khusus kepada wanita, anak perempuan, dan penduduk rentan.

Indikator tambahan pada tujuan 6 ini masih belum tersedia. Data yang memadai mengenai akses air minum dan sanitasi berbasis sekolah membuat indikator masih sulit untuk diukur.

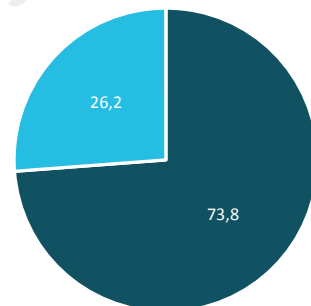
INDIKATOR 6.5 PERSENTASE PENERIMA MANFAAT RUMAH SAKIT, FASILITAS KESEHATAN, DAN KLINIK YANG MENYEDIAKAN AIR MINUM, SANITASI YANG MEMADAI, DAN LAYANAN KESEHATAN YANG MEMADAI.

Indikator ini mengukur akses terhadap air minum, toilet yang terpisah antara pria dan wanita, dan fasilitas cuci tangan untuk pasien di fasilitas kesehatan, sesuai dengan definisi WHO-UNICEF JMP. Indikator ini dapat menjawab target 6.1, yaitu pada tahun 2030, tercapainya kemudahan dan keadilan bagi seluruh penduduk untuk mendapat air minum yang aman dan target 6.2, yaitu pada tahun 2030, tercapainya akses sanitasi dan kesehatan yang mudah dan merata bagi seluruh penduduk, dan tempat pembuangan akhir tinja yang terbuka, serta memberikan perhatian khusus kepada wanita, anak perempuan, dan penduduk rentan.

Data mengenai indikator ini dapat tergambar dari informasi mengenai ketersediaan air minum, sanitasi, dan kebersihan yang memadai di setiap fasilitas kesehatan. Di Indonesia, data mengenai informasi tersebut dikumpulkan dari Riset Fasilitas Kesehatan (Risfaskes). Indikator dari Risfaskes tersebut adalah puskesmas yang memiliki ketersediaan air bersih dan yang memiliki pengelolaan limbah (SPAL).

Pada tahun 2012, rumah sakit umum/pemerintah dan puskesmas di Indonesia yang memiliki ketersediaan air bersih dan memiliki pengolahan limbah (SPAL) ada sebanyak 73,8 persen. Persentase tersebut sudah cukup besar. Mengingat rumah sakit umum/pemerintah dan puskesmas merupakan sarana kesehatan, sarana dan prasarana yang tersedia didalamnya juga harus sehat. Supply pelayanan kesehatan tidak hanya ketersediaannya sarana kesehatan, tetapi harus didukung dengan ketersediaan sarana penunjangnya seperti penyediaan air bersih, listrik, kendaraan, peralatan, obat, dan lainnya. Selain itu, pengolahan limbah juga harus dilakukan oleh pelayanan kesehatan. Pengolahan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pemisahan limbah medis dan non medis. Penolahan limbah juga dapat dilakukan dengan menyediakan SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah) dan penanganan limbah medis dengan incenerator (alat pembakar sampah rumah sakit). Dengan demikian, pelayanan kesehatan dapat menciptakan keadaan lingkungan yang sehat.

Gambar 6.7 Persentase Rumah Sakit Umum/ Pemerintah Dan Puskesmas yang Memiliki Ketersediaan Air Bersih dan Memiliki Pengolahan Limbah (SPAL), 2011



- Memiliki ketersediaan air bersih dan memiliki pengolahan limbah (SPAL)
- Tidak memiliki ketersediaan air bersih dan memiliki pengolahan limbah (SPAL)

Sumber: Risfaskes, Kemenkes

INDIKATOR 6.6. PROPORSI ARUS DARI AIR LIMBAH KOTA YANG DITANGANI SECARA LANGSUNG DAN AMAN DIGUNAKAN KEMBALI

Di Indonesia data untuk indikator 6.6 belum tersedia.

Indikator ini merupakan alternatif dari indikator 47 yang mengidentifikasi pengelolaan dan penggunaan kembali limbah. Indikator ini dapat mengukur target 6.4, yaitu pada tahun 2030, meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor secara substansial dan memastikan penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara substansial mengurangi jumlah orang yang mengalami kelangkaan air dan target 14.1, yaitu pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi pencemaran laut dari semua jenis, terutama dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.

Data mengenai air limbah yang ditangani dan dapat digunakan ini belum dapat ditemukan di Indonesia. Hal tersebut terkait dengan minimnya data mengenai air limbah. Selain itu, penanganan air limbah di Indonesia juga cenderung masih belum maksimal.

INDIKATOR 6.7. PELAPORAN OTORITAS DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) INTERNASIONAL TENTANG MANAJEMEN DAS LINTAS-BATAS/NEGARA (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Di Indonesia data untuk indikator 6.7 belum tersedia.

Sungai dan ekosistem air tawar lainnya sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Ekosistem tersebut juga sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Arus sungai yang melintasi dalam negara dan batas negara menjadi sasaran untuk bendungan, polusi dan waduk. Indikator yang cocok perlu dikembangkan untuk mengukur kemajuan pengelolaan sungai lintas batas berkelanjutan. Indikator ini dapat mengukur target 6.5, yaitu pada tahun 2030, melaksanakan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang sesuai.

Informasi untuk indikator ini masih belum tersedia di Indonesia. Hal ini dapat dikarenakan pengelolaan DAS yang harus dilakukan secara terintegrasi di dalam suatu wilayah. Pengelolaan DAS harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat, petani, dan pemerintah. Pengelolaan DAS tersebut merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat.

INDIKATOR 6.8. INDIKATOR KERJASAMA INTERNASIONAL DAN PEMBANGUNAN KAPASITAS DALAM AIR DAN KEGIATAN SANITASI YANG BERHUBUNGAN (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Di Indonesia data untuk indikator 6.8 belum tersedia.

Indikator ini dapat mengukur target 6.a, yaitu pada tahun 2030, memperluas kerjasama internasional dan pembangunan

kapasitas dukungan untuk negara-negara berkembang dalam aktivitas dan program yang berkaitan dengan air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan penggunaan kembali teknologi. Data ini masih belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 6.9. INDIKATOR PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL UNTUK MENINGKATKAN PENGELOLAAN AIR DAN SANITASI (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

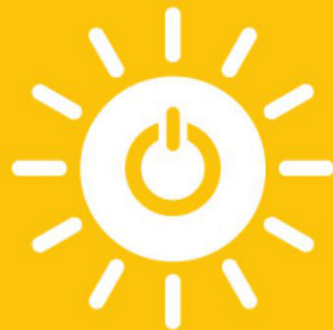
Indikator ini dapat mengukur target 6.b, yaitu mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal untuk meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi. Data untuk menggambarkan mengenai informasi indikator ini masih belum tersedia di Indonesia. Padahal partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi sangat penting karena masyarakat dapat membangun kesadaran, pemahaman, dan peran dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, pengelolaan air dan sanitasi dapat dilakukan secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah.

Di Indonesia data untuk indikator 6.8 belum tersedia.

<http://www.bps.go.id>

**MEMASTIKAN SELURUH PENDUDUK
MENDAPAT AKSES UNTUK ENERGI YANG
TERJANGKAU, DAPAT DIANDALKAN, DAN
BERKELANJUTAN**

**7 AFFORDABLE AND
CLEAN ENERGY**



TUJUAN 7.

MEMASTIKAN SELURUH PENDUDUK MENDAPAT AKSES UNTUK ENERGI YANG TERJANGKAU, DAPAT DIANDALKAN, DAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR 50. PROPORSI PENDUDUK DENGAN AKSES TERHADAP SOLUSI MEMASAK MODERN, MENURUT PERKOTAAN/PEDESAAN

Bahan bakar modern untuk memasak di rumah tangga Indonesia didekati dengan bahan bakar listrik, gas/elpiji, gas kota, dan minyak tanah.

Indikator ini mengukur proporsi penduduk yang menggunakan bahan bakar fosil non-solid untuk memasak, yang didefinisikan dalam laporan kerangka kerja *Sustainable Energy For All (SE4All)*. Basis data yang tersedia saat ini (termasuk basis data energi yang digunakan rumah tangga secara global milik WHO dan Statistik dan Keseimbangan Energi Dunia milik IEA) hanya menelusuri akses secara biner (rumah tangga yang punya atau tidak punya akses terhadap solusi memasak modern). Hal itu menyebabkan SE4All menggunakan definisi sederhana tersebut sebagai titik awal untuk menelusuri akses solusi memasak modern. Meskipun pendekatan biner ini memenuhi kebutuhan global, namun konsesus yang berkembang menuntut kemajuan yang berkelanjutan, seperti dalam laporan SE4All.

Tentu saja, mendefinisikan akses solusi memasak modern dengan menggunakan proporsi penduduk yang mengandalkan bahan bakar fosil non solid untuk memasak, mengabaikan peran penggunaan kompor masak. Namun indikator tersebut dapat menentukan tingkat efisiensi, polusi dan keamanan praktek memasak yang ada dalam masyarakat. Selain itu, kebiasaan kegiatan memasak dan karakteristik perumahan juga akan memengaruhi performa solusi memasak di rumah tangga.

Untuk alasan ini SE4All berencana menggunakan matriks berlapis untuk menelusuri akses ke solusi memasak modern. Matriks ini akan mengukur akses tersebut melalui performa solusi memasak utama (termasuk bahan bakar dan kompor masak) dan menilai bagaimana kecocokan solusi ini dengan kehidupan sehari-hari. Matriks ini juga mencakup pertimbangan polusi udara dalam ruangan/ventilasi dan minyak tanah untuk memasak/pencahayaan. Pengukuran akses ke solusi memasak modern juga menyajikan kemungkinan untuk meningkatkan kesehatan rumah tangga miskin, khususnya perempuan dan anak perempuan yang umumnya bertanggung jawab untuk urusan dapur. WHO memperkirakan bahwa sebanyak empat juta orang meninggal akibat penyakit yang disebabkan oleh polusi udara dari memasak dengan bahan bakar padat.

Indikator ini dapat mengukur tiga target. Ketiga target tersebut adalah sebagai berikut

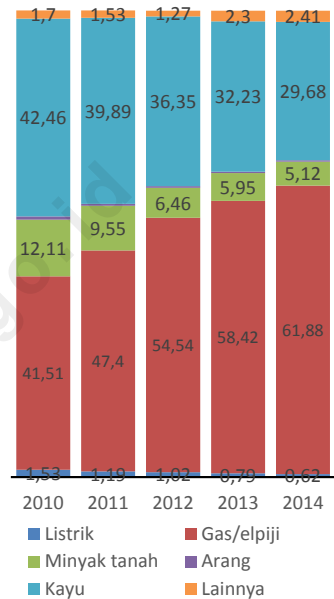
- Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, handal, dan modern,
- Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, handal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan trans perbatasan, untuk mendukung ekonomi pengembangan dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua, dan
- Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua perumahan dan layanan dasar yang layak, aman dan terjangkau, serta membenahi permukiman kumuh.

Data penggunaan bahan bakar utama untuk memasak diperoleh dari Susenas. Bahan bakar/energi utama yang dapat disajikan adalah listrik, gas/elpiji, gas kota, minyak tanah, arang, briket, kayu, dan lainnya. Bahan bakar yang berjenis bukan padat/non-solid adalah listrik, gas/elpiji, gas kota, dan minyak tanah. Sehingga indikator yang dapat digunakan adalah persentase rumah tangga yang menggunakan bahan bakar (listrik, gas/elpiji, gas kota, dan minyak tanah) untuk memasak. Indikator ini dapat disajikan berdasarkan perkotaan/pedesaan dan jenis kelamin kepala rumah tangga.

Bahan bakar memasak erat kaitannya dengan beberapa penyakit pada balita, seperti pnemonia. Bahan bakar memasak yang tidak memenuhi syarat akan menyebabkan pencemaran udara di lingkungan rumah. Pencemaran yang banyak terjadi di dalam rumah adalah CO₂, NH₃ (amoniak), dan H₂S, dimana keberadaan gas tersebut dalam jumlah besar dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan (Yulianti, Setiani, & D, 2012). Pada tahun 2010, bahan bakar yang digunakan oleh rumah tangga di Indonesia masih didominasi oleh penggunaan bahan bakar tradisional kayu, yaitu sebesar 42,46 persen. Namun lambat laun, penggunaan bahan bakar kayu sudah mulai berkurang, dimana pada tahun 2014, rumah tangga yang menggunakan kayu sebagai bahan bakar memasak hanya sebesar 29,68 persen. Sebagaimana penggunaan kayu, penggunaan listrik, minyak tanah, dan arang sebagai bahan bakar juga menurun selama tahun 2010-2014.

Di sisi lain, rumah tangga yang menggunakan bahan bakar modern gas/elpiji sebagai bahan bakar untuk memasak meningkat dari 41,51 persen pada tahun 2010 menjadi 61,88 persen pada tahun 2014. Rata-rata peningkatan sebesar 5,08 persen per tahun tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai konversi minyak tanah ke elpiji. Kebijakan tersebut dilakukan salah satunya dengan cara pembatasan subsidi minyak tanah sehingga banyak rumah tangga yang mulai beralih

Gambar 7.1 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Bahan Bakar (Listrik, Gas/ Elpiji, Gas Kota, dan Minyak Tanah) Untuk Memasak di Indonesia, 2010-2014



Sumber: Susenas, BPS

ke gas/elpiji. Program konversi tersebut telah menjangkau hampir seluruh kawasan Indonesia dengan melibatkan instansi pemerintah. Konversi minyak tanah ke LPG diharapkan dapat menggerakkan perekonomian dan menghemat energi.

INDIKATOR 51. PROPORSI PENDUDUK YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP LISTRIK YANG DAPAT DIANDALKAN, MENURUT PERKOTAAN/PEDESAAN

Indikator ini mengukur proporsi penduduk yang memiliki listrik di rumah atau mengandalkan listrik sebagai penerangan utama, seperti yang didefinisikan dalam Laporan Kerangka Kerja SE4All. Basis data yang tersedia saat ini (termasuk basis data energi yang di gunakan rumah tangga secara global milik WHO dan Statistik dan Keseimbangan Energi Dunia milik IEA) hanya menelusuri akses secara biner (rumah tangga yang punya atau tidak punya akses). Indikator ini tidak dapat menangkap dimensi penting terhadap akses listrik diantaranya, sebagai berikut

Data indikator 51 diukur dengan persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik PLN dan listrik non PLN dari Susenas

1. Solusi *off-grid* (independen, tidak memerlukan jaringan PLN) dan mini-grid terisolasi, yang dibutuhkan di banyak negara sebagai alternatif/transisi untuk listrik berbasis grid, yang berpotensi berfungsi sebagai solusi jangka panjang di daerah-daerah geografis terpencil;
2. Masalah pasokan, yang umum dijumpai di negara-negara berkembang, di mana jaringan listrik mengalami pasokan tidak teratur, sering terjadi kegagalan;
3. Masalah kualitas (seperti tegangan rendah atau berfluktuasi); dan
4. Perbedaan antara pasokan listrik dan jasa listrik, yang berarti kepemilikan alat listrik yang tepat dan penggunaan aktual listrik.

Untuk alasan ini, SE4All berencana untuk menggunakan matriks berlapis untuk mengukur akses listrik. Indikator ini akan mengukur tingkat akses terhadap pasokan listrik di berbagai dimensi, termasuk kuantitas (kapasitas tertinggi yang tersedia), durasi, pasokan malam, keterjangkauan, legalitas, dan kualitas. Hal ini dilengkapi dengan kerangka *multi-tier* paralel yang menangkap penggunaan layanan listrik utama.

Sebagian besar rumah tangga di Indonesia menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utama yang meningkat rata-rata sebesar 1,13 persen per tahun dari tahun 2010 sampai 2014

Indikator ini dapat mengukur empat target. Keempat target tersebut adalah sebagai berikut

- Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, handal, dan modern,
- Target 7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan

untuk semua di negara-negara berkembang, khususnya LDCs dan SIDS,

Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, handal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan trans perbatasan, untuk mendukung ekonomi pengembangan dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua, dan

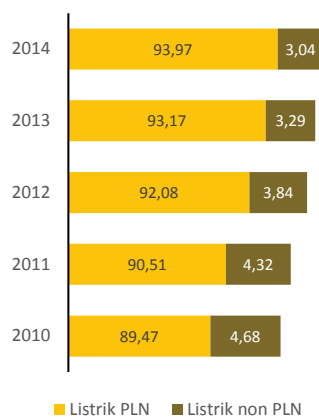
Target 11.1 Tahun 2030, menjamin akses bagi semua perumahan dan layanan dasar yang layak, aman dan terjangkau, serta membenahi permukiman kumuh.

Susenas menyediakan data rumah tangga dengan sumber penerangan utama berupa listrik PLN, listrik non PLN, petromak/aladin, pelita/ sentir/obor, dan lainnya. Akses listrik yang dapat diandalkan dapat diukur dengan persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik PLN dan listrik non PLN. Data dapat dirinci menurut wilayah kota-desa dan jenis kelamin KRT. Indikator ini disajikan berdasarkan perkotaan/pedesaan dan jenis kelamin kepala rumah tangga.

Sebagian besar rumah tangga di Indonesia menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utama. Selama tahun 2010-2014, persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik PLN meningkat rata-rata sebesar 1,13 persen per tahun. Sebaliknya, persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik non PLN menurun rata-rata sebesar 0,41 persen per tahun. Listrik non PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN). Listrik non PLN ini juga dapat merupakan hasil dari pemberdayaan masyarakat.

Meningkatnya pengguna listrik PLN menunjukkan bahwa upaya PLN untuk memberikan pasokan listrik di berbagai daerah mulai tercapai. Upaya tersebut dapat mendukung target memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan pada tahun 2030. Dengan demikian, setiap orang dapat memiliki akses listrik yang terjangkau. Selain itu, PLN juga menyiapkan kapal pasokan listrik guna meningkatkan performa pelayanan sebagai penyedia tenaga listrik. Kapal tersebut merupakan salah satu upaya PLN untuk memperkuat pasokan listrik di beberapa lokasi di Indonesia. Kapal tersebut memiliki keunggulan menurunkan biaya pokok penyediaan listrik, kemudahan relokasi, sehingga pemenuhan kebutuhan listrik di suatu daerah dapat lebih fleksibel (Jurnal Jakarta.com, 2015).

Gambar 7.2 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Utama Listrik PLN dan Listrik Non PLN di Indonesia, 2010-2014



Sumber: Susenas, BPS

INDIKATOR 52. INSENTIF IMPLISIT UNTUK ENERGI RENDAH KARBON PADA SEKTOR LISTRIK (DIUKUR SEBAGAI US\$/MWH ATAU US\$ PER TON CO₂ YANG HARUS DIHINDARI)

Data indikator 52 belum tersedia di Indonesia.

Untuk mengurangi emisi GRK ke level optimal secara sosial, biaya sosial emisi GRK perlu diterapkan, yang pada gilirannya memerlukan kebijakan pemerintah untuk menerapkan harga karbon dalam rentang ukuran tertentu, namun kebijakan ini tidak terbatas hanya pada peraturan, pajak, atau pasar karbon. Indikator ini mengukur tingkat harga karbon (dalam \$/tCO₂e) yang efektif di sektor listrik, seperti yang didefinisikan oleh laporan OECD tentang harga karbon yang efektif, sebagai biaya bersih bagi masyarakat untuk setiap unit pengurangan GRK terinduksi. Definisi yang hampir sama diusulkan oleh laporan Komisi Produktivitas Australia tentang kebijakan emisi karbon di perekonomian penting.

Harga karbon bisa eksplisit seperti pajak karbon atau harga tunjangan emisi dalam sistem perdagangan emisi GRK, atau dapat menjadi implisit, yaitu harga karbon yang mencerminkan biaya untuk masyarakat per ton CO₂e yang berkurang sebagai akibat dari setiap jenis tindakan kebijakan yang memiliki dampak terhadap emisi GRK. Perbandingan harga efektif karbon berdasarkan kebijakan pada sektor dan negara yang berbeda memberikan pemahaman mengenai adanya insentif untuk mengurangi emisi dan adanya efektivitas biaya dari kebijakan alternatif untuk mengurangi emisi, dan dampak potensialnya terhadap daya saing. Hasil numerik dari perbandingan ini harus diperlakukan dengan hati-hati, karena harga satu karbon tidak bisa secara komprehensif dapat menangkap apa yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut.

Sebagai titik awal, SDSN mengusulkan bahwa kerangka pasca-2015 dapat menelusuri harga karbon yang efektif untuk pembangkit listrik. Indikator ini meliputi bagian besar dari emisi gas rumah kaca dan secara metodologi lebih mudah untuk ditelusuri karena teknologi yang relevan bersifat global, emisi dan kebijakan terkonsentrasi, serta beberapa informasi yang tersedia dapat dibandingkan antarnegara, internasional, dan organisasi lainnya.

Indikator ini dapat mengukur empat target. Keempat target tersebut adalah sebagai berikut:

- Target 7.2 Meningkatnya proporsi energi terbarukan terhadap energi global secara substansial pada tahun 2030,
- Target 7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan untuk semua di negara-negara berkembang, khususnya LDCs dan SIDS,

Target 8.4 Pada tahun 2030, meningkatkan efisiensi konsumsi dan produksi terhadap sumber daya global secara progresif, dan berusaha untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan sesuai dengan program dalam kerangka kerja 10 tahunan pada bidang konsumsi berkelanjutan dan produksi dengan negara-negara maju yang memimpin, dan

Target 13.2 Mengintegrasikan langkah-langkah perubahan iklim ke dalam kebijakan nasional, strategi, dan perencanaan.

Efektivitas harga karbon di sektor listrik belum diukur di Indonesia. Rentang harga karbon yang efektif untuk sektor listrik dapat dihitung oleh Ditjen EBTKE sebagai salah satu kebijakan untuk meningkatkan sumber daya energi yang baru dan terbarukan dengan mengacu pada penghitungan OECD.

SDSN menggarisbawahi bahwa indikator ini agnostik terhadap jenis kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah. Indikator ini tidak memberikan preferensi pajak, instrumen pasar atau peraturan. Dengan demikian, pemerintah dapat mempertahankan fleksibilitas penuh mereka untuk mengidentifikasi dan mengerucutkan instrumen yang terbaik disesuaikan dengan konteksnya. Metodologi yang dikembangkan oleh Komisi Produktivitas dan OECD Australia dapat digunakan sebagai acuan. Setelah metodologi yang lebih baik tersedia untuk area emisi lainnya, indikator dapat diperluas untuk fokus sektoral. Indikator ini mengestimasi biaya pengurangan GRK dan dampaknya terhadap harga tanpa membandingkannya dengan manfaat sosial.

INDIKATOR 53. TINGKAT PERBAIKAN INTENSITAS ENERGI PRIMER

Indikator ini digunakan sebagai proksi efisiensi energi, salah satu pilar kerangka kerja SE4All. Indikator tersebut dapat menelusuri sejauh mana pertumbuhan ekonomi dipisahkan dari penggunaan energi, yang merupakan persyaratan utama untuk energi berkelanjutan dan dekarbonisasi.

Efisiensi energi didefinisikan sebagai rasio konsumsi energi bruto dengan PDB. Pada umumnya, konsumsi energi bruto dilaporkan dengan menggunakan lima sumber utama energi: bahan bakar padat/biomassa, minyak, gas, nuklir dan sumber daya terbarukan. Indikator dinyatakan sebagai laju pertumbuhan gabungan tahunan (CAGR) intensitas energi terhadap PDB, diukur melalui paritas daya beli (PPP).

Indikator ini dapat mengukur dua target. Kedua target tersebut adalah target 7.3, yaitu meningkatkan dua kali lipat tingkat perbaikan dalam efisiensi energi pada tahun 2030 dan

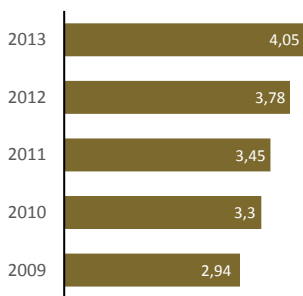
Intensitas konsumsi energi akhir per kapita di Indonesia mengalami peningkatan selama tahun 2009-2013, yaitu sebesar 2,94 SBM/kapita menjadi 4,05 SBM/kapita dengan rata-rata peningkatan 0,28 persen per tahun.

target 13.2, yaitu mengintegrasikan langkah-langkah perubahan iklim ke dalam kebijakan nasional, strategi, dan perencanaan.

Intensitas energi primer dapat dihitung dengan menggunakan data konsumsi energi primer oleh Kementerian ESDM dan data PDB dari BPS. Data dapat dirinci menurut sektor pengguna seperti rumah tangga, industri, dan transportasi.

Intensitas energi merupakan indikator proksi yang tidak sempurna karena dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi volume dan struktur sektoral PDB. Namun hal itu dapat diatasi dengan metode dekomposisi statistik. Statistikawan akan perlu menentukan apakah indikator dinyatakan sebagai rata-rata bergerak lebih dari beberapa tahun atau apakah pertumbuhan ini dilaporkan setiap tahun.

Gambar 7.3 Intensitas Konsumsi Energi Akhir per Kapita di Indonesia, 2009-2013



Sumber: *Handbook of Energy & Economic Statistic of Indonesia 2014* (Pusdatin ESDM)

Intensitas konsumsi energi final per kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk suatu negara terkait energi. Selama tahun 2009-2013, intensitas konsumsi energi akhir per kapita di Indonesia mengalami peningkatan, yaitu sebesar 2,94 SBM/kapita pada tahun 2009 menjadi 4,05 SBM/kapita pada tahun 2013. Peningkatan tersebut terjadi sebesar rata-rata 0,28 persen per tahun. Peningkatan konsumsi energi final di Indonesia meningkat seiring meningkatnya kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Tingginya intensitas energi akhir per kapita erat kaitannya dengan kemudahan penduduk untuk mengakses energi.

Negara-negara maju umumnya memiliki tingkat konsumsi energi akhir yang lebih tinggi. Dalam WEO tahun 2009, konsumsi energi primer per kapita di negara-negara OECD (2007) mencapai 34,5 SBM, Eropa Timur dan Eurasia 24,2 SBM, Cina 11 SBM, India 3,7 SBM, negara Asia lainnya (di luar Cina dan India) 5,55 SBM sementara rata-rata dunia mencapai 13,6 SBM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2010). Di sisi lain, intensitas konsumsi energi akhir per kapita di Indonesia pada tahun 2013 baru mencapai 4,05 SBM. Rendahnya konsumsi energi final di Indonesia menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia masih belum berkembang. Meningkatnya konsumsi energi final di Indonesia yang disertai dengan peningkatan ekonomi Indonesia akan mampu mencapai target SDGs, yaitu meningkatkan dua kali lipat tingkat perbaikan dalam efisiensi energi pada tahun 2030. Peningkatan kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi akan menurunkan intensitas energi akibat pemakaian energi yang efisien.

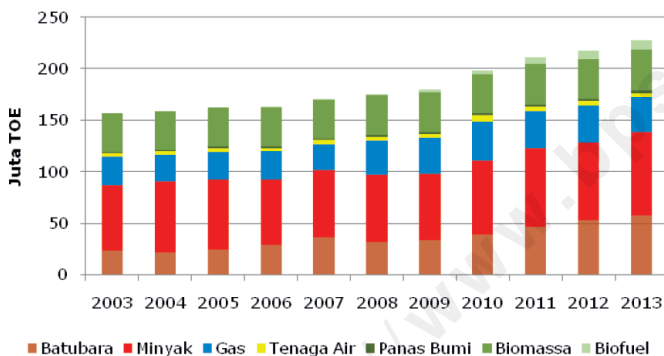
INDIKATOR 7.1. ENERGI PRIMER MENURUT JENISNYA

Terkait energi primer, *International Energy Agency* (IEA) melaporkan data tahunan mengenai sumber energi utama yang digunakan oleh masing-masing negara, seperti batu bara, minyak, gas, energi terbarukan, atau biomassa.

Berdasarkan PP No. 79 Tahun 2014, energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Di Indonesia, data konsumsi energi final menurut jenisnya, seperti batubara, minyak bumi, biomassa, dan gas dilaporkan oleh Kementerian ESDM setiap tahunnya. Selain konsumsi, dilaporkan juga data persediaan energi primer menurut jenisnya.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 7.1, yaitu pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, handal, dan modern. Perencanaan energi perlu dilakukan supaya dapat menjamin ketersediaan energi dengan harga yang terjangkau untuk jangka panjang. Kebutuhan energi masyarakat akan terus tumbuh seiring pertumbuhan penduduk, penambahan sarana transportasi seperti kereta api dan angkutan masal *Mass Rapid Transit/MRT* (BPPT, 2014).

Gambar 7.4 Perkembangan Penyediaan Energi Primer Menurut Jenis (Juta TOE), 2003-2013



Sumber: mengutip dari publikasi Outlook Energi Indonesia 2014, Dewan Energi Nasional Republik Indonesia

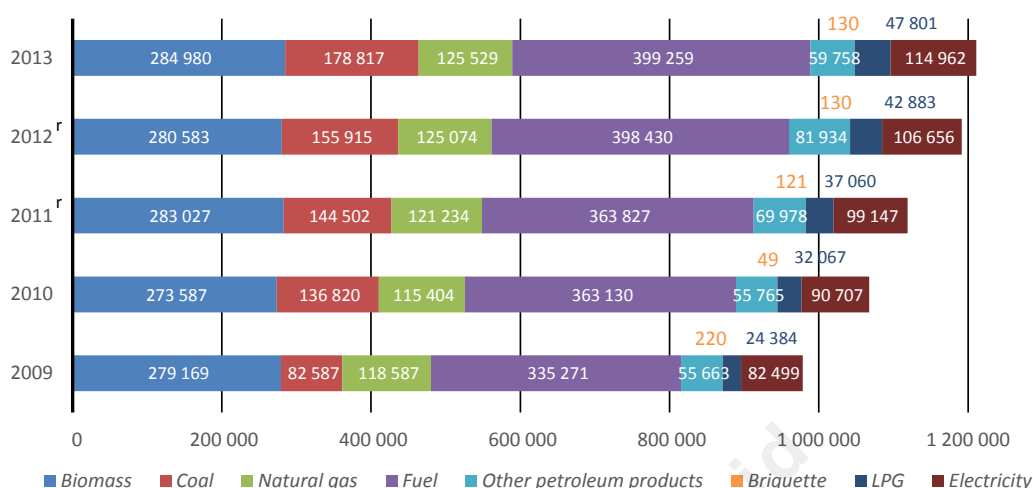
Dalam sepuluh tahun terakhir (2003-2013), penyediaan energi primer mengalami peningkatan dari sekitar 157,08 juta Tonnes Oil Equivalent (TOE) menjadi 228,22 juta TOE (dengan biomassa) atau meningkat rata-rata 3,8 persen per tahun (Dewan Energi Nasional, 2014). Penyediaan energi primer di Indonesia masih didominasi minyak yang mencakup minyak bumi dan bahan bakar minyak (BBM). Penyediaan energi diupayakan untuk mencukupi kebutuhan energi masyarakat. Kebutuhan energi primer dunia meningkat cukup tinggi seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi dunia (*World Energy Outlook*, 2013, IEA).

Selama periode 2009-2013, konsumsi energi final di Indonesia meningkat dari 978.380 ribu SBM pada tahun 2009 menjadi 1.211.237 ribu SBM pada tahun 2013 atau meningkat 23,80 persen dalam lima tahun terakhir. Konsumsi energi final terbesar yaitu jenis fuel. Fuel atau lebih sering dikenal sebagai

Indikator 7.1 dijelaskan dengan data Penyediaan Energi Primer Menurut Jenisnya dan data Konsumsi Energi Final Menurut Jenisnya.

Penyediaan Energi Primer di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat selama tahun 2003-2013, dengan nilai lebih dari 200 juta TOE di tahun 2013. Sementara data konsumsi energi final tahun 2013 tercatat sebesar 1.211.237ribu SBM dengan konsumsi terbesar pada *fuel*.

Gambar 7.5 Konsumsi Energi Final Menurut Jenisnya (Ribu SBM)



Catatan: r Data Revisi

Sumber: Handbook of Energy & Economic Statistic of Indonesia 2014, Kementerian ESDM

Bahan Bakar Minyak (BBM), terdiri dari avtur, avgas, bensin, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, dan minyak bakar. Peningkatan konsumsi BBM disebabkan tingginya laju konsumsi bensin kendaraan pribadi, tingginya laju konsumsi avtur/avgas oleh pesawat udara, terjadinya diversifikasi energi di sektor industri, dan adanya program substitusi minyak tanah dengan LPG di sektor rumah tangga. Sektor transportasi merupakan sektor pengguna BBM terbesar. Konsumsi batubara meningkat untuk memasok kebutuhan energi sektor industri, terutama untuk industri semen, industri tekstil, serta industri kertas. Tingginya laju pertumbuhan konsumsi energi final di sektor transportasi disebabkan pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor dari kurun waktu 2000-2012 yang mencapai 14,3 persen per tahun (BPPT, 2014).

Konsumsi energi final menunjukkan tren yang positif setiap tahun. Energi final adalah energi yang dapat langsung digunakan oleh pengguna akhir. Hal ini menggambarkan bahwa kebutuhan masyarakat akan energi semakin meningkat seiring kemajuan teknologi dan industri. Untuk penggunaan energi jenis bahan bakar, BBM mendominasi kebutuhan energi nasional karena teknologi berbasis BBM lebih efisien dan nyaman digunakan. Pemanfaatan batubara di sektor industri dan pemanfaatan teknologi berbasis listrik di beberapa sektor akan terus meningkat seiring perkembangan sektor pengguna. Pemakaian kayu bakar dan biomassa di sektor rumah tangga yang teknologinya kurang efisien secara bertahap terus menurun karena penggunaan peralatan listrik yang lebih efisien akan terus meningkat di semua sektor. Dengan tren yang terus meningkat secara konsisten, target SDG's 7.1 optimis dapat dicapai.

INDIKATOR 7.2. SUBSIDI BAHAN BAKAR FOSIL (S ATAU PERSEN GND)

Indikator ini mengukur subsidi untuk bahan bakar fosil yang dikonsumsi langsung oleh pengguna akhir atau dikonsumsi sebagai masukan untuk pembangkit listrik. Indikator ini menggunakan pendekatan gap harga, merupakan metodologi yang paling umum diterapkan untuk mengukur subsidi konsumsi, khususnya oleh IEA.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur :

Target 7.a Pada tahun 2030, meningkatkan kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses terhadap penelitian dan teknologi energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi bahan bakar fosil yang lebih canggih dan bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih

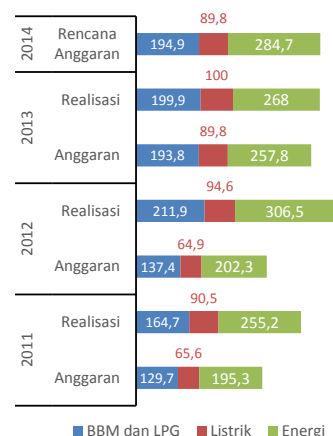
Target 12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien yang mendorong konsumsi boros dengan menghapus distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan pentahapan keluar subsidi berbahaya, bila ada, untuk mencerminkan dampak lingkungan, dengan sepenuhnya memperhatikan kebutuhan dan kondisi spesifik dari negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak buruk yang mungkin terjadi pada perkembangannya dengan cara yang melindungi orang miskin dan masyarakat yang terkena dampak.

INDIKATOR PROXY: SUBSIDI BBM DAN LPG (TRILIUN RUPIAH)

Di Indonesia, indikator ini didekati dengan subsidi BBM dan LPG yang disajikan dalam Outlook Energi Indonesia 2014 oleh BPPT, dengan bersumber pada Data Pokok APBN 2010-2014. Sebagian pemanfaatan energi di Indonesia masih disubsidi, antara lain bensin premium, minyak solar, biofuel untuk transportasi, minyak tanah untuk konsumen tertentu, paket LPG 3 kg, dan listrik untuk konsumen tertentu. Selama beberapa tahun subsidi energi terus meningkat. Menariknya, realisasi subsidi energi selalu lebih besar dari anggaran yang dialokasikan. Jika subsidi BBM dan LPG terus meningkat, dikhawatirkan target 7.a dan 12.c tentang efisiensi energi dan pengurangan subsidi bahan bakar fosil yang efisien akan sulit tercapai. Subsidi harus dikurangi agar ruang fiskal lebih longgar untuk dialokasikan pada program pembangunan yang lebih bermanfaat. Beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk mengurangi subsidi energi antara lain menghapuskan atau mengurangi subsidi BBM dan listrik dengan menaikkan harga BBM bersubsidi serta menaikkan tarif dasar listrik pada tingkat

Indikator 7.2 dijelaskan dengan Subsidi BBM dan LPG dalam triliun rupiah.

Gambar 7.6 Subsidi BBM dan LPG (triliun rupiah)



Sumber: APBN dan RAPBN, mengutip dari publikasi Outlook Energi Indonesia 2014, BBPT

harga keekonomiannya, substitusi BBM dengan bahan bakar nabati, dan mengganti kereta rel diesel dengan kereta rel listrik (BPPT, 2014).

INDIKATOR 7.3 . PROPORSI ENERGI DARI ENERGI TERBARUKAN (RENEWABLES)

Indikator ini mengukur energi yang dihasilkan dari sumber terbarukan sebagai persen dari total produksi energi. Berdasarkan PP No 79 Tahun 2014, energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 7.2 yaitu meningkatnya proporsi energi terbarukan terhadap energi global secara substansial pada tahun 2030.

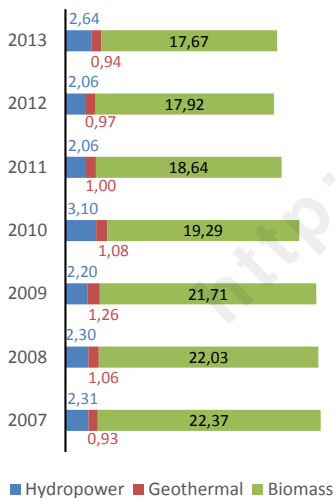
INDIKATOR PROXY: PROPORSI SUPPLY ENERGI TERBARUKAN TERHADAP TOTAL SUPPLY ENERGI PRIMER

Di Indonesia, indikator ini dapat diukur dengan proporsi supply energi terbarukan terhadap total supply energi primer yang disediakan oleh Kementerian ESDM. Energi terbarukan yang diukur yaitu *hydropower* (tenaga air), *geothermal* (panas bumi), dan *biomassa*. *Hydropower* (tenaga air) adalah energi potensial dari air yang mengalir. Energi ini dihitung sebagai input daya untuk menghasilkan listrik dan terdiri dari bendungan, aliran sungai, *mini hydro* dan *micro hydro*. Jumlah energi hidro yang dibutuhkan setara dengan energi fosil yang diperlukan untuk menghasilkan listrik. *Geothermal* (panas bumi) adalah salah satu jenis energi yang dihasilkan dari magma di dalam bumi dalam daerah vulkanik. Tekanan panas dan uap tinggi yang dipancarkan dapat dimanfaatkan untuk menekan turbin uap di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi atau dimanfaatkan secara langsung untuk pengeringan produk pertanian. Biomassa adalah jenis bahan bakar berbasis bahan organik terbarukan. Jenis-jenis biomassa antara lain kayu bakar (kayu dan limbah kayu), limbah pertanian (sekam padi, jerami, daun-daun palem, batok kelapa, dll), limbah padat perkotaan, dan limbah industri.

Gambar 7.7 menggambarkan proporsi penyediaan energi terbarukan biomassa terhadap total penyediaan energi primer lebih tinggi dibandingkan *hydropower* dan *geothermal*. Namun demikian, selama periode 2009-2013 proporsi *supply biomassa* menurun. Hal serupa juga terjadi pada proporsi *supply geothermal*. Potensi energi terbarukan seperti tenaga air, panas bumi, dan biomassa jumlahnya cukup memadai namun tersebar. Secara umum, pemanfaatan energi terbarukan masih relatif kecil. Hal ini disebabkan antara lain tingginya biaya investasi, birokrasi, insentif atau subsidi, dan harga jual produk

Indikator 7.3 didekati dengan proporsi *supply* energi terbarukan terhadap *total supply* energi primer

Gambar 7.7 Proporsi Supply Energi Terbarukan Terhadap Total Supply Energi Primer (persen)



Sumber: *Handbook of Energy & Economic Statistic of Indonesia 2014*, Kementerian ESDM

akhir energi terbarukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan energi fosil, kurangnya pengetahuan dalam mengadaptasi fasilitas energi bersih, serta potensi sumber daya energi baru dan terbarukan pada umumnya kecil dan tersebar (BPPT, 2014). Kebijakan pemerintah untuk mendukung peningkatan proporsi energi terbarukan harus dioptimalkan. Jika tidak, target 7.2 akan semakin sulit dicapai. Penghapusan subsidi BBM secara bertahap dan kebijakan *feed-in tariffs* (FIT) pada sektor listrik diharapkan akan berdampak pada berkembangnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Indonesia (Kementerian ESDM, 2014).

<http://www.bps.go.id>

**MENINGKATKAN PERTUMBUHAN
EKONOMI YANG MERATA DAN
BERKELANJUTAN, TENAGA KERJA
YANG OPTIMAL DAN PRODUKTIF, SERTA
PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA**

**8 DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH**



- INDIKATOR 54. PENDAPATAN NASIONAL BRUTO PER KAPITA (PPP, DALAM US\$ SAAT INI DENGAN METODE ATLAS)
- INDIKATOR 55. LAPORAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM NERACA EKONOMI DAN LINGKUNGAN (SEEA)
- INDIKATOR 56. TINGKAT PEKERJA MUDA, BAIK SEKTOR FORMAL MAUPUN INFORMAL
- INDIKATOR 57. RATIFIKASI DAN IMPLEMENTASI STANDAR KERJA FUNDAMENTAL ILO DAN KEPATUHAN DALAM HUKUM DAN PRAKTIK
- INDIKATOR 8.1 LAJU PERTUMBUHAN PDB PER TENAGA KERJA (INDIKATOR MDG)
- INDIKATOR 8.2 ANGKA PENDUDUK MISKIN YANG BEKERJA, DIUKUR DENGAN PENDAPATAN \$2 PPP PER KAPITA PER HARI
- INDIKATOR 8.3 INDEKS PEKERJAAN LAYAK (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)
- INDIKATOR 8.4 PENDAPATAN RUMAH TANGGA, TERMASUK DALAM BENTUK JASA-JASA (PPP, US\$ TERKINI)
- INDIKATOR 8.5 RASIO PEKERJAAN TERHADAP PENDUDUK (EPR) MENURUT GENDER DAN KELOMPOK UMUR (15-64)

INDIKATOR 8.6 - 8.9..

TUJUAN 8. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA DAN BERKELANJUTAN, TENAGA KERJA YANG OPTIMAL DAN PRODUKTIF, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA

INDIKATOR 54. PENDAPATAN NASIONAL BRUTO PER KAPITA (PPP, DALAM US\$ SAAT INI DENGAN METODE ATLAS)

Pendapatan Nasional Bruto mengukur total pendapatan penduduk berdasarkan biaya hidup di masing-masing negara (paritas daya beli, PPP). Pendapatan ini didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah oleh semua produsen yang ada di negara tersebut, ditambah dengan pajak netto (dikurangi subsidi) tidak termasuk nilai output, ditambah penerimaan bersih dari penghasilan utama (kompensasi karyawan dan pendapatan properti) dari luar negeri. *International Comparison Program* (ICP) dapat digunakan untuk menghitung paritas daya beli (PPP). Metode Atlas adalah metode Bank Dunia untuk menghitung nilai tukar untuk mengurangi dampak fluktuasi pasar lintas negara dibandingkan dengan pendapatan nasional.

Data indikator 54 diperoleh dari World Bank dengan tren yang meningkat selama 2010-2013, namun menurun di tahun 2014. Pada tahun 2014, Pendapatan Nasional Bruto per kapita di Indonesia sebesar 3.630 US\$.

Indikator ini dapat mengukur target 8.1 yaitu mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional, dan khususnya setidaknya 7 persen per tahun pertumbuhan PDB di negara-negara kurang berkembang; dan target 17.13 yaitu meningkatkan stabilitas makroekonomi global termasuk melalui koordinasi kebijakan dan koherensi kebijakan.

Indikator ini dihitung setiap tahun oleh Bank Dunia dengan menggunakan pendapatan nasional negara-negara. Pendapatan Nasional Bruto per kapita belum dapat dirinci menurut wilayah (kota/desa maupun provinsi/kabupaten).

Bank Dunia mendefinisikan Pendapatan Nasional Bruto/GNI per kapita (Produk Domestik Bruto/GNP per kapita sebelumnya) adalah pendapatan nasional bruto, dikonversi ke dolar AS dengan menggunakan metode Atlas Bank Dunia, dibagi dengan penduduk tengah tahun. GNI adalah jumlah dari nilai tambah oleh semua produsen penduduk ditambah pajak produk (dikurangi subsidi) tidak termasuk dalam penilaian output ditambah penerimaan bersih dari penghasilan utama (kompensasi karyawan dan pendapatan properti) dari luar negeri. GNI, dihitung dalam mata uang nasional, biasanya dikonversi ke dolar AS pada kurs resmi untuk perbandingan di seluruh negara, meskipun tingkat alternatif digunakan ketika nilai tukar resmi dinilai menyimpang dengan margin yang sangat besar dari tingkat benar-benar diterapkan dalam transaksi internasional. Untuk memuluskan fluktuasi harga dan nilai

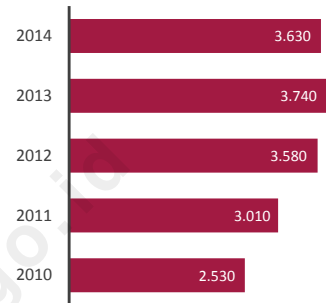
tukar, metode khusus Atlas konversi digunakan oleh Bank Dunia. Hal ini berlaku faktor konversi yang rata-rata nilai tukar untuk tahun tertentu dan dua tahun sebelumnya, disesuaikan dengan perbedaan tingkat inflasi antara negara, dan hingga tahun 2000, G-5 negara (Perancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat). Dari tahun 2001, negara-negara ini termasuk kawasan Euro, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.

Gambar 8.1 menunjukkan bahwa Pendapatan Nasional Bruto per kapita meningkat selama periode 2010-2013 dan menurun di tahun 2014. Penurunan pendapatan per kapita disebabkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pendapatan per kapita merupakan salah satu ukuran kesejahteraan penduduk dan cermin pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan per kapita dapat berarti pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berhasil dicapai. Jika kestabilan ekonomi dapat dijaga setiap tahunnya, target 8.1 dan 17.13 optimis dapat tercapai.

Seperti ditegaskan dalam laporan SDSN, Pendapatan Nasional Bruto dan Produk Domestik Bruto adalah indikator penting, namun alat tersebut hanya dapat mengukur sebagian dari dimensi ekonomi pembangunan berkelanjutan. Kedua ukuran ekonomi tersebut tidak cukup menangkap kondisi masyarakat.

Oleh karena itu, SDSN merekomendasikan indikator dilengkapi dengan indikator yang lain (di luar PDB). Misalnya, Kerangka Sentral Sistem Neraca Lingkungan dan Ekonomi 2012 dapat mendukung indikator yang lebih luas terkait pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi hijau, yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi sambil memastikan sumber daya alam terus menyediakan sumber daya dan jasa lingkungan. Kerangka kerja ekonomi-lingkungan memungkinkan indikator terhubung dengan pengurangan kemiskinan dan pengelolaan sumber daya alam. Ketergantungan yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan gizi juga harus diperhatikan. Isu-isu ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang pro-poor dan kebijakan perlindungan sosial di negara berkembang.

Gambar 8.1. Pendapatan Nasional Bruto per kapita (PPP, metode US\$ Atlas saat ini), 2010-2014



Sumber : Worldbank

INDIKATOR 55. LAPORAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM NERACA EKONOMI DAN LINGKUNGAN (SEEA)

Komisi statistik PBB mengadopsi Sistem Neraca Ekonomi Lingkungan (SEEA) pada tahun 2012 sebagai standar internasional pertama untuk neraca ekonomi lingkungan. SEEA membawa statistik lingkungan dan hubungannya dengan ekonomi ke dalam inti statistik resmi dan dengan demikian memperluas Sistem Neraca Nasional (SNN), yang berfokus pada pengukuran kinerja ekonomi. Contoh informasi yang diberikan oleh SEEA termasuk penilaian tren dalam penggunaan dan ketersediaan sumber daya alam, tingkat emisi dan pembuangan

ke lingkungan dari kegiatan ekonomi, dan jumlah aktivitas ekonomi yang dilakukan untuk tujuan lingkungan. Komisi statistik PBB akan mengembangkan templat pelaporan untuk Kerangka kerja sentral SEEA.

Indikator ini mengukur apakah suatu negara memberlakukan dan melaporkan SEEA nasional. Indikator ini mempertimbangkan fakta bahwa beberapa elemen dari SEEA mungkin tidak berlaku untuk negara tertentu dan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara bertahap mulai dari neraca yang dipilih tergantung pada prioritas kebijakan.

Indikator ini dapat mengukur :

- Target 8.4 Pada tahun 2030, meningkatkan efisiensi konsumsi dan produksi terhadap sumber daya global secara progresif, dan berusaha untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan sesuai dengan program dalam kerangka kerja 10 tahunan pada bidang konsumsi berkelanjutan dan produksi dengan negara-negara maju yang memimpin
- Target 12.1 Melaksanakan Kerangka 10-Tahun Program konsumsi berkelanjutan dan produksi (10YFP), semua negara mengambil tindakan, dengan negara-negara maju memimpin, dengan mempertimbangkan perkembangan dan kemampuan negara-negara berkembang
- Target 12.2 Tahun 2030 mencapai pengelolaan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan efisien
- Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan yang ramah lingkungan dari bahan kimia dan semua limbah sepanjang siklus hidup mereka sesuai dengan kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pembebasan mereka ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan
- Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan ekosistem dan nilai keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan lokal, proses pembangunan dan strategi pengurangan kemiskinan, dan laporan
- Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pembangunan kapasitas untuk negara-negara berkembang, termasuk untuk LDCs dan SIDS, meningkat secara signifikan ketersediaan berkualitas tinggi, tepat waktu dan data

BPS telah membuat SEEA setiap tahun dalam publikasinya yang berjudul Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi.

yang dapat dipercaya dipilah berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, usia, ras, suku, status migrasi, kecacatan, lokasi geografis dan karakteristik lain yang relevan dalam konteks nasional.

BPS telah membuat SEEA setiap tahun dalam publikasinya yang berjudul Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi. Saat ini pembangunan ekonomi mulai beralih dari memenuhi kebutuhan hidup saja menjadi pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan daya dukung alam untuk memenuhi kebutuhan hidup generasi mendatang. Unit analisis pada penyusunan publikasi ini adalah nasional dengan sampel beberapa wilayah provinsi di Indonesia. Tantangan indikator ini adalah adanya kebutuhan untuk menciptakan kerangka kerja institusional untuk menyusun data yang terintegrasi, dan proses produksi statistik dan manajemen informasi dalam sistem statistik negara-negara. SEEA merupakan indikator nasional, namun SEEA dapat sangat terpilah (berdasarkan sektor kegiatan, sumber daya lingkungan, unit sub-nasional, dan lain-lain).

INDIKATOR 56. TINGKAT PEKERJA MUDA, BAIK SEKTOR FORMAL MAUPUN INFORMAL

Tingkat pekerja muda adalah persentase angkatan kerja muda yang bekerja. Orang-orang muda didefinisikan sebagai orang yang berusia 15 hingga 24 tahun. Angkatan kerja terdiri dari semua orang yang saat ini berada dalam kelompok usia tersebut yang sedang bekerja atau aktif mencari pekerjaan, dan jumlah mereka yang berkerja dan tidak berkerja.

Sebisa mungkin tingkat ketenagakerjaan muda harus dilaporkan secara terpisah untuk pekerjaan formal dan informal. Hal ini sangat penting untuk negara berkembang. Konferensi Statistik Internasional yang Ke-17 dari Statistik Tenaga Kerja merekomendasikan cakupan pekerjaan informal, yaitu:

1. berusaha sendiri (wiraswasta tanpa pekerja) sektor informal
2. berusaha (wiraswasta dengan pekerja) di sektor informal
3. pekerja keluarga, terlepas dari jenis pekerjaan
4. anggota koperasi produsen informal (tidak berbadan hukum)
5. karyawan informal seperti yang didefinisikan sesuai hubungan ketenagakerjaan (dalam hukum/prakteknnya, pekerjaan tidak tunduk pada UU nasional tenaga kerja, pajak penghasilan, perlindungan sosial atau hak atas imbalan kerja tertentu (cuti tahunan atau sakit)) dan

Lapangan pekerjaan sektor formal semakin meningkat, sebaliknya lapangan pekerjaan sektor informal semakin menurun selama periode 2011-2015.

6. pekerja milik sendiri yang terlibat dalam produksi barang-barang khusus untuk penggunaan akhir oleh rumah tangga.

Indikator ini dapat mengukur :

- Target 8.3 Mempromosikan kebijakan pembangunan yang berorientasi yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk akses ke layanan keuangan
- Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan yang penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang cacat, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya
- Target 8.6 Pada tahun 2020, mengurangi proporsi pemuda yang tidak sedang bekerja, dalam pendidikan atau pelatihan secara substansial
- Target 8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan muda dan melaksanakan Pakta Lapangan Kerja Global ILO.

Di perkotaan, lapangan pekerjaan sektor formal lebih mendominasi, sedangkan di perdesaan lebih didominasi lapangan pekerjaan sektor informal.

Tingkat pekerja muda didefinisikan sebagai persentase angkatan kerja usia 15-24 tahun yang bekerja, menurut sektor formal dan informal. Data diperoleh melalui Sakernas serta dapat dipilah menurut gender dan sektor formal-informal. Sektor formal mencakup berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sementara sektor informal meliputi berusaha sendiri; berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar; pekerja bebas di pertanian; pekerja bebas di non pertanian; pekerja keluarga/tak dibayar.

Indikator ketenagakerjaan untuk pekerja muda sektor formal dan informal lebih baik dibandingkan ukuran pengangguran standar yang hanya fokus pada sektor formal. Pekerja sektor informal tidak serta merta dapat dihitung di semua negara. Meskipun sudah banyak yang memulai mendefinisikan dan menghitung jumlah pekerja di sektor informal, namun kualitas hasil dan ketersediaan data masih kurang baik.

Indikator ketenagakerjaan menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Gambar 8.2 menjelaskan persentase angkatan kerja usia 15-24 tahun yang bekerja di sektor formal meningkat selama periode 2011-2015. Sebaliknya, persentase angkatan kerja usia 15-24 tahun yang bekerja di

sektor informal menurun. Tren ini menunjukkan Indonesia sedang mengalami kemajuan dalam mencapai tujuan pekerjaan yang layak. Pekerja di sektor formal umumnya memiliki akses yang lebih baik ke pelayanan sosial, seperti kesehatan dan kompensasi kerja. Pola pertumbuhan ekonomi sejak 2010 mungkin memainkan peran penting dalam pergeseran menuju pekerjaan di sektor formal (ILO, 2013).

Pekerja di sektor formal lebih banyak terdapat di perkotaan, sementara pekerja di sektor informal lebih banyak terdapat di perdesaan. Perkotaan menyediakan akses pekerjaan formal yang lebih banyak, dimana hampir separuh dari semua pekerja memiliki kontrak kerja. Usaha menengah dan usaha besar, umumnya beroperasi dalam ekonomi formal dan sebagian besar berada di perkotaan. Sementara di perdesaan, masih banyak pekerja tidak dibayar dengan tingkat pendidikan rendah yang bekerja di sektor pertanian (ILO, 2013).

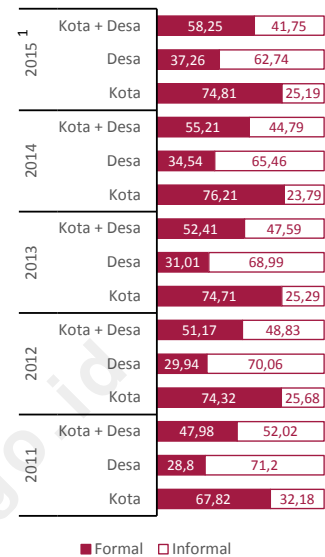
Pekerjaan di sektor formal meningkat dan organisasi pengusaha dan pekerja menjadi penting untuk mendukung tren ini. Untuk mendukung perluasan sektor formal, kebijakan ditempuh untuk meningkatkan produktivitas dengan memfasilitasi peralihan pekerja kepada kegiatan dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan dengan meningkatkan perlindungan pekerja (ILO, 2015).

Meningkatnya pekerja di sektor formal menggambarkan bahwa semakin banyak angkatan kerja yang memiliki pendidikan dan kemampuan yang cukup untuk memasuki lapangan pekerjaan formal dan memperoleh upah yang layak. Jika tren peningkatan pekerja di sektor formal dapat terus dipertahankan, target 8.3, 8.5, 8.6, dan 8.b optimis dapat dicapai.

INDIKATOR 57. RATIFIKASI DAN IMPLEMENTASI STANDAR KERJA FUNDAMENTAL ILO DAN KEPATUHAN DALAM HUKUM DAN PRAKTIK

Konvensi ILO menjelaskan standar perburuhan utama yang bertujuan untuk mendorong peluang pekerjaan yang layak dan produktif, di mana pria dan wanita bisa bekerja dalam kondisi yang sama, non-diskriminasi, aman, bebas dan bermartabat. Indikator yang diusulkan menelusuri ratifikasi negara dan kepatuhan dengan 8 konvensi fundamental ILO, yang mencakup hal-hal berikut, kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak untuk berunding bersama, penghapusan segala bentuk kerja paksa atau wajib, usia minimum untuk tenaga kerja dan penghapusan langsung dari bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, termasuk upah yang setara. Negara-negara diwajibkan untuk melaporkan konvensi yang telah diratifikasi setiap dua tahun. Sistem pelaporan didukung oleh sistem pengawasan yang membantu untuk memastikan implementasi. ILO secara teratur mengkaji penerapan standar di

Gambar 8.2. Persentase angkatan kerja usia 15-24 tahun yang bekerja, menurut sektor formal dan informal, 2011-2015



Catatan : ¹ Februari 2015
 Sumber : Sakernas, BPS

negara-negara anggota dan membuat rekomendasi.

Indikator ini dapat mengukur :

- Target 8.3 Mempromosikan kebijakan pembangunan yang berorientasi yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk akses ke layanan keuangan
- Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan yang penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang cacat, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya
- Target 8.7 Mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, memberantas kerja paksa, dan pada tahun 2025, menghilangkan pekerja anak dalam segala bentuk termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak
- Target 8.8 Melindungi hak-hak buruh dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan orang-orang dalam pekerjaan berbahaya
- Target 8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan muda dan melaksanakan Pakta Lapangan Kerja Global ILO
- Target 10.2 Tahun 2030 memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi dan politik dari semua terlepas dari usia, jenis kelamin, cacat, ras, etnis, asal, agama atau status ekonomi atau lainnya
- Target 10.3 Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan dari hasil, termasuk melalui menghilangkan hukum kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan undang-undang, kebijakan dan tindakan yang tepat dalam hal ini
- Target 10.4 Mengadopsi kebijakan terutama kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial dan mencapai kesetaraan yang lebih besar secara progresif

Indonesia sebagai negara anggota ILO sejak tahun 1950 memiliki kewajiban untuk meratifikasi Konvensi ILO. Proses ratifikasi dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Luar Negeri yang disahkan oleh Presiden. Laporan ratifikasi tersebut kemudiandiserahkan kepada Dirjen ILO.

Target 16.2 Mengakhiri kekerasan, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak.

Indonesia sebagai negara anggota ILO sejak tahun 1950 memiliki kewajiban untuk meratifikasi Konvensi ILO. Proses ratifikasi dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Luar Negeri yang disahkan oleh Presiden. Laporan ratifikasi tersebut kemudian diserahkan kepada Dirjen ILO.

INDIKATOR 8.1 LAJU PERTUMBUHAN PDB PER TENAGA KERJA (INDIKATOR MDG)

Indikator ini merupakan ukuran kunci produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merupakan jumlah rupiah yang diterima seorang pekerja dalam waktu satu tahun yang dihitung dari PDRB suatu daerah/Negara dibagi dengan jumlah pekerja.

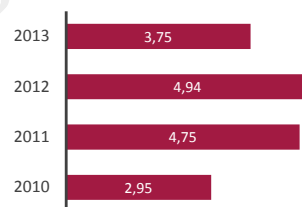
Indikator ini dapat mengukur target 8.1 yaitu mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional, dan khususnya setidaknya 7 persen per tahun pertumbuhan PDB di negara-negara kurang berkembang. Indikator yang merupakan indikator MDGs ini dapat diperoleh dari BPS yaitu dari data PDB nasional dan Sakernas. Dapat dirinci menurut sektor lapangan usaha dan tersedia sampai level provinsi.

Peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat penting bagi perekonomian karena dapat mempertahankan daya saing global. Gambar 8.3 menunjukkan produktivitas tenaga kerja meningkat selama periode 2010-2012, dan menurun pada tahun 2013. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh investasi di bidang infrastruktur, serta perubahan struktural dimana terjadi peningkatan jumlah pekerjaan di sektor industri dan sektor bernilai tambah sementara pekerjaan di sektor pertanian dengan nilai tambah yang lebih kecil mengalami penurunan (ILO, 2015). Jika produktivitas tenaga kerja meningkat secara konsisten setiap tahun, target 8.1 diperkirakan dapat tercapai.

INDIKATOR 8.2 ANGKA PENDUDUK MISKIN YANG BEKERJA, DIUKUR DENGAN PENDAPATAN \$2 PPP PER KAPITA PER HARI

Indikator ini mengukur penduduk bekerja yang berpenghasilan kurang dari \$ 2 PPP per hari. Di Indonesia, indikator ini dapat diukur dengan persentase pekerja dengan pendapatan \$2 PPP per kapita per hari yang dapat diperoleh dari Susenas, namun data belum dapat dihitung. Indikator ini dapat mengukur target 8.1 yaitu mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional, dan

Gambar 8.3. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja, 2010-2013



Sumber : MDG, United Nation Statistics Division (UNSTAT)

Indikator ini dapat diukur dengan persentase pekerja dengan pendapatan \$2 PPP per kapita per hari yang memungkinkan diperoleh dari Susenas, namun sampai saat ini belum dapat disajikan.

khususnya setidaknya 7 persen per tahun pertumbuhan PDB di negara-negara kurang berkembang.

INDIKATOR 8.3 INDEKS PEKERJAAN LAYAK (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini dipertimbangkan untuk menelusuri kepatuhan negara dengan agenda pekerjaan layak yang diadopsi oleh negara-negara anggota ILO. Pekerjaan yang layak seperti yang didefinisikan ILO, termasuk akses pekerjaan penuh dan produktif dengan hak di tempat kerja, perlindungan sosial dan promosi dialog sosial, dengan kesetaraan gender sebagai isu lintas sektor. Saat ini, indeks tunggal tidak ada, tetapi dapat dibuat (kemungkinan sebagai indikator komposit). ILO saat ini membangun indikator statistik yang meliputi sepuluh kategori komponen untuk pekerjaan layak yang dapat memenuhi indikator ini. Demikian pula, OECD membangun kerangka kerja konseptual dan operasional untuk mengukur kualitas kerja. Hal ini dapat diintegrasikan dengan Kelompok kerja Khusus UNECE untuk kualitas kerja, yang anggotanya mencakup OECD dan ILO.

Saat ini, indeks tunggal tidak ada, tetapi dapat dibuat (kemungkinan sebagai indikator komposit) di Indonesia sebagai negara anggota ILO.

Indikator ini dapat mengukur target 8.3 yaitu mempromosikan kebijakan pembangunan yang berorientasi yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk akses ke layanan keuangan, dan target 8.8 yaitu melindungi hak-hak buruh dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan orang-orang dalam pekerjaan berbahaya.

Statistik ketenagakerjaan juga dapat diperoleh dari statistik sosio-demografis dari SNN dan SEEA. Berdasarkan Divisi Statistik PBB, sistem ini harus digunakan untuk menghasilkan statistik ekonomi dan ketenagakerjaan dalam penerapan kebijakan pasar tenaga kerja yang terintegrasi dan mengacu pada tujuan kebijakan lain untuk sektor riil, fisik dan moneter. Dengan mengimplementasikan SEEA di negara berkembang, juga dapat mempertegas konsep pekerjaan hijau/green jobs. BPS dengan menggunakan Sakernas sebagai sumber utama data ketenagakerjaan dapat menyediakan indikator ini jika indikator telah dikembangkan. Untuk sementara, proksi yang tepat mungkin adalah proporsi pekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional.

Menurut ILO, pekerjaan layak melibatkan kesempatan atas kerja yang produktif dan memberikan pendapatan yang adil, memberikan keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya. Indikator pekerjaan layak dapat dilihat dari konteks ekonomi dan sosial untuk pekerjaan layak, kesempatan kerja, pendapatan yang mencukupi dan pekerjaan yang produktif, dan jam kerja. Sebagai contoh, indikator

pekerjaan layak dari konteks ekonomi dan sosial antara lain anak-anak yang tidak bersekolah, usia 5-17 tahun (persen); perkiraan persentase populasi usia produktif yang terkena HIV positif; produktivitas tenaga kerja; ketidaksetaraan berbasis pendapatan (rasio persentil P90/P10); tingkat inflasi (persen); pekerjaan sesuai kegiatan ekonomi, usia +15 tahun (persen); tingkat keaksaraan orang dewasa; upah (persen dari PDB); PDB per kapita, PPP; jumlah pekerja perempuan sesuai industri, usia +15 tahun (persen); ketidaksetaraan upah/pendapatan (persentil rasio P90/P10) (ILO, 2011).

INDIKATOR 8.4 PENDAPATAN RUMAH TANGGA, TERMASUK DALAM BENTUK JASA-JASA (PPP, US\$ TERKIND)

Indikator ini berasal dari Sistem Neraca Nasional (SNN) dan digunakan sebagai salah satu komponen PDB. Data dapat diperoleh melalui survei khusus yang dinamakan Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga, namun data belum dapat ditemukan. Pendapatan rumah tangga dapat berupa pendapatan upah dan gaji, pendapatan usaha rumah tangga, pendapatan kepemilikan, dan transfer. Survei dilakukan setiap tahun tetapi level penyajiannya hanya pada level nasional.

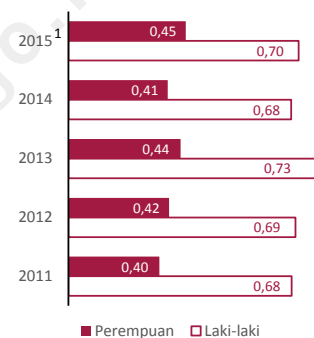
Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 8.3 yaitu mempromosikan kebijakan pembangunan yang berorientasi yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk akses ke layanan keuangan.

INDIKATOR 8.5 RASIO PEKERJAAN TERHADAP PENDUDUK (EPR) MENURUT GENDER DAN KELOMPOK UMUR (15-64)

Indikator ini melengkapi berbagai ukuran pengangguran karena menelusuri kontribusi keseluruhan penduduk yang dipekerjakan. Indikator rasio pekerjaan terhadap penduduk (EPR) didefinisikan sebagai rasio jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Konsep bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu; atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja yaitu keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.

Indikator ini dapat mengukur target 8.5 yaitu pada tahun 2030, mencapai pekerjaan yang penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua wanita dan pria, termasuk

Gambar 8.4. Rasio pekerjaan terhadap penduduk (EPR) menurut jenis kelamin, 2011-2015



Catatan : ¹ Februari 2015
Sumber : Sakernas, BPS

bagi orang-orang muda dan penyandang cacat, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Di Indonesia, data ini dapat diperoleh melalui Sakernas setiap tahun dan tersedia sampai level provinsi.

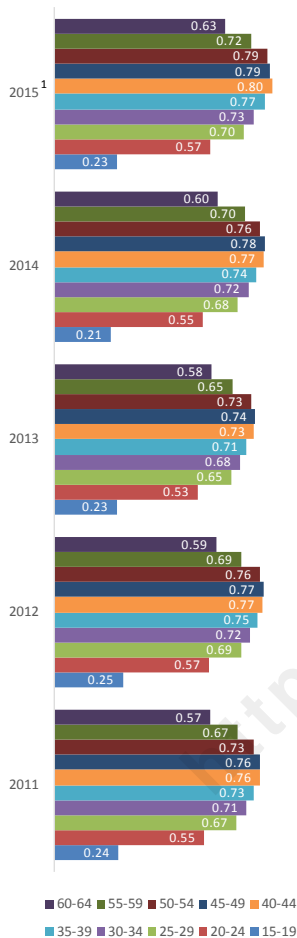
Gambar 8.4 menunjukkan rasio pekerjaan terhadap penduduk (EPR) laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa kesempatan kerja yang diperoleh penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Jika dilihat perkembangannya, selama 2011-2015 EPR laki-laki dan perempuan cenderung meningkat. Jika rasio pekerjaan terhadap penduduk laki-laki dan rasio pekerjaan terhadap penduduk perempuan konsisten meningkat, maka target 8.5 optimis dapat dicapai. Hanya saja, partisipasi dan produktivitas penduduk perempuan perlu lebih ditingkatkan dalam lapangan kerja.

Peningkatan tingkat pendidikan perempuan muda seharusnya dapat meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja pada masa mendatang, namun persistensi EPR perempuan ini menunjukkan perlunya kebijakan dan program yang lebih aktif dalam membantu perempuan memasuki angkatan kerja dan terlibat dalam pekerjaan di luar rumah. Laki-laki memiliki manifestasi pilihan yang akan diambil di bidang pendidikan, pelatihan, pengembangan karir dan partisipasi angkatan kerja, yang dipegaruhi oleh beberapa norma dan stereotip social yang berlaku di masyarakat. Rasio pekerjaan menurut gender menjelaskan sejauh mana perempuan dan laki-laki dapat memperoleh keuntungan dari berbagai kesempatan di dunia kerja (ILO, 2015).

Gambar 8.5 menunjukkan rasio pekerjaan terhadap penduduk menurut kelompok umur yang berbentuk piramida, dengan persentase tertinggi pada kelompok umur 40-44 tahun. Rasio pekerjaan terendah pada kelompok umur 15-19 tahun, sementara rasio pekerjaan pada kelompok umur di atas 50 tahun masih tergolong tinggi. Pemerataan rasio pekerjaan terhadap penduduk di setiap kelompok umur diperlukan untuk mencapai target 8.5.

Tren secara keseluruhan menunjukkan nilai yang positif bagi pekerja muda. Bagi pekerja usia 30 tahun ke atas mungkin dapat memperoleh keuntungan dari kebijakan dan program yang membuka akses bagi pelajar dewasa untuk meningkatkan ketrampilan dan mengikuti pelatihan untuk terjun di sektor dan pekerjaan lain (ILO, 2015).

Gambar 8.5. Rasio pekerjaan terhadap penduduk (EPR) menurut kelompok umur (15-64 tahun), 2011-2015



Catatan : ¹ Februari 2015
 Sumber : Sakernas, BPS

INDIKATOR 8.6 PROPORSI PEKERJAAN INFORMAL TERHADAP TOTAL LAPANGAN KERJA

Indikator ini mencakup jumlah orang yang bekerja di lapangan kerja informal, yaitu pekerja yang lapangan kerjanya tidak dikenakan undang-undang ketenagakerjaan, pajak penghasilan, perlindungan sosial atau kerja lain dalam hukum dan praktiknya. Indikator ini dapat diperoleh melalui Sakernas yaitu persentase pekerja sektor informal (penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja keluarga/tak dibayar) terhadap seluruh tenaga kerja.

Indikator ini dapat mengukur target 8.5 yaitu pada tahun 2030, mencapai pekerjaan yang penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang cacat, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

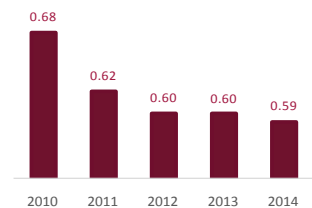
Gambar 8.6 menunjukkan proporsi pekerjaan informal terhadap total lapangan kerja menurun selama periode 2010-2014. Melihat kecenderungan ini, target 8.5 diperkirakan akan tercapai. Proporsi pekerjaan informal terus ditekan untuk mengurangi jumlah pekerja rentan yang tidak memperoleh jaminan sosial dan upah yang layak. Salah satu agenda pekerjaan layak yang diidentifikasi ILO di tingkat global sektor informal yaitu formalisasi ekonomi informal, seperti pekerja rumah tangga (PRT).

INDIKATOR 8.7 PERSENTASE PEKERJA YANG BERUSAHA SENDIRI DAN PEKERJA KELUARGA TERHADAP TOTAL LAPANGAN PEKERJAAN

Indikator ini menelusuri penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga atau yang berusaha sendiri. Ukuran ini sangat penting untuk negara-negara dengan pasar tenaga kerja informal yang besar. Indikator ini dapat diperoleh melalui Sakernas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 8.5 yaitu pada tahun 2030, mencapai pekerjaan yang penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang cacat, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Persentase pekerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total lapangan pekerjaan cenderung menurun selama 2010-2014, meskipun ada sedikit kenaikan pada tahun 2013. Kondisi ini sebanding dengan penurunan proporsi pekerjaan sektor informal, yang mencakup jabatan pekerjaan berusaha sendiri dan pekerja keluarga. Jika tren indikator ini konsisten menurun, maka target 8.5 optimis dapat dicapai.

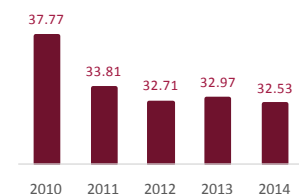
Gambar 8.6. Proporsi pekerjaan informal terhadap total lapangan kerja, 2010-2014



Sumber : Sakernas, BPS

Proporsi pekerjaan informal terhadap total lapangan kerja menurun selama tahun 2010-2014, pada tahun 2014 mencapai 0,59.

Gambar 8.7. Persentase pekerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total lapangan pekerjaan, 2010-2014



Sumber : Sakernas, BPS

INDIKATOR 8.8 PERSENTASE PENDUDUK MUDA YANG TIDAK SEDANG MENGIKUTI PENDIDIKAN, PEKERJAAN, ATAU PELATIHAN (NEET)

Indikator ini melacak jumlah kaum muda yang tidak sedang melakukan pekerjaan formal maupun dalam pendidikan dan pelatihan penuh waktu. Ini adalah ukuran dari persentase pemuda yang menganggur, bekerja di sektor informal, atau memiliki bentuk-bentuk pekerjaan tidak tetap. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 8.6 yaitu pada tahun 2020, mengurangi proporsi pemuda yang tidak sedang bekerja, dalam pendidikan atau pelatihan secara substansial.

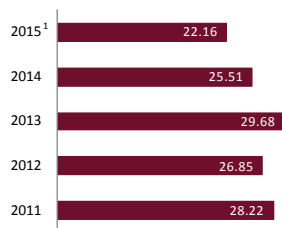
INDIKATOR PROXY : PERSENTASE PENDUDUK MUDA YANG TIDAK SEDANG BERSEKOLAH DAN TIDAK SEDANG BEKERJA

Dari sisi konsep, di Indonesia belum tersedia data untuk mengukur indikator 8.8 secara keseluruhan. Ketersediaan indikator ini didekati dengan persentase penduduk muda (usia 15-24 tahun) yang tidak sedang mengikuti pendidikan (bersekolah) dan tidak sedang bekerja yang bersumber dari Sakernas. Pada kuesioner Sakernas, terdapat pertanyaan apakah penduduk muda selama seminggu yang lalu melakukan kegiatan seperti bersekolah dan bekerja. Namun untuk konsep pelatihan, pertanyaan di kuesioner Sakernas adalah apakah pernah mengikuti pelatihan, sehingga referensi waktu dari variabel pelatihan belum dapat tercermin bersama-sama dengan variabel pendidikan dan pekerjaan yang menggunakan referensi waktu seminggu yang lalu. Indikator ini dapat disagregasi menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal.

Konsep bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu; atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja yaitu keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya. Indikator ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui proporsi penduduk muda yang tidak melakukan kegiatan produktif terkait pendidikan, pekerjaan, dan pelatihan. Penduduk muda berada pada usia yang sangat produktif merupakan sumber tenaga kerja produktif. Potensi demografi ini perlu dikelola dan dikembangkan secara kompeten dan berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan.

Gambar 8.8 menggambarkan penduduk muda usia 15-24 tahun yang selama seminggu sebelum pencacahan hingga waktu pencacahan tidak sedang bersekolah dan tidak sedang bekerja persentasenya masih cukup tinggi secara total, yaitu di atas 20 persen. Namun demikian, dalam lima tahun terakhir persentasenya cenderung menurun.

Gambar 8.8. Persentase Penduduk Muda yang Tidak Sedang Bersekolah dan Tidak Bekerja, 2011-2015



Catatan : ¹ Februari 2015
Sumber : Sakernas, BPS

Indikator 8.8 didekati dengan persentase penduduk muda yang tidak sedang bersekolah dan tidak sedang bekerja. Persentase penduduk muda yang tidak sedang bersekolah dan tidak sedang bekerja cenderung menurun dalam lima tahun terakhir, dengan persentase tahun 2015 sebesar 22,16 persen.

Pemerintah melalui institusi terkait berupaya meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan lapangan kerja. Di bidang pendidikan, pemerintah berupaya mempercepat pemerataan pembangunan prasarana pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Peningkatan mutu pendidikan melalui menuju wajib belajar 12 tahun sedang dikembangkan. Di bidang tenaga kerja, dibutuhkan kebijakan yang mendukung transisi dari sekolah ke pekerjaan agar penduduk muda dapat mengakses peluang kerja yang ada (ILO, 2015).

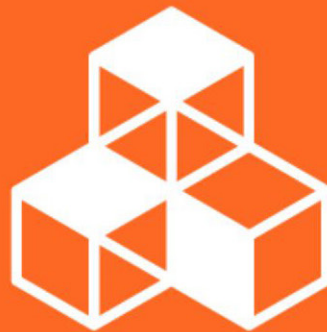
INDIKATOR 8.9 INDIKATOR PELAKSANAAN KERANGKA KERJA 10 TAHUNAN PADA PROGRAM KONSUMSI DAN PRODUKSI BERKELANJUTAN (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 8.4 yaitu pada tahun 2030, meningkatkan efisiensi konsumsi dan produksi terhadap sumber daya global secara progresif, dan berusaha untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan sesuai dengan program dalam kerangka kerja 10 tahunan pada bidang konsumsi berkelanjutan dan produksi dengan negara-negara maju yang memimpin, dan target 12.7 yaitu mempromosikan praktik pengadaan publik yang berkelanjutan sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.

Indikator 8.9 belum tersedia di Indonesia dan perlu dikembangkan.

**MEMBANGUN INFRASTRUKTUR
TANGGUH, MENINGKATKAN
INDUSTRIALISASI INKLUSIF DAN
BERKELANJUTAN DAN MENDORONG
INOVASI**

**9 INDUSTRY, INNOVATION
AND INFRASTRUCTURE**



- INDIKATOR 58. AKSES TERHADAP JALAN UNTUK SEGALA CUACA/ALL WEATHER ROAD (PERSENTASE AKSES PADA [X] KM JARAK KE JALAN)
- INDIKATOR 59. LANGGANAN *BROADBANDPHONE* PER 100 PENDUDUK PERKOTAAN/ PEDESAAN
- INDIKATOR 60. INDEKS KINERJA INFRASTRUKTUR TIKI
- INDIKATOR 61. NILAI TAMBAH ECTOR MANUFAKTUR (MVA) SEBAGAI PERSENTASE TERHADAP PDB
- INDIKATOR 62. JUMLAH EMISI GAS RUMAH KACA TERKAIT ECTOR DAN ECTORY MENURUT JENIS GAS DAN ECTOR, DINYATAKAN SEBAGAI EMISI BERBASIS PRODUKSI DAN PERMINTAAN (TCO_{2E})
- INDIKATOR 63. PENELITI DAN TEKNISI DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (PER SEJUTA PENDUDUK)
- INDIKATOR 9.1. PERSENTASE RUMAHTANGGA YANG MEMILIKI INTERNET, MENURUT TIPE LAYANAN DI DAERAH PEDESAAN/PERKOTAAN
- INDIKATOR 9.2. LAPANGAN PEKERJAAN DI SEKTOR INDUSTRI (% DARI TOTAL LAPANGAN PEKERJAAN)

TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRIALISASI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN DAN MENDORONG INOVASI

INDIKATOR 58. AKSES TERHADAP JALAN UNTUK SEGALA CUACA/ALL WEATHER ROAD (PERSENTASE AKSES PADA [X] KM JARAK KE JALAN)

Indikator 58 belum tersedia, didekati dengan persentase desa yang terdapat jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun.

Menurut UU No. 38 Tahun 2004, jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung berbagai aspek seperti ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan.

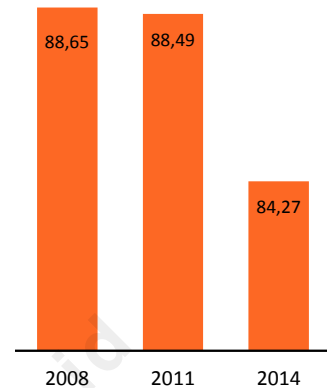
1. Aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir.
2. Aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya.
3. Aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah
5. Aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Terdapat sebanyak 84,27 persen desa di Indonesia yang memiliki jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun.

Mengingat pentingnya peranan jalan, maka penyelenggaraan jalan pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan perkembangan antardaerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan (*road infrastructures for all*). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara mempunyai kewenangan menyelenggarakan jalan. Penyelenggaraan jalan, sebagai salah satu bagian penyelenggaraan prasarana transportasi, melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah. Agar diperoleh suatu hasil penanganan jalan yang memberikan pelayanan yang optimal, diperlukan penyelenggaraan jalan secara terpadu dan bersinergi antarsektor, antardaerah dan juga antarpemerintah serta masyarakat termasuk dunia usaha.

Akses jalan yang bisa dilewati dan handal sepanjang tahun sangat penting untuk banyak proses pembangunan terutama pembangunan di wilayah perdesaan dan wilayah terpencil. Jalan sebagai akses masyarakat untuk menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pasar, serta fasilitas pelayanan lainnya. Indikator 58 ini menggambarkan proporsi penduduk yang memiliki jarak [x] km dari tempat tinggal ke jalan yang handal dan bisa dilewati sepanjang tahun. Secara umum jalan yang handal dan dapat dilewati sepanjang tahun memiliki kondisi yang baik dengan permukaan jalan yang terbuat dari aspal atau permukaan yang padat diperkeras dengan beton atau apapun sehingga dapat dilewati sepanjang tahun. Indikator 58 ini dapat digunakan untuk mengukur target 9.1 (mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, handal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk infrastruktur daerah dan lintas perbatasan, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua) dan target 11.1 (Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua perumahan yang layak, aman dan terjangkau dan layanan dasar, dan memperbaiki kawasan kumuh).

Gambar 9.1. Persentase Desa yang Terdapat Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat Sepanjang Tahun, 2008-2014



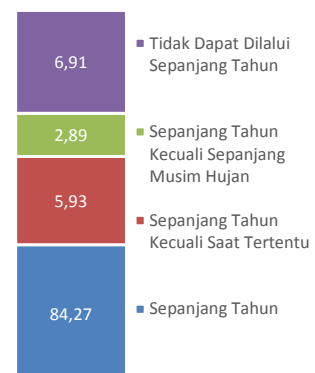
Sumber: diolah dari Statistik Potensi Desa Indonesia, 2008, 2011, dan 2014

INDIKATOR PROXY: PERSENTASE DESA YANG TERDAPAT JALAN YANG DAPAT DILALUI KENDARAAN RODA EMPAT SEPANJANG TAHUN

Di Indonesia ketersediaan data untuk indikator 58 ini belum tersedia, sehingga dapat diganti dengan alternatif proxy indikator persentase desa yang terdapat jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun. Data indikator *proxy* ini diperoleh dari pengolahan data Podes (Potensi Desa), sementara konsep Podes untuk jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun adalah kondisi jalan dapat dilewati oleh berbagai jenis kendaraan roda empat atau lebih, kapanpun sepanjang tahun dan tahan terhadap perubahan cuaca baik di musim hujan maupun di musim kemarau. Data indikator ini bisa didisagregasi berdasarkan desa pesisir dan bukan pesisir, dapat disajikan sampai level provinsi.

Jika dilihat perkembangannya, selama periode tahun 2008-2014, persentase desa di Indonesia yang sudah menikmati akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih sepanjang tahun telah mencapai lebih dari 80 persen, namun terjadi kecenderungan penurunan. Pada tahun 2008 terdapat sebesar 88,65 persen desa yang telah memiliki jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi sebesar 88,49 persen dan terus berlanjut hingga menjadi 84,27 persen pada tahun 2014. Lebih detail lagi dapat digambarkan bahwa masih terdapat desa-desa yang belum memiliki jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat yaitu sebesar 6,91 persen. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian pemerintah agar masyarakat mampu menikmati pembangunan dan tentunya

Gambar 9.2. Persentase Desa yang Terdapat Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat, 2014



Sumber: diolah dari Statistik Potensi Desa Indonesia, 2014

dengan semakin terbukanya jalan maka akses masyarakat ke tempat-tempat fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan lainnya dapat semakin lebih mudah dan terjangkau. Selain itu, tren penurunan dapat menunjukkan bahwa masih membutuhkan lagi kerja keras agar lebih mencapai kemajuan dalam agenda SDGs ini (setidaknya mengalami tren peningkatan).

INDIKATOR 59. LANGGANAN *BROADBANDPHONE* PER 100 PENDUDUK PERKOTAAN/PERDESAAN

Akses *Broadband* adalah teknologi pendukung utama yang dapat memberikan keuntungan ekonomi (akses ke ekonomi formal, akses ke pasar regional dan global untuk pengusaha lokal, dan akses ke layanan perbankan); manfaat kesehatan (menghubungkan tenaga kesehatan dengan sistem kesehatan nasional); dan mendorong partisipasi warga dalam pemerintahan. Indikator ini mengukur jumlah pelanggan broadband per 100 penduduk. Komisi *Broadband* menjelaskan broadband sebagai, (a) selalu *ON*, (b) konektivitas berkapasitas tinggi, dan (c) memungkinkan penyediaan gabungan beberapa layanan secara bersamaan. Definisi ITU mengacu pada akses komunikasi data (misalnya Internet) di kecepatan *downstream broadband* lebih besar dari atau sama dengan 256 Kbit/s. Indikator ini harus dilihat dalam hubungannya dengan indikator 60.

Indikator 59 belum tersedia, didekati dengan persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir menurut daerah tempat tinggal.

Indikator 59 ini dapat digunakan untuk mengukur target-target SDGs seperti :

- Target 2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama di tingkat internasional, pada infrastruktur perdesaan, penelitian dan penyuluhan pertanian, pengembangan teknologi, tanaman dan bank gen ternak untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara-negara berkembang, khususnya di negara-negara kurang berkembang
- Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya di ICT , untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan
- Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada nilai tambah yang tinggi dan sektor padat karya
- Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, handal, berkelanjutan, dan

tangguh, termasuk infrastruktur daerah dan lintas perbatasan, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua

- Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses ke TIK dan berusaha untuk menyediakan akses internet secara universal dan terjangkau di LDCs pada tahun 2020
- Target 17.6 Meningkatkan Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama segitiga secara regional maupun internasional dan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, serta meningkatkan berbagi pengetahuan atas dasar persetujuan bersama, termasuk melalui pengembangan koordinasi antarmekanisme yang ada, khususnya di tingkat PBB, dan melalui mekanisme pemberian kemudahan untuk teknologi global saat disepakati.

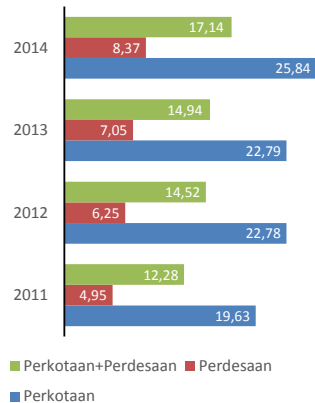
Indikator ini dapat didisagregasi berdasarkan penduduk perkotaan dan perdesaan, penduduk menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Indikator ini mempunyai keterbatasan mengenai data yang tersedia, yaitu memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu langganan mobile *broadband* sehingga bisa melebihi persentase penduduk dengan akses *mobile broadband*.

INDIKATOR PROXY: PERSENTASE PENDUDUK USIA 5 TAHUN KE ATAS YANG PERNAH MENGAKSES INTERNET DALAM 3 BULAN TERAKHIR MENURUT DAERAH TEMPAT TINGGAL

Di Indonesia ketersediaan data untuk indikator 59 ini belum tersedia, sehingga dapat diganti dengan alternatif indicator proxy: Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir menurut daerah tempat tinggal. Data indikator *proxy* ini diperoleh dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), sementara konsep Susenas untuk penduduk usia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir adalah penduduk yang berusia lima tahun ke atas yang pernah mengakses internet selama kurun waktu tiga bulan terakhir baik dilakukan di rumah sendiri, warnet, kantor, maupun sekolah atau melalui media HP/Ponsel atau lainnya (modem). Indikator ini bisa didisagregasi berdasarkan daerah tempat tinggal, jenis kelamin, dan provinsi.

Internet bermanfaat untuk berbagai kepentingan termasuk bisnis serta membangun jaringan mitranya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini seakan mendekatkan antarpengguna secara nyata, meski secara geografis mereka terpisahkan dengan jarak yang cukup jauh. Pengguna internet

Gambar 9.3. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2011-2014



Sumber: Susenas, BPS

di Indonesia saat ini (tahun 2014) secara umum baru mencapai 17,14 persen. Sebagian besar pengguna internet berada di daerah perkotaan yaitu sebesar 25,84 persen sementara di perdesaan hanya sekitar 8,37 persen. Bila dilihat tren perkembangannya selama periode 2011-2014, pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa indikator ini sudah sejalan dengan peningkatan akses internet dalam agenda SDGs ini (mengalami tren peningkatan).

INDIKATOR 60. INDEKS KINERJA INFRASTRUKTUR TIK (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan teknologi canggih lainnya sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Indeks yang akan dikembangkan ini dapat menelusuri kualitas dan kinerja infrastruktur TIK di setiap negara. Indeks yang diusulkan mengukur tiga dimensi tertimbang kinerja infrastruktur TIK antara lain:

Di Indonesia data untuk indikator 60 belum tersedia.

1. Kualitas *broadband* tetap: diukur sebagai kecepatan *download* rata-rata (dalam kilobit per detik), sebagaimana ditetapkan melalui tes kecepatan pengguna;
2. Kualitas *broadband* HP: diukur sebagai proporsi pengukuran uji kecepatan *download* dengan *download throughput* dari [1 megabit per detik] atau lebih; dan
3. Kapasitas *bandwidth* internasional: diukur sebagai *bandwidth* terhubung melintasi perbatasan internasional ke daerah-daerah metropolitan pada pertengahan tahun (disajikan dalam megabit per detik (mbps)).

Setiap komponen dari indeks dan indeks secara keseluruhan dapat dinormalisasi dengan nilai-nilai antara 1 dan 100.

Indikator 59 dan indikator 59 ini, mengukur dimensi penggunaan infrastruktur TIK di perkotaan dan perdesaan, yang saling terkait dan harus ditinjau bersama-sama. Karena standar TIK dan penggunaan asosiasi berkembang cepat, setiap indeks untuk kualitas infrastruktur TIK suatu negara perlu ditinjau secara berkala-mungkin setiap lima tahun. Akses data bisa menjadi batasan untuk mengembangkan indeks ini.

Indikator 60 ini dapat digunakan untuk mengukur target SDGs seperti:

- Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus

pada nilai tambah yang tinggi dan sektor padat karya

- Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, handal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk infrastruktur daerah dan lintas perbatasan, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua
- Target 9.4 Pada tahun 2030 meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri yang berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih besar dari teknologi dan proses produksi yang bersih dan ramah lingkungan, semua negara mengambil tindakan sesuai dengan kemampuan masing-masing
- Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses ke TIK dan berusaha untuk menyediakan akses internet secara universal dan terjangkau di LDCs pada tahun 2020
- Targer 17.6 Meningkatkan Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama segitiga secara regional maupun internasional dan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, serta meningkatkan berbagi pengetahuan atas dasar persetujuan bersama, termasuk melalui pengembangan koordinasi antarmekanisme yang ada, khususnya di tingkat PBB, dan melalui mekanisme pemberian kemudahan untuk teknologi global saat disepakati.

Di Indonesia ketersediaan data untuk indikator ini belum tersedia.

INDIKATOR 6.1. PERSENTASE NILAI TAMBAH SEKTOR INDUSTRI TERHADAP TOTAL PDB NASIONAL

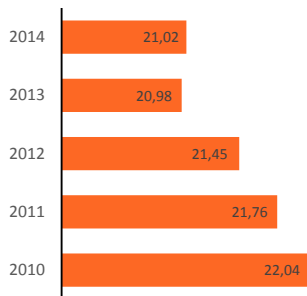
Indikator ini adalah ukuran kontribusi *output* industri terhadap perekonomian suatu negara. Industri manufaktur secara luas didefinisikan sebagai “transformasi bahan fisik atau kimia menjadi produk baru”, terlepas dari proses (dengan mesin atau dengan tangan), lokasi (pabrik atau rumah), atau metode penjualan (grosir atau eceran). Nilai tambah adalah output bersih dari sektor manufaktur, dihitung setelah menambahkan semua *output* dan mengurangi *input* antara, ditentukan oleh *International Standard Industrial Classification* (ISIC) revisi 3, dan dihitung tanpa dikurangi depresiasi aset fabrikasi, atau depleksi dan degradasi sumber daya alam. Indikatornya diukur

Pada tahun 2014 peranan nilai tambah sektor industri mencapai 21,02 persen terhadap perekonomian nasional.

sebagai bagian dari produk domestik bruto (PDB).

Indikator 61 ini dapat digunakan untuk mengukur target 8.2 (mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada nilai tambah yang tinggi dan sektor padat karya) dan target 9.2 (meningkatkan industrialisasi secara inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030 meningkatkan secara signifikan pembagian saham industri dan PDB sejalan dengan keadaan nasional, dan menggandakan sahamnya di LDCs). Indikator ini dapat diperoleh melalui Survei Industri Besar dan Sedang dan Survei Industri Mikro dan Kecil Tahunan serta dapat dirinci menurut subsektor sesuai dengan KBLI.

Gambar 9.4. Persentase Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDB, 2010-2014



Sumber: Website BPS (www.bps.go.id) [Hasil Pengolahan]

Sektor industri merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor ini tidak saja berpotensi mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi struktural bangsa ke arah modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjang pembentukan daya saing nasional. Selama periode 2010-2014, peran nilai tambah sektor industri terhadap perekonomian nasional selalu berada di atas 20 persen. Namun bila dilihat dari perkembangannya, peranan nilai tambah sektor industri manufaktur menunjukkan adanya kecenderungan penurunan. Pada tahun 2010 peranan nilai tambah sektor industri mencapai 22,04 persen terhadap perekonomian nasional Indonesia, sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 21,76 persen. Penurunan peranan nilai tambah sektor industri terus terjadi hingga tahun 2013 menjadi 20,98 persen. Namun, penurunan tidak berlanjut pada tahun 2014 karena peranan nilai tambah sektor industri mengalami sedikit peningkatan menjadi 21,02 persen.

Menurut Peneliti Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Ina Primiana yang sekaligus juga sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, menyatakan bahwa kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto dapat dikatakan masih minim. Padahal, untuk menjadi negara industri, suatu negara minimal memiliki 40 persen kontribusi sektor industri terhadap PDB.

INDIKATOR 62. JUMLAH EMISI GAS RUMAH KACA TERKAIT ENERGI DAN INDUSTRI MENURUT JENIS GAS DAN SEKTOR, DINYATAKAN SEBAGAI EMISI BERBASIS PRODUKSI DAN PERMINTAAN (TCO_{2E})

Indikator ini menelusuri jumlah gas rumah kaca (GRK) per ton CO₂ ekuivalen (tCO_{2e}), dirinci menurut gas (termasuk CO₂, N₂O, CH₄, HFC, PFC, dan SF₆) dan sektor (termasuk penyulingan minyak bumi, listrik dan produksi panas, industri

manufaktur dan konstruksi, transportasi, bangunan komersial dan residensial, emisi fugitive, serta emisi dari proses industri) sesuai dengan pedoman Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) tahun 2006 untuk inventarisasi GRK nasional, dan bab khusus untuk energi dan emisi industri yang terkait.

UNFCCC mengumpulkan data emisi gas rumah kaca, diperkirakan dengan metode penghitungan berbasis produksi (kadang-kadang juga disebut berbasis wilayah). Dalam pendekatan ini, semua emisi yang terjadi “di dalam wilayah nasional dan daerah lepas pantai dimana negara tersebut memiliki yurisdiksi” (seperti yang didefinisikan oleh IPCC 2006 pedoman inventarisasi GRK nasional) ditugaskan kepada tiap negara.

Metode penghitungan komplementer berfokus pada emisi berbasis permintaan atau konsumsi. Berdasarkan pendekatan ini emisi dikaitkan dengan konsumsi akhir domestik dan semua yang disebabkan oleh produksi impor dikaitkan dengan suatu negara. Dengan kata lain emisi gas rumah kaca untuk negara pengimpor ditambah dengan konten gas rumah kaca dari impor. Demikian pula, emisi dikurangi untuk negara pengekspor. Permintaan atau emisi berbasis konsumsi diperkirakan menggunakan tabel *input-output* internasional dan oleh karena itu memerlukan metodologi yang lebih kompleks.

Penggunaan penghitungan emisi berbasis produksi ini konsisten dengan definisi PDB. Namun, karena menghilangkan emisi yang terkandung dalam perdagangan internasional, ada pengembangan literatur yang memperdebatkan penghitungan emisi berbasis permintaan atau konsumsi. Oleh karena itu SDSN merekomendasikan agar negara-negara melaporkan emisi mereka dengan menggunakan ukuran berbasis produksi dan permintaan.

Indikator 62 ini dapat digunakan untuk mengukur target 9.4 (pada tahun 2030 meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri yang berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih besar dari teknologi dan proses produksi yang bersih dan ramah lingkungan, semua negara mengambil tindakan sesuai dengan kemampuan masing-masing) dan target 13.2 (mengintegrasikan langkah-langkah perubahan iklim ke dalam kebijakan nasional, strategi, dan perencanaan). Mengenai ketersediaan data emisi GRK yang dihitung di Indonesia mengacu pada Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang diterbitkan sebagai Perpres No. 61/2011. Sektor utama yang menjadi target penurunan emisi GRK adalah (i) Kehutanan dan Lahan Gambut, (ii) Pertanian, (iii) Energi dan Transportasi, (iv) Industri, serta (v) Pengelolaan Limbah. Penyediaan data emisi ini merupakan tanggung jawab masing-masing kementerian yang membawahi sektor utama tersebut dengan Bappenas sebagai

Data indikator 62 tidak tersedia di Indonesia. Penyediaan data emisi ini merupakan tanggung jawab masing-masing kementerian yang membawahi sektor utama tersebut dengan Bappenas sebagai penanggungjawab utama RAN-GRK.

penanggungjawab utama RAN-GRK. Rincian data juga dapat berdasarkan jenis gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca yang dinyatakan paling berkontribusi terhadap gejala pemanasan global adalah CO₂, CH₄, N₂O, NO_x, CO, PFC dan SF₆. Namun, untuk Indonesia gas PFC dan SF₆ masih sangat kecil emisinya sehingga tidak diperhitungkan. Jadi untuk indikator ini, datanya belum tersedia.

INDIKATOR 63. PENELITI DAN TEKNISI DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (PER SEJUTA ORANG)

Perkembangan, difusi, dan adopsi teknologi memerlukan staf terlatih yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan. Indikator ini mengukur jumlah peneliti dan teknisi yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan per juta orang. Negara-negara dapat mempertimbangkan indikator ini sebagai proksi untuk “pekerja teknologi”.

Indikator 63 ini dapat digunakan untuk mengukur target keberhasilan SDGs seperti:

- Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada nilai tambah yang tinggi dan sektor padat karya
- Target 9.5 Meningkatkan penelitian ilmiah, meningkatkan kemampuan teknologi dari sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030 mendorong inovasi dan meningkatkan jumlah pekerja R & D per satu juta orang sebesar x% dan pengeluaran publik dan swasta R & D
- Target 12.a Dukungan negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi untuk bergerak menuju pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan
- Target 14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan transfer teknologi kelautan dengan memperhitungkan Kriteria *Intergovernmental Oceanographic Commission* dan Pedoman Transfer Teknologi Kelautan, dalam rangka meningkatkan kesehatan laut dan untuk meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut demi pengembangan negara-negara berkembang, khususnya SIDS dan LDCs
- Target 17.6 Meningkatkan Utara-Selatan, Selatan-Selatan

Data indikator 63 tersedia dari LIPI tentang jumlah peneliti di masing-masing Kementerian/Lembaga.

dan kerja sama segitiga secara regional maupun internasional dan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, serta meningkatkan berbagi pengetahuan atas dasar persetujuan bersama, termasuk melalui pengembangan koordinasi antar mekanisme yang ada, khususnya di tingkat PBB, dan melalui mekanisme pemberian kemudahan untuk teknologi global saat disepakati.

Untuk ketersediaan data indikator ini, data tersedia untuk sekitar 140 negara, tetapi tantangan besar perlu diatasi untuk memastikan data dapat dibandingkan untuk seluruh negara. Indikator ini hanya menelusuri pekerja di bidang penelitian dan pengembangan dan cakupannya perlu diperluas sehingga menggambarkan jumlah peneliti dan teknisi di sektor berteknologi tinggi. Di Indonesia, data yang tersedia terkait indikator ini hanya data dari LIPI tentang jumlah peneliti di masing-masing Kementerian/Lembaga.

INDIKATOR 9.1 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI INTERNET, BERDASARKAN JENIS LAYANAN DI DAERAH PERDESAAN

Indikator ini mengukur persentase rumah tangga dengan akses internet berdasarkan jenis layanan (*dial-up*, DSL, dan lain-lain). Di Indonesia, keterangan akses internet rumah tangga diperoleh melalui Susenas yaitu anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Data dapat dirinci berdasarkan lokasi/media (rumah sendiri, warnet, kantor, sekolah, HP/Ponsel, dan lainnya), belum bisa dirinci berdasarkan jenis layanan.

Indikator 9.1 ini dapat digunakan untuk mengukur target 9.1 (mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, handal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan trans perbatasan, untuk mendukung ekonomi pengembangan dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua), dan target 9.c (secara signifikan meningkatkan akses ke ICT dan berusaha untuk menyediakan akses internet secara universal dan terjangkau di LDCs 2020).

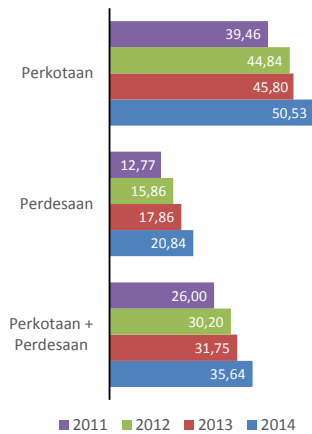
Di era informasi saat ini, ketersediaan infrastruktur dan akses Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) mempunyai peranan yang penting dalam kemajuan suatu bangsa untuk mendorong pergerakan sektor ekonomi. Kemajuan di bidang teknologi informasi memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Pengembangan potensi TIK yang dilakukan secara optimal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, peran TIK dalam pembangunan nasional juga penting yaitu dapat berperan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, memberdayakan masyarakat, dan mengembangkan kemampuan masyarakat.

Indikator 9.1 belum tersedia menurut jenis layanan tetapi bias didekati dengan persentase rumah tangga yang mempunyai akses internet

Semakin banyak penduduk yang memiliki akses TIK dan terus mengikuti kemajuan teknologi, maka dapat dipastikan kesejahteraan penduduk akan semakin meningkat.

INDIKATOR PROXY: PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMPUNYAI AKSES INTERNET

Gambar 9.5. Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Internet, 2011-2014



Sumber: Susenas, BPS

Di Indonesia ketersediaan data untuk indikator 59 ini belum tersedia berdasarkan jenis layanan, tetapi dapat hanya dapat diperoleh dengan indikator *proxy* : Persentase rumah tangga yang mempunyai akses internet berdasarkan daerah perkotaan dan perdesaan.

Salah satu akses TIK yang dapat dijangkau oleh masyarakat yaitu akses internet. Media internet digunakan karena memiliki sifat instan, interaktif dan menarik. Secara umum, persentase rumah tangga yang mengakses internet pada periode 2011-2014 selalu menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011, secara umum persentase rumah tangga yang mengakses internet sebesar 26,00 persen, dan secara terus menerus mengalami peningkatan hingga tahun 2014 menjadi sebesar 35,64 persen.

Dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, peningkatan persentase rumah tangga yang mengakses internet juga terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Rumah tangga di perkotaan terlihat lebih banyak yang memiliki akses internet dibandingkan di perdesaan. Pada tahun 2011, rumah tangga yang memiliki akses internet di perkotaan sebesar 39,46 persen sementara di perdesaan hanya sebesar 12,77 persen. Bahkan pada tahun 2014 rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses internet sudah mencapai lebih dari 50 persen yaitu tepatnya sebesar 50,53 persen, sedangkan di perdesaan baru mencapai 20,84 persen. Hal ini dapat dimengerti mengingat media atau sarana untuk mengakses internet lebih banyak tersedia di wilayah perkotaan dibanding perdesaan. Kondisi seperti ini tentunya dapat menjadi perhatian pemerintah pada setiap program pembangunan nasional agar wilayah perdesaan lebih maju lagi. Peningkatan akses internet dapat menunjukkan bahwa sudah sejalan dengan peningkatan akses internet dalam sasaran agenda SDGs (mengalami tren peningkatan).

INDIKATOR 9.2 LAPANGAN PEKERJAAN DI SEKTOR INDUSTRI (PERSEN DARI TOTAL LAPANGAN KERJA)

Pada tahun 2014 sektor industri mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 13,31 persen dari total tenaga kerja.

Indikator ini mengukur persentase tenaga kerja di sektor industri, termasuk di bidang pertambangan, manufaktur, konstruksi, dan utilitas publik, sebagai bagian dari total lapangan kerja. Indikator ini dapat diperoleh melalui Sakernas dan dapat dirinci berdasarkan jenis industri (besar-sedang dan mikro-kecil) dan menurut subsektor sesuai dengan KBLI.

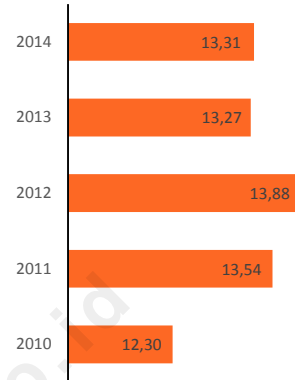
Indikator 9.2 tambahan ini dapat digunakan untuk mengukur

target 8.2 (mencapai tingkat yang lebih tinggi dari produktivitas ekonomi melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor dengan nilai tambah tinggi dan sektor padat karya) dan target 9.2 (meningkatkan industrialisasi secara inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030 meningkatkan secara signifikan pembagian saham industri dan PDB sejalan dengan keadaan nasional, dan menggandakan sahamnya di LDCs).

Industri manufaktur menjadi salah satu sektor yang diandalkan untuk perluasan penciptaan lapangan kerja, terutama pada cabang-cabang industri yang bersifat padat karya. Pemerintah mestinya menetapkan sektor industri manufaktur bersama dengan sektor pertanian sebagai program prioritas dalam upaya menekan angka pengangguran. Selama lima tahun terakhir, sektor-sektor inilah yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Maka, untuk mendapatkan hasil signifikan dalam menurunkan pengangguran, tentu sektor industri manufaktur dan sektor pertanian yang harus didorong.

Khusus untuk sektor industri manufaktur, pada tahun 2010 sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 12,30 persen dari total tenaga kerja. Dua tahun berselang, pada 2012, angka penyerapan tenaga kerja pada sektor industri melesat cukup tinggi, yaitu menjadi sebesar sekitar 13,88 persen. Namun, pada dua tahun terakhir penyerapan tenaga kerja sektor industri cenderung mengalami sedikit penurunan yaitu turun hingga menjadi 13,31 persen pada tahun 2014.

Gambar 9.6. Persentase Tenaga Kerja Sektor Industri terhadap Total Tenaga Kerja, 2010-2014

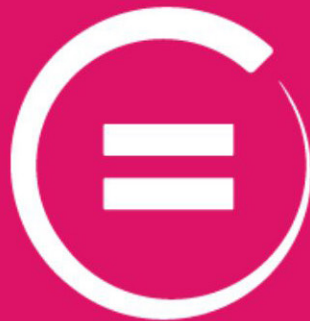


Sumber: Website BPS
(www.bps.go.id)
[Hasil Pengolahan]

MENGURANGI KETIMPANGAN DI DALAM DAN ANTAR NEGARA-NEGARA

<http://www.bps.go.id>

10 REDUCED
INEQUALITIES



- INDIKATOR 64. [INDIKATOR KETIMPANGAN PADA BATAS ATAS DAN BAWAH DISTRIBUSI PENDAPATAN: PROPORSI PENDAPATAN NASIONAL BRUTO DARI 10% PENDUDUK TERKAYA ATAU RASIO PALMA]
- INDIKATOR 65. PERSENTASE RUMAHTANGGA DENGAN PENDAPATAN DIBAWAH 50% DARI MEDIAN PENDAPATAN (KEMISKINAN RELATIF)
- INDIKATOR 10.1. KOEFISIEN GINI
- INDIKATOR 10.2. PERSISTENSI PENDAPATAN/ UPAH
- INDIKATOR 10.3. INDEKS TATA KELOLA MOBILITAS MANUSIA
- INDIKATOR 10.4. PERSENTASE ODA BERSIH KE LDCS TERHADAP GNI UNTUK NEGARA-NEGARA BERPENGHASILAN TINGGI (DIMODIFIKASI DARI MDG INDIKATOR)
- INDIKATOR 10.5. INDIKATOR SAHAM PERWAKILAN LDCS / LIC DI DEWAN IMF / WB (DAN LEMBAGA PEMERINTAHAN LAIN)
- INDIKATOR 10.6. [BIAYA TRANSFER REMITTANCE] - UNTUK DIKEMBANGKAN

TUJUAN 10. MENGURANGI KETIMPANGAN DALAM DAN ANTAR NEGARA

INDIKATOR 64. INDIKATOR KETIMPANGAN PADA BATAS ATAS DAN BAWAH DISTRIBUSI PENDAPATAN: PROPORSI PENDAPATAN NASIONAL BRUTO DARI 10 PERSEN PENDUDUK TERKAYA ATAU RASIO PALMA (INDIKATOR YANG PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator 64 belum tersedia tetapi dapat didekati dengan penghitungan ketimpangan pendapatan menggunakan data pengeluaran rumah tangga berdasarkan hasil Susenas

Kekhawatiran tentang ketimpangan berfokus pada batas atas dan bawah distribusi pendapatan. Indikator ini memantau perubahan di distribusi pendapatan bagian atas. SDSN melihat dua pilihan untuk indikator tersebut yaitu negara-negara dapat menelusuri kontribusi pendapatan oleh 10 persen penduduk terkaya dari populasi dan rasio Palma.

Indikator alternatif yang semakin populer adalah Rasio Palma yang didefinisikan sebagai rasio kontribusi pendapatan nasional bruto dari 10 persen penduduk terkaya terhadap 40 persen penduduk termiskin dari populasi. Rasio Palma berusaha untuk mengatasi beberapa keterbatasan koefisien Gini, yang gagal memperhitungkan perubahan struktur demografi (misalnya efek dari ledakan pertumbuhan penduduk atau populasi yang menua) dan tidak sensitif terhadap perubahan ekor (atas dan bawah) dari distribusi pendapatan, dimana pada bagian tersebut banyak terjadi perubahan.

Dengan menggunakan rasio sederhana yang bertentangan dengan pengukuran koefisien gini yang lebih kompleks ini dapat lebih intuitif bagi para pembuat kebijakan dan warga negara. Sebagai contoh, tingginya nilai Palma jelas menggambarkan apa yang perlu diubah yaitu untuk mempersempit kesenjangan dapat dilakukan dengan meningkatkan kontribusi pendapatan 40 persen penduduk termiskin dan/atau dengan mengurangi kontribusi 10 persen penduduk terkaya.

Kontribusi pendapatan desil atas dan rasio Palma diformulasikan menggunakan data survei rumah tangga yang berhubungan dengan pendapatan dan konsumsi (biasanya dari Bank Dunia/Indikator Pembangunan Dunia). Data tersebut dapat dipilah menurut desil pendapatan di negara-negara yang memungkinkan untuk analisis komparatif antara negara dan wilayah. Pemilahan lain dapat berdasarkan persentil, daerah atau kelompok yang memerlukan analisis kompleks dari data survei rumah tangga asli, yang saat ini mungkin tidak layak untuk skala nasional/ global.

Keterbatasan penting dari kontribusi pendapatan desil atas dan rasio Palma (serta Koefisien Gini) yaitu indikator tidak bisa dekomposisi (yaitu ketimpangan total terkait secara konsisten terhadap ketimpangan antar sub-kelompok). Selain itu, data yang

berdasarkan survei rumah tangga, beberapa di antaranya ada yang mengukur pendapatan dan ada yang mengukur konsumsi. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menjadi tantangan perbandingan internasional, karena distribusi konsumsi yang cenderung kurang timpang dibandingkan dengan pendapatan. Oleh karena tidak ada cara untuk menyesuaikan pendapatan dan konsumsi, hal tersebut menyebabkan hasil survei yang tidak disesuaikan menjadi hal yang lumrah. Untuk meningkatkan kualitas data ini sebaiknya diperluas dengan pengumpulan data berdasarkan pada pendapatan murni, misalnya melalui Luxembourg Income Study, yang saat ini memiliki data mikro untuk 40 negara.

Indikator 64 ini dapat digunakan untuk mengukur target 10.1 (Pada tahun 2030 semakin mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk bagian bawah 40% dari populasi pada tingkat lebih tinggi dari rata-rata nasional). Mengenai ketersediaan data, dalam penghitungan ketimpangan pendapatan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran rumah tangga berdasarkan hasil Susenas. Penghitungan ketimpangan dengan menggunakan rasio Palma belum dilakukan sehingga nantinya dapat dihitung dengan menggunakan data pengeluaran tersebut. Namun, sebaiknya ada peningkatan kualitas pengumpulan data sehingga indikator dapat dihitung dengan menggunakan data pendapatan bukan dengan pendekatan pengeluaran. Data dapat dirinci berdasarkan desil maupun persentil, dan berdasarkan wilayah.

INDIKATOR 65. PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN PENDAPATAN DI BAWAH 50 PERSEN DARI PENDAPATAN RATA-RATA (“KEMISKINAN RELATIF”)

Kemiskinan relatif didefinisikan sebagai persentase rumah tangga dengan pendapatan kurang dari setengah dari pendapatan rata-rata nasional. Ini merupakan indikator ketimpangan di bagian bawah distribusi pendapatan, yang menjadi penyebab pengucilan sosial dan merusak persamaan kesempatan.

Data dapat didisagregasikan berdasarkan jenis kelamin dan usia kepala rumah tangga dan berdasarkan wilayah perkotaan/perdesaan. Jika metodologi survei memungkinkan, disagregasi berdasarkan etnis, agama, bahasa, disabilitas, dan status adat juga harus dipertimbangkan.

Indikator ini membutuhkan pengukuran distribusi nasional pendapatan rumah tangga, yang masih langka di sebagian besar negara. Pengukuran tersebut sering dilakukan sekali setiap dua sampai tiga tahun sehingga data dilaporkan dengan *lag* tiga tahun.

Indikator 65 ini dapat digunakan untuk mengukur target 10.1 (Pada tahun 2030 semakin mencapai dan mempertahankan

Data indikator 65 belum tersedia di Indonesia tetapi didekati dengan Persentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan.

pertumbuhan pendapatan penduduk bagian bawah 40 persen dari populasi pada tingkat lebih tinggi dari rata-rata nasional).

INDIKATOR PROXY: PERSENTASE PENDUDUK MISKIN BERDASARKAN GARIS KEMISKINAN

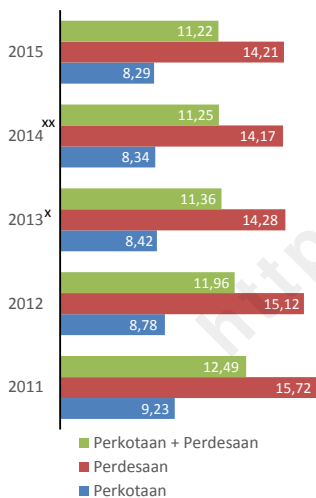
Mengenai ketersediaan data, indikator ini dapat dihitung dengan data pengeluaran penduduk dari Susenas yaitu persentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan yang dapat dirinci menurut jenis kelamin dan usia kepala rumah tangga dan berdasarkan wilayah kota-desa. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Dalam beberapa tahun belakangan ini angka kemiskinan di Indonesia memperlihatkan penurunan yang signifikan. Meskipun demikian, diperkirakan penurunan ini akan berlangsung secara melambat. Mereka yang dalam beberapa tahun terakhir ini mampu keluar dari kemiskinan adalah mereka yang hidup di ujung garis kemiskinan yang berarti tidak diperlukan sokongan yang kuat untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Namun sejalan dengan berkurangnya kelompok tersebut, kelompok yang berada di bagian paling bawah garis kemiskinanlah yang sekarang harus dibantu untuk bangkit. Ini lebih rumit dan akan menghasilkan angka penurunan tingkat kemiskinan yang berjalan lebih lambat dari sebelumnya.

Secara umum, selama periode 2011-2015 persentase penduduk miskin Indonesia menunjukkan adanya tren yang menurun secara melambat. Tingkat penurunan kemiskinan yang hanya mencapai 0,3 persen pada tahun 2015 adalah yang terkecil sepanjang periode empat tahun terakhir. Pemerintah telah berhasil menurunkan penduduk miskin 12,49 persen pada Maret 2011 menjadi 11,22 persen pada Maret 2015. Artinya masih dibutuhkan kerja keras untuk mencapai target yang ditentukan dalam Pembangunan Millenium MDGs dalam agenda SDGs ini (Target MDGs sebesar 7,5 persen).

Jika ditinjau dari daerah tempat tinggal, penduduk miskin masih didominasi oleh penduduk yang tinggal di perdesaan. Persentase penduduk miskin di perdesaan hampir tujuh persen lebih banyak dari penduduk miskin di perkotaan. Pada tahun 2011 persentase penduduk miskin di perkotaan mencapai 9,23 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 15,72 persen. Hingga tahun 2015, persentase penduduk miskin di perkotaan masih menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan di perdesaan yaitu 8,29 persen berbanding 14,21 persen. Masih banyaknya penduduk miskin di perdesaan disebabkan oleh kurangnya infrastruktur yang mendukung, serta masalah keterbatasan akses penduduk terhadap sarana dan prasarana transportasi, kesehatan, dan pendidikan (Haryanto,

Gambar 10.1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal, Maret 2011- Maret 2014



Catatan : x Maret 2013 merupakan hasil *backcasting* dari penimbang Proyeksi Penduduk

xx Maret 2014 menggunakan penimbang Hasil Proyeksi Penduduk

Sumber : Susenas, BPS

2012). Berdasarkan data tersebut, pemerintah dapat lebih mengencangkan dan merealisasikan program pengentasan kemiskinan terutama pada daerah perdesaan sehingga angka kemiskinan akan terus mengalami penurunan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

INDIKATOR 10.1. KOEFISIEN GINI

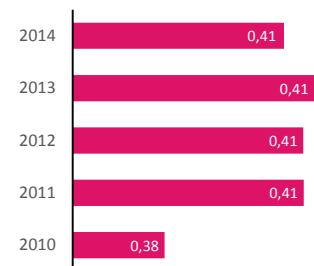
Koefisien Gini mengukur sejauh mana distribusi pendapatan atau pengeluaran konsumsi antarindividu atau rumah tangga dalam suatu perekonomian menyimpang dari distribusi pemerataan sempurna. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Indikator ini dihitung dan dipublikasikan oleh BPS setiap tahunnya pada level provinsi dan dapat juga dihitung hingga level kabupaten/kota. Indikator 10.1 ini dapat digunakan untuk mengukur target 10.1 (Pada tahun 2030 semakin mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk bagian bawah 40% dari populasi pada tingkat lebih tinggi dari rata-rata nasional).

Selama 5 tahun terakhir ketimpangan pendapatan di Indonesia cenderung stabil walalupun sempat meningkat pada tahun 2011. Koefisien Gini, indikator standar ketimpangan pendapatan, pada tahun 2010 sebesar 0,38. Koefisien Gini meningkat menjadi 0.41 di tahun 2012. Setelah itu mengalami kondisi stabil pada level moderate (sekitar 0.41) di pada periode tahun 2011-2014. Walaupun demikian, angka ini merupakan angka koefisien Gini tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah. Dulu Indonesia sering disejajarkan dengan negara-negara dengan ketimpangan pendapatan sedang atau rendah seperti negara-negara Skandinavia atau mantan Soviet, tetapi dengan angka ini, Indonesia sudah bisa dikategorikan sebagai negara yang relatif tinggi ketimpangan pendapatannya (<http://keberpihakan.org/page/articles/1>). Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan tersebut, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk mendorong kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan tersebut diwujudkan dengan meratakan kemakmuran bukan meratakan kemiskinan sehingga ketimpangan pendapatan dapat segera teratasi.

INDIKATOR 10.2 PERSISTENSI PENDAPATAN/UPAH

Indikator ini adalah ukuran dari mobilitas sosial ekonomi antargenerasi, yang secara umum didefinisikan sebagai hubungan antara status sosial ekonomi orang tua dan status anak-anak mereka yang akan menjadi dewasa. Mobilitas ekonomi dapat diukur baik melalui upah atau pendapatan, dan dinyatakan sebagai sebagian pendapatan orang tua atau upah

Gambar 10.2 Perkembangan Koefisien Gini Rasio Indonesia, 2010-2014



Sumber: www.bps.go.id

Data indikator 10.2 belum tersedia di Indonesia tapi dapat dikembangkan menggunakan informasi dari hasil Sakernas.

yang tercermin dalam keturunan mereka. Persistensi pendapatan ini belum pernah diukur secara nasional di Indonesia. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai hal ini dengan menggunakan informasi dari hasil Sakernas.

Indikator 10.2 ini dapat digunakan untuk mengukur target 10.3 (memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan dari hasil, termasuk melalui menghilangkan hukum kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan undang-undang, kebijakan dan tindakan yang tepat dalam hal ini). Data untuk indikator ini belum tersedia di Indonesia karena belum ada lembaga yang menerbitkan indikator ini.

INDIKATOR 10.3. INDEKS TATA KELOLA MOBILITAS MANUSIA

Data indikator 10.3 belum tersedia di Indonesia.

Indikator 10.3 ini dapat digunakan untuk mengukur target 10.7 (memfasilitasi migrasi dan mobilitas orang dengan tertib, aman, dan bertanggung jawab, termasuk melalui pelaksanaan kebijakan migrasi yang direncanakan dan dikelola dengan baik). Data untuk indikator ini belum tersedia di Indonesia karena belum ada lembaga yang menerbitkan indikator ini.

INDIKATOR 10.4. PERSENTASE ODA BERSIH KE LDCS TERHADAP GNI UNTUK NEGARA-NEGARA BERPENDHASILAN TINGGI (INDIKATOR MDG YANG DIMODIFIKASI)

Data indikator 10.4 belum tersedia di Indonesia.

Indikator 10.4 ini dapat digunakan untuk mengukur target 10.b (mendorong ODA dan arus keuangan, termasuk investasi asing langsung, untuk negara-negara dimana kebutuhan paling besar, di LDCs khususnya, negara-negara Afrika, SIDS, dan LLDCs, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka). Data untuk indikator ini belum tersedia di Indonesia karena belum ada lembaga yang menerbitkan indikator ini.

INDIKATOR 10.5. INDIKATOR SAHAM PERWAKILAN LDCS / LIC DI DEWAN IMF / WB (DAN LEMBAGA LAIN PEMERINTAHAN)

Data indikator 10.5 belum tersedia di Indonesia.

Indikator 10.5 tambahan ini dapat digunakan untuk mengukur target 10.5 (meningkatkan regulasi dan pengawasan pasar keuangan global dan lembaga-lembaga dan memperkuat pelaksanaan peraturan tersebut) dan target 10.6 (memastikan ditingkatkannya representasi dan suara negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global dalam rangka untuk memberikan lembaga yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan sah). Data untuk indikator ini belum tersedia di Indonesia karena belum ada lembaga yang menerbitkan indikator ini.

INDIKATOR 10.6. BIAYA TRANSFER REMITTANCE (INDIKATOR YANG PERLU DIKEMBANGKAN)

Remitansi semakin penting bagi banyak negara, tapi pengukuran yang akurat masih sulit dilakukan. G20 berkomitmen untuk mengurangi biaya remitansi rata-rata global sebesar 5 persen, sehingga peningkatan metodologi statistik diperlukan untuk pengumpulan data agar dapat memantau biaya remitansi. Indikator ini dapat dikembangkan oleh Bank Indonesia/Kementerian Keuangan dengan mengacu pada ukuran internasional.

Indikator 10.6 tambahan ini dapat digunakan untuk mengukur target 10.c (pada tahun 2030, mengurangi kurang dari 3 persen biaya transaksi pengiriman uang migran dan menghilangkan koridor remitansi dengan biaya yang lebih tinggi dari 5 persen). Data untuk indikator ini belum tersedia di Indonesia karena belum ada lembaga yang menerbitkan indikator ini.

Data indikator 10.6 belum tersedia di Indonesia.

<http://www.bps.go.id>

**MEMBUAT PEMUKIMAN KOTA DAN
PEMUKIMAN MANUSIA YANG INKLUSIF,
AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN**

<http://www.bps.go.id>

**11 SUSTAINABLE CITIES
AND COMMUNITIES**



TUJUAN 11. MEMBUAT PEMUKIMAN PERKOTAAN DAN PENDUDUK YANG INKLUSIF, AMAN, TANGGUH, DAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR 66. PERSENTASE PEDUDUK PERKOTAAN YANG TINGGAL DI DAERAH KUMUH ATAU PEMUKIMAN INFORMAL (INDIKATOR MDG)

Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah orang yang tinggal di daerah kumuh perkotaan dibagi dengan jumlah penduduk perkotaan tersebut dan dinyatakan sebagai persentase. Di tingkat nasional, persentase ini dapat dihitung dengan mengambil jumlah orang yang tinggal di daerah kumuh semua kota dibagi dengan total penduduk yang tinggal di semua kota di negara tersebut.

Data indikator 66 tersedia di situs *United Nation*.

UN-Habitat telah mengembangkan definisi dari rumah tangga kumuh agar dapat dilakukan survei atau sensus di tingkat rumah tangga untuk mengidentifikasi penghuni kawasan kumuh di kalangan penduduk perkotaan. Rumah tangga dalam permukiman kumuh (*slum household*) adalah kelompok individu yang tinggal di bawah satu atap di daerah perkotaan yang tidak mempunyai salah satu dari indikator berikut:

1. Rumah yang kokoh, yang dapat melindungi penghuninya dari kondisi cuaca yang ekstrim,
2. Ruang huni yang cukup, yang berarti tidak lebih dari 3 orang menghuni 1 ruang bersama,
3. Akses yang mudah ke air bersih (aman) dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau,
4. Akses ke sanitasi yang memadai, dalam bentuk toilet pribadi atau toilet bersama,
5. Kepastian atau rasa aman bermukim (*secure tenure*), yang dapat melindungi penghuninya dari pengusuran paksa.

Indikator ini dapat didisagregasi berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur kepala keluarga. Keterbatasan indikator ini yaitu tidak semua permukiman kumuh sama dan tidak semua penghuni kawasan kumuh menderita kekurangan pada tingkat yang sama. Tingkat kekurangan tergantung pada seberapa banyak dari lima kondisi tersebut tidak dimiliki oleh rumah tangga kumuh. Sekitar seperlima dari rumah tangga kumuh hidup dalam kondisi sangat miskin.

Indikator 66 ini dapat digunakan untuk mengukur target 11.1 (tahun 2030, menjamin akses bagi semua perumahan dan layanan dasar yang layak, aman dan terjangkau dan *upgrade* kumuh). Mengenai ketersediaan data Indonesia, data indikator ini dapat dilihat dari situs *United Nation*, sebagaimana data ini juga digunakan dalam laporan pembangunan milenium yang dilaporkan setiap tahun.

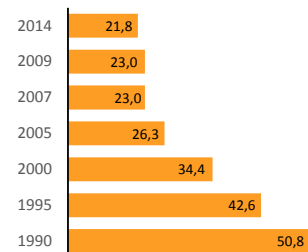
Menurut UU No. 4 pasal 22 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, dimana permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya.

Perkembangan lingkungan permukiman di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk baik karena faktor pertumbuhan penduduk secara alami serta proses urbanisasi. Pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lahan di daerah perkotaan menyebabkan semakin berkembangnya rumah petak kecil yang diperjualbelikan dan disewakan kepada para pendatang. Rumah-rumah petak kecil tersebut kemudian berkembang menjadi kawasan padat dan kumuh yang disebut dengan kawasan kumuh (*slum area*).

Selama periode 1990-2014 terjadi penurunan persentase penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh. Pada tahun 1990 sekitar 50,8 persen penduduk perkotaan tinggal di daerah kumuh. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pembangunan yang dilakukan pemerintah, permukiman kumuh semakin berkurang. Pada tahun 2005 persentase penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh sudah berkurang hampir setengah dari tahun 1990 yaitu menjadi hanya 26,3 persen. Ini membuktikan bahwa upaya penurunan permukiman kumuh cukup pesat. Selama periode 2005-2014 permukiman kumuh terus mengalami penurunan tiap tahunnya walaupun tidak secepat sebelum tahun 2005. Hingga tahun 2014 tercatat sebesar 21,8 persen penduduk perkotaan tinggal di daerah kumuh, artinya masih membutuhkan lagi kerja keras untuk mencapai target yang ditentukan dalam Pembangunan Millenium MDGs dalam agenda SDGs ini (Target MDGs sebesar 6 persen).

Untuk itu, pemerintah diharapkan terus mengintensifkan program pembangunan untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh. Menurut Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Imam Ernawi, upaya pemerintah untuk mengatasi permukiman kumuh diantaranya peningkatan kualitas lingkungan seperti perbaikan prasarana air minum, sanitasi, dan jalan lingkungan khusus di permukiman kumuh di atas tanah legal. Sedangkan bagi permukiman kumuh di atas lahan ilegal, warga yang menetap di pemukiman tersebut akan dipindahkan ke hunian yang lebih layak seperti rumah susun sederhana sewa (*rusunawa*).

Gambar 11.1. Persentase Penduduk Perkotaan yang Tinggal di Daerah Kumuh, 1990-2014



Sumber : MDG, United Nations

INDIKATOR 67. PERSENTASE ORANG DALAM 0.5 KM DARI ANGKUTAN UMUM BERJALAN SETIDAKNYA SETIAP 20 MENIT

Data indikator 67 belum tersedia di Indonesia.

Indikator akses ke transportasi umum yang memadai didekati dengan proksi persentase penduduk dalam 0,5 kilometer dari angkutan umum berjalan setidaknya setiap 20 menit. Transportasi umum didefinisikan sebagai layanan angkutan penumpang yang tersedia untuk masyarakat umum. Yang dimaksud transportasi umum disini adalah bus, troli, trem, kereta api, kereta bawah tanah, dan kapal feri dan tidak termasuk taksi, kolam mobil, dan bus yang disewa. Transportasi murah yang efektif sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan dalam rangka pengurangan kemiskinan di daerah perkotaan. Transportasi yang efektif akan memudahkan akses menuju tempat kerja, layanan kesehatan, pusat perdagangan dan lain-lain. *The Partnership on Sustainable Low-Carbon Transport (SLoCaT)* mengusulkan indikator untuk akses untuk transportasi yang berkelanjutan di daerah perkotaan meliputi: waktu tempuh harian, persentase pendapatan yang dibelanjakan oleh keluarga perkotaan untuk transportasi, dan persentase rumah tangga dalam 500 meter dari transportasi umum yang berkualitas baik dan terjangkau.

Tidak ada metodologi yang disepakati secara internasional untuk mengukur kenyamanan dan kualitas pelayanan transportasi umum. Selain itu, data global untuk sistem transportasi perkotaan tidak ada. Meskipun beberapa data tersedia pada perusahaan angkutan umum dan kota-kota tertentu, tetapi data yang selaras dan dapat dibandingkan pada tingkat dunia belum tersedia. Data dibutuhkan sampai level kabupaten/kota, seperti transportasi perkotaan yang paling sering tidak berada di bawah tanggung jawab langsung pemerintah nasional. Secara umum, saat ini data tentang jumlah orang dengan akses ke transportasi massal dan infrastruktur transportasi kurang memadai.

Indikator 67 ini dapat digunakan untuk mengukur target 11.2 (pada tahun 2030, menyediakan akses sistem transportasi yang aman, terjangkau, dapat diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan jalan, terutama dengan memperluas transportasi umum, dengan perhatian khusus kepada kebutuhan mereka pada saat situasi rentan, wanita, anak-anak, penyandang cacat dan orang tua). Data untuk indikator belum tersedia di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut menghasilkan/ membentuk indikator ini.

INDIKATOR 68. RASIO TINGKAT KONSUMSI TANAH TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK, PADA SKALA YANG SEBANDING IINDIKATOR YANG PERLU DIKEMBANGKAN

Indikator 68 ini dapat digunakan untuk mengukur target SDGs seperti;

- Target 11.3 Tahun 2030 meningkatkan urbanisasi dan kapasitas untuk partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan, perencanaan dan manajemen permukiman manusia yang terpadu dan berkelanjutan di semua negara
- Target 11.6 Tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan kota yang merugikan per kapita, termasuk dengan membayar perhatian khusus untuk kualitas udara, kota dan pengelolaan limbah lainnya
- Tahun 11.7 Tahun 2030, menyediakan akses universal ke ruang terbuka hijau dan tempat umum yang aman, inklusif dan dapat diakses, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, orang tua dan penyandang cacat.

Data indikator 68 belum tersedia di Indonesia.

Mengenai ketersediaan data, saat ini indikator 68 ini belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 69. RATA-RATA POLUSI UDARA DARI BENDA-BENDA PARTIKULER DI PERKOTAAN (PM10 DAN PM2.5)

Indikator 69 ini dapat digunakan untuk mengukur target SDGs seperti;

- Target 3.9 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi jumlah kematian dan penyakit dari bahan kimia berbahaya dan polusi udara, polusi air, dan polusi dan kontaminasi tanah
- Target 9.4 Pada tahun 2030 meningkatkan industri infrastruktur dan retrofit untuk membuatnya berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih besar dari teknologi dan proses produksi yang bersih dan ramah lingkungan, dimana semua negara mengambil tindakan sesuai dengan kemampuan masing-masing
- Target 11.6 Tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan kota yang merugikan per kapita, termasuk dengan membayar perhatian khusus untuk kualitas udara, kota dan pengelolaan limbah lainnya
- Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan yang ramah lingkungan dari bahan kimia dan semua limbah sepanjang siklus hidupnya sesuai dengan kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pembebasannya ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap

Data indikator 69 belum tersedia di Indonesia.

kesehatan manusia dan lingkungan).

Saat ini data untuk indikator 69 belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 70. PROPORSI LUAS RUANG PUBLIK DAN RUANG HIJAU TERHADAP TOTAL RUANG KOTA

Indikator ini mengukur jumlah ruang terbuka hijau yang tersedia untuk penduduk kota. Ruang terbuka hijau didefinisikan sebagai ruang terbuka dan tempat rekreasi di luar ruangan, ruang terbuka informal dan taman bermain anak-anak, taman umum, taman warisan, kawasan konservasi alam dan hutan. Indikator ini dinyatakan dalam meter persegi per penduduk. Indikator alternatif lainnya adalah jarak penduduk menuju ruang terbuka hijau, tetapi untuk membentuk indikator ini dibutuhkan data yang kompleks dan rinci. Ruang terbuka hijau sangat penting dalam menentukan kualitas hidup masyarakat kota. Bukti empiris menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau akan memberikan manfaat sosial dan psikologis (rekreasi, relaksasi, dan meningkatkan kesehatan) bagi penduduk kota.

Banyak ukuran yang tersedia untuk menilai ruang terbuka hijau. Beberapa bersifat universal, seperti penginderaan jauh, dan beberapa bersifat spesifik-lokasi seperti *on site surveys*. Indikator 70 ini dapat digunakan untuk mengukur target 11.7 (tahun 2030, menyediakan akses universal ke ruang terbuka hijau dan tempat umum yang aman, inklusif dan dapat diakses, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, orang tua dan penyandang cacat).

Data indikator 70 belum tersedia di Indonesia. Namun, pernah tersedia data dari Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup oleh BPS mengenai perlakuan terhadap sampah di rumah tangga.

Indikator terkait ruang terbuka hijau di Indonesia hanya sebatas total luas taman dan jalur sebagai ruang terbuka hijau karena data tersebut menjadi ukuran pencapaian UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mensyaratkan luas ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Data ruang terbuka hijau per kapita belum tersedia tetapi dapat dihitung dengan menggunakan data jumlah penduduk dari BPS. Indikator mengenai ruang terbuka hijau ini dihasilkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Datanya dilaporkan setiap tahun dan tersedia untuk setiap wilayah perkotaan, dan dapat dirinci berdasarkan fungsi RTH perkotaan seperti RTH taman kota, hutan kota, sabuk hijau, jalur hijau jalan, ruang pejalan kaki, di bawah jalan layang, dan RTH fungsi tertentu.

INDIKATOR 71. PERSENTASE LIMBAH PADAT PERKOTAAN YANG SECARA RUTIN DIKUMPULKAN DAN DIKELOLA DENGAN BAIK.

Rumah tangga di daerah perkotaan menghasilkan banyak limbah padat yang harus dikumpulkan secara teratur dan dibuang dengan benar agar dapat menciptakan kondisi

hidup yang sehat dan sanitasi di daerah perkotaan tersebut tetap terjaga. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan penyumbatan pada saluran-saluran air yang dapat mengakibatkan banjir dan berbagai permasalahan kesehatan. Hal ini membuat pengelolaan sampah yang berkelanjutan menjadi sangat penting. Daur ulang dan pengomposan menjadi cara yang lebih disukai dan harus dicanangkan karena mampu mengurangi penggunaan energi serta meminimalkan jumlah limbah yang akhirnya harus dibuang ke tempat pembuangan sampah.

Di banyak negara, sistem pemantauan untuk pengumpulan limbah padat dapat dikatakan masih lemah karena data yang tidak lengkap atau tidak tersedia. Pengembangan sistem pemantauan yang memadai mungkin memerlukan upaya yang besar di beberapa negara.

Indikator 71 ini dapat digunakan untuk mengukur target SDGs seperti :

- Target 9.4 Pada tahun 2030 meningkatkan industri infrastruktur dan retrofit untuk membuatnya berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih besar dari teknologi dan proses produksi yang bersih dan ramah lingkungan, dimana semua negara mengambil tindakan sesuai dengan kemampuan masing-masing
- Target 11.6 Tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan kota yang merugikan per kapita, termasuk dengan membayar perhatian khusus untuk kualitas udara, kota dan pengelolaan limbah lainnya
- Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali).

Data indikator 71 belum tersedia di Indonesia.

Indikator ini tersedia melalui hasil Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup oleh BPS. Informasi yang tersedia berupa perlakuan terhadap sampah yang ditanyakan terhadap rumah tangga dengan jawaban ya atau tidak. Perlakuan tersebut antara lain didaur ulang, dibuat kompos/pupuk, diangkut petugas/dibuang ke TPS/TPA, dijual ke pengumpul barang bekas, ditimbun/dikubur, dibakar, dibuang ke laut/sungai/got, dibuang sembarangan, dan dijadikan makanan ternak. Selain itu juga diperoleh informasi mengenai perlakuan terhadap sampah yang paling utama/sering dilakukan.

INDIKATOR 11.1. JUMLAH PERSIMPANGAN JALAN PER KILOMETER PERSEGI

Indikator 11.1 ini dapat digunakan untuk mengukur target 11.3 (tahun 2030 meningkatkan urbanisasi dan kapasitas untuk partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan, perencanaan dan manajemen pemukiman manusia yang terpadu dan berkelanjutan di semua negara) dan 11.7 (tahun 2030, menyediakan akses universal ke ruang terbuka hijau dan tempat umum yang aman, inklusif dan dapat diakses, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, orang tua dan penyandang cacat). Data untuk indikator 11.1 saat ini belum tersedia di Indonesia.

Data indikator 11.1 belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 11.2. KEBERADAAN DAN PELAKSANAAN KERANGKA KEBIJAKAN PERKOTAAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL

Indikator 11.2 tambahan ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan target SDGs seperti :

- Target 1.a Keberadaan dan pelaksanaan permukiman perkotaan dan manusia dalam kerangka kebijakan tindakan pemberantasan nasional
- Target 11.3 Tahun 2030 meningkatkan urbanisasi dan kapasitas untuk partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan, perencanaan dan manajemen pemukiman manusia yang terpadu dan berkelanjutan di semua Negara
- Target 11.7 Tahun 2030, menyediakan akses universal ke ruang terbuka hijau dan tempat umum yang aman, inklusif dan dapat diakses, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, orang tua dan penyandang cacat
- Target 11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan yang positif antara daerah perkotaan, pinggiran kota dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah

Data untuk indikator 11.2 saat ini belum tersedia di Indonesia.

Data indikator 11.2 belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 11.3. PERSENTASE KOTA DENGAN LEBIH DARI 100.000 PENDUDUK YANG MENERAPKAN PENGURANGAN RISIKO DAN KETAHANAN STRATEGI DIINFORMASIKAN OLEH KERANGKA KERJA INTERNASIONAL (SEPERTI FORTHCOMING HYOGO-2 FRAMEWORK)

Indikator 11.3 tambahan ini dapat digunakan untuk mengukur target SDGs seperti :

- Target 11.4 Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia

Target 11.5 Tahun 2030 secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak dan penurunan sebesar y persen kerugian ekonomi relatif terhadap PDB yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus pada melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan

Target 11.b Pada tahun 2020, meningkat sebesar x persen jumlah kota dan pemukiman manusia mengadopsi dan menerapkan kebijakan dan rencana yang terintegrasi menuju inklusi, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, mengembangkan dan menerapkan sejalan dengan bencana holistik Hyogo Framework yang akan datang manajemen risiko di semua tingkatan

Data indikator 11.3 belum tersedia di Indonesia.

Indikator 11.3 saat ini belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 11.4. KEHADIRAN KODE BANGUNAN PERKOTAAN MENETAPKAN BAIK PENGGUNAAN BAHAN LOKAL DAN/ATAU TEKNOLOGI ENERGI BARU YANG EFISIEN ATAU DENGAN INSENTIF YANG SAMA.

Indikator 11.4 tambahan ini dapat digunakan untuk mengukur target 11.c (dukungan setidaknya negara-negara maju, termasuk melalui bantuan keuangan dan teknis, untuk memanfaatkan bahan lokal bangunan yang berkelanjutan dan tangguh) dan target 13.1 (memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya iklim terkait dan bencana alam di semua negara). Saat ini data untuk indikator 11.4 belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 11.5. INDEKS KEANEKARAGAMAN HAYATI KOTA (INDEKS SINGAPOR).

Terdapat 23 indikator *self-assessment* untuk mengevaluasi upaya konservasi keanekaragaman hayati. Kementerian Lingkungan Hidup dapat melakukan evaluasi ketersediaan data terkait indikator ini.

Data indikator 11.4 belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 11.6. PERSENTASE KONSUMSI MAKANAN DAN BAHAN BAKU DALAM WILAYAH PERKOTAAN YANG DIPRODUKSI DAN DISAMPAIKAN DALAM/ DARI DAERAH PERDESAAN DALAM NEGERI.

Indikator 11.6 tambahan ini dapat digunakan untuk mengukur target 11.7 (tahun 2030, menyediakan akses universal ke ruang terbuka hijau dan tempat umum yang aman, inklusif dan dapat diakses, khususnya bagi perempuan dan

Data indikator 11.6 belum tersedia di Indonesia.

anak-anak, orang tua dan penyandang cacat), dan target 11.a (mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan yang positif antara daerah perkotaan, pinggiran kota dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah). Saat ini data untuk indikator 11.6 belum tersedia di Indonesia.

<http://www.bps.go.id>

**PASTIKAN POLA KONSUMSI DAN
PRODUKSI BERKELANJUTAN**

<http://www.bps.go.id>

**12 RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION**



- INDIKATOR 72 KETERBUKAAN PEMEGANG HAK SUMBER DAYA ALAM (INDIKATOR YANG PERLU DIKEMBANGKAN)
- INDIKATOR 73 INDIKATOR KERUGIAN PANGAN GLOBAL (ATAU INDIKATOR LAIN YANG PERLU DIKEMBANGKAN UNTUK MENGETAHUI PROPORSI KERUGIAN PANGAN ATAU PANGAN YANG TERBUANG DALAM RANTAI NILAI SETELAH PANEN)
- INDIKATOR 74 KONSUMSI BAHAN PERUSAK OZON (BPO) (INDIKATOR MDG)
- INDIKATOR 75 KEDALAMAN OPTIK AEROSOL (AOD)
- INDIKATOR 76 PROPORSI PERUSAHAAN SENILAI LEBIH DARI \$1.000.000.000 YANG MENERBITKAN LAPORAN TERINTEGRASI (INDIKATOR YANG PERLU DIKEMBANGKAN)
- INDIKATOR 12.1 STRATEGI ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL YANG DIPERLUKAN (INDIKATOR YANG PERLU DIKEMBANGKAN)
- INDIKATOR 12.2. [PERAN PENGAWASAN CABANG LEGISLATIF MENGENAI KONTRAK DAN LISENSI BERBASIS SUMBER DAYA]
- INDIKATOR 12.3. [INDIKATOR POLUSI KIMIA]
- INDIKATOR 12.4. INTENSITAS CO2 SEKTOR BANGUNAN DAN BANGUNAN BARU (KGC02/M2/TAHUN)

INDIKATOR 12.5.- 12.6...

TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN

INDIKATOR 72. KETERBUKAAN PEMEGANG HAK SUMBER DAYA ALAM (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Data indikator 72 belum tersedia di Indonesia

Indikator 72 ini dapat digunakan untuk mengukur target 12.2 (pada tahun 2030 mencapai pengelolaan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan efisien). Mengenai ketersediaan data, saat ini indikator 72 ini belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 73. INDIKATOR KERUGIAN PANGAN GLOBAL (ATAU INDIKATOR LAIN YANG PERLU DIKEMBANGKAN UNTUK MENGETAHUI PROPORSI KERUGIAN PANGAN ATAU PANGAN YANG TERBUANG DALAM RANTAI NILAI SETELAH PANEN)

Data indikator 73 belum tersedia di Indonesia, masih dalam tahap pengembangan oleh FAO.

Kerugian makanan karena ketidakefisienan dalam rantai dan sisa produksi pangan tersebar luas hampir di semua negara. Saat ini, data mengenai kerugian dan sisa makanan sangat jarang dan sulit untuk dibandingkan secara internasional. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya untuk mengukur kerugian dan sisa dari berbagai kategori produk makanan dan seluruh tahapan dari panen hingga konsumsi akhir. Dilihat dari pentingnya kerugian dan sisa makanan, diperlukan indikator dasar untuk mengetahui perkembangan kerugian dan sisa makanan dari waktu ke waktu. FAO saat ini sedang mengembangkan indikator kerugian pangan global, yang diharapkan sudah jadi pada akhir 2015 walaupun masih perlu divalidasi.

Indeks ini didasarkan pada model yang menggunakan variabel-variabel yang mempengaruhi kerugian pangan (misalnya kepadatan jalan, cuaca dan hama) untuk memperkirakan kerugian kuantitatif. Data variabel ini tersedia dari beberapa sumber, termasuk statistik di tiap-tiap negara, FAOSTAT, indeks kapasitas logistik WFP, *World Road Statistics*, dan lain-lain. Selain itu, tergantung juga pada prioritas dan sistem pemantauan, tiap-tiap negara dapat mengadopsi indikator lain untuk mengetahui kerugian pangan dan/atau sisa makanan.

Tanaman pangan pokok yang sering digabungkan setelah panen untuk diproses akan memberikan data tentang kerugian pangan yang lebih baik. Tanaman pangan yang ditanam dalam skala kecil dan/atau dikonsumsi langsung oleh rumah tangga pertanian akan jauh lebih sulit untuk diukur, akan tetapi tanaman pangan inilah yang cenderung mengalami kerugian pangan tertinggi.

Indikator 73 ini dapat digunakan untuk mengukur target 12.3 (pada tahun 2030 membagi limbah pangan global per kapita di tingkat ritel dan konsumen, dan mengurangi kerugian makanan bersama rantai produksi dan pasokan termasuk kerugian pascapanen) dan target 12.5 (pada tahun 2030, secara substansial mengurangi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali).

Indikator ini masih dalam tahap pengembangan oleh FAO yang diharapkan pada akhir 2015 sudah tersedia. Data yang tersedia di Indonesia adalah berupa kerugian pascapanen yaitu susut hasil panen padi. Data bersumber dari Survei Susut Hasil Tanaman Pangan oleh BPS yang bekerjasama dengan Kementerian Pertanian. Variabel yang dikumpulkan pada survei tersebut adalah susut hasil pada saat panen, susut hasil pada saat perontokan, dan susut hasil pada saat pengeringan.

INDIKATOR 74. KONSUMSI BAHAN PERUSAK OZON (BPO) (INDIKATOR MDG)

Indikator ini mengukur pola konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) yang diatur dalam Protokol Montreal tentang zat-zat yang mengurangi lapisan ozon, sehingga memungkinkan adanya pengurangan jumlah BPO sebagai akibat dari protokol tersebut. Hal ini dinyatakan dalam ton *ozone depleting potential* (ODP), yang didefinisikan sebagai metrik ton BPO ditimbang dengan ODP.

Montreal dan Konvensi Wina untuk perlindungan lapisan ozon menargetkan fase lengkap penggunaan BPO.

Indikator 74 ini dapat digunakan untuk mengukur target 8.4 (meningkatkan efisiensi sumber daya global secara progresif pada tahun 2030 dalam hal konsumsi dan produksi, dan berusaha untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan sesuai dengan kerangka 10-tahun dari program pada konsumsi dan produksi secara berkelanjutan dengan dipimpin oleh negara-negara maju) dan target 12.4 (pada tahun 2020 mencapai pengelolaan yang ramah lingkungan dari bahan kimia dan semua limbah sepanjang siklus hidup mereka sesuai dengan kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pembebasan mereka ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan).

Potokol Montreal telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 23 Tahun 1992 tentang Penghapusan Konsumsi Bahan Perusak Ozon. Definisi konsumsi BPO yang diterapkan di Indonesia adalah jumlah impor BPO, karena Indonesia tidak memproduksi dan mengekspor BPO. Konsumsi BPO dinyatakan dalam Metrik Ton ODP. Data ini tersedia di Kementerian Lingkungan Hidup yang dapat disajikan setiap tahun sebagaimana pada laporan MDGs pada level nasional.

Data indikator 74 tersedia di Kementerian Lingkungan Hidup yang dapat disajikan setiap tahun

INDIKATOR 75. KEDALAMAN OPTIK AEROSOL (AOD)

Indikator ini mengukur jumlah aerosol (misalnya kabut perkotaan, partikel asap, debu gurun, garam laut) yang didistribusikan melalui udara permukaan bumi ke atas atmosfer.

Data indikator 75 belum tersedia di Indonesia

Indikator 75 ini dapat digunakan untuk mengukur target 8.4 (meningkatkan efisiensi sumber daya global secara progresif pada tahun 2030 dalam hal konsumsi dan produksi, dan berusaha untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan sesuai dengan kerangka 10 tahun dari program pada konsumsi dan produksi secara berkelanjutan dengan dipimpin oleh negara-negara maju) dan target 12.4 (pada tahun 2020 mencapai pengelolaan yang ramah lingkungan dari bahan kimia dan semua limbah sepanjang siklus hidup mereka sesuai dengan kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pembebasan mereka ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan).

Indikator ini belum tersedia dan belum disajikan di Indonesia. Namun, pengumpulan data dapat dilakukan melalui satelit sehingga bisa tersedia untuk seluruh negara. UNEP dapat bertanggungjawab untuk mengumpulkan data tersebut sehingga bisa dibandingkan antar negara.

INDIKATOR 76. PROPORSI PERUSAHAAN SENILAI LEBIH DARI \$1.000.000.000 YANG MENERBITKAN LAPORAN TERINTEGRASI (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Data indikator 76 belum tersedia di Indonesia

Saat ini, sebagian besar perusahaan hanya melaporkan hasil keuangan mereka tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Akibatnya investor mungkin tidak menyadari risiko yang timbul dari proses produksi perusahaan, serta masyarakat juga tidak mengetahui kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan. Beberapa standar pelaporan terpadu sudah dikembangkan untuk mengetahui dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis. Salah satu contoh yang menonjol adalah *International Integrated Reporting Council* (IIRC). SDSN mengusulkan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui persentase perusahaan besar (yaitu lebih besar dari US \$ 1 miliar (diukur dalam PPP) yang menyiapkan laporan terpadu yang konsisten terhadap SDGs dan sesuai dengan standar yang perlu didefinisikan.

Standar dan metodologi yang dilacak oleh indikator ini perlu didefinisikan. Secara khusus, indikator akan perlu menentukan standar untuk pelaporan terpadu yang dapat diterapkan dalam berbagai yurisdiksi.

Indikator 76 ini dapat digunakan untuk mengukur target 10.5 (meningkatkan regulasi dan pengawasan pasar keuangan global

dan lembaga-lembaga dan memperkuat pelaksanaan peraturan tersebut), dan target 12.6 (mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan trans-nasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan untuk mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka).

Di Indonesia belum tersedia indikator ini, karena indikator ini masih dalam tahap pengembangan. Namun, ketersediaan indikator dapat diakomodasi pada Survei Industri Besar Sedang BPS.

INDIKATOR 12.1. STRATEGI ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL YANG DIPERLUKAN (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini mengukur apakah strategi analisa dampak lingkungan dan sosial diperlukan untuk semua proyek berbasis sumber daya. Dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Indikator tambahan 12.1 ini dapat digunakan untuk mengukur target 12.2 (pada tahun 2030 mencapai pengelolaan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan efisien), dan 12.6 (mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan trans-nasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan untuk mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka). Mengenai ketersediaan data, saat ini indikator 12.1 ini belum tersedia di Indonesia.

Data indikator 12.1 belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 12.2. PERAN PENGAWASAN CABANG LEGISLATIF MENGENAI KONTRAK DAN LISENSI BERBASIS SUMBER DAYA (INDIKATOR YANG PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini mengukur keberadaan dan pemberlakuan kerangka kerja legislatif di sekitar sumber daya alam. Dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Indikator 12.2 tambahan ini dapat digunakan untuk mengukur target 12.2 (pada tahun 2030 mencapai pengelolaan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan efisien). Mengenai ketersediaan data, saat ini indikator 12.2 ini belum tersedia di Indonesia.

Data indikator 12.2 belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 12.3. INDIKATOR POLUSI KIMIA (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Polusi kimia merupakan dimensi penting dalam perubahan lingkungan global, namun sulit diukur untuk dijadikan dasar perbandingan secara internasional. Terdapat beberapa indikator untuk polusi kimia tertentu, namun biasanya hanya tersedia untuk subset kecil dan hanya untuk mengukur sebagian kecil polusi kimia. Indikator ini masih perlu dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan di Indonesia belum tersedia.

Data indikator 12.3 belum tersedia di Indonesia, masih perlu dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Indikator tambahan 12.3 ini dapat digunakan untuk mengukur target 3.9 (pada tahun 2030, secara substansial mengurangi jumlah kematian dan penyakit dari bahan kimia berbahaya dan polusi udara, polusi air, dan polusi tanah dan kontaminasi), dan target 12.4 (pada tahun 2020 mencapai pengelolaan yang ramah lingkungan dari bahan kimia dan semua limbah sepanjang siklus hidup mereka sesuai dengan kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pembebasan mereka ke udara, air dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan).

INDIKATOR 12.4. INTENSITAS CO2 SEKTOR BANGUNAN DAN BANGUNAN BARU (KGC02/M2/TAHUN)

Sektor bangunan (perumahan dan komersial) memiliki sandil besar terhadap emisi gas rumah kaca di seluruh dunia. Indikator ini didefinisikan sebagai volume emisi CO₂ (diukur dalam kilogram) per unit permukaan bangunan (diukur dalam meter persegi) dan per tahun. Indikator ini dilaporkan untuk bangunan yang ada dan tambahan bangunan baru selama setahun. Data di Indonesia hanya bisa menyajikan emisi CO₂ dari sektor konstruksi saja (bagian dari sektor Pertanian, Konstruksi, dan Pertambangan), tetapi tidak tersedia data intensitas CO₂ sektor bangunan dan bangunan baru. Oleh karena itu, perlu dikembangkan lagi agar data indikator ini dapat disajikan. Mengenai ketersediaan data, saat ini indikator 12.4 ini belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 12.5. INDIKATOR KEBIJAKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN (INDIKATOR YANG PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini mengukur kebijakan pariwisata berkelanjutan. Belum ada penjelasan rinci dan teknis bagaimana indikator ini dapat menjadi ukuran turis yang berkelanjutan. Indikator ini masih dikembangkan dan di Indonesia sudah mulai menggali ide-ide pariwisata berkelanjutan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan kementerian lain yang terkait.

Indikator 12.5 tambahan ini dapat digunakan untuk mengukur target keberhasilan SDGs seperti;

Target 8.9 Pada tahun 2030 menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata secara berkelanjutan yang menciptakan pekerjaan, mempromosikan budaya dan produk lokal

Target 12.1 Melaksanakan Kerangka 10-Tahun Program konsumsi berkelanjutan dan produksi (10YFP), semua negara mengambil tindakan, dengan

Data indikator 12.5 belum tersedia di Indonesia (dapat dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

negara-negara maju memimpin, dengan mempertimbangkan perkembangan dan kemampuan negara-negara berkembang

Target 12.b Mengembangkan dan menerapkan alat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata yang berkelanjutan yang menciptakan pekerjaan, mempromosikan budaya lokal dan produk.

INDIKATOR 12.6. INDIKATOR PENGADAAN PUBLIK YANG BERKELANJUTAN (INDIKATOR YANG PERLU DIKEMBANGKAN)

<http://www.bps.go.id>

**MENGAMBIL TINDAKAN SEGERA UNTUK
MEMERANGI PERUBAHAN IKLIM DAN
DAMPAKNYA**

<http://www.bps.go.id>

13 CLIMATE
ACTION



- INDIKATOR 77. KETERSEDIAAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI DEKARBONISASI YANG TRANSPARAN DAN RINCI, KONSISTEN DENGAN ANGGARAN KARBON GLOBAL 2°C ATAU LEBIH RENDAH DAN DENGAN TARGET EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) UNTUK TAHUN 2020, 2030 DAN 2050
- INDIKATOR 78. INTENSITAS CO₂ DARI KAPASITAS PEMBANGKIT LISTRIK BARU TERPASANG (GCO₂PER KWH), DAN MOBIL BARU (GCO₂/PKM) DAN TRUK (TCO₂/TKM)
- INDIKATOR 79. EMISI GRK NETTO DI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PENGGUNAAN LAHAN LAINNYA (AFOLU) (TCO₂E)
- INDIKATOR 80. PENDANAAN IKLIM RESMI DARI NEGARA-NEGARA MAJU YANG MENJADI TAMBAHAN UNTUK ODA (DALAM US\$)
- INDIKATOR 13.1. INDEKS AKSI PERUBAHAN IKLIM (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)
INDIKATOR 14. JUMLAH PETUGAS PENYULUH PERTANIAN PER 1000 PETANI DAN PERSENTASE PETANI YANG MENDAPATKAN PENYULUHAN
- INDIKATOR 13.2. INTENSITAS EMISI GRK DI WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN (GTCO₂E/HA)

TUJUAN 13. MENGAMBIL TINDAKAN SEGERA UNTUK MEMERANGI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA

INDIKATOR 77. KETERSEDIAAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI DEKARBONISASI YANG TRANSPARAN DAN RINCI, KONSISTEN DENGAN ANGGARAN KARBON GLOBAL 2°C ATAU LEBIH RENDAH DAN DENGAN TARGET EMISI GAS RUMAH KACA (GRK) UNTUK TAHUN 2020, 2030 DAN 2050

Data indikator 77 belum tersedia di Indonesia, hal ini disebabkan karena belum ada strategi dekarbonisasi dengan target emisi GRK untuk tahun 2020, 2030 dan 2050. (Indikator ini masih perlu dikembangkan oleh Kementerian ESDM)

Untuk mempertahankan pemanasan global pada 2°C atau lebih rendah, mensyaratkan negara-negara menyiapkan strategi nasional dekarbonisasi tahun 2050, yang meliputi semua sumber emisi GRK termasuk dari energi, industri, pertanian, hutan, transportasi, bangunan, dan sektor lainnya. Strategi ini harus transparan dan rinci tentang bagaimana negara-negara ingin mencapai pengurangan emisi (termasuk emisi yang terkait dengan energi), bagaimana mengurangi konsumsi energi, zat arang sektor listrik, dan menyediakan listrik penggunaan energi (khususnya di sektor transportasi dan bangunan). Strategi mencakup target untuk mengurangi emisi GRK pada tahun 2020, 2030 dan 2050. Indikator ini juga mengusulkan untuk mengukur pelaksanaan strategi tersebut.

Keberadaan indikator 77 dapat digunakan untuk menjawab target SDG's yaitu;

Target 13.2 Mengintegrasikan langkah-langkah perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional,

Target 13.3 Meningkatkan pendidikan, peningkatan kesadaran dan manusia dan kapasitas kelembagaan pada mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini,

Target 13.b Mempromosikan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas untuk perencanaan dan manajemen perubahan terkait iklim yang efektif, di LDCs, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, dan masyarakat setempat terpinggirkan, dan

Target 14.3 Meminimalkan dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah ditingkatkan di semua tingkatan.

Di Indonesia belum ada strategi dekarbonisasi dengan target emisi GRK untuk tahun 2020, 2030 dan 2050 sehingga data juga belum tersedia. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan pelaksanaan SDGs di Indonesia seharusnya pemerintah melalui Kementerian ESDM sudah mulai membuat strategi tersebut yang transparan dan rinci.

Disagregasi indikator masih dikembangkan. Indikator yang diusulkan mendeteksi keberadaan strategi nasional sukarela, yang akan diserahkan kepada UNFCCC.

INDIKATOR 78. INTENSITAS CO₂ DARI KAPASITAS PEMBANGKIT LISTRIK BARU TERPASANG (GCO₂PER KWH), DAN MOBIL BARU (GCO₂/PKM) DAN TRUK (TCO₂/TKM)

Pembangkitan listrik dari sektor listrik dan penggunaan bahan bakar di sektor transportasi memiliki kontribusi terhadap sebagian besar total emisi GRK global. Pada akhirnya, untuk mencapai tingkat pengurangan emisi yang diperlukan dalam rangka membatasi kenaikan suhu global menjadi 2°C atau lebih rendah, sektor listrik dan transportasi perlu mengurangi emisi yang berhubungan dengan penyediaan layanan energi ini. Pendeteksian intensitas CO₂ dari tambahan baru pada sektor-sektor tersebut itu penting untuk menilai bagaimana sektor-sektor ini berkembang berdasarkan kondisi pasar dan kerangka kebijakan di setiap negara.

Indikator sektor listrik yang diusulkan didefinisikan sebagai jumlah (diukur dalam gram) emisi CO₂ per unit listrik yang dihasilkan (diukur dalam kilowatt-hour) dari kapasitas baru yang terpasang (antara kedua tanggal pengukuran indikator). Indikator transportasi yang diusulkan didefinisikan sebagai jumlah (diukur dalam gram) emisi CO₂ per kilometer penumpang perjalanan (pkm) untuk mobil baru, dan per ton kilometer perjalanan (tkm) untuk truk baru (antara kedua tanggal pengukuran indikator).

Untuk sektor transportasi, perubahan tingkat aktivitas merupakan pendorong utama terjadinya peningkatan emisi CO₂ yang menyangkut transportasi global, tetapi tingkat absolut emisi CO₂ yang menyangkut transportasi dipengaruhi oleh ukuran wilayah suatu negara, penduduk, dan tingkat aktivitas ekonomi. Mengukur intensitas CO₂ dari mobil baru untuk transportasi penumpang dan truk baru untuk transportasi angkutan memungkinkan untuk perbandingan sejarah dan lintas negara yang lebih relevan, dengan memberikan pemahaman tentang seberapa baik negara melaksanakan pekerjaan transportasi, berdasarkan parameter kinerja fisik. Harus dicatat bahwa emisi dari udara internasional dan transportasi laut merupakan sumber penting dari emisi global, tetapi sumber-sumber ini tidak dengan mudah disebabkan oleh suatu negara tertentu.

Keberadaan indikator 78 dapat digunakan untuk menjawab target dalam SDG's yaitu mengukur target 14.3 meminimalkan dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah ditingkatkan di semua tingkatan.

Aktivitas transportasi biasanya digambarkan dengan mengukur kilometer kendaraan (vkm). Hal ini tidak

Data untuk indikator 78 belum tersedia di Indonesia. Kementerian ESDM hanya menghitung data emisi CO₂ keseluruhan pada sektor pembangkit listrik dan sektor transportasi, belum memisahkan data emisi dari kapasitas pembangkit listrik baru maupun data emisi dari mobil baru dan truk.

memungkinkan adanya perbandingan atau memperhitungkan berbagai faktor terkait lainnya. Hal ini juga diperlukan untuk mengukur kilometer penumpang (pkm) atau ton kilometer (tkm) meskipun metrik ini memerlukan pengumpulan data yang lebih rinci.

Data emisi CO₂ sektor pembangkit listrik dan sektor transportasi dihitung oleh Kementerian ESDM. Namun data merupakan emisi secara keseluruhan, belum memisahkan data emisi dari kapasitas pembangkit listrik baru maupun data emisi dari mobil baru dan truk. Oleh karena itu, penghitungan emisi dari kapasitas pembangkit listrik baru dan emisi dari mobil baru dan truk dapat menjadi pertimbangan untuk dilakukan.

INDIKATOR 79. EMISI GRK NETTO DI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PENGGUNAAN LAHAN LAINNYA (AFOLU) (TCO_{2E})

Data indikator 79 bersumber dari berbagai kementerian, salah satunya oleh Kementerian Kehutanan.

Indikator 79 didefinisikan sebagai jumlah GRK netto (ton CO₂ ekuivalen) di sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, dipilah menurut gas bumi (CO₂, N₂O, dan CH₄) dan menurut kategori lahan yang digunakan (lahan hutan, lahan pertanian, padang rumput, lahan basah, pemukiman dan lahan lainnya), berdasarkan panduan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) 2006 untuk inventarisasi GRK nasional, dan *Good Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry* (GPG-LULUCF).

Metode inventarisasi harus praktis dan operasional. Untuk sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, GRK antropogenik dan pembuangan melalui wastafel didefinisikan sebagai semua yang ada pada lahan terkelola. Lahan terkelola merupakan lahan yang sudah terdapat intervensi kegiatan manusia untuk meningkatkan produksi, fungsi ekologi dan sosialnya. Untuk lahan tak terkelola emisi GRK tidak perlu dilaporkan. Namun, menjadi sebuah tindakan yang baik apabila negara mengukur dan melacak luas lahan tak terkelola dari waktu ke waktu sehingga konsistensi pelaporannya tercatat sebagai perubahan penggunaan lahan yang terjadi.

Indikator 79 dapat digunakan untuk mengukur target-target SDGs seperti;

Target 8.4 Pada tahun 2030, meningkatkan efisiensi konsumsi dan produksi terhadap sumber daya global secara progresif, dan berusaha untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan sesuai dengan program dalam kerangka kerja 10 tahunan pada bidang konsumsi berkelanjutan dan produksi dengan negara-negara maju yang memimpin,

Target 13.2 Mengintegrasikan langkah-langkah perubahan iklim ke dalam kebijakan nasional, strategi, dan perencanaan, dan

Target 14.3 Meminimalkan dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah ditingkatkan di semua tingkatan.

Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan pedoman IPCC2006 tentang persediaan GRK nasional bab 4 pada AFOLU, sektor AFOLU memiliki beberapa karakteristik unik yang berhubungan dengan pengembangan metode inventarisasi. Faktor-faktor yang mengatur emisi dan penyerapan dapat menjadi alami maupun antropogenik (langsung dan tidak langsung) dan bisa sulit membedakan secara jelas antarfaktor-faktor penyebab. Selain itu, indikator ini melingkupi efisiensi penggunaan 12 Nitrogen dalam sistem makanan.

Indonesia telah melakukan pelaporan data emisi kepada UNFCCC karena berpartisipasi dalam penurunan emisi GRK melalui mekanisme REDD+, termasuk melaporkan emisi GRK sektor ini. Data bersumber dari berbagai kementerian, salah satunya oleh Kementerian Kehutanan. Disagregasi dapat dilakukan menurut kategori penggunaan gas bumi dan penggunaan lahan. Selain itu, indikator ini juga dapat disajikan dalam ukuran per ton basis produksi karena data per unit lahan dapat menyebabkan kesimpulan menyesatkan.

INDIKATOR 80. PENDANAAN IKLIM RESMI DARI NEGARA-NEGARA MAJU YANG MENJADI TAMBAHAN UNTUK ODA (DALAM US\$)

Negara-negara maju telah menjanjikan melalui Konferensi UNFCCC untuk memberikan sekitar \$100 miliar per tahun untuk pendanaan iklim pada tahun 2020. Dengan indikator ini akan diketahui pendanaan iklim resmi yang disediakan oleh masing-masing negara maju sebagai perbandingan terhadap target keseluruhan pendanaan yang setidaknya sebesar \$ 100 miliar per tahun.

Indikator 80 dapat digunakan untuk mengukur target-target SDGs seperti;

Target 13.2 Mengintegrasikan langkah-langkah perubahan iklim ke dalam kebijakan nasional, strategi, dan perencanaan,

Target 13.3 Meningkatkan pendidikan, peningkatan kesadaran dan manusia dan kapasitas kelembagaan pada mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini, dan

Target 13.a Mengimplementasikan komitmen yang dilakukan oleh pihak negara maju ke UNFCCC

Data indikator ini 80 belum tersedia di Indonesia karena Indikator ini untuk negara maju.

untuk tujuan memobilisasi bersama-sama USD100 miliar per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk memenuhi kebutuhan negara-negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang berarti dan transparansi pelaksanaan dan sepenuhnya mengoperasikan Dana Iklim Hijau melalui kapitalisasi sesegera mungkin.

Komitmen keuangan ini di bawah COP tidak mendefinisikan pendanaan iklim resmi dengan cara yang memungkinkan untuk menciptakan indikator global yang tidak ambigu. Beberapa lembaga, termasuk OECD, mengusulkan standar dan definisi. Pekerjaan tambahan diperlukan untuk sampai pada standar yang koheren diterima secara internasional untuk mengawasi pendanaan iklim resmi. Di Indonesia indikator ini belum tersedia karena Indikator ini untuk negara maju. Disagregasi dapat dilakukan berdasarkan tujuan, pengeluaran untuk mitigasi vs adaptasi, untuk sumber daya publik vs privat.

INDIKATOR 13.1. INDEKS AKSI PERUBAHAN IKLIM (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini merupakan indeks komposit yang mengukur kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim, termasuk adanya rencana aksi perubahan iklim (CCA), kebijakan yang berorientasi aksi perubahan iklim, apakah aksi perubahan iklim terintegrasi ke dalam rencana pemerintah kota lainnya, dan ketersediaan dana yang digunakan pada tingkat kota untuk mitigasi dan adaptasi.

Data untuk indikator 13.1 belum tersedia di Indonesia. (Indikator ini masih perlu dikembangkan oleh Bappenas dan kementerian terkait)

Indonesia (Bappenas dan kementerian terkait) telah menyusun rencana mitigasi dan adaptasi seperti Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API). Indikator ini akan dikembangkan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Indonesia melalui kebijakan tersebut terhadap perubahan iklim. Indikator 13.1 dapat digunakan untuk mengukur target 14.3 yaitu meminimalkan dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah ditingkatkan di semua tingkatan.

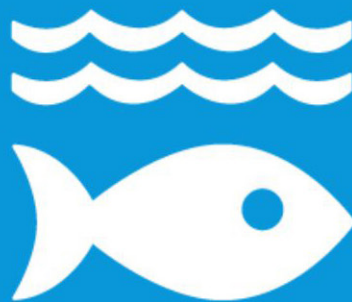
INDIKATOR 13.2. INTENSITAS EMISI GRK DI WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN (GTCO₂E/HA)

Indikator ini mengukur manfaat karbon dari pengelolaan hutan yang lebih baik, melalui penerapan teknik RIL (*Reduced Impact Logging*), yang menjadi hal penting karena kehilangan karbon akibat degradasi bisa menjadi sama besarnya seperti akibat dari deforestasi. Indikator ini belum tersedia di Indonesia, tetapi penelitian lebih lanjut dapat dilakukan oleh Kementerian Kehutanan terkait penerapan RIL untuk menekan emisi.

Data untuk indikator 13.2 belum tersedia di Indonesia. (Indikator ini masih perlu dikembangkan oleh Kementerian Kehutanan)

**PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN
SAMUDERA, LAUT DAN SUMBER
DAYA KELAUTAN BERKELANJUTAN
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN**

14 LIFE BELOW
WATER



- INDIKATOR 81. PROPORSI PESISIR DAN LUAS LAUT YANG DILINDUNGI
- INDIKATOR 82. PERSENTASE TONASE IKAN YANG MENDARAT DENGAN MAXIMUM SUSTAINABLE YIELD (MSY)
- INDIKATOR 14.1. EUTROFIKASI MUARA UTAMA
- INDIKATOR 14.2. KEASAMAN LAUT (PH DIUKUR DI PERMUKAAN)
- INDIKATOR 14.3. INDIKATOR PELAKSANAAN STRATEGI PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH PESISIR DAN LAUT
- INDIKATOR 14.4. DAERAH EKOSISTEM TERUMBU KARANG DAN PERSENTASE TUTUPAN TERUMBU KARANG HIDUP
- INDIKATOR 14.5. PROPORSI TANGKAPAN IKAN YANG BERADA DALAM BATASAN BIOLOGIS YANG AMAN (INDIKATOR MDG)
- INDIKATOR 14.6. PERSENTASE PERIKANAN DENGAN SERTIFIKASI BERKELANJUTAN
- INDIKATOR 14.7. APAKAH NEGARA MEMERLUKAN BENDERA ORGANISASI MARITIM INTERNASIONAL (IMO), NOMOR, DAN TRANSPONDER UNTUK SEMUA KAPAL PENANGKAP IKAN LEBIH DARI 24 METER ATAU 100 TON?

INDIKATOR 14.8- 14.12...

TUJUAN 14. MELESTARIKAN SAMUDERA, LAUT, DAN SUMBER DAYA KELAUTAN SECARA BERKELANJUAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR 81. PROPORSI PESISIR DAN LUAS LAUT YANG DILINDUNGI

Data indikator 81 belum tersedia di Indonesia tetapi didekati dengan proporsi luas kawasan konservasi laut terhadap luas wilayah perairan laut teritorial.

Peraturan yang baik tentang pesisir dan wilayah laut yang dilindungi telah terbukti efektif dalam menjaga populasi dan habitat. Tujuan C dari Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) bertujuan “meningkatkan status keanekaragaman hayati dengan menjaga ekosistem, spesies dan keragaman genetik.” Untuk mendukung gini, CBD *Aichi Biodiversity target 11* bertujuan untuk memiliki minimal 10 persen dari wilayah pesisir dan laut yang dilindungi tahun 2020.

Undang-undang No. 5/1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya mendefinisikan bahwa kawasan konservasi terdiri dari kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang berfungsi sebagai wilayah. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Statistik resmi terbaru tentang daerah perlindungan laut (MPA) menunjukkan bahwa kurang dari 3 persen dari lautan global adalah dilindungi. Upaya utama yang diperlukan untuk memenuhi Aichi Target 11 dan penekanan khusus diperlukan untuk melindungi ekosistem penting seperti terumbu karang tropis, padang lamun tidur, laut terumbu karang dingin, gunung laut dan pesisir lahan basah.

Indikator ini dapat memantau ketercapaian dari 4 target SDGs di 2 *goals*, keempat target tersebut yaitu;

Target 6.6 Tahun 2020 melindungi dan memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, akuifer dan danau,

Target 14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi pencemaran laut dari semua jenis, terutama dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi,

Proporsi luas kawasan konservasi laut meningkat sejak tahun 2011 sebesar 54,23 persen menjadi 57,88 persen pada tahun 2014.

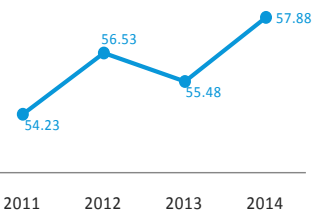
- Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola secara berkelanjutan, dan melindungi ekosistem laut dan pesisir untuk menghindari dampak merugikan yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanan mereka dan mengambil tindakan untuk memulihkan kondisinya, untuk mencapai lautan yang sehat dan produktif; dan
- Target 14.5 Pada tahun 2020, menghemat setidaknya 10 persen dari pesisir dan laut daerah, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.

INDIKATOR PROXY: PROPORSI LUAS KAWASAN KONSERVASI LAUT TERHADAP LUAS WILAYAH PERAIRAN LAUT TERITORIAL

Persentase MPA sederhana tidak memberikan informasi mengenai apakah kawasan lindung ini dikelola dengan baik atau apakah keanekaragaman hayati sebenarnya sedang diamankan. Meskipun sebagian besar digunakan pada skala global, indikator dilaporkan di tingkat nasional. Indikator ini dapat didekati dengan indikator proporsi luas kawasan konservasi laut terhadap luas wilayah perairan laut teritorial. Sumber data berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Publikasi Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2013 dan 2014.

Data proporsi luas kawasan konservasi laut terhadap luas wilayah perairan laut teritorial pada gambar memperlihatkan dari tahun 2011 hingga 2014 proporsi luas kawasan konservasi laut cenderung naik turun setiap tahunnya. Proporsi terbesar terdapat pada tahun 2014 yaitu sebesar 57,88 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa luas kawasan konservasi laut terus meningkat.

Gambar 14.1 Proporsi Luas Kawasan Konservasi Laut Terhadap Luas Wilayah Perairan Laut Teritorial, 2011-2014



Sumber : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2013 dan 2014, KKP

INDIKATOR 82. PERSENTASE TONASE IKAN YANG MENDARAT DENGAN *MAXIMUM SUSTAINABLE YIELD* (MSY)

MSY adalah rata-rata hasil tangkapan terbesar yang secara teoritis dapat diperoleh dari sejumlah spesies yang ada selama periode yang tidak terbatas dalam kondisi lingkungan yang konstan. MSY biasanya diukur dalam ton. Indikator ini memberikan informasi tingkat eksploitasi sumber daya perikanan dan kemajuan pengelolaan perikanan berkelanjutan. Konferensi PBB tentang Hukum Laut, Perjanjian Saham PBB Ikan, Rencana Pelaksanaan World Summit 2001 tentang Pembangunan Berkelanjutan, dan CBD, antara lain, semua mengacu pada titik referensi dan target berbasis MSY. Dalam deklarasi akhir dari Rio+20, negara berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah mendesak untuk “mempertahankan atau mengembalikan

semua stok setidaknya ke tingkat yang dapat menghasilkan MSY.”

Indikator ini digunakan untuk mengukur 4 target SDGs di 2 goals, meliputi;

Target 2.3 Pada 2030 meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, terutama perempuan, masyarakat adat, petani keluarga, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap tanah, sumber daya produktif lainnya dan input, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang untuk penambahan nilai dan pekerjaan non-pertanian,

Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur panen, dan mengakhiri penangkapan ikan yang berlebihan, ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) *fishing* dan praktek penangkapan ikan yang merusak dan melaksanakan rencana manajemen berbasis ilmu pengetahuan, untuk mengembalikan stok ikan dalam waktu singkat layak setidaknya ke tingkat yang dapat menghasilkan maksimum yang berkelanjutan sebagaimana ditentukan oleh karakteristik biologis mereka,

Target 14.6: Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk tertentu dari subsidi perikanan yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan *overfishing*, dan menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap IUU *fishing*, dan menahan diri dari memperkenalkan subsidi seperti baru, mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara maju setidaknya harus merupakan bagian integral dari WTO subsidi perikanan negosiasi; dan

Target 14.7 Pada tahun 2030 meningkatkan manfaat ekonomi untuk SIDS dan LDCs dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan berkelanjutan perikanan, budidaya dan pariwisata.

Salah satu permasalahan dari MSY adalah bahwa MSY dihitung untuk satu spesies, mengabaikan efek pada atau dari spesies lain. Sebuah konsep alternatif untuk MSY adalah *Optimum Sustainable Yield* (OSY) yang juga memperhitungkan faktor ekonomi, sosial, dan ekologi seperti penciptaan lapangan kerja. OSY dapat sama atau di bawah MSY. Namun, tidak ada kesepakatan tentang definisi umum dari OSY.

Data indikator 82 belum tersedia di Indonesia.

Semua negara anggota PBB diminta untuk melaporkan pendaratan tahunan spesies ikan atau kelompok spesies ke FAO. Kualitas data bervariasi antar negara dengan data pendaratan perikanan sering dilaporkan oleh pemerintah nasional dalam bentuk agregat bukan dengan spesies ikan.

INDIKATOR 14.1. EUTROFIKASI MUARA UTAMA

Meningkatnya limbah yang tidak diolah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dapat menjadi eutrofikasi, pemekaran alga berbahaya (HAB) dan “zona mati”. Oleh karena itu, tingkat eutrofikasi perlu dipantau dalam semua muara utama. Eutrofikasi adalah proses perkembangbiakan tumbuhan air dengan cepat karena memperoleh zat makanan yang berlimpah akibat pemupukan yang berlebihan. Kementerian Lingkungan Hidup dapat bertanggungjawab atas ketersediaan data.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 14.1, yaitu pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi pencemaran laut dari semua jenis, terutama dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.

INDIKATOR 14.2. KEASAMAN LAUT (PH DIUKUR DI PERMUKAAN)

Kimia laut tidak konstan dan variabel seperti suhu air mempengaruhi kelarutan CO₂, membuat pH berbeda dari rata-rata global. Pengukuran yang konsisten akan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang proses dan dampak dari penyerapan CO₂.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 14.3, yaitu meminimalkan dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah ditingkatkan di semua tingkatan.

Data indikator 14.2 belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 14.3. INDIKATOR PELAKSANAAN STRATEGI PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH PESISIR DAN LAUT

Perencanaan tata ruang laut merupakan suatu cara untuk mendistribusikan (spasial dan temporal) aktivitas manusia di wilayah pesisir dan laut yang berguna untuk menjamin ekologi, kehidupan sosial dan ekonomi yang diputuskan melalui proses publik dan politik. Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat bertanggungjawab terhadap ketersediaan data.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 14.2, pada tahun 2020, mengelola secara berkelanjutan, dan melindungi ekosistem laut dan pesisir untuk menghindari dampak

merugikan yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanan mereka dan mengambil tindakan untuk memulihkan kondisinya, untuk mencapai lautan yang sehat dan produktif dan target 14.5, pada tahun 2020, menghemat setidaknya 10 persen dari pesisir dan laut daerah, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia .

INDIKATOR 14.4. DAERAH EKOSISTEM TERUMBU KARANG DAN PERSENTASE TUTUPAN TERUMBU KARANG HIDUP

Ekosistem terumbu karang adalah ekosistem yang mengandung sumber daya alam yang dapat memberi manfaat besar bagi manusia. Dari itu diperlukan kearifan manusia untuk mengelolanya, yang bisa menjadikan sumber daya alam ini menjamin kesejahteraan manusia sepanjang zaman. Tanpa menghiraukan masa depan dan terus-menerus merusak, ekosistem terumbu karang akan menjadi semacam padang gurun tandus di dalam laut yang hanya dipenuhi oleh patahan-patahan karang dan benda mati lainnya. Karena itu pengelolaan sangat diperlukan untuk mengatur aktivitas manusia serta mengurangi dan memantau cara-cara pemanfaatan yang merusak.

Indikator ini mengukur area cakupan ekosistem terumbu karang yang hidup dalam perairan nasional. Untuk melihat kondisi terkait terumbu karang, data yang tersedia di Indonesia adalah data luas dan kondisi terumbu karang yang dihasilkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data ini dapat disajikan setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah Indonesia (melalui LIPI) telah memprakarsai Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (COREMAP) yang bertujuan untuk melindungi, merehabilitasi, dan mengelola pemanfaatan secara lestari terumbu karang serta ekosistem terkait di Indonesia, yang pada gilirannya akan menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir. Hasil penelitian COREMAP tersebut menghasilkan data kondisi terumbu karang dan persentase tutupan karang hidup.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 14.2, pada tahun 2020, mengelola secara berkelanjutan, dan melindungi ekosistem laut dan pesisir untuk menghindari dampak merugikan yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanan mereka dan mengambil tindakan untuk memulihkan kondisinya, untuk mencapai lautan yang sehat dan produktif.

Indikator ini dapat diperoleh dari publikasi KKP tahun 2013 dan 2014. Data pada gambar 14.1 memperlihatkan bahwa Luasan Ekosistem Terumbu Karang di Indonesia pada tahun 2014 sudah mengalami peningkatan pesat dari tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk sudah menyadari untuk melindungi dan melestarikan habitat laut dari kerusakan, karena

Luasan Ekosistem Terumbu Karang di Indonesia mengalami peningkatan pesat dari tahun 2010 sebesar 464.400 ha menjadi 2.517.858 ha pada tahun 2014.

jika habitat laut rusak akan berimbas kepada kesejahteraan masyarakat sendiri, terutama masyarakat pesisir yang hidupnya tergantung pada hasil laut. Artinya target 14.2 pada pembangunan berkelanjutan ada harapan untuk tercapai.

INDIKATOR 14.5. PROPORSI TANGKAPAN IKAN YANG BERADA DALAM BATASAN BIOLOGIS YANG AMAN (INDIKATOR MDG)

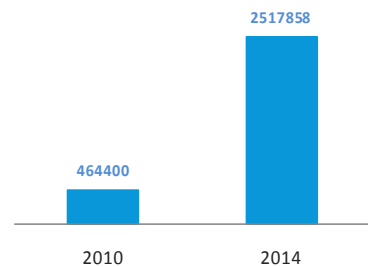
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman didefinisikan sebagai persentase tangkapan ikan yang dieksploitasi dalam tingkat produktivitas yang maksimum dan berkelanjutan. Indikator ini memberikan ukuran penting dari pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di dunia. Klasifikasi terhadap tangkapan ikan dikategorikan sebagai : *non-fully exploited*, *fully exploited*, dan *overexploited*. Tangkapan ikan dalam batas biologis yang aman adalah yang diklasifikasikan sebagai *non-fully exploited* dan *fully exploited*.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 14.4 pada tahun 2020, secara efektif mengatur panen, dan mengakhiri penangkapan ikan yang berlebihan, ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) fishing dan praktek penangkapan ikan yang merusak dan melaksanakan rencana manajemen berbasis ilmu pengetahuan, untuk mengembalikan stok ikan dalam waktu singkat layak setidaknya ke tingkat yang dapat menghasilkan maksimum yang berkelanjutan sebagaimana ditentukan oleh karakteristik biologis mereka dan target 14.6 pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk tertentu dari subsidi perikanan yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan *overfishing*, dan menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap IUU *fishing*, dan menahan diri dari memperkenalkan subsidi seperti baru, mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara maju setidaknya harus merupakan bagian integral dari WTO subsidi perikanan negosiasi.

Dalam pengelolaan sumber daya ikan, wilayah perairan Indonesia dibagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman dapat dihasilkan oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan yang dinilai menurut WPP. Indikator ini tidak tersedia setiap tahunnya, hanya pada tahun-tahun tertentu saja. Oleh karena itu, sistem statistik untuk menghasilkan indikator ini perlu dikembangkan lagi sehingga indikator ini dapat disajikan setiap tahunnya.

Indikator ini dapat didisagregasi menurut wilayah dan global. Untuk disagregasi yang lain perlu ditinjau kembali. FAO telah membagi lautan dunia menjadi 21 wilayah statistik dan penilaian tangkapan ikan dilakukan berdasarkan wilayah statistik ini. Secara total, 584 tangkapan ikan dan spesies telah dipantau sejak tahun 1974.

Gambar 14.2 Luasan Ekosistem Terumbu Karang tahun 2010-2014

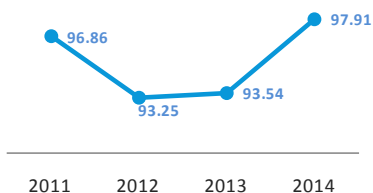


Sumber : Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2013 dan 2014, KKP

Data indikator 14.5 tersedia di Indonesia yang bersumber dari Publikasi Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Proporsi penangkapan ikan dari tahun 2011 sampai 2014 masing-masing 96,86 persen, 93,25 persen, 93,54 persen, dan 97,91 persen yang masih berada di bawah batas biologis aman (<100% dari JTJ).

Gambar 14.3 Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman, 2011 - 2014



Catatan : * angka sementara

Sumber : Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia, BAPPENAS

Data untuk indikator ini tersedia di Indonesia bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dikutip pada Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, berdasarkan Keputusan MKP No.KEP.45/MEN/2011 untuk tahun 2011-2014 dapat dilihat dalam gambar berikut 14.3.

Proporsi penangkapan ikan harus dijaga agar selalu di bawah batas biologis aman. Dari gambar terlihat bahwa produksi perikanan tangkap di laut tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 masih berada di bawah jumlah tangkap yang diperbolehkan (JTB), yakni 96,86 persen pada tahun 2011, 93,25 persen pada tahun 2012, 93,54 persen pada tahun 2013 dan 97,91 persen pada tahun 2014. Capaian ini menggambarkan kondisi yang baik mengingat batasan yang ditoleransi adalah pada kisaran < 100% dari JTB.

INDIKATOR 14.6: PERSENTASE PERIKANAN DENGAN SERTIFIKASI BERKELANJUTAN

Indikator 14.6 didefinisikan sebagai persentase perikanan yang telah menerima sertifikasi pengelolaan berkelanjutan. Data untuk indikator ini sampai saat ini belum ditemukan.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 14.6, pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk tertentu dari subsidi perikanan yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan *overfishing*, dan menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap IUU *fishing*, dan menahan diri dari memperkenalkan subsidi seperti baru, mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara maju setidaknya harus merupakan bagian integral dari WTO subsidi perikanan negosiasi dan target 14.7, pada tahun 2030 meningkatkan manfaat ekonomi untuk SIDs dan LDCs dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan berkelanjutan perikanan, budidaya dan pariwisata.

INDIKATOR 14.7. APAKAH NEGARA MEMERLUKAN BENDERA ORGANISASI MARITIM INTERNASIONAL (IMO), NOMOR, DAN TRANSPONDER UNTUK SEMUA KAPAL PENANGKAP IKAN LEBIH DARI 24 METER ATAU 100 TON?

Nomor IMO dan transponder untuk kapal penangkap ikan dapat memantau lebih baik kapal-kapal nelayan dan berkontribusi untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur/ ilegal, *unreported and unregulated* (IUU) *fishing*.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 14.4, pada tahun 2020, secara efektif mengatur panen, dan mengakhiri

penangkapan ikan yang berlebihan, ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) fishing dan praktek penangkapan ikan yang merusak dan melaksanakan rencana manajemen berbasis ilmu pengetahuan, untuk mengembalikan stok ikan dalam waktu singkat layak setidaknya ke tingkat yang dapat menghasilkan maksimum yang berkelanjutan menghasilkan sebagaimana ditentukan oleh karakteristik biologis mereka dan target 14.7, pada tahun 2030 meningkatkan manfaat ekonomi untuk SIDS dan LDCs dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan berkelanjutan perikanan, budidaya dan pariwisata.

INDIKATOR 14.8. APAKAH REGIONAL FISHERIES MANAGEMENT ORGANIZATION (RFMO) MENDIRIKAN PROGRAM PEMANTAUAN SATELITE?

RFMO mengadopsi program pemantauan satelit untuk mengidentifikasi kapal yang dapat terlibat dalam IUU fishing.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 14.4, pada tahun 2020, secara efektif mengatur panen, dan mengakhiri penangkapan ikan yang berlebihan, ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) fishing dan praktek penangkapan ikan yang merusak dan melaksanakan rencana manajemen berbasis ilmu pengetahuan, untuk mengembalikan stok ikan dalam waktu singkat yang layak setidaknya ke tingkat yang dapat menghasilkan produksi maksimum yang berkelanjutan menghasilkan sebagaimana ditentukan oleh karakteristik biologis mereka dan target 14.7, pada tahun 2030 meningkatkan manfaat ekonomi untuk SIDS dan LDCs dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan berkelanjutan perikanan, budidaya dan pariwisata.

Data indikator 14.7 dan 14.8 belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 14.9. PENGGUNAAN TEKNIK PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini berguna untuk mengetahui penggunaan teknik penangkapan ikan yang destruktif, seperti troli memancing. Indikator ini masih perlu dikembangkan dan ketersediaan data dapat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau melalui Survei Perusahaan Perikanan BPS pada variabel sarana penangkapan.

Indikator ini dapat memantau ketercapaian dari 3 target SDGs di 2 goals, ketiga target tersebut yaitu;

Target 14.7 Pada tahun 2030 meningkatkan manfaat ekonomi untuk SIDS dan LDCs dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut,

Indikator 14.9 masih perlu dikembangkan dan ketersediaan data dapat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau melalui Survei Perusahaan Perikanan BPS pada variabel sarana penangkapan.

termasuk melalui pengelolaan berkelanjutan perikanan, budidaya dan pariwisata,

- Target 14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan transfer teknologi kelautan memperhitungkan Kriteria *Intergovernmental Oceanographic Commission* dan Pedoman Transfer Teknologi Kelautan, dalam rangka meningkatkan kesehatan laut dan untuk meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pengembangan negara-negara berkembang, di khususnya SIDS dan LDCs; dan
- Target 14.b Menyediakan akses nelayan artisanal skala kecil terhadap sumber daya kelautan dan pasar.

INDIKATOR 14.10. INDIKATOR AKSES KE SUMBER DAYA LAUT BAGI NELAYAN RAKYAT SKALA KECIL (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 14.7, pada tahun 2030 meningkatkan manfaat ekonomi untuk SIDS dan LDCs dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan berkelanjutan perikanan, budidaya dan pariwisata dan target 14.b, menyediakan akses nelayan artisanal skala kecil terhadap sumber daya kelautan dan pasar.

Data indikator 14.10 dan 14.11 belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 14.11. INDIKATOR TRANSFER TEKNOLOGI KELAUTAN (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 14.a, meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan transfer teknologi kelautan memperhitungkan Kriteria *Intergovernmental Oceanographic Commission* dan Pedoman Transfer Teknologi Kelautan, dalam rangka meningkatkan kesehatan laut dan untuk meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pengembangan negara-negara berkembang, di khususnya SIDS dan LDCs.

INDIKATOR 14.12. AREA DEFORESTASI BAKAU (HEKTAR DAN PERSENTASE DARI TOTAL LUAS HUTAN BAKAU)

Deforestasi adalah istilah untuk menyebutkan perubahan tutupan suatu wilayah dari kawasan hutan menjadi tidak berhutan, artinya dari suatu wilayah yang sebelumnya berpenutupan tajuk berupa hutan (vegetasi pohon dengan kerapatan tertentu) menjadi bukan hutan (bukan vegetasi

pohon atau bahkan tidak bervegetasi. Indikator ini mengetahui pelestarian ekosistem bakau yang sangat penting sebagai pembibitan untuk spesies ikan dan hambatan terhadap gelombang badai.

Indikator ini dapat memantau ketercapaian dari 3 target SDGs di 2 *goals*, ketiga target tersebut yaitu;

- Target 6.6 Pada tahun 2020 melindungi dan memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, akuifer dan danau,
- Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola secara berkelanjutan, dan melindungi ekosistem laut dan pesisir untuk menghindari dampak merugikan yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanan mereka dan mengambil tindakan untuk memulihkan kondisinya, untuk mencapai lautan yang sehat dan produktif; dan
- Target 14.7 Pada tahun 2030 meningkatkan manfaat ekonomi untuk SIDS dan LDCs dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan berkelanjutan perikanan, budidaya dan pariwisata.

Data indikator 14.12 belum tersedia di Indonesia.

**MELINDUNGI, MEMULIHKAN DAN
MEMPROMOSIKAN PEMANFAATAN
EKOSISTEM DARAT, LESTARI
MENGELOLA HUTAN, MEMERANGI
PENGURUNAN, DAN MENGHENTIKAN
DAN MEMBALIKKAN DEGRADASI LAHAN
DAN MENGHENTIKAN HILANGNYA
KEANEKARAGAMAN HAYATI**

15 LIFE
ON LAND



- INDIKATOR 83. PERUBAHAN TAHUNAN LUAS KAWASAN HUTAN DAN LAHAN BUDIDAYA (INDIKATOR MDGS YANG DIMODIFIKASI)
- INDIKATOR 84. PERSENTASE KAWASAN HUTAN LINDUNG TERHADAP KAWASAN HUTAN
- INDIKATOR 85. PERUBAHAN TAHUNAN LAHAN TERDEGRADASI ATAU MENJADI GURUN (% ATAU HA)
- INDIKATOR 86. *RED LIST INDEX* (KELOMPOK SPESIES UTAMA NEGARA DAN SPECIES YANG DIPERDAGANGKAN UNTUK INTERNASIONAL)
- INDIKATOR 87. DAERAH KEANEKARAGAMAN HAYATI YANG DILINDUNGI
- INDIKATOR 15.1. PENINGKATAN KEPEMILIKAN LAHAN DAN TATA KELOLA HUTAN
- INDIKATOR 15.2. [INDIKATOR KONSERVASI EKOSISTEM GUNUNG]
- INDIKATOR 15.3. INDEKS VITALITAS PENGETAHUAN LINGKUNGAN TRADISIONAL (VITEK)
- INDIKATOR 15.4. [INDIKATOR AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK]

INDIKATOR 15.5. - 15.9....

TUJUAN 15. MELINDUNGI, MEMULIHKAN, DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN SECARA BERKELANJUTAN TERHADAP EKOSISTEM DARAT, MENGELOLA HUTAN SECARA BERKELANJUTAN, MEMERANGI DESERTIFIKASI, DAN MENGHENTIKAN DAN MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN DAN MENGHENTIKAN HILANGNYA KEANEKARAGAMAN HAYATI

INDIKATOR 83. PERUBAHAN TAHUNAN LUAS KAWASAN HUTAN DAN LAHAN BUDIDAYA (INDIKATOR MDGS YANG DIMODIFIKASI)

Indikator dapat diperluas juga untuk mencakup lahan basah atau ekosistem penting lainnya.

Indikator ini berguna untuk mengetahui perubahan neto dari kawasan hutan dan perluasan pertanian ke ekosistem alami, serta hilangnya lahan pertanian produktif untuk pertumbuhan daerah perkotaan, industri, jalan, dan penggunaan lainnya, yang dapat mengancam ketahanan pangan suatu negara. Hal ini diukur sebagai persentase perubahan per tahun dan dilacak oleh FAO. Intensifikasi agroekologi yang berkelanjutan juga akan memungkinkan peningkatan produksi pangan tanpa mengubah ekosistem alami menjadi lahan pertanian.

Lahan budidaya didefinisikan oleh FAO sebagai lahan yang ditanami oleh tanaman panen sementara (lahan yang dipanen dua kali dihitung satu kali), padang rumput sementara untuk penyiangan atau untuk penggembalaan, lahan yang ditanami untuk kebutuhan pasar atau dapur, dan lahan yang sementara belum ditanami (kosong). Kawasan hutan adalah lahan yang ditanami pohon, tidak termasuk pohon dalam sistem produksi pertanian (misalnya perkebunan atau sistem agroforestry) dan pohon di taman kota dan kebun.

Data ini dapat diperoleh dari Kementerian Kehutanan dan tersedia sampai dengan level provinsi. Namun data masih belum diperoleh dari instansi bersangkutan.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 2.4 (pada tahun 2030 memastikan sistem produksi makanan yang berkelanjutan dan mengimplementasikan praktek-praktek pertanian yang kokoh yang dapat meningkatkan produktivitas dan produksi, yang membantu memelihara ekosistem, yang menguatkan kapasitas untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, dan semakin meningkatkan kualitas lahan dan tanah) dan target 15.1 (pada tahun 2020 memastikan konservasi, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat dan air tawar, di hutan-hutan tertentu, lahan basah, gunung dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban perjanjian internasional).

Data luas kawasan hutan dicatat setiap tahunnya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan serta Tata Guna Hutan Kesepakatan. Data dapat dirinci menurut fungsi kawasan hutan

seperti hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan produksi yang dapat dikonversi, dan taman buru. Yang termasuk kawasan budidaya adalah kawasan peruntukan hutan produksi seperti hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Data tersedia sampai dengan level provinsi tetapi tahun data sesuai dengan tahun terbit SK masing-masing provinsi.

Data ini dapat diperoleh dari Kementerian Kehutanan. Indikator dapat diperluas juga untuk mencakup lahan basah atau ekosistem penting lainnya. Indikator ini dapat didisagregasikan secara spasial. Namun sampai saat penyajian publikasi, data belum dapat diperoleh dari instansi yang bersangkutan.

INDIKATOR 84. KAWASAN HUTAN DI BAWAH PENGELOLAAN HUTAN LESTARI SEBAGAI PERSENTASE DARI KAWASAN HUTAN

Indikator perubahan tahunan di kawasan hutan dan kawasan lindung dengan keanekaragaman hayati memberikan informasi penting tentang perubahan kawasan hutan dan perlindungan kawasan hutan. Indikator yang berkaitan dengan hutan diperlukan untuk mengetahui penggunaan hutan yang berkelanjutan untuk kegiatan ekonomi dan penggunaan hutan lainnya. Global Forest Resources Assessment 2010 telah mengusulkan indikator tersebut untuk mengukur persentase hutan dengan pengelolaan yang berkelanjutan.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target-target SDGs seperti;

- Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, molekul air yang terkandung dalam tanah, dan danau,
- Target 15.1 Pada tahun 2020 memastikan konservasi, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat dan air tawar, di hutan-hutan tertentu, lahan basah, gunung dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban perjanjian internasional, dan
- Target 15.2 Pada tahun 2020, memajukan implementasi pengelolaan segala tipe hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, memulihkan hutan yang terdegradasi, dan meningkatkan penghijauan dan reboisasi sebesar x persen secara global.

Rasio luas kawasan hutan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan merupakan perbandingan antara luas kawasan hutan lindung

Data ini dapat diperoleh dari Kementerian Kehutanan dan tersedia sampai dengan level provinsi.

dan total luas kawasan hutan dalam persen. Indikator ini juga merupakan indikator MDG's. Sama seperti sumber data indikator sebelumnya, data untuk indikator ini diperoleh berdasarkan SK Menteri Kehutanan yang tersedia pada level nasional setiap tahun serta pada level provinsi sesuai dengan tahun SK.

Tantangan untuk indikator ini adalah pada pembentukan definisi yang konsisten secara internasional tentang praktik pengelolaan hutan berkelanjutan. Penyempurnaan indikator dan data dasar akan disediakan pada tahun 2015. Data ini dapat diperoleh dari Kementerian Kehutanan. Negara dengan sistem pengelolaan hutan yang tangguh dapat memilah indikator ini secara spasial. Namun sampai saat penyajian publikasi, data belum dapat diperoleh dari instansi yang bersangkutan.

INDIKATOR 85. PERUBAHAN TAHUNAN LAHAN SUBUR YANG TERDEGRADASI ATAU MENJADI GURUN (% ATAU HA)

FAO mendefinisikan degradasi lahan sebagai pengurangan kondisi tanah, yang mempengaruhi kemampuannya untuk menyediakan kebutuhan dan pelayanan kepada ekosistem dan untuk menjamin fungsinya dalam jangka waktu tertentu. Komponen degradasi lahan termasuk salinisasi, erosi, hilangnya nutrisi tanah, dan perambahangundukan pasir. Data degradasi lahan secara terus menerus ditingkatkan melalui kemajuan dalam penginderaan jarak jauh, pemetaan digital, dan pemantauan. Sebuah tujuan utama harus dapat melakukan pemberhentian seluruh degradasi neto lahan pada tahun 2030.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target-target SDGs seperti;

Target 2.4 Pada tahun 2030 memastikan sistem produksi makanan yang berkelanjutan dan mengimplementasikan praktek-praktek pertanian yang kokoh yang dapat meningkatkan produktivitas dan produksi, yang membantu memelihara ekosistem, yang menguatkan kapasitas untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, dan semakin meningkatkan kualitas lahan dan tanah,

Target 15.2 Pada tahun 2020, memajukan implementasi pengelolaan segala tipe hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, memulihkan hutan yang terdegradasi, dan meningkatkan penghijauan dan reboisasi sebesar x persen secara global, dan

Data ini dapat diperoleh dari Kementerian Kehutanan. Namun data masih belum diperoleh dari instansi bersangkutan

Target 15.3 Pada tahun 2020, memerangi desertifikasi, dan mengembalikan lahan dan lapisan tanah yang terdegradasi, termasuk tanah yang terkena dampak desertifikasi, kekeringan dan banjir, dan berusaha untuk mencapai degradasi tanah dunia yang netral.

Data ini dapat diperoleh dari Kementerian Kehutanan. Namun sampai saat penyajian publikasi, data belum dapat diperoleh dari instansi yang bersangkutan.

INDIKATOR 86. RED LIST INDEX (KELOMPOK SPESIES UTAMA NEGARA DAN SPESIES YANG DIPERDAGANGKAN UNTUK INTERNASIONAL).

Red List Index (RLI) merupakan indeks yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepunahan kelompok spesies laut dan darat dalam waktu dekat (yaitu 10-50 tahun) dengan tidak adanya tindakan konservasi. Penurunan indeks ini menunjukkan bahwa resiko kepunahan suatu spesies meningkat. RLI juga digunakan untuk mengukur kemajuan menuju target Aichi 12 tentang Konvensi Keanekaragaman Hayati dan MDG's.

IUCN Red List adalah sistem yang paling memiliki reputasi untuk mengetahui status spesies yang terancam menurut tujuh kategori resiko yang berkisar dari "punah" sampai "kurang perhatian". Kriteria untuk menentukan status resiko masing-masing spesies sangat tepat secara ilmiah dan mudah dipahami bagi masyarakat umum. RLI dapat diaplikasikan untuk kelompok spesies utama yang berbeda, jelas, dan dapat diikuti perkembangannya dari waktu ke waktu. *Red List Index* ini telah dikembangkan untuk berbagai kelompok spesies utama, seperti amfibi dan burung, namun tetap terdapat kesenjangan, khususnya untuk kelompok spesies utama, seperti jamur.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target-target SDGs seperti;

- Target 11.4 Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia,
- Target 15.5 Mengambil tindakan segera dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2020 melindungi serta mencegah kepunahan spesies langka,
- Target 15.7 Mengambil tindakan segera untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan satwa dilindungi flora dan fauna, dan mengatasi baik permintaan maupun penawaran produk satwa liar, dan
- Target 15.c Meningkatkan dukungan global untuk upaya

Data RLI tersedia di Indonesia dan dikumpulkan oleh IUCN pada level nasional.

Data *Red List Index* tahun 2014 memperlihatkan bahwa resiko kepunahan tertinggi berada pada spesies moluska dengan RLI sebesar 6 dan resiko kepunahan terendah berada pada spesies tanaman dengan nilai RLI 408

memerangi perburuan dan perdagangan spesies yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan,

RLI merupakan indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui tingkat kepunahan suatu spesies. Data RLI tersedia di Indonesia dan dikumpulkan oleh IUCN pada level nasional. Data dipublikasikan secara rutin setiap empat atau lima tahun sekali. Data tahun 2014 dapat diperoleh dari IUCN.

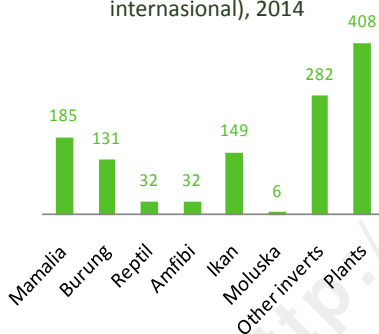
Salah satu keterbatasan dari indikator ini adalah fokus pada spesies liar yang bertentangan dengan jenis-jenis yang biasa digunakan sebagai makanan atau untuk pertanian oleh manusia. Selain itu, indeks ini tidak mempertimbangkan status genetik spesies, indeks ini hanya mengambil satu aspek tentang keanekaragaman hayati.

RLI dapat dipisahkan untuk tingkat regional dan nasional. Sebaiknya RLI nasional dan global dilaporkan untuk kelompok spesies utama. Dalam kasus negara-negara kecil yang mencakup bioma laut atau darat yang berdekatan, mungkin lebih tepat untuk melaporkan RLI regional dengan kelompok spesies utama.

SDSN mengusulkan bahwa RLI juga diterapkan untuk perdagangan internasional spesies darat dan laut yang diidentifikasi dalam lampiran I dan II dari Konvensi tentang Perdagangan Internasional dan Spesies Terancam Punah (CITES). RLI untuk spesies internasional yang diperdagangkan akan digunakan untuk mengukur resiko kepunahan jangka pendek untuk spesies yang diperdagangkan secara internasional dan yang kelangsungan hidupnya dipengaruhi dengan kuat oleh negara bukan asalnya dan strategi operasi internasional.

Gambar 15.1 adalah data *Red List Index* tahun 2014. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa resiko kepunahan tertinggi berada pada spesies moluska dengan RLI sebesar 6, diikuti oleh spesies reptil dan amfibi dengan nilai RLI 32. Sementara itu nilai RLI tertinggi berada pada spesies tanaman dengan nilai 408. Hal ini berarti spesies tanaman memiliki resiko kepunahan paling rendah pada tahun 2014.

Gambar 15.1. *Red List Index* (kelompok spesies utama negara dan species yang diperdagangkan untuk internasional), 2014



Sumber : International Union for Conservation of Nature (IUCN)

INDIKATOR 87. DAERAH KEANEKARAGAMAN HAYATI YANG DILINDUNGI.

Kawasan lindung darat dan laut merupakan sarana penting untuk mengamankan keanekaragaman hayati. Selain itu, kawasan ini menjadi juga menjadi indikator di bawah target Aichi. Meskipun demikian, sistem kawasan lindung global masih belum mencakup sampel yang representatif dari keanekaragaman hayati dunia dan menjadi tidak efektif untuk dijadikan target dalam perjanjian yang paling penting

bagi keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, Target 11 Aichi Biodiversity dari Konvensi Keanekaragaman Hayati menekankan adanya pengembangan ekologis yang mewakili sistem kawasan lindung dan perlindungan kawasan yang secara khusus penting bagi keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem. Indikator yang dikembangkan oleh *Bird Life International* dan IUCN untuk UNEP-WCMC (pusat pengawasan konservasi dunia) ini digunakan untuk mengukur kemajuan menuju elemen-elemen pada target 11.

Indikator ini merupakan gabungan dari tiga sub indikator yaitu tingkat perlindungan ekoregion darat dan laut dunia, tingkat perlindungan Important Bird Areas (IBAs) dan tingkat perlindungan *Alliance for Zero Extinctionsites* (AZEs). Sub indikator dihitung berdasarkan lapisan dari ekoregion, IBAs dan AZEs dengan semua kawasan lindung yang ditetapkan dan dicatat dalam Database Kawasan Lindung Dunia. Database Kawasan Lindung Dunia merupakan dataset spasial global yang paling komprehensif mengenai kawasan lindung darat dan laut.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target-target SDGs seperti;

- Target 11.4 Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia,
- Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola secara berkelanjutan, dan melindungi ekosistem laut serta pesisir untuk menghindari dampak merugikan yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanan mereka dan mengambil tindakan untuk memulihkan kondisinya, dalam rangka mencapai lautan yang sehat dan produktif,
- Target 15.5 Mengambil tindakan segera dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2020 melindungi serta mencegah kepunahan spesies langka, dan
- Target 15.c Meningkatkan dukungan global untuk upaya memerangi perburuan dan perdagangan spesies yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan

Data ini belum tersedia. Data untuk indikator ini masih tersedia pada level global oleh IUCN. Kementerian Lingkungan Hidup dapat mengadopsi indikator ini sehingga dapat menyediakan data pada level nasional.

Indikator ini dapat digunakan untuk menilai status perlindungan dan kecenderungan dalam perlindungan dari

Data untuk indikator ini masih tersedia pada level global oleh IUCN

waktu ke waktu. Hal ini dapat diterapkan secara luas pada berbagai skala untuk mengukur respon kebijakan hilangnya keanekaragaman hayati. Indikator ini lebih kompleks daripada indikator MDG's, tetapi memberikan informasi yang jauh lebih kaya tentang keadaan keanekaragaman hayati di negara-negara. Indikator ini sederhana dan non-komposit untuk mencakup kawasan lindung serta dapat diturunkan dengan hanya berfokus pada komponen pertama. Dengan menggunakan cakupan kawasan lindung akan menyederhanakan tugas negara tentang pengumpulan data. Selain itu, persentase kawasan lindung tidak menyediakan wawasan tentang apakah kawasan lindung penting untuk mengamankan keanekaragaman hayati regional.

Meskipun sebagian besar digunakan pada skala global, indikator ini dapat dihitung untuk daerah, negara, atau bahkan bioma. Dalam kasus negara-negara kecil meliputi ekoregion bersebelahan, indikator ini lebih tepat menggunakan representasi regional.

INDIKATOR 15.1. PENINGKATAN KEPEMILIKAN LAHAN DAN TATA KELOLA HUTAN.

Pendataan dan publikasi kepemilikan lahan kawasan hutan belum lengkap dilakukan sehingga indikator belum bisa disediakan.

Indikator ini merupakan persentase kawasan hutan dengan kepemilikan lahan yang jelas dan aman. Pendataan dan publikasi kepemilikan lahan kawasan hutan belum lengkap dilakukan sehingga indikator belum bisa disediakan. Kementerian Kehutanan maupun BPN dapat bertanggungjawab atas ketersediaan indikator ini.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 15.2, yaitu pada tahun 2020, memajukan implementasi pengelolaan segala tipe hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, memulihkan hutan yang terdegradasi, dan meningkatkan penghijauan dan reboisasi sebesar x persen secara global.

INDIKATOR 15.2. INDIKATOR KONSERVASI EKOSISTEM GUNUNG (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Kementerian Lingkungan Hidup dapat menyediakan indikator setelah indikator dikembangkan sesuai dengan kesepakatan internasional.

Indikator ini berguna untuk mengetahui konservasi dan pengelolaan ekosistem gunung yang berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup dapat menyediakan indikator setelah indikator dikembangkan sesuai dengan kesepakatan internasional.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 15.4, yaitu pada tahun 2030 memastikan konservasi ekosistem hutan, termasuk keanekaragaman hayati, untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menyediakan manfaat yang penting bagi perkembangan berkelanjutan.

INDIKATOR 15.3. INDEKS VITALITAS PENGETAHUAN LINGKUNGAN TRADISIONAL (VITEK).

Indikator ini berguna untuk mengetahui kecenderungan sejauh mana pengetahuan dan praktik tradisional dari masyarakat adat/asli dan lokal dihormati/dihargai dan terintegrasi dengan pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Indikator ini dibangun oleh organisasi non-profit Terralingua. Kementerian Lingkungan Hidup dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi indikator ini. Informasi lebih lengkap dapat dilihat di <http://www.terralingua.org/vitek/>

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 15.9, yaitu pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan lokal, mengembangkan proses dan strategi pengurangan kemiskinan.

INDIKATOR 15.4. INDIKATOR AKSES PADA SUMBER DAYA GENETIK. (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 15.6, yaitu memastikan pembagian yang adil dan merata dari keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang layak terhadap sumber daya genetik.

Data indikator 15.3, 15.4, 15.5, dan 15.6 belum tersedia.

INDIKATOR 15.5. KELIMPAHAN SPESIES ASING YANG MASUK.

Indikator ini berguna untuk mengetahui jumlah spesies asing yang masuk yang ditemukan di suatu negara. Kelimpahan spesies adalah jumlah suatu spesies pada area tertentu. Data ini belum tersedia di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya mengatasi ketidakterersediaan data oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan/atau Kementerian Kehutanan, atau lembaga lain yang terkait.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 15.8, yaitu pada tahun 2020 memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah pendahuluan dan secara signifikan mengurangi dampak serbuan spesies asing pada ekosistem tanah dan air, dan mengendalikan atau membasmi spesies prioritas.

INDIKATOR 15.6. INDIKATOR SUMBER DAYA FINANSIAL UNTUK EKOSISTEM DAN KEANEKARAGAMAN (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 15.a, yaitu memobilisasi dan meningkatkan secara signifikan sumber daya finansial untuk melestarikan dan menggunakan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan, dari segala sumber yang tersedia.

INDIKATOR 15.7. INDIKATOR SUMBER DAYA FINANSIAL UNTUK PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 15.b, yaitu memobilisasi sumber daya secara signifikan dari semua sumber dan di semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan lestari, dan memberikan insentif yang memadai untuk negara-negara berkembang untuk memajukan pengelolaan hutan lestari, termasuk untuk konservasi dan reboisasi.

INDIKATOR 15.8. INDIKATOR DUKUNGAN GLOBAL UNTUK MEMERANGI PERBURUAN DAN PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI. (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 15.7 (mengambil tindakan segera untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan dari satwa yang dilindungi dari flora dan fauna, dan mengatasi baik permintaan dan penawaran dari produk satwa liar) dan 15.c(meningkatkan dukungan global untuk upaya memerangi perburuan dan perdagangan spesies yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan).

Data indikator 15.7, 15.8, dan 15.9 belum tersedia.

INDIKATOR 15.9. *LIVING PLANET INDEX*

Indikator ini untuk mengukur keanekaragaman hayati di dunia dari suatu negara, berdasarkan tren populasi spesies. Hal ini dihitung menggunakan data time-series pada lebih dari 10.000 populasi lebih dari 3.000 spesies mamalia, burung, reptil, amfibi, dan ikan. Perubahan dalam populasi setiap spesies dikumpulkan dan dibandingkan dengan nilai pada tahun 1970.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 15.4 pada tahun 2030 memastikan konservasi ekosistem hutan, termasuk keanekaragaman hayati, untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menyediakan manfaat yang penting bagi perkembangan berkelanjutan dan 15.5 mengambil tindakan mendesak dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2020 melindungi dan mencegah kepunahan spesies terancam.

**MENINGKATKAN MASYARAKAT
YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN,
MENYEDIAKAN AKSES TERHADAP
KEADILAN BAGI SEMUA, DAN MEMBANGUN
INSTITUSI YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN
INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN**

16 PEACE AND JUSTICE
STRONG INSTITUTIONS



- INDIKATOR 88. CEDERA DAN KEMATIAN AKIBAT KEKERASAN PER 100.000 PENDUDUK
- INDIKATOR 89. JUMLAH PENGUNGS
- INDIKATOR 90. PROPORSI ORANG HUKUM DAN PENJANJIAN TENTANG KEPEMILIKAN INFORMASI BERMANFAAT YANG TERSEDIA UNTUK UMUM
- INDIKATOR 91. PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN SEMUA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT DISAJIKAN SECARA BRUTO DALAM DOKUMENTASI ANGGARAN PUBLIK DAN DISAHKAN OLEH LEGISLATIF
- INDIKATOR 92. PERSENTASE ANAK DI BAWAH USIA 5 YANG LAHIR TERDAFTAR DENGAN OTORITAS SIPIL
- INDIKATOR 93. KEBERADAAN DAN PELAKSANAAN HUKUM NASIONAL DAN / ATAU JAMINAN KONSTITUSIONAL TENTANG HAK ATAS INFORMASI
- INDIKATOR 94. PERSEPSI KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK
- INDIKATOR 16.1. PERSENTASE PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI YANG MERASA AMAN BERJALAN SENDIRIAN DI MALAM HARI DI KOTA ATAU AREA MEREKA TINGGAL
- INDIKATOR 16.2. KEPATUHAN TERHADAP REKOMENDASI DARI UPR DAN PERJANJIAN PBB

INDIKATOR 16.3. - 16.9....

TUJUAN 16. MENINGKATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES TERHADAP KEADILAN BAGI SEMUA, DAN MEMBANGUN INSTITUSI YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN

INDIKATOR 88. CEDERA DAN KEMATIAN AKIBAT KEKERASAN PER 100.000 PENDUDUK

Indikator 88 ini didekati dengan indikator persentase desa menurut adanya korban perkelahian massal dalam keadaan meninggal dan luka-luka. Sumber data pada indikator ini berasal dari Potensi Desa (Podes) yang dilaksanakan oleh BPS.

Statistik ini mengukur cedera dan kematian akibat kekerasan, termasuk serangan (pemukulan, pelecehan, pembakaran) dan kekerasan bersenjata tetapi bukan kecelakaan atau cedera yang diakibatkan diri sendiri, dinyatakan dalam unit per 100.000 penduduk. SDSN mengusulkan adanya cedera, karena ada banyak bentuk kekerasan yang tidak mengakibatkan kematian.

Tingkat kematian banyak dikaitkan dengan akses dan kualitas pelayanan kesehatan seperti halnya dengan tingkat kekerasan. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mengumpulkan data statistik tahunan mengenai pembunuhan yang disengaja dan *World Health Organization* (WHO) mengumpulkan data tentang cedera. Namun, laporan dan realibilitas data nasional dari beberapa negara bervariasi, terutama bagi negara-negara yang mengalami konflik.

Data ini merupakan cerminan dari tingkat kekerasan di negara tertentu dan harus dipisahkan berdasarkan jenis kelamin (untuk membedakan kekerasan terhadap perempuan), usia (untuk mengidentifikasi kekerasan terhadap anak), berdasarkan etnisitas (untuk melacak kemungkinan genosida), dan geografi (untuk mengidentifikasi daerah kekerasan dan untuk melacak kejahatan perkotaan). Selain itu, tingkat pembunuhan konflik bersenjata yang disengaja harus dilaporkan secara terpisah dari kematian.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target-target SDGs seperti;

- Target 5.1 Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimana saja,
- Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan ruang pribadi, termasuk eksploitasi pada perdagangan manusia, eksploitasi seksual serta jenis-jenis eksploitasi lainnya

Pada tahun 2014, terjadi peningkatan persentase desa menurut adanya korban perkelahian massal hingga mencapai 3,38 persen atau sebesar 2.779 desa.

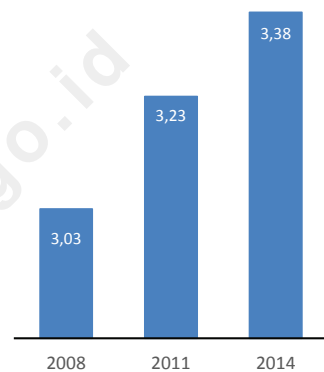
- Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan tingkat kematian yang terkait di mana-mana
- Target 16.2 Mengakhiri kekerasan, eksploitasi, perdagangan serta segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak-anak

INDIKATOR PROXY: JUMLAH DESA MENURUT ADANYA KORBAN PERKELAHIAN MASSAL (MENINGGAL DAN LUKA-LUKA)

Karena keterbatasan data, indikator 88 ini didekati dengan indikator persentase desa menurut adanya korban perkelahian massal dalam keadaan meninggal dan luka-luka. Sumber data pada indikator ini berasal dari Potensi Desa (Podes) yang dilaksanakan oleh BPS tiga tahun sekali. Keterangan perkelahian massal diperoleh melalui PODES berdasarkan jenisnya yaitu perkelahian antar kelompok warga, warga antar desa kelurahan, warga dengan aparat keamanan, warga dengan aparat pemerintahan, antar pelajar/ mahasiswa, antarsuku, dan lainnya. Data ini dapat disediakan sampai dengan level provinsi, namun pada penyajian saat ini hanya level nasional.

Berdasarkan gambar 16.1, persentase desa menurut adanya korban perkelahian massal dalam keadaan meninggal dan luka-luka terus mengalami peningkatan pada tahun 2008- 2014. Pada tahun 2008 ada sejumlah 2.283 desa atau sekitar 3,03 persen dari seluruh desa di Indonesia terjadi perkelahian massal. Desa yang mengalami perkelahian massal dan terjadi korban meninggal dan luka-luka terus mengalami peningkatan sampai tahun 2014 hingga mencapai 2.779 desa (3,38 persen). Hal ini menunjukkan ada peningkatan tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka, dalam hal ini akibat dari perkelahian massal perkelahian antar kelompok warga, warga antar desa kelurahan, warga dengan aparat keamanan, warga dengan aparat pemerintahan, antar pelajar/ mahasiswa, antarsuku, dan lainnya.

Gambar 16.1 Persentase desa menurut adanya korban perkelahian massal (meninggal dan luka-luka), 2008-2014



Sumber: Potensi Desa, BPS

INDIKATOR 89. JUMLAH PENGUNGS

Indikator ini berguna untuk mengetahui jumlah pengungsi akibat konflik atau kekerasan, termasuk pengungsi karena bencana alam atau sebab-sebab lainnya. Indikator ini meliputi pengungsi di daerah perbatasan nasional serta pengungsi internal. Indikator ini mengukur populasi pengungsi menurut negara atau wilayah asal, ditambah jumlah orang yang terlantar sebagai persentase dari total penduduk negara tersebut. Pengasingan dan perpindahan akibat konflik atau kekerasan dapat merusak proses perdamaian dan kemungkinan pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan risiko ketidakstabilan suatu daerah ketika pengungsi yang mengungsi ke negara-negara tetangga akibat konflik penduduk lokal.

Data indikator 89 tersedia di Indonesia dengan sumber data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai tahun 2010-2014.

Banjir merupakan bencana yang mengakibatkan munculnya jumlah pengungsi terbesar. Jumlah pengungsi banjir terbesar terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 679.652 pengungsi atau sekitar 70,78 persen dari total pengungsi.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 10.7 yaitu memfasilitasi migrasi dan mobilitas orang dengan tertib, aman, dan, bertanggung jawab, termasuk melalui pelaksanaan kebijakan migrasi yang direncanakan dan dikelola dengan baik. Disamping itu, indikator ini juga dapat mengukur target 16.1 yaitu secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan tingkat kematian yang terkait dimana-mana.

Sumber data yang digunakan pada indikator ini yaitu jumlah pengungsi berdasarkan jenis bencana dan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2010-2014. Sumber data untuk indikator ini dapat menggunakan laporan dari IDMC. Lembaga internasional IDMC (*Internal Displacement Monitoring Center*) merupakan lembaga yang menjadi sumber utama informasi dan analisis mengenai pengungsian internal. Indikator mengenai pengungsi dan pengungsian internal yang dianalisis berasal dari data yang dikumpulkan oleh instansi pemerintah BNPB, LSM internasional, dan masyarakat sipil. Data pengungsi dan pengungsian internal belum tersedia secara akurat sehingga sulit untuk didisagregasi baik menurut umur, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Sementara itu, sejumlah program yang dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir oleh badan-badan lokal dan internasional di provinsi-provinsi seperti Aceh, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur membuat sebagian data menjadi tersedia sampai level provinsi.

Tabel 16.1 Jumlah pengungsi berdasarkan jenis bencana, 2010-2015

Kejadian	2010	2011	2012	2013	2014	2015 ¹
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BANJIR	50 310	12 977	10 592	365 343	679 652	105 099
BANJIR DAN TANAH LONGSOR	1 059	331	21 115	19 024	44 174	655
GELOMBANG PASANG / ABRASI	267	1 165	773	1 267	866	
GEMPA BUMI	399	4	133	58 339	200	3
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI	15 353					
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN				2	473	
KECELAKAAN TRANSPORTASI			13			
KONFLIK / KERUSUHAN SOSIAL	44	361	1 536	2 977	505	
LETUSAN GUNUNG API	563	1 680	192	46 617	120 839	13 454
PUTING BELIUNG	682	1 198	1 655	1 598	1 904	440
TANAH LONGSOR	3 367	1 374	6 263	16 264	17 107	3 590
TSUNAMI		67				
TOTAL	72 044	19 157	137 672	511 431	865 720	123 241

Catatan: ¹ September 2015

Sumber: BNPB (<http://dibi.bnpb.go.id/Desinventar/crosstab.jsp>)

Sulit untuk mendapatkan angka yang akurat karena populasi yang terus berfluktuasi dan tidak ada definisi internasional yang seragam. Indikator ini dapat didisagregasi menurut jenis kelamin, umur, agama, dan asal-usul kebangsaan dan etnis.

Tabel 16.1 merupakan jumlah pengungsi berdasarkan jenis bencana. Dari banyak bencana yang melanda Indonesia, banjir merupakan bencana yang mengakibatkan munculnya jumlah pengungsi terbesar. Selama periode tahun 2010-2015 jumlah pengungsi yang diakibatkan banjir fluktuatif setiap tahunnya. Jumlah pengungsi banjir terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 679.652 pengungsi atau sekitar 70,78 persen dari total pengungsi. Pada tahun yang sama, letusan jumlah pengungsi akibat letusan gunung merapi dan banjir disertai tanah longsor juga cukup banyak, masing-masing sebesar 13,96 persen untuk pengungsi letusan gunung merapi dan 5,10 persen pengungsi akibat banjir disertai tanah longsor.

Pada tahun 2014, jumlah pengungsi terbanyak berikutnya terjadi akibat letusan gunung merapi dan banjir disertai tanah longsor masing-masing sebesar 13,96 persen dan 5,10 persen.

INDIKATOR 90. PROPORSI ORANG HUKUM DAN PENJANJIAN TENTANG KEPEMILIKAN INFORMASI BERMANFAAT YANG TERSEDIA UNTUK UMUM

Indikator ini dapat mengukur target 16.4 yaitu pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi arus keuangan terlarang, memperkuat pemulihan dan pengembalian aset curian, dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisir, serta target 17.1 yaitu memperkuat mobilisasi sumber daya dalam negeri, termasuk melalui dukungan internasional untuk negara-negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas dalam negeri untuk pajak dan pengumpulan pendapatan lainnya.

Data indikator 90 belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 91. PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN SEMUA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT DISAJIKAN SECARA BRUTO DALAM DOKUMENTASI ANGGARAN PUBLIK DAN DISAHKAN OLEH LEGISLATIF

Berdasarkan Pilar II dan IV dari IMF *Fiscal Transparency Code*, indikator ini mengukur pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan pemerintah secara berkala. Data ini disajikan secara bruto dalam anggaran publik dan disahkan oleh legislatif. Pendapatan termasuk pajak, royalti, dividen, bonus, biaya perijinan, biaya infrastruktur, atau biaya manfaat signifikan lainnya. Pengeluaran mengacu pada semua pengeluaran, termasuk pendapatan dari sumber daya alam, yang tidak dialokasikan melalui APBN. Indikator ini juga digunakan untuk memonitor penggunaan subsidi BBM.

Data indikator 91 belum tersedia di Indonesia.

Kurangnya transparansi fiskal melemahkan akuntabilitas pemerintah dan meningkatkan kesempatan korupsi atau buruknya manajemen, yang akhirnya dapat menghambat kemajuan SDGs. Pendapatan dan anggaran pemerintah seringkali sulit untuk dilacak. Namun, transparansi fiskal telah menjadi

standar yang didukung oleh standar internasional seperti IMF yang telah diperbarui menjadi Panduan tentang Transparansi Fiskal. Transparansi fiskal akan memperkuat peluang dalam pengawasan publik dengan memungkinkan keterlibatan publik dalam proses penganggaran dan ketimpangan pengawasan publik. Ketimpangan ini dapat terjadi antara data pendapatan dan pengeluaran, serta data lainnya termasuk pembayaran oleh perusahaan dan pajak perusahaan. Pengawasan publik dapat membantu mengidentifikasi perbedaan nasional misalnya, oleh *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) dan arus terlarang.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target-target SDGs seperti;

- Target 12.2 Tahun 2030 mencapai pengelolaan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan efisien,
- Target 16.5 Substansial mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuknya, dan
- Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat. Indikator ini dapat didisagregasi menurut project dan perusahaan.

INDIKATOR 92. PERSENTASE ANAK DI BAWAH USIA 5 TAHUN YANG LAHIR TERDAFTAR DENGAN OTORITAS SIPIL

Di banyak negara berkembang, hampir sebagian besar kelahiran anak-anak tidak terdaftar. Mendaftarkan kelahiran sangat penting dilakukan untuk pemenuhan hak asasi manusia. Pencatatan kelahiran gratis adalah titik awal kunci untuk pengakuan dan perlindungan hak setiap orang untuk identitas dan eksistensi. Kegagalan untuk mendaftarkan kelahiran karena sistem administrasi yang kurang baik, diskriminasi, atau isolasi merupakan penyebab utama pengucilan sosial. Dengan melakukan pendaftaran kelahiran, peluang penduduk untuk mengakses layanan, kesempatan dan kemampuan untuk memperoleh data mengenai kesehatan (angka kematian bayi, cakupan vaksinasi, dan lain-lain) akan meningkat.

Data dapat didisagregasi menurut jenis kelamin, etnis, agama, disabilitas, suku, dan lokasi geografis untuk mengidentifikasi antar penduduk. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 16.9 yaitu pada tahun 2030 memberikan identitas hukum bagi semua termasuk pendaftaran kelahiran gratis. Ketersediaan data di Indonesia yaitu kepemilikan akte kelahiran yang terdapat pada Susenas dengan pertanyaan untuk anggota rumah tangga umur 0-17 tahun apakah mempunyai akta kelahiran dari kantor catatan sipil.

Data indikator 92 tersedia di Indonesia yaitu kepemilikan akte kelahiran berdasarkan hasil Susenas tahun 2010-2014.

INDIKATOR PROXY: PERSENTASE BALITA YANG MEMILIKI AKTE KELAHIRAN

Secara umum, balita yang memiliki akte kelahiran di Indonesia terus mengalami peningkatan selama periode tahun 2010-2014. Pada tahun 2010 balita yang memiliki akte kelahiran baru mencapai 54,79 persen, kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 76,08 persen. Kepemilikan akte kelahiran balita lebih besar di daerah perkotaan dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua di perkotaan memiliki kesadaran yang lebih baik dalam mendaftarkan kelahiran anaknya dibandingkan orang tua di daerah perdesaan. Jika dilihat dari pencapaiannya setiap tahun, target 16.9 ada prospek untuk terpenuhi jika kenaikan kepemilikan akte kelahiran terus terjadi.

INDIKATOR 93. KEBERADAAN DAN PELAKSANAAN HUKUM NASIONAL DAN/ATAU JAMINAN KONSTITUSIONAL MENGENAI HAK ATAS INFORMASIMENGENAI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI DAN UUD PASAL 28

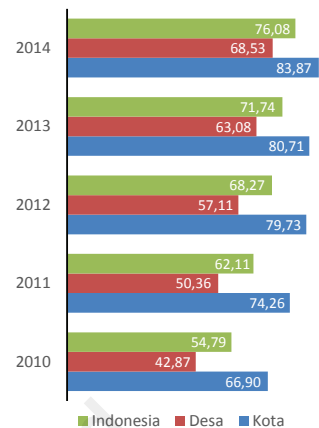
Indikator ini membantu menilai apakah suatu negara memiliki kebijakan hukum yang melindungi akses informasi. Akses publik terhadap informasi membantu memastikan akuntabilitas lembaga dan transparansi. Hal ini penting untuk mengukur keberadaan kerangka dan pelaksanaannya, sebagai hukum yang baik tetapi tidak dapat ditegakkan. Hal ini terjadi karena kurangnya kapasitas, ketahanan kelembagaan yang sistematis, atau budaya kerahasiaan atau korupsi. Selanjutnya, pengecualian atau hukum bertentangan dapat mengikis jaminan ini.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur 16.10 yaitu menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental, sesuai dengan undang-undang nasional dan perjanjian internasional. Data pada indikator ini belum tersedia di Indonesia. Keterbatasan yang ada di Indonesia yakni akses publik yang tepat waktu, dapat diakses, mudah digunakan dan gratis. Namun, hal ini ada di luar lingkup indikator. Indikator ini masih ditentukan pendisagregasian.

INDIKATOR 94. PERSEPSI KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK

Korupsi di sektor publik merupakan hambatan bagi pembangunan, upaya pemberantasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Korupsi sulit diukur karena data obyektif cenderung sangat tidak lengkap dan sulit untuk dibandingkan. *Transparency International* (TI) adalah organisasi masyarakat sipil global yang bekerja untuk memerangi korupsi dan telah mengembangkan *Corruption Perception Index* (CPI). Peringkat CPI negara-negara didasarkan atas seberapa besar

Gambar 16.2 Persentase balita yang memiliki akte kelahiran, 2010-2014



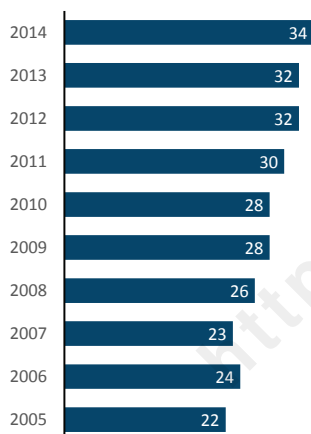
Sumber : Susenas, BPS

Data indikator 93 belum tersedia di Indonesia.

Ketersediaan data indikator 94 berasal dari *Corruption Perception Index* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi yang bersumber dari *Transparency International Indonesia* atau SPAK (BPS) dari tahun 2005-2014.

Skor CPI lebih sering meningkat setiap tahunnya pada periode tahun 2005-2014. Pada tahun 2014 ini, skor CPI Indonesia sebesar 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih).

Gambar 16.3 *Corruption Perception Index (CPI) / Indeks Persepsi Korupsi, 2005-2014*



Sumber : *Transperancy International Indonesia*

korupsi pada sektor publik (administrasi dan politik). Indeks ini merupakan indeks komposit berbasis data persepsi terkait korupsi yang dikumpulkan oleh berbagai lembaga terkemuka. Indeks ini mencerminkan pandangan pengamat dari seluruh dunia, termasuk para ahli yang tinggal dan bekerja di negara dan wilayah yang dievaluasi.

Indikator ini dapat mengukur target 16.5 yaitu secara substansial mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuknya dan target 16.6 yaitu mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat.

Corruption Perception Index (CPI) sudah tersedia untuk hampir seluruh negara. CPI yang dihitung oleh TI setiap tahun sejak 1995 pada level nasional untuk dapat dibandingkan dengan negara lain. IPK direpresentasikan dalam bentuk bobot skor/angka (score) dengan rentang 0-100. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih dari korupsi.

Selain itu, perwakilan TI di Indonesia juga menghitung CPI atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada beberapa kota di Indonesia. Berbeda dengan CPI yang mengukur tingkat korupsi negara-negara di dunia berdasarkan gabungan beberapa indeks, IPK Indonesia dibuat berdasarkan survei yang metodenya dikembangkan oleh TI-Indonesia. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka terhadap responden pelaku bisnis. IPK Indonesia mengukur tingkat korupsi di 50 kota di seluruh Indonesia, meliputi 33 ibukota propinsi ditambah 17 kota lain yang signifikan secara ekonomi. Nilai IPK berada pada rentang 0-10, dimana 0 sangat korup dan 10 sangat bersih. IPK kota di Indonesia dihitung sejak tahun 2004 setiap 2 tahun sekali.

Berdasarkan gambar 3, skor CPI lebih sering meningkat setiap tahunnya pada periode tahun 2005-2014, kecuali terjadi penurunan 1 poin pada tahun 2007 dan skor tetap dengan tahun sebelumnya pada tahun 2010 dan 2013. Pada tahun 2014 ini, skor CPI Indonesia sebesar 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih) dan menempati urutan 107 dari 175 negara yang dikur. Skor CPI Indonesia 2014 naik 2 poin, sementara peringkat naik 7 peringkat dari tahun sebelumnya. Terjadinya peningkatan CPI setiap tahunnya membuat Indonesia optimis pada tahun 2030, Indonesia menjadi negara anti korupsi sebab kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pebisnis dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.

INDIKATOR 16.1. PERSENTASE PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI YANG MERASA AMAN BERJALAN SENDIRIAN DI MALAM HARI DI KOTA ATAU DAERAH DI MANA MEREKA TINGGAL

Indikator ini digunakan untuk mengetahui pengalaman warga mengenai pelayanan keamanan pribadi dan

keadilan. Ketersediaan indikator di Indonesia yaitu persentase perempuan dan laki-laki yang merasa aman berjalan sendirian di malam hari di kota atau daerah tempat tinggal mereka. Sumber data indikator ini berasal dari *Gallup Survey*. *Gallup survey* merupakan survei polling tentang persepsi keamanan di 135 negara dan Indonesia termasuk dalam negara yang disurvei tersebut.

Indikator ini dapat didisagregasi berdasarkan wilayah geografis (perkotaan dan perdesaan). Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 5.2 yaitu menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua wanita dan anak perempuan di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan manusia dan seksual serta jenis-jenis eksploitasi.

Ketersediaan data indikator 16.1 di Indonesia yaitu persentase perempuan dan laki-laki yang merasa aman berjalan sendirian di malam hari di kota atau daerah tempat tinggal mereka. Sumber data indikator ini berasal dari *Gallup Survey*. Namun, data tidak ditemukan.

INDIKATOR 16.2. KEPATUHAN TERHADAP REKOMENDASI DARI UNIVERSAL PERIODIC REVIEW DAN PERJANJIAN PBB

Indikator ini menilai sejauh mana keterlibatan negara dengan mekanisme HAM PBB. *Universal Period Review* (UPR) adalah *peer review* yang dilakukan oleh negara-negara anggota Dewan HAM PBB. Kelompok Kerja UPR mendalami apa yang negara telah lakukan untuk meningkatkan dan memenuhi hak asasi manusia. Setiap negara anggota PBB akan dikaji setiap 4,5 tahun. Badan Perjanjian Hak Asasi Manusia PBB adalah badan ahli kuasa-hukum yang dibuat berdasarkan perjanjian hak asasi manusia. Ketika negara meratifikasi perjanjian, negara berkewajiban untuk memberikan laporan berkala kepada badan perjanjian secara relevan.

Data indikator 16.2 belum tersedia di Indonesia.

Baik UPR maupun masalah Perjanjian Hak Asasi Manusia PBB memerlukan negara untuk melakukan perubahan administratif, legislatif, atau yudikatif penerapan hak asasi manusia. Indikator ini kemudian akan mengukur sejauh mana negara telah terlibat dalam mengadopsi rekomendasi dari kedua proses tersebut.

Indikator ini dapat didisagregasi berdasarkan perjanjian. Keberadaan indikator ini dapat digunakan untuk menjawab target-target SDGs seperti;

- Target 8.7 Mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak, memberantas kerja paksa, dan pada tahun 2025, menghilangkan pekerja anak dalam segala bentuk termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak,
- Target 8.8 Melindungi hak-hak buruh dan meningkatkan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan orang-orang dalam pekerjaan berisiko tinggi,

- Target 10.2 Pada tahun 2030 memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi, dan politik dari semua terlepas dari usia, jenis kelamin, cacat, ras, etnis, asal, agama, ekonomi atau status lainnya,
- Target 16.2 Mengakhiri kekerasan, eksploitasi, perdagangan serta segala bentuk kekerasan dan penyiiksaan terhadap anak-anak,
- Target 16.3 Mempromosikan aturan hukum di tingkat nasional dan internasional, serta menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua,
- Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat, dan
- Target 16.b Mempromosikan dan menegakkan hukum non-diskriminatif serta kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.

Kedua indikator di atas merupakan indikator dari UN OHCHR, dan data tersedia untuk 197 negara PBB termasuk Indonesia. Indikator ini dapat didisagregasi berdasarkan peranjian.

INDIKATOR 16.3 FREKUENSI PEMBAYARAN GAJI PASUKAN KEAMANAN (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini mengukur frekuensi dan keteraturan dari anggota dari kepolisian dan militer terkait penerimaan gaji mereka. Hal ini mencerminkan sumber daya pemerintah dan kapasitas. Keterlambatan pembayaran sebagian gaji merupakan faktor utama kekerasan dan konflik. Sebelumnya, memang belum ada publikasi terkait indikator ini. Namun, indikator ini dapat dibentuk dan di publikasikan, dan TNI dan Kepolisian RI dapat memberikan informasi. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 16.3 yaitu mempromosikan aturan hukum di tingkat nasional dan internasional, dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.

Data indikator 16.3 belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 16.4 PERSENTASE ORANG DAN BISNIS YANG MEMBAYAR SUAP KEPADA PEJABAT PUBLIK, ATAU DIMINTA UNTUK SUAP OLEH PEJABAT PUBLIK, SELAMA 12 BULAN TERAKHIR. (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini terkait tentang orang dan bisnis mengenai korupsi dan suap. Korupsi dan suap memiliki dampak pengeluaran ekonomi yang besar. Indikator ini dapat diukur melalui survei. Penyuaipan didefinisikan dalam Konvensi PBB UN *Convention Against Corruption* (UNCAC) sebagai janji, menawarkan atau memberikan, kepada pejabat publik secara langsung atau tidak langsung dari manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau orang lain atau badan/

Sumber data dari indikator 16.4 adalah Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) oleh BPS. SPAK ditujukan mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan berbagai indikator tunggal perilaku anti korupsi.

lembaga. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 16.5 yaitu substansial mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuknya.

INDIKATOR PROXY: INDEKS PENGALAMAN TERKAIT LAYANAN PUBLIK TERTENTU

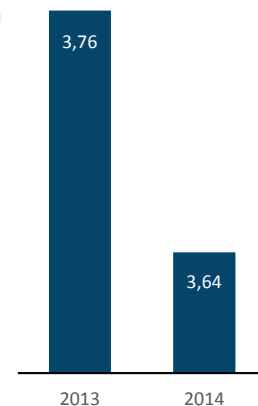
Sumber data dari indikator ini adalah Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) BPS. SPAK ditujukan mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan berbagai indikator tunggal perilaku anti korupsi. Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuaian (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*).

IPAK disusun berdasarkan tiga sumber keterangan utama yakni pertama pendapat/penilaian terhadap akar kebiasaan perilaku korupsi di masyarakat, kedua pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik tertentu, dan ketiga pengalaman praktek korupsi lainnya. Jika ditinjau berdasarkan pengalaman terkait layanan publik tertentu.

IPAK dihitung tiap tahun untuk menggambarkan dinamika perilaku anti korupsi masyarakat. Capaian indeks selama ini termasuk dalam kategori “Anti Korupsi”. Nilai IPAK dibagi ke dalam empat kategori yakni “Sangat Permisif Terhadap Korupsi” dengan nilai indeks 0 sampai 1,25, kategori “Permisif” terhadap korupsi dengan nilai indeks 1,26 sampai 2,50, kategori “Anti Korupsi” dengan nilai indeks 2,51 sampai 3,75, dan kategori “Sangat Anti Korupsi” dengan nilai indeks 3,76 sampai 5,00. Indeks terkait layanan publik tertentu turun dari 3,76 pada tahun 2013 menjadi 3,64 pada tahun 2014. Meskipun mengalami penurunan, IPAK di Indonesia masih dalam kategori anti korupsi karena nilai indeks antara 2,51 sampai 3,75. Dalam hal ini target 16.5 optimis terpenuhi dari sisi layanan publik.

Sumber data dari indikator 16.4 adalah Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) oleh BPS. SPAK ditujukan mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan berbagai indikator tunggal perilaku anti korupsi

Gambar 16.4 Indeks Pengalaman terkait Layanan Publik Tertentu, 2013-2014



Sumber : SPAK, BPS

INDIKATOR 16.5. PERSENTASE DARI JUMLAH TAHANAN YANG TELAH DITAHAN SELAMA LEBIH DARI 12 BULAN Sambil MENUNGGU HUKUMAN ATAU DISPOSISI AKHIR DARI KASUS MEREKA. (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur keseluruhan fungsi dan efektivitas sistem peradilan di negara tertentu. Di tingkat internasional, data tentang jumlah penjara dikumpulkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan data tentang sejumlah tahanan yang masih menunggu masa sidang di 118 negara dan wilayah. Data tentang jumlah penjara juga tersedia di tingkat nasional dari pihak penegak hukum.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 16.3 yaitu substansial mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuknya.

Data indikator 16.5 belum tersedia di Indonesia.

Data indikator 16.6 belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 16.6. INDIKATOR TOTAL ARUS KEUANGAN TERLARANG. (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui mengenai arus keuangan terlarang masuk dan luar dari negara. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 16.4 yaitu pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi arus keuangan terlarang, memperkuat pemulihan dan pengembalian aset curian, dan memerangi segala bentuk kejahatan terorganisir.

Data indikator 16.7 belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 16.7. INDIKATOR KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM MENEGAH KEKERASAN DAN MEMERANGI TERORISME DAN KEJAHATAN. (INDIKATOR INI PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini berfungsi untuk mengetahui tentang kerja sama internasional dalam pembangunan di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang dalam hal mencegah kekerasan dan memerangi terorisme dan kejahatan. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 16.a yaitu pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi terlarang arus keuangan dan lengan, memperkuat pemulihan dan pengembalian aset curian, dan memerangi segala bentuk kejahatan terorganisir.

Data indikator 16.8 belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 16.8. KETERWAKILAN PEREMPUAN DI ANTARA MEDIATOR, NEGOSIATOR DAN AHLI TEKNIS DALAM NEGOSIASI PERDAMAIAN FORMAL. (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 5.5 yaitu menjamin partisipasi perempuan secara penuh dan efektif serta kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di setiap tingkat pengambilan keputusan dalam bidang politik, ekonomi, dan kehidupan bermasyarakat dan target 16.7 yaitu memastikan responsif, inklusif, partisipatif dan perwakilan pengambilan keputusan di semua tingkat.

Data indikator 16.9 belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 16.9. JUMLAH WARTAWAN DAN PETUGAS MEDIA TERKAIT YANG DISERANG SECARA FISIK, DITAHAN DAN DIBUNUH SECARA TIDAK SAH SAAT MENGEJAR KEGIATAN RESMI MEREKA. (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini mengukur tentang keamanan dan kebebasan dasar wartawan dan personil media terkait profesi mereka. UNESCO mengetahui wartawan yang terbunuh dan banyak LSM bekerja sama dengan UNESCO untuk mengawasi keselamatan jurnalis. Namun indikator ini tidak dapat dijadikan sebagai proxy untuk kebebasan pers. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 16.10 yaitu menjamin akses publik terhadap

informasi dan melindungi kebebasan fundamental, sesuai dengan undang-undang nasional dan perjanjian internasional. Sumber Indeks Demografi Indonesia (IDI) BPS.

<http://www.bps.go.id>

**MEMPERKUAT SARANA PELAKSANAAN
DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN
GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN**

17 PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS



- INDIKATOR 95. PENDAPATAN DOMESTIK DIALOKASIKAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PERSEN DARI PENDAPATAN NASIONAL BRUTO
- INDIKATOR 96. ODA DAN HIBAH SWASTA NETTO DALAM PENDAPATAN NASIONAL BRUTO NEGARA BERPENDAPATAN TINGGI
- INDIKATOR 97. ARUS NETTO SWASTA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA HARGA PASAR DALAM BENTUK PROPORSI DARI PENDAPATAN NASIONAL BRUTO NEGARA BERPENDAPATAN TINGGI
- INDIKATOR 98. LAPORAN TAHUNAN BIS, IASB, IFRS, IMF, WIPO, WTO (ORGANISASI LAIN YANG AKAN DITAMBAHKAN) PADA HUBUNGAN ANTARA ATURAN INTERNASIONAL DAN SDGS
- INDIKATOR 99. PROPORSI INDIKATOR SDGS YANG DILAPORKAN SETIAP TAHUN
- INDIKATOR 100. KESEJAHTERAAN EVALUATIF DAN *POSITIVE MOOD AFFECT*
- INDIKATOR 17.1. JUMLAH BANTUAN RESMI UNTUK PEMBANGUNAN
- INDIKATOR 17.2. BANTUAN *PROGRAMMABLE COUNTRY* (CPA)
- INDIKATOR 17.3. INDIKATOR PINJAMAN KEBERLANJUTAN (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

INDIKATOR 17.4-17.10...

TUJUAN 17. MEMPERKUAT SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR 95. PENDAPATAN DOMESTIK DIALOKASIKAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PERSEN DARI PENDAPATAN NASIONAL BRUTO, PER SEKTOR

Di Indonesia data untuk indikator 95 belum tersedia

Pembangunan berkelanjutan merupakan serangkaian proses pembangunan yang meliputi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui alokasi sumber daya pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari PNB. Data internasional dikumpulkan oleh IMF, dimana kategori belanja pemerintah yang mendukung pembangunan berkelanjutan harus ditentukan terlebih dahulu (misalnya pengeluaran militer dan beberapa subsidi harus dikeluarkan). Setelah kategori pengeluaran pemerintah yang relevan telah ditetapkan, indikator dapat dikompilasi untuk semua negara. Secara umum, semakin kaya suatu negara, maka alokasi dari PNB untuk belanja pemerintah semakin tinggi. Wajar jika negara-negara mengalokasikan sedikitnya 15-20 persen dari PNB sebagai pengeluaran pemerintah.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target-target SDGs seperti;

- Target 1.b Memastikan mobilisasi yang signifikan untuk sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui peningkatan kerjasama pembangunan untuk menyediakan sarana yang memadai dan dapat diprediksi untuk negara-negara berkembang, khususnya di LDC, untuk melaksanakan program-program dan kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan di semua dimensi,
- Target 2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama di tingkat internasional, pada infrastruktur pedesaan, penelitian dan penyuluhan pertanian, pengembangan teknologi, tanaman dan bank gen ternak untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian di negara-negara berkembang, khususnya di negara-negara kurang berkembang,
- Target 3.c Meningkatkan secara substansial pembiayaan dan perekrutan kesehatan, pengembangan, pelatihan, dan penyediaan tenaga kesehatan di negara-negara berkembang, terutama di LDCs dan SIDS,

- Target 3.d Memperkuat kapasitas semua negara, terutama negara-negara berkembang, untuk peringatan dini, pengurangan risiko, dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global,
- Target 4.c Pada tahun 2030 meningkatkan ketersediaan guru yang berkualitas sebesar x% , termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya LDCs dan SIDS,
- Target 7.a Pada tahun 2030, meningkatkan kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses terhadap penelitian dan teknologi energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, teknologi bahan bakar fosil yang lebih canggih dan bersih, dan meningkatkan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih,
- Target 11.3 Pada tahun 2030, meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan kapasitas partisipatif, terpadu dan perencanaan berkelanjutan dan pengelolaan pemukiman manusia di semua negara,
- Target 11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan yang positif antara daerah perkotaan, pinggiran kota dan pedesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah,
- Target 15.a Memobilisasi dan secara signifikan meningkatkan sumber daya finansial untuk melestarikan serta menggunakan keanekaragaman hayati berkelanjutan dan ekosistem,
- Target 15.b Memobilisasi sumber daya secara signifikan dari semua sumber yang ada di semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan lestari, dan memberikan insentif yang memadai bagi negara-negara berkembang untuk memajukan pengelolaan hutan lestari, termasuk untuk konservasi dan reboisasi
- Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya dalam negeri, termasuk melalui dukungan internasional bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas dalam negeri untuk pajak dan pengumpulan pendapatan lainnya

Data untuk indikator ini belum tersedia di Indonesia. Perlu dukungan dari pemerintah untuk penyediaan data melalui Kementerian Keuangan dan BPS agar indikator ini dapat disajikan.

INDIKATOR 96. ODA DAN HIBAH SWASTA NETTO YANG MERUPAKAN ALOKASI DARI PENDAPATAN NASIONAL BRUTO

Di Indonesia data untuk indikator 96 belum tersedia

Indikator ini mengukur bantuan resmi pembangunan (ODA) ditambah hibah swasta bersih sebagai bagian dari PNB. Target nilai ODA adalah sebesar 0,7 persen dari PNB, dengan komitmen tambahan 0,15-0,2 persen dari PNB untuk LDCs. Untuk negara-negara penerima ODA di daftar DAC, indikator ini mengukur jumlah ODA yang diterima sebagai persentase dari PNB, tetapi tidak dapat mengukur efektivitas atau hasil dari pembangunan tersebut. Indikator ini merupakan kelanjutan dari indikator MDG tujuan 8 dan ukuran ketergantungan bantuan. Bank Dunia mengeluarkan klasifikasi pendapatan negara-negara yang terdapat di seluruh dunia berdasarkan estimasi PNB per kapita mulai tahun 2013. Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, Indonesia berada dalam klasifikasi negara berpendapatan menengah-bawah, seperti Filipina, Laos dan Vietnam.

Komite Bantuan Pembangunan (OECD) sedang merevisi dan memperbaiki indikator ODA agar lebih mencerminkan upaya penyedia untuk pengembangan, menjelaskan penerimaan sumber daya penerima, dan mengatasi beberapa kelemahan dari tindakan ODA saat ini. Langkah-langkah baru ini juga berpotensi memungkinkan untuk pemantauan yang lebih komprehensif pembangunan eksternal untuk tujuan global atau barang publik.

Indikator ini dapat didisagregasi berdasarkan tujuan, sektor, dan dimensi lain yang dilaporkan di bawah database DAC. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target-target SDGs seperti;

- Target 1.b Memastikan mobilisasi yang signifikan untuk sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui peningkatan kerjasama pembangunan untuk menyediakan sarana yang memadai dan dapat diprediksi untuk negara-negara berkembang, khususnya di LDC, untuk melaksanakan program-program dan kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan di semua dimensi,
- Target 2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama di tingkat internasional, pada infrastruktur pedesaan, penelitian dan penyuluhan pertanian, pengembangan teknologi, tanaman dan bank gen ternak untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian

- di negara-negara berkembang, khususnya di negara-negara kurang berkembang,
- Target 3.c Meningkatkan secara substansial pembiayaan dan perekrutan kesehatan, pengembangan, pelatihan, dan penyediaan tenaga kesehatan di negara-negara berkembang, terutama di LDCs dan SIDS,
- Target 3.d Memperkuat kapasitas semua negara, terutama negara-negara berkembang, untuk peringatan dini, pengurangan risiko, dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global,
- Target 4.c Pada tahun 2030 meningkatkan ketersediaan guru yang berkualitas sebesar x% , termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, khususnya LDCs dan SIDS,
- Target 7.a Pada tahun 2030, meningkatkan kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses terhadap penelitian dan teknologi energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, teknologi bahan bakar fosil yang lebih canggih dan bersih, dan meningkatkan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih,
- Target 9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara-negara berkembang melalui peningkatan dukungan keuangan, teknologi, dan teknis untuk negara-negara Afrika, LDCs, LLDCs, dan SIDS,
- Target 10.b Mendorong arus ODA dan keuangan, termasuk investasi asing langsung untuk negara-negara di mana kebutuhan paling besar di LDCs khususnya negara-negara Afrika, SIDS, dan LLDCs, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka,
- Target 15.a Memobilisasi dan secara signifikan meningkatkan sumber daya finansial untuk melestarikan serta menggunakan keanekaragaman hayati berkelanjutan dan ekosistem,
- Target 15.b Memobilisasi sumber daya secara signifikan dari semua sumber yang ada di semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan lestari, dan memberikan insentif yang memadai bagi negara-negara berkembang

untuk memajukan pengelolaan hutan lestari, termasuk untuk konservasi dan reboisasi,

Target 17.2 Negara-negara maju untuk melaksanakan sepenuhnya komitmen ODA mereka, termasuk untuk menyediakan 0,7% dari GNI di ODA ke negara-negara berkembang yang setidaknya sebesar 0,15-0,20% untuk negara maju,

Target 17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan dilengkapi dengan kemitraan multi-stakeholder yang dapat memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di semua negara, khususnya bagi negara-negara berkembang,

Data untuk indikator ini belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 97. ARUS NETTO SWASTA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA HARGA PASAR DALAM BENTUK PROPORSI DARI PENDAPATAN NASIONAL BRUTO NEGARA BERPENDAPATAN TINGGI

Keuangan swasta internasional sangat penting untuk membiayai pembangunan berkelanjutan. Keuangan swasta tertentu dapat mendanai pengembangan sektor swasta (termasuk pertanian) dan infrastruktur. Indikator yang diusulkan akan menelusuri aliran dana swasta internasional dengan harga pasar menggunakan definisi Komite Bantuan Pembangunan OECD, yang meliputi: investasi langsung, pinjaman bank internasional (jatuh tempo > satu tahun), pinjaman obligasi (jatuh tempo > 1 tahun), dan arus lain (kepemilikan terutama dilaporkan ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan di negara-negara penerima bantuan).

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target-target SDGs seperti;

Target 1.b Memastikan mobilisasi yang signifikan untuk sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui peningkatan kerjasama pembangunan untuk menyediakan sarana yang memadai dan dapat diprediksi untuk negara-negara berkembang, khususnya di LDC, untuk melaksanakan program-program dan kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan di semua dimensi,

Target 2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama di tingkat internasional, pada infrastruktur pedesaan, penelitian dan

Di Indonesia data untuk indikator 97 belum tersedia

penyuluhan pertanian, pengembangan teknologi, tanaman dan bank gen ternak untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara-negara berkembang, khususnya di negara-negara kurang berkembang,

- Target 7.a Pada tahun 2030, meningkatkan kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses terhadap penelitian dan teknologi energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, teknologi bahan bakar fosil yang lebih canggih dan bersih, dan meningkatkan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih,
- Target 10.5 Meningkatkan regulasi dan pengawasan pasar keuangan global dan lembaga-lembaga serta memperkuat pelaksanaan peraturan tersebut,
- Target 10.b Mendorong arus ODA dan keuangan, termasuk investasi asing langsung untuk negara-negara di mana kebutuhan paling besar di LDCs khususnya negara-negara Afrika, SIDS, dan LLDCs, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka,
- Target 15.a Memobilisasi dan secara signifikan meningkatkan sumber daya finansial untuk melestarikan serta menggunakan keanekaragaman hayati berkelanjutan dan ekosistem,
- Target 15.b Memobilisasi sumber daya secara signifikan dari semua sumber yang ada di semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan lestari, dan memberikan insentif yang memadai bagi negara-negara berkembang untuk memajukan pengelolaan hutan lestari, termasuk untuk konservasi dan reboisasi,
- Target 17.3 Memobilisasi sumber daya finansial tambahan untuk negara-negara berkembang dari berbagai sumber,

Dapat didisagregasi berdasarkan tujuan, jenis aliran swasta. Data untuk indikator ini belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 98: LAPORAN TAHUNAN BIS, IASB, IFRS, IMF, WIPO, WTO (ORGANISASI LAIN YANG AKAN DITAMBAHKAN) PADA HUBUNGAN ANTARA ATURAN INTERNASIONAL DAN SDGS

Indikator ini berupa laporan-laporan dari organisasi internasional. Indikator ini menunjukkan penilaian lembaga-

Di Indonesia data untuk indikator 98 belum tersedia

lembaga internasional tentang apakah aturan internasional konsisten dengan pencapaian SDG. Laporan juga harus menjelaskan pilihan untuk perbaikan untuk membuat aturan yang konsisten dengan pencapaian tujuan. Institusi dan laporan yang tercakup dalam indikator ini meliputi:

- BIS : Laporan standar peraturan keuangan internasional
- IASB : Laporan standar akuntansi internasional
- IFRS : Laporan standar pelaporan keuangan internasional
- IMF : Laporan sistem keuangan internasional
- WIPO : Laporan rezim kekayaan intelektual internasional
- WTO : Laporan pada sistem perdagangan internasional

Atau laporan dari organisasi-organisasi lain juga dapat ditambahkan ke indikator ini. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target-target SDGs seperti;

- Target 1.a Membuat kerangka kebijakan yang tepat, di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang pro-miskin dan peka terhadap gender untuk mendukung percepatan investasi dalam kegiatan pemberantasan kemiskinan,
- Target 1.b Memastikan mobilisasi yang signifikan untuk sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui peningkatan kerjasama pembangunan untuk menyediakan sarana yang memadai dan dapat diprediksi untuk negara-negara berkembang, khususnya di LDC, untuk melaksanakan program-program dan kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan di semua dimensi,
- Target 2.b Mengoreksi dan mencegah pembatasan perdagangan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia termasuk oleh penghapusan paralel segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat Ronde Pembangunan Doha,
- Target 8.a Meningkatkan bantuan untuk dukungan perdagangan bagi negara-negara berkembang, khususnya LDCs, termasuk melalui Enhanced Integrated Framework untuk LDCs,
- Target 9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara-negara berkembang melalui peningkatan

dukungan keuangan, teknologi, dan teknis untuk negara-negara Afrika, LDCs, LLDCs, dan SIDS,

- Target 10.5 Meningkatkan regulasi dan pengawasan pasar keuangan global dan lembaga-lembaga serta memperkuat pelaksanaan peraturan tersebut,
- Target 10.6 Menjamin peningkatan perwakilan dan suara negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga ekonomi global dan keuangan internasional dalam rangka untuk memberikan lembaga yang lebih efektif, kredibel, akuntabel, dan sah,
- Target 10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas seseorang secara tertib, aman, dan bertanggung jawab, termasuk dengan pelaksanaan kebijakan migrasi yang direncanakan dan dikelola dengan baik,
- Target 10.a Melaksanakan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang, di negara-negara kurang berkembang khususnya sesuai dengan perjanjian WTO,
- Target 12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien yang mendorong konsumsi boros dengan menghapus distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan bertahap mereka subsidi berbahaya, bila ada, untuk mencerminkan dampak lingkungan, dengan sepenuhnya memperhatikan kebutuhan khusus dan kondisi negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak buruk yang mungkin terjadi pada perkembangan mereka dengan cara yang melindungi orang miskin dan masyarakat yang terkena dampak,
- Target 14.c Menjamin pelaksanaan penuh hukum internasional, sebagaimana tercermin dalam UNCLOS bagi negara-negara berpihak, termasuk, di mana terdapat pemerintahan regional dan internasional yang berlaku untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan terhadap lautan dan sumber dayanya oleh pihak mereka,
- Target 16.8 Memperluas dan memperkuat partisipasi negara berkembang di lembaga-lembaga pemerintahan global,

- Target 17.10 Mempromosikan sistem perdagangan multilateral di bawah WTO yang bersifat universal, berdasarkan aturan-aturan, terbuka, non-diskriminatif dan adil termasuk melalui kesimpulan dari negosiasi dalam Doha Development Agenda,
- Target 17.12 Menyadari pelaksanaan kebebasan pajak yang tepat waktu, akses pasar kuota bebas yang awet bagi semua negara-negara maju yang setidaknya konsisten dengan keputusan WTO, termasuk dengan memastikan bahwa aturan-aturan istimewa dari pemberlakuan asal untuk diimpor dari LDCs yang transparan dan sederhana, dan berkontribusi untuk memfasilitasi akses pasar,
- Target 17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan,
- Target 17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan,
- Target 17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan masing-masing negara untuk membangun dan menerapkan kebijakan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

Data untuk indikator ini belum tersedia di Indonesia. Keterbatasan mengenai indikator ini perlu ditinjau setelah indikator telah dibangun.

INDIKATOR 99. PROPORSI INDIKATOR SDGS YANG DILAPORKAN SETIAP TAHUN

Untuk mendapatkan sebuah alat kontrol yang efektif, SDGs perlu didukung oleh kualitas data yang dilaporkan setiap tahun. Hal ini akan membutuhkan investasi yang signifikan untuk meningkatkan instrumen pengukuran yang ada (misalnya untuk mempercepat pemantauan dan meningkatkan pemilahan), membuat instrumen baru, dan membangun kapasitas NSOs, terutama di LDCs, dan lembaga statistik internasional. Disarankan untuk membuat indikator sederhana agar dapat dilaporkan setiap setahunnya. Indikator tersebut akan memberikan proxy yang baik untuk efektivitas sistem pemantauan nasional untuk SDGs. Sumber utama datanya akan ditentukan.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 17.18. yaitu pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pembangunan kapasitas untuk negara-negara berkembang, termasuk untuk LDCs dan SIDS, meningkat secara signifikan ketersediaan berkualitas tinggi, tepat waktu dan data yang dapat dipercaya

Di Indonesia data untuk indikator 99 belum tersedia

dipilih berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, usia, ras, suku, status migrasi, kecacatan, lokasi geografis dan karakteristik lain yang relevan dalam konteks nasional.

INDIKATOR 100. KESEJAHTERAAN EVALUATIF DAN *POSITIVE MOOD AFFECT*

Ukuran kesejahteraan evaluatif ini dapat menangkap penilaian reflektif kepuasan secara keseluruhan individu dengan kehidupannya. Salah satu yang paling banyak digunakan sebagai ukuran kesejahteraan evaluatif adalah *Self-Anchoring Striving Scale* atau yang dikenal dengan Tangga Cantril. Skala ini meminta responden untuk membayangkan sebuah tangga dengan langkah-langkah bernomor 0 (bawah) sampai 10 (atas), dengan 10 yang mewakili kemungkinan kehidupan yang paling baik dan 0 yang paling buruk.

Tangga Cantril dapat mengevaluasi kehidupan individu-individu yang dilengkapi dengan "*Positive Mood*", yang mengukur naik turunnya emosi sehari-hari. Meskipun laporan emosional jangka pendek membawa informasi jauh lebih sedikit tentang keadaan hidup daripada evaluasi kehidupan, hal ini sangat berguna untuk mengungkapkan sifat dan kemungkinan penyebab perubahan suasana hati pada jam demi jam atau hari demi hari.

Indikator 100 ini merupakan indikator yang berfungsi untuk mengukur kepuasan secara keseluruhan individu dengan kehidupan. Di Indonesia sudah ada indeks kebahagiaan yang juga dapat dijadikan ukuran kepuasan keseluruhan individu dengan kehidupannya. Indeks kebahagiaan Indonesia merupakan indeks komposit yang diukur secara tertimbang dan mencakup indikator kepuasan terhadap 10 domain kehidupan yang esensial. Sepuluh domain secara substansial dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan, meliputi kepuasan terhadap pekerjaan, pendapatan rumah tangga, kondisi rumah dan aset, pendidikan, kesehatan, keharmonisan keluarga, hubungan sosial, ketersediaan waktu luang, kondisi lingkungan dan kondisi keamanan. Indeks kebahagiaan merupakan hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) yang dilakukan oleh BPS yang dirancang untuk merepresentasikan tingkat kebahagiaan kepala rumah tangga atau pasangan kepala rumah tangga. Survei ini merupakan survei yang baru dilakukan oleh BPS pada tahun 2013 dengan level penyajian indeks ini hanya pada tingkat nasional. Walaupun begitu, indeks ini dapat disajikan menurut karakteristik ekonomi dan demografi.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 17.19, yaitu tahun 2030 membangun inisiatif yang ada untuk mengembangkan pengukuran kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi GDP, dan mendukung pembangunan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.

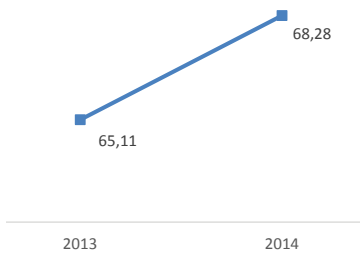
Data indikator 100 belum tersedia namun bisa didekati dengan data Indeks Kebahagiaan, yang diperoleh melalui Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK)

Pada tahun 2014, Indeks Kebahagiaan Indonesia meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 68,28 persen

INDIKATOR PROXY: INDEKS KEBAHAGIAAN

Gambar 16.5 merupakan Indeks Kebahagiaan. Indeks kebahagiaan merupakan rata-rata dari angka indeks yang dimiliki oleh setiap individu di Indonesia pada tahun. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka penduduk semakin tidak bahagia. Indeks Kebahagiaan Indonesia meningkat dari 65,11 persen pada tahun 2013 menjadi 68,28 persen pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan penduduk Indonesia semakin bahagia, tanpa melihat karakteristik ekonomi dan demografi.

Gambar 17.1 Indeks Kebahagiaan, 2013 dan 2014



Sumber: Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK), BPS

Di Indonesia data untuk indikator 17.1 belum tersedia

INDIKATOR 17.1. JUMLAH BANTUAN RESMI UNTUK PEMBANGUNAN

Indikator ini merupakan indikator baru yang dikembangkan oleh OECD untuk mengukur berbagai pembiayaan pembangunan selain ODA untuk mendukung agenda pembangunan yang lebih luas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target-target SDGs seperti;

Target 10.b Mendorong ODA dan arus keuangan, termasuk investasi asing langsung, untuk negara-negara di mana kebutuhan paling besar, di LDCs khususnya, negara-negara Afrika, SIDS, dan LLDCs, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka,

Target 17.3 Memobilisasi sumber daya keuangan tambahan untuk negara-negara berkembang dari berbagai sumber, dan

Target 17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan ditargetkan di negara-negara untuk mendukung rencana nasional untuk menerapkan semua tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui Utara-Selatan, Selatan-Selatan berkembang, dan kerja sama segitiga. Data untuk indikator ini belum tersedia di Indonesia.

INDIKATOR 17.2. BANTUAN PROGRAMMABLE COUNTRY (CPA)

Indikator OECD DAC ini digunakan untuk mengukur porsi bantuan program dari negara pemberi dan pengelolaan negara penerima. CPA dianggap jauh lebih dekat daripada ODA untuk menangkap arus nyata bantuan. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 10.b (mendorong ODA dan arus keuangan, termasuk investasi asing langsung, untuk negara-negara di mana kebutuhan paling besar, di LDCs

khususnya, negara-negara Afrika, SIDS, dan LLDCs, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka), target 17.3 (memobilisasi sumber daya keuangan tambahan untuk negara-negara berkembang dari berbagai sumber), dan target 17.9 (meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan ditargetkan di negara-negara untuk mendukung rencana nasional untuk menerapkan semua tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui Utara-Selatan, Selatan-Selatan berkembang, dan kerja sama segitiga). Data untuk indikator ini belum tersedia di Indonesia.

Di Indonesia data untuk indikator 17.2 belum tersedia

INDIKATOR 17.3. INDIKATOR PINJAMAN KEBERLANJUTAN (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini digunakan untuk melacak keberlanjutan utang suatu negara. Data untuk indikator ini nantinya dapat diperoleh melalui Kementerian Keuangan.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target-target SDGs seperti;

Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya dalam negeri, termasuk dukungan internasional untuk negara-negara berkembang dalam rangka meningkatkan kapasitas dalam negeri atas pajak dan pengumpulan pendapatan lainnya,

Target 17.4 Membantu negara-negara dalam mencapai keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan terkoordinasi yang bertujuan membina pembiayaan utang, penghapusan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai berkembang, dan mengatasi utang luar negara-negara miskin yang terjerat utang (HIPC) untuk mengurangi tekanan utang, dan

Target 17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan ditargetkan di negara-negara untuk mendukung rencana nasional untuk menerapkan semua tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui Utara-Selatan, Selatan-Selatan berkembang, dan kerja sama segitiga.

Di Indonesia data untuk indikator 17.3 belum tersedia

INDIKATOR 17.4. PENGELUARAN DOMESTIK BRUTO UNTUK R & D SEBAGAI BAGIAN DARI PDB

Indikator ini mencakup semua pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah nasional. Indikator ini belum tersedia di Indonesia tetapi dapat

dikembangkan oleh BPS. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target-target SDGs seperti;

- Target 9.5 Meningkatkan penelitian ilmiah, meningkatkan kemampuan teknologi dari sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030 mendorong inovasi dan meningkatkan jumlah pekerja R & D per satu juta orang dengan x% dan publik dan swasta R & D pengeluaran,
- Target 9.b Mendukung teknologi domestik pengembangan, penelitian dan inovasi di negara berkembang termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif untuk diversifikasi inter industri dan nilai tambah komoditas, dan
- Target 17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan ditargetkan di negara-negara untuk mendukung rencana nasional untuk menerapkan semua tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui Utara-Selatan, Selatan-Selatan berkembang, dan kerja sama segitiga.

Di Indonesia data untuk indikator 17.4 belum tersedia

INDIKATOR 17.5. INDIKATOR TEKNOLOGI SHARING DAN DIFUSI (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini akan mengukur difusi teknologi di seluruh negara. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target-target SDGs seperti;

- Target 2.5: Pada tahun 2020 mempertahankan keragaman genetik benih, tanaman budidaya, hewan peternakan dan hewan peliharaan serta spesies liar yang terkait dengannya, termasuk melalui pengelolaan yang baik dan memberagamkan benih dan bank tanaman di tingkat nasional, regional, dan internasional, dan menjamin akses dan pembagian yang adil dan merata dari keuntungan yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait yang disepakati secara internasional,
- Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat-obatan untuk penyakit menular dan tidak menular yang terutama memengaruhi negara-negara berkembang, menyediakan akses ke obat-obatan dan vaksin utama yang terjangkau, sesuai dengan

Di Indonesia data untuk indikator 17.5 belum tersedia

Deklarasi Doha yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan ketentuan penuh dalam perjanjian TRIPS mengenai fleksibilitas untuk melindungi kesehatan masyarakat dan, khususnya, menyediakan akses ke obat-obatan untuk semua,

- Target 9.5 Meningkatkan penelitian ilmiah, meningkatkan kemampuan teknologi dari sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030 mendorong inovasi dan meningkatkan jumlah pekerja R & D per satu juta orang sebesar x% dan pengeluaran publik dan swasta R & D,
- Target 9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara-negara berkembang melalui peningkatan dukungan keuangan, teknologi, dan teknis untuk negara-negara Afrika, LDCs, LLDCs, dan SIDS
- Target 12.a Dukungan negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi untuk bergerak menuju pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan,
- Target 17.6 Meningkatkan Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama segitiga secara regional maupun internasional dan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, serta meningkatkan berbagi pengetahuan atas dasar persetujuan bersama, termasuk melalui pengembangan koordinasi antar mekanisme yang ada, khususnya di tingkat PBB, dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global saat disepakati,
- Target 17.7 Mempromosikan pembangunan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan yang menguntungkan untuk negara-negara berkembang, termasuk persyaratan konsesi dan khusus, seperti yang telah disepakati bersama,
- Target 17.8 Sepenuhnya mengoperasionalkan mekanisme pembangunan kapasitas Teknologi Bank dan IMS (Sains, Teknologi dan Inovasi) untuk LDCs tahun 2017, dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan khususnya di ICT, dan
- Target 17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan yang efektif

dan peningkatan kapasitas yang ditargetkan di negara-negara berkembang dalam rangka mendukung rencana nasional untuk menerapkan semua tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui Utara-Selatan, Selatan-Selatan berkembang, dan kerja sama segitiga.

INDIKATOR 17.6. INDIKATOR PADA PENCIPTAAN / PENDAFTARAN KE BANK TEKNOLOGI DAN STI (SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI) PENINGKATAN KAPASITAS MEKANISME UNTUK LDCs 2017 (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini akan melihat perkembangan kemajuan operasionalisasi Teknologi Bank dan kapasitas mekanisme STI untuk LDGs. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target-target SDGs seperti;

- Target 9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara-negara berkembang melalui peningkatan dukungan keuangan, teknologi, dan teknis untuk negara-negara Afrika, LDCs, LLDCs, dan SIDS,
- Target 9.b Mendukung pengembangan, penelitian, dan inovasi teknologi domestik di negara-negara berkembang termasuk dengan memastikan kebijakan lingkungan yang kondusif untuk diantaranya diversifikasi industri dan nilai tambah komoditas,
- Target 12.a Dukungan negara-negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi untuk bergerak menuju pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan,
- Target 17.7 Mempromosikan pembangunan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan yang menguntungkan untuk negara-negara berkembang, termasuk persyaratan konsesi dan khusus, seperti yang telah disepakati bersama,
- Target 17.8 Sepenuhnya mengoperasionalkan mekanisme pembangunan kapasitas Teknologi Bank dan IMS (Sains, Teknologi dan Inovasi) untuk LDCs tahun 2017, dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan khususnya di ICT, dan
- Target 17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan yang efektif

Di Indonesia data untuk indikator 17.6 belum tersedia

dan peningkatan kapasitas yang ditargetkan di negara-negara berkembang dalam rangka mendukung rencana nasional untuk menerapkan semua tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui Utara-Selatan, Selatan-Selatan berkembang, dan kerja sama segitiga.

INDIKATOR 17.7. RATA-RATA TARIF YANG DIKENAKAN OLEH NEGARA-NEGARA MAJU PADA PRODUK PERTANIAN, TEKSTIL DAN PAKAIAN DARI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG (INDIKATOR MDG)

Indikator MDG ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh negara-negara maju untuk mengurangi atau menghilangkan tarif (bea masuk yang menjadi hambatan keuangan untuk impor) dalam tiga sektor (pertanian, tekstil dan pakaian) yang sangat penting bagi negara berkembang dan negara miskin. Menghapus tarif negara maju, khususnya di sektor ini yang mencakup sebagian besar ekspor negara berkembang, bisa membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target-target SDGs seperti;

- Target 2.b Mengoreksi dan mencegah pembatasan perdagangan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia termasuk oleh penghapusan paralel segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat Ronde Pembangunan Doha,
- Target 8.a Meningkatkan bantuan untuk dukungan perdagangan bagi negara-negara berkembang, khususnya LDCs, termasuk melalui Enhanced Integrated Framework untuk LDCs,
- Target 10.a Melaksanakan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang, di negara-negara kurang berkembang khususnya sesuai dengan perjanjian WTO,
- Target 17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan yang efektif dan peningkatan kapasitas yang ditargetkan di negara-negara berkembang dalam rangka mendukung rencana nasional untuk menerapkan semua tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui Utara-Selatan, Selatan-Selatan berkembang, dan kerja sama segitiga,

Di Indonesia data untuk indikator 17.7 belum tersedia

- Target 17.10 Mempromosikan sistem perdagangan multilateral di bawah WTO yang bersifat universal, berdasarkan aturan-aturan, terbuka, non-diskriminatif dan adil termasuk melalui kesimpulan dari negosiasi dalam *Doha Development Agenda*,
- Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor negara-negara berkembang, khususnya yang bertujuan untuk menggandakan pangsa LDC terhadap ekspor global pada tahun 2020, dan
- Target 17.12 Menyadari pelaksanaan kebebasan pajak yang tepat waktu, akses pasar kuota bebas yang awet bagi semua negara-negara maju yang setidaknya konsisten dengan keputusan WTO, termasuk dengan memastikan bahwa aturan-aturan istimewa dari pemberlakuan asal untuk diimpor dari LDCs yang transparan dan sederhana, dan berkontribusi untuk memfasilitasi akses pasar.

Indikator ini tidak menangkap hambatan perdagangan non tarif seperti standar teknis atau peraturan lainnya dan dapat didisagregasi menurut sektor dan kategori produk.

INDIKATOR 17.8. NILAI LDC (LEAST DEVELOPED COUNTRIES) EKSPOR SEBAGAI PERSENTASE DARI EKSPOR GLOBAL

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target-target SDGs seperti;

- Target 2.b Mengoreksi dan mencegah pembatasan perdagangan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia termasuk oleh penghapusan paralel segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat Ronde Pembangunan Doha,
- Target 8.a Meningkatkan bantuan untuk dukungan perdagangan bagi negara-negara berkembang, khususnya LDCs, termasuk melalui *Enhanced Integrated Framework* untuk LDCs,
- Target 10.a Melaksanakan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang, di negara-negara kurang berkembang khususnya sesuai dengan perjanjian WTO,
- Target 17.5 Mengadopsi dan menerapkan pemerintahan promosi investasi untuk LDCs,
- Target 17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk

Di Indonesia data untuk indikator 17.8 belum tersedia

melaksanakan pembangunan yang efektif dan peningkatan kapasitas yang ditargetkan di negara-negara berkembang dalam rangka mendukung rencana nasional untuk menerapkan semua tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui Utara-Selatan, Selatan-Selatan berkembang, dan kerja sama segitiga,

- Target 17.10 Mempromosikan sistem perdagangan multilateral di bawah WTO yang bersifat universal, berdasarkan aturan-aturan, terbuka, non-diskriminatif dan adil termasuk melalui kesimpulan dari negosiasi dalam *Doha Development Agenda*,
- Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor negara-negara berkembang, khususnya yang bertujuan untuk menggandakan pangsa LDC terhadap ekspor global pada tahun 2020, dan
- Target 17.12 Menyadari pelaksanaan kebebasan pajak yang tepat waktu, akses pasar kuota bebas yang awet bagi semua negara-negara maju yang setidaknya konsisten dengan keputusan WTO, termasuk dengan memastikan bahwa aturan-aturan istimewa dari pemberlakuan asal untuk diimpor dari LDCs yang transparan dan sederhana, dan berkontribusi untuk memfasilitasi akses pasar.

INDIKATOR 17.9. INDIKATOR REZIM PROMOSI INVESTASI UNTUK LDCs (INDIKATOR PERLU DIKEMBANGKAN)

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target-target SDGs seperti;

- Target 17.5: Mengadopsi dan menerapkan rezim promosi investasi untuk LDCs,
- Target 17.9: Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan ditargetkan di negara-negara untuk mendukung rencana nasional untuk menerapkan semua tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui Utara-Selatan, Selatan-Selatan berkembang, dan kerja sama segitiga, dan
- Target 17.10 Mempromosikan universal, aturan berbasis, terbuka, non-diskriminatif dan adil sistem perdagangan multilateral di bawah WTO

Di Indonesia data untuk indikator 17.9 belum tersedia

termasuk melalui kesimpulan dari negosiasi *Doha Development Agenda*.

INDIKATOR 17.10. PERSEN BANTUAN PEMBANGUNAN RESMI (ODA), HIBAH SWASTA NETTO, DAN PEMBIAYAAN IKLIM RESMI YANG DISALURKAN MELALUI SKALA PRIORITAS YANG DIKUMPULKAN DENGAN MEKANISME PEMBIAYAAN MULTILATERAL

Indikator ini berguna untuk mengetahui pangsa bantuan dan pendanaan iklim resmi melalui mekanisme pooling multilateral berikut, diantaranya yaitu: *Global Alliance for Vaccine Initiative (GAVI)*, *Global Environment Facility (GEF)*, *the Global Fund to Fight HIV/AIDS, TB, and Malaria*, *Green Climate Fund*, *International Development Association (IDA)*, *International Fund for Agricultural Development (IFAD)*, UNFPA, UNICEF, [mekanisme lain yang akan ditambahkan, misalnya untuk pendidikan, pertanian, transfer teknologi]. Mekanisme pooling ini menawarkan biaya transaksi yang lebih rendah untuk penerima dan pendonor. Mereka juga dapat memastikan skalabilitas yang lebih besar dari aliran bantuan. Indikator ini perlu disediakan untuk setiap negara berpenghasilan tinggi.

Di Indonesia data untuk indikator 17.10 belum tersedia

Komite Bantuan Pembangunan OECD sedang merevisi dan memperbaiki indikator pada ODA. Hal ini dapat membantu meningkatkan ukuran ini. Indikator ini berguna untuk negara yang memiliki pendapatan tinggi. Indikator ini dapat didisagregasi dengan mekanisme multilateral.

Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur target 17.5 (mengadopsi dan menerapkan rezim promosi investasi untuk LDCs), target 17.9 (meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan ditargetkan di negara-negara untuk mendukung rencana nasional untuk menerapkan semua tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui Utara-Selatan, Selatan-Selatan berkembang, dan kerja sama segitiga), dan target 17.10 (mempromosikan universal, aturan berbasis, terbuka, non-diskriminatif dan adil sistem perdagangan multilateral di bawah WTO termasuk melalui kesimpulan dari negosiasi *Doha Development Agenda*).

LAMPIRAN

No.	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia	Proxy	Sumber	Tahun Series	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
Tujuan 1 Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada						
1	Persentase penduduk dengan daya beli dibawah \$1,25 (PPP) per hari (Indikator MDG)	Persentase penduduk dengan daya beli dibawah \$1,25 (PPP) per hari	-	Worldbank	2007-2011	Data konversi \$1.25 ke rupiah ditentukan oleh worldbank
2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dibedakan menurut perkotaan dan pedesaan (Indikator MDG yang dimodifikasi)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, dibedakan menurut perkotaan dan pedesaan	-	BPS (Susenas)	2010-2015	Data diperoleh dari website
3	Indeks Kemiskinan Multidimensial	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	Belum tersedia
4	Persentase penduduk yang tercapuk dalam program perlindungan sosial	(Indikator belum tersedia)	Persentase rumah tangga yang tercapuk dalam program perlindungan sosial	BPS (Susenas)	2010-2013	Data diolah dari susenas KOR
5	Persentase perempuan dan laki-laki di daerah pedesaan yang memiliki hak atas lahan, diukur dengan (i) persentase yang memiliki sertifikat tanah, dan (ii) persentase yang tidak takut akan penyitaan terhadap lahannya	(Indikator belum tersedia)	Jumlah bidang tanah yang bersertifikat di pedesaan, Persentase terhadap target sertifikasi tanah di pedesaan	BPN	-	Data belum bisa diakses melalui web
6	Kerugian bencana alam akibat iklim maupun bukan iklim menurut perkotaan/pedesaan (dalam US\$ dan korban jiwa)	Jumlah korban bencana alam yang meninggal dunia, Kerugian akibat bencana alam dalam rupiah dan \$US	Jumlah korban meninggal, luka-luka, hilang menurut kejadian bencana, dan jumlah kerusakan rumah berat, sedang, dan ringan menurut kejadian bencana.	BNPB	2010-2015	Data kerugian tidak tercatat dengan baik sehingga didekati dengan kerusakan rumah
7	Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total	-	BPS (SDKI)	2010-2014	Indikator ini dianggap mempengaruhi insiden kemiskinan ekstrim dan pertumbuhan ekonomi per kapita
1.1	Indeks kedalaman kemiskinan (Indikator MDG)	Indeks kedalaman kemiskinan	-	BPS (Susenas)	2010-2014	-
1.2	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap layanan perbankan (termasuk mobile banking)	(Indikator belum tersedia)	Persentase rumahtangga yang menerima kredit usaha, dan Persentase penduduk terhadap akses jasa keuangan formal/perbankan	BPS (Susenas) dan BI	2010-2013	Data Persentase penduduk terhadap akses jasa keuangan formal/perbankan belum ditemukan

No.	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia	Proxy	Sumber	Tahun Series	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1.3	Indikator akses sama ke warisan	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	Indikator tambahan baru, beberapa negara memiliki hukum yang memberikan akses yang berbeda pada warisan berdasarkan gender dan status sosial.
1.4	[Indeks Pengurangan Resiko Bencana]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	Indonesia belum memiliki Indeks PRB
Tujuan 2. Mengakhiri Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Peningkatan Gizi, dan Menganangkan Pertanian Berkelanjutan						
8	Persentase penduduk dengan konsumsi energi di bawah standar minimum (Indikator MDG yang dimodifikasi)	Persentase penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (2150 kkal per kapita per hari)	-	BPS (Susenas)	2011-2014	Penentuan 2150 kkal berdasarkan WNP 2012
9	Persentase wanita produktif umur 15-49 yang mengalami anemia	(Indikator belum tersedia)	Proporsi anemia pada perempuan tidak hamil umur ≥15 tahun	Risikesdas	2007, 2013 (3 tahunan)	Pada laporan risikesdas 2010 tidak terdapat data mengenai anemia, yang ada data konsumsi Fe pada ibu hamil
10	Prevalensi balita (usia < 5 Tahun) dengan keadaan stunting (tinggi badan kurang)	Prevalensi balita dengan keadaan stunting (tinggi badan kurang)	-	Risikesdas	2007, 2010, 2013 (3 tahunan)	-
11	Persentase bayi dibawah 6 bulan dengan ASI eksklusif	Persentase bayi dibawah 6 bulan dengan ASI eksklusif	-	BPS (Susenas)	2010-2014	Indikator baru di Tujuan 2
12	Persentase wanita umur 15-49 tahun yang mengkonsumsi paling tidak 5 dari 10 kelompok makanan	(Indikator belum tersedia)	-	BPS (Susenas)	2010-2013	Pada modul konsumsi blok 41 unit statistiknya ruta. Modul konsumsi susenas tidak menyediakan data individu.
13	Kesenjangan hasil panen pertanian (persentase hasil panen sebenarnya dibanding hasil panen potensial)	Persentase produksi yang dicapai terhadap target produksi pertanian tanaman pangan	-	BPS (Web) dan Kementan	2010-2014	Data produksi dari BPS sedangkan data target produksi dari kementan (renstra)
14	Jumlah petugas penyuluh pertanian per 1000 petani dan persentase petani yang mendapatkan penyuluhan.	Jumlah penyuluh pertanian per 1000 petani, persentase petani yang mendapatkan penyuluhan	-	Kementan dan BPS (Survei Ubinan)	2013-2014	Data persentase petani yang mendapat penyuluhan belum didapatkan.
15	Efisiensi penggunaan pupuk nitrogen (%)	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
16	[Produktivitas air tanaman (hasil panen (ton) per satuan air irigasi)]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
2.1	Persentase penduduk yang kekurangan zat : besi, zinc, yodium, vitamin A, asam folat, vitamin B12, [dan vitamin D]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-

No.	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia	Proxy	Sumber	Tahun Series	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
2.2	Proporsi bayi 6-23 bulan usia yang menerima minimum acceptable diet	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
2.3	Persentase anak dengan berat lahir rendah.	Persentase anak dengan berat lahir rendah.	-	SDKI	2012	Data tersedia 1 tahun. SDKI tahun sebelumnya tidak ada pembahasan tentang kesehatan anak.
2.4	Tingkat pertumbuhan hasil panen sereal(persentase per tahun)	Tingkat pertumbuhan hasil panen sereal(padi dan jagung)	-	BPS	2010-2014	Data didapatkan dari web
2.5	Kesenjangan hasil ternak (persentase hasil ternak sebenarnya dibanding hasil produksi ternak yang dapat dicapai)	Persentase hasil ternak yang dicapai terhadap target produksi ternak.	-	Kementan dan BPS	2010-2014	Data didapatkan dari web
2.6	[Efisiensi penggunaan fosfor dalam sistem pangan] - untuk dikembangkan	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
2.7	Proporsi kalori dari bahan pangan non-pokok	Kontribusi jumlah kalori dari bahan pangan non-pokok	-	BPS (Susenas)	2010-2014	Data belum didapatkan, perlu data modul konsumsi dan sulit dilakukan konversi satuan menjadi kalori
2.8	Persentase total nergy dari protein untuk orang dewasa	(Indikator belum tersedia)	Persentase ketersediaan total kalori protein terhadap total kalori per kapita	BPS (SI)	2010-2014	-
2.9	[Akses terhadap fasilitas pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
2.10	[Indikator keragaman genetik dalam pertanian] - untuk dikembangkan	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
2.11	[Indikator kesenjangan akses irigasi] - untuk dikembangkan	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
2.12	[Petani dengan asuransi tanaman yang tepat secara nasional (%)] - untuk dikembangkan	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
2.13	Pengeluaran pemerintah dan swasta di bidang penelitian dan pembangunan untuk pertanian dan pembangunan perdesaan (%GNI)	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
2.14	[Indikator volatilitas harga pangan] - untuk dikembangkan	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk di Segala Usia						
17	Rasio (Indikator MDG) dan Angka Kematian Ibu (Indikator MDG)	Rasio dan Angka Kematian Ibu	-	BPS (SDKI)	1994, 1997, 2002-2003, 2007, 2012	Data 5 tahunan

No.	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia	Proxy	Sumber	Tahun Series	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
18	Angka kematian neonatal, bayi dan balita (Indikator MDG yang dimodifikasi)	Angka kematian neonatal, bayi dan balita	-	BPS (SDKI)	1991, 1994, 1997, 2002-2003, 2007, 2012	Data 5 tahunan
19	Persentase anak yang menerima imunisasi lengkap (sesuai rekomendasi jadwal imunisasi nasional)	Persentase anak yang menerima imunisasi lengkap	-	BPS (Susenas)	2010-2014	-
20	Insiden, angka pengobatan dan angka kematian HIV (Modifikasi indikator MDG)	Prevalensi HIV/AIDS, jumlah kematian akibat HIV/AIDS	-	Bank Dunia, MDGs (UN)	2010-2013	-
21	Insiden, prevalensi dan angka kematian terkait TB (Indikator MDG)	Insiden, prevalensi, dan angka kematian akibat TB	-	Global Tuberculosis Report	2010-2013	-
22	Insiden dan angka kematian terkait malaria (Indikator MDG)	Insiden Malaria	-	WHO	2000-2013	Data terbaru belum tersedia dari WHO
23	Probabilitas kematian antara usia tepat 30 dan 70 tahun dari setiap penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis, [atau bunuh diri]	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
24	Persentase populasi kelebihan berat badan dan obesitas, termasuk balita.	Prevalensi kegemukan pada balita; prevalensi gemuk dan obesitas	-	Kemenkes (Riskesmas)	2007, 2010, 2013	-
25	Kematian di lalu lintas per 100.000 penduduk	rasio kematian lalu lintas per 100.000 penduduk	-	BPS dan Korlantas POLRI dan POLDA	2010-2014	-
26	[Konsultasi dengan provider kesehatan berlisensi di fasilitas kesehatan atau dalam masyarakat per orang, per tahun]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
27	[Persentase penduduk tanpa perlindungan keuangan yang efektif untuk perawatan kesehatan]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
28	Proporsi orang dengan gangguan mental parah (psikosis, gangguan afektif bipolar, atau depresi sedang-berat) yang menggunakan jasa	proporsi cakupan pengobatan rumah tangga yang memiliki ART dengan gangguan jiwa berat	-	Kemenkes (Riskesmas)	2013	-
29	Tingkat prevalensi kotrasepsi (Indikator MDG)	Tingkat prevalensi kotrasepsi	-	BPS (Susenas)	2010-2013	-
30	Penggunaan produk tembakau saat ini (tingkat standardisasi-umur)	Proporsi penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok dan mengunyah tembakau	-	Kemenkes (Riskesmas)	2007, 2010, 2013	-
3.1	Persentase kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih (Indikator MDG)	Persentase kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih	-	BPS (SDKI)	2000-2012 (SDKI 5 th-an)	-
3.2	Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan setidaknya empat kali kunjungan) (Indikator MDG)	Cakupan pelayanan Antenatal (setidaknya 1 dan 4 kali kunjungan)	-	BPS (SDKI)	2002-2003, 2007, 2012	5 tahunan

No.	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia	Proxy	Sumber	Tahun Series	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
3.3	Cakupan pelayanan Pasca Persalinan (satu kunjungan) (Indikator MDG)	Persentase Wanita (15-49 tahun) yang Menerima Perawatan Nifas dari Tenaga Medis Pasca Melahirkan	-	BPS (SDKI)	-	Data berdasarkan kunjungan tidak ditemukan, yang ditemukan data berdasarkan hari setelah melahirkan
3.4	Cakupan suplemen asam folat-besi untuk ibu hamil (%)	Cakupan Ibu Hamil yang Mendapatkan 90 TTD (Tablet Tambah Darah) di Indonesia (dalam persen)	-	Kemenkes (Profil Kesehatan Indonesia)	2010-2014	-
3.5	Insiden diare pada balita	Insiden diare pada balita	-	Kemenkes (Risikesdas)	2013	-
3.6	Persentase anak berumur 1 tahun yang diimunisasi campak (Indikator MDG)	Persentase anak berumur 1 tahun yang diimunisasi campak	-	BPS (Susenas)	2010-2013	-
3.7	Persentase HIV + ibu hamil yang menerima PMTCT	Persentase Ibu Hamil yang Positif HIV dan Menerima PPIA	-	Kemenkes (Pemodelan Matematik Epidemi HIV)	2012	-
3.8	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir (ndikator MDG)	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	-	Kemenkes (STBP)	2010-2014	-
3.9	Persentase kasus tuberkulosis yang terdeteksi dan sembuh di bawah pengobatan singkat dari hasil pengamatan langsung (DOTS) (Indikator MDG)	Persentase kasus tuberkulosis yang terdeteksi dan sembuh di bawah pengobatan singkat dari hasil pengamatan langsung (DOTS)	-	MDG (UN)	2008-2012	Data ditemukan dari website UNSTAT
3.10	Persentase balita dengan demam yang diobati dengan obat anti-malaria yang tepat (Indikator MDG)	Persentase balita dengan demam yang diobati dengan obat anti-malaria yang tepat	-	SDKI	2002-2003, 2007, 2012	
3.11	Persentase penduduk di daerah endemis malaria yang tidur di bawah kelambu insektisida (Indikator MDG yang dimodifikasi).	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
3.12	Persentase kasus malaria yang menerima terapi Icoholrial lini pertama sesuai dengan kebijakan nasional yang telah dikonfirmasi	Proporsi penderita malaria yang melakukan pengobatan efektif dengan ACT	-	Kemenkes (Risikesdas)	2010,2013 (Data 3 tahunan)	-
3.13	Persentase kasus dugaan malaria yang menerima tes parasitologi	Persentase kasus dugaan malaria yang menerima tes parasitologi	-	Kemenkes (Profil Kesehatan Indonesia)	2010-2014	-
3.14	Persentase wanita hamil yang menerima malaria IPT (In Pregnant Treatment) di daerah endemik	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
3.15	Angka Kesembuhan Penyakit Tropis Terabaikan (NTD)	-	Jumlah kasus baru kusta (Tibe MB dan PB) dan Filariasis	Kemenkes (Profil Kesehatan Indonesia)	2010-2014	-
3.16	Tingkat kejadian dan kematian terkait dengan hepatitis.	Prevalensi hepatitis menurut diagnosis atau gejala di Indonesia)	-	Kemenkes (Risikesdas)	2007-2013 (data 3 tahunan)	-

No.	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia	Proxy	Sumber	Tahun Series	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
3.17	Persentase wanita dengan screening kanker serviks	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
3.18	Persentase penderita hipertensi yang didiagnosa dan menerima pengobatan	Prevalensi penyakit hipertensi (≥ 18 Tahun)	-	Kemenkes (Risksdas)	2007-2013 (data 3 tahunan)	-
3.19	Penggunaan Icohol yang berbahaya	Prevalensi peminum Icohol 12 bulan dan 1 bulan terakhir	-	Kemenkes (Risksdas)	-	Data belum didapatkan
3.20	Angka Harapan Hidup Sehat saat Lahir	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
3.21	Masa Tunggu operasi elektif	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
3.22	Prevalensi ketidakaktifan fisik	Prevalensi kurang aktivitas fisik penduduk 10 tahun ke atas	-	Kemenkes (Risksdas)	2007, 2013 (data 3 tahunan)	-
3.23	Fraksi kalori dari lemak jenuh dan gula tambahan (%)	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
3.24	Rata-rata populasi berusia standar dengan konsumsi garam (natrium klorida) per hari dalam gram pada orang berusia 18 tahun keatas.	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
3.25	Prevalensi orang (usia 18 + tahun) yang mengkonsumsi kurang dari lima porsi (400 gram) buah dan sayur per hari	(Indikator belum tersedia)	Proporsi konsumsi buah dan sayur penduduk umur ≥ 10 th menurut jumlah porsi dalam seminggu	Kemenkes (Risksdas)	2007, 2013	-
3.26	Persen perubahan konsumsi daging merah per kapita tahun dasar 2015	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
3.27	Persentase usia terstandar (terhadap distribusi usia populasi dunia) penderita diabetes (sebaiknya berdasarkan HbA1c), hipertensi, penyakit kardiovaskular, dan penyakit pernapasan kronis	Prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) berdasarkan jenis	-	Kemenkes (Risksdas)	-	Data belum didapatkan
3.28	[Kematian disebabkan polusi udara dalam ruangan]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
3.29	Persentase fasilitas kesehatan sesuai persyaratan kecukupan pelayanan tertentu.	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
3.30	Persentase penduduk dengan akses ke obat-obatan penting dengan harga terjangkau dan akses komoditas secara berkelanjutan	(Indikator belum tersedia)	Persentase Puskesmas menurut ketersediaan obat umum, obat sakit gigi, obat/alat KB, obat khusus Puskesmas PONED, dan alat KIT	Kemenkes (Risfaskes)	2011	-
3.31	Persentase fasilitas perawatan kesehatan yang baru dibangun sesuai dengan kode dan standar bangunan	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-

No.	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia	Proxy	Sumber	Tahun Series	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
3.32	Pengeluaran pemerintah dan swasta untuk penelitian dan pengembangan pada kesehatan (% thd PNB)	(Indikator belum tersedia)	Pengeluaran pemerintah dan swasta untuk kesehatan terhadap PDB	Bank Dunia	2010-2013	-
3.33	Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk (orthopaedi, bidan perawat, perawat, pekerja kesehatan masyarakat, pengasuh EmOC)	Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk	-	BPS (Podes)	2005, 2008, 2011	3 Tahunan
3.34	Persentase perempuan dan laki-laki berusia 15-49 yang melaporkan sikap diskriminatif terhadap orang-orang yang hidup dengan HIV	(Indikator belum tersedia)	Persentase sikap menerima terhadap orang yang tinggal dengan penderita HIV/AIDS	BPS (SDKI)	2007, 2012	-
3.35	Angka lahir mati/kematian janin	(Indikator belum tersedia)	Angka Kematian Perinatal	BPS (SDKI)	2002-2012	-
Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Adil dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua						
31	Persentase anak (36-59 bulan) yang menerima setidaknya satu tahun dari program pendidikan pra-dasar yang berkualitas	(Indikator belum tersedia)	Persentase anak (3-5 th) yang mengikuti pendidikan prasekolah	BPS (Susenas)	2011-2014	-
32	Indeks Perkembangan Anak Usia Dini (ECDI)	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
33	Angka kelulusan Pendidikan Dasar untuk anak perempuan dan anak laki-laki	Angka Kelulusan SD dan SMP	Jumlah lulusan SD dan SMP menurut status sekolah	Kemendiknas	2009/2010 - 2013/2013	-
34	[Persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang menguasai berbagai keterampilan dasar, termasuk kemampuan dalam membaca dan keterampilan mendasar dalam matematika pada akhir siklus sekolah dasar (berdasarkan tolak ukur nasional yang dibentuk secara kredibel)]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
35	Angka kelulusan sekolah menengah untuk anak perempuan dan anak laki-laki	Angka Kelulusan SMA dan SMK	Jumlah Kelulusan SMA dan SMK menurut status sekolah	Kemendiknas	2009/2010 - 2013/2014	-
36	[Persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang mencapai kecakapan di berbagai hasil belajar, termasuk dalam matematika pada akhir siklus sekolah menengah]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
37	Angka partisipasi perguruan tinggi bagi perempuan dan laki-laki	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi	-	BPS (Susenas)	2011-2014	-
4.1	[Persentase anak perempuan dan anak laki-laki yang memperoleh keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk kewarganegaraan global dan pembangunan berkelanjutan (tolak ukur nasional perlu dikembangkan) pada akhir sekolah menengah]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-

No.	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia	Proxy	Sumber	Tahun Series	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
4.2	Persentase balita yang memperoleh pengasuhan yang esponsive dan stimulatif di lingkungan yang aman	(Indikator belum tersedia)	Persentase balita terlantar	BPS, MSBP	2006-2012	-
4.3	Jumlah anak yang putus sekolah	Jumlah anak yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan	-	Kemendiknas	2010-2014	-
4.4	[Persentase remaja (15-19 tahun) yang memiliki akses program transisi sekolah ke bekerja]	Persentase penduduk (15-19 tahun) yang pernah mendapatkan pelatihan kerja (dan memperoleh sertifikat)	-	BPS (Sakernas)	2010-2015	-
4.5	Tingkat melek huruf usia 15-24, perempuan dan laki-laki (MDG Indikator)	Persentase penduduk (15-24 tahun) yang melek huruf menurut jenis kelamin	-	BPS (Susenas)	2010-2014	-
4.6	[Proporsi orang dewasa muda (18-24 tahun) yang memiliki akses program pembelajaran]	(Indikator belum tersedia)	Persentase penduduk (18-24 tahun) yang pernah/sedang mengikuti kursus	BPS (Susenas)	2006-2012	-
4.7	[Indikator saham fasilitas pendidikan yang menyediakan lingkungan belajar yang efektif] - untuk dikembangkan	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
4.8	Rasio komputer dengan siswa pada sekolah dasar dan menengah	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
4.9	[Indikator beasiswa untuk siswa dari negara-negara berkembang] - untuk dikembangkan	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
4.10	[Indikator untuk tenaga guru/ pengajar yang berkualitas]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
4.11	Adanya kerangka hukum yang menjamin hak atas pendidikan bagi semua anak untuk anak usia dini dan pendidikan dasar, dan yang menjamin usia minimal masuk ke lapangan kerja tidak di bawah tahun pendidikan dasar	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan						
38	Prevalensi wanita 15-49 tahun yang mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intimnya dalam 12 bulan terakhir	Prevalensi wanita 15-49 tahun yang mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intimnya dalam 12 bulan terakhir (ad-hoc)	Persentase wanita 15-49 tahun yang menjadi korban kejahatan (rutin)	BPS (Susenas)	2010-2014	Data tersedia untuk indikator proxy
39	Persentase kasus kekerasan seksual dan berbasis gender terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan, diselidiki dan dijatuhi hukuman	(Indikator belum tersedia)	Persentase wanita yang mengalami tindak kejahatan dan dilaporkan ke polisi	BPS (Susenas)	2010-2014	-
40	Persentase wanita berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau menikah sebelum berusia 18 tahun	Persentase wanita umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus kawin sebelum berusia 18 tahun	-	BPS (Susenas)	2010-2014	-

No.	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia	Proxy	Sumber	Tahun Series	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
41	Persentase anak perempuan dan wanita berusia 15-49 tahun yang telah menjalani Female genital mutilation/cutting (FGM/C)	(Indikator belum tersedia)	-	UNICEF	-	Data series belum ditemukan
42	Jumlah rata-rata jam yang dihabiskan untuk pekerjaan dibayar dan tidak dibayar (beban kerja total), berdasarkan jenis kelamin	Rata-rata jam kerja pekerja dibayar dan tidak dibayar	-	BPS (Sakernas)	2010-2015	-
43	Persentase kursi yang diduduki perempuan dan minoritas di parlemen nasional dan/atau kantor daerah (Indikator MDG yang dimodifikasi)	(Indikator belum tersedia)	Persentase perempuan yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	KPU dan BPS	1992-2014	Data indikator proxy ditemukan di publikasi Statistik Indonesia 2014
44	Tingkat kebutuhan pelayanan KB yang terpenuhi (Indikator MDG yang dimodifikasi)	Tingkat kebutuhan pelayanan KB yang terpenuhi	-	BPS (SDKI)	1991, 1994, 1997, 2002, 2007, 2012 (5 Tahunan)	-
5.1	Kesenjangan gender dalam upah, menurut rofes kegiatan ekonomi	Rasio upah yang diterima pekerja perempuan terhadap laki-laki	-	BPS (Sakernas)	2010-2015	-
5.2	Proporsi perempuan di perusahaan multinasional	(Indikator belum tersedia)	Persentase perempuan sebagai tenaga manager, rofesional, kepemimpinan dan teknisi	BPS (Sakernas)	2010-2014	-
5.3	Persentase perempuan tanpa pendapatan sendiri	Persentase perempuan yang berstatus sebagai kepala rumah tangga ataupun istri yang tidak bekerja dan menjadi pekerja keluarga/ tidak dibayar	-	BPS (Sakernas)	2010-2014	-
5.4	Adolescent Birth Rate (Indikator MDG)	(Indikator belum tersedia)	Usia rata-rata ibu saat kelahiran anak pertama	BPS (SDKI)	1991, 1994, 1997, 2002, 2007, 2012 (5 Tahunan)	-
5.5	Persentase anak muda yang menerima pendidikan seksualitas yang komprehensif	(Indikator belum tersedia)	Persentase penduduk usia 15-24 tahun dengan pengetahuan komprehensif mengenai HIV/AIDS	BPS (SDKI)	2007-2012	-
Tujuan 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua						
45	Persentase penduduk yang menggunakan air minum dasar, menurut perkotaan/ pedesaan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	-	BPS Susenas	2009-2013	-
46	Persentase penduduk yang menggunakan sanitasi dasar, menurut perkotaan/ pedesaan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	-	BPS Susenas	2009-2014	-

No.	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia	Proxy	Sumber	Tahun Series	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
47	Persentase pengolahan air limbah sesuai standar nasional, menurut sumber rumah tangga dan industri	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
48	[Indikator pengelolaan sumber daya air] - untuk dikembangkan	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
49	Persentase total sumber air yang digunakan (Indikator MDG)	Persentase total sumber air yang digunakan	-	FAO (AQUASTAT)	1990 dan 2000	-
6.1	Persentase penduduk yang membuang kotorannya di alam terbuka	Persentase rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir tinja di alam terbuka	-	BPS (Susenas)	2010-2014	-
6.2	Persentase penduduk dengan fasilitas cuci tangan di rumah	Persentase penduduk dengan fasilitas cuci tangan dasar di rumah	-	BPS (SDKI)	2012	Data series belum ditemukan
6.3	Proporsi penduduk yang terhubung ke saluran pembuangan kolektif atau ke penyimpanan tempat semua air limbah domestik	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
6.4	Persentase siswa yang mendaftar masuk sekolah dasar dan menengah yang menyediakan air minum, sanitasi yang memadai, dan layanan kesehatan yang memadai.	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
6.5	Persentase penerima manfaat rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan klinik yang menyediakan air minum, sanitasi yang memadai, dan layanan kesehatan yang memadai.	Persentase rumah sakit umum/ pemerintah dan puskesmas yang memiliki ketersediaan air bersih dan memiliki pengolahan limbah (SPAL)	-	Kemendes (Risfaskes)	2011	Data series belum ditemukan
6.6	Proporsi arus dari air limbah kota yang ditangani secara langsung dan aman digunakan kembali	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
6.7	[Laporan sungai internasional mencurahkan otoritas pengelolaan sungai-gudang lintas batas] - untuk dikembangkan	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
6.8	[Indikator kerjasama internasional dan pembangunan kapasitas dalam air dan kegiatan sanitasi yang berhubungan] - untuk dikembangkan	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
6.9	[Indikator partisipasi masyarakat lokal untuk meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi] - untuk dikembangkan	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
Tujuan 7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan						
50	Proporsi penduduk dengan akses terhadap solusi memasak modern, menurut perkotaan/ pedesaan	Persentase rumah tangga yang menggunakan bahan bakar (listrik, gas/ elpiji, gas kota, dan minyak tanah) untuk memasak	-	BPS (Susenas)	2006-2014	-

No.	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia	Proxy	Sumber	Tahun Series	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
51	Proporsi penduduk yang memiliki akses terhadap listrik yang dapat diandalkan, menurut perkotaan/pedesaan	Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik PLN dan listrik non PLN	-	BPS (Susenas)	2009-2014	-
52	Insentif implisit untuk energi rendah karbon pada sektor listrik (diukur sebagai US\$/MWh atau US\$ per ton CO2 yang harus dihindari)	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
53	Tingkat perbaikan intensitas energi primer	Tingkat intensitas energi primer	Intensitas Konsumsi Energi Akhir per Kapita	Kemen ESDM, BPS	2009-2013	Data indikator proxy ditemukan pada handbook of energy and economic statistics of Indonesia
7.1	Energi primer menurut jenisnya	Penyediaan Energi Primer menurut jenis dan konsumsi energi final menurut jenis	-	Kemen ESDM	2003-2013	-
7.2	Subsidi bahan bakar fosil (\$ atau %GNI)	Subsidi bahan bakar fosil (\$ atau %GNI)	Subsidi BBM dan LPG	Kemen ESDM, BPS	2011-2014	-
7.3	Proporsi nergy dari nergy terbarukan (renewables)	(Indikator belum tersedia)	Proporsi supply energi terbarukan terhadap total supply energi primer	Kemen ESDM	2009-2013	-

Tujuan 8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan

54	Pendapatan Nasional Bruto per kapita (PPP, metode US\$ Atlas saat ini)	Pendapatan Nasional Bruto per kapita (PPP, metode US\$ Atlas saat ini)	-	Bank Dunia	2010-2014	-
55	Laporan dan implementasi Sistem Neraca Ekonomi dan Lingkungan (SEEA)	Laporan dan implementasi Sistem Neraca Ekonomi dan Lingkungan (SEEA)	-	BPS	-	Data belum ditemukan
56	Tingkat pekerja muda, baik ector formal maupun informal	Persentase angkatan kerja usia 15-24 tahun yang bekerja, menurut ector formal dan informal	-	BPS (Sakernas)	2011-2015	-
57	Ratifikasi dan implementasi standar kerja fundamental ILO dan kepatuhan dalam hukum dan praktik	Ratifikasi dan implementasi standar kerja fundamental ILO dan kepatuhan dalam hukum dan praktik	-	Kemenakertrans / Kemenlu	-	Data belum ditemukan
8.1	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (Indikator MDG)	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	-	BPS (PDB Nasional dan Sakernas)	2010-2013	-
8.2	Angka penduduk miskin yang bekerja, diukur dengan pendapatan \$2 PPP per kapita per hari	Persentase pekerja dengan pendapatan \$2 PPP per kapita per hari	-	BPS (Sakernas)	-	Data belum ditemukan
8.3	[Indeks pekerjaan layak]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
8.4	Pendapatan rumahtangga, termasuk dalam bentuk jasa-jasa (PPP, US\$ terkini)	Pendapatan rumahtangga, termasuk dalam bentuk jasa-jasa (PPP, US\$ terkini)	-	BPS (SKTIR)	-	Data belum ditemukan
8.5	Rasio pekerjaan terhadap penduduk (EPR) menurut gender dan kelompok umur (15-64)	Rasio pekerjaan terhadap penduduk (EPR) menurut gender dan kelompok umur (15-64)	-	BPS (Sakernas)	2011-2015	-

No.	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia	Proxy	Sumber	Tahun Series	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
8.6	Proporsi pekerjaan informal terhadap total lapangan kerja	Proporsi pekerjaan informal terhadap total lapangan kerja	-	BPS (Sakernas)	2010-2014	-
8.7	Persentase pekerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total lapangan pekerjaan	Persentase pekerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total lapangan pekerjaan	-	BPS (Sakernas)	2010-2014	-
8.8	Persentase penduduk muda yang tidak sedang mengikuti pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan (NEET)	(Indikator belum tersedia)	Persentase penduduk muda yang tidak sedang bersekolah dan tidak bekerja	BPS (Sakernas)	2011-2015	-
8.9	[Indikator pelaksanaan kerangka kerja 10 tahunan pada program konsumsi dan produksi berkelanjutan] – untuk dikembangkan	(data tidak tersedia)	-	-	-	-
Tujuan 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh						
58	Akses terhadap jalan untuk segala cuaca/ all weather road (persentase akses pada [x] km jarak ke jalan)	(Indikator belum tersedia)	Persentase desa yang terdapat jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun	BPS (Podes)	2008-2014	-
59	Langganan broadband telepon genggam per 100 penduduk, menurut perkotaan/pedesaan	(Indikator belum tersedia)	Persentase penduduk usia 5 tahun keatas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir menurut daerah tempat tinggal	BPS (Susenas)	-	-
60	[Indeks kinerja infrastruktur TIK]	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
61	Nilai tambah ector manufaktur (MVA) sebagai persentase terhadap PDB	Nilai tambah ector manufaktur (MVA) sebagai persentase terhadap PDB	-	BPS (PDB Nasional)	2010-2014	-
62	Jumlah emisi gas rumah kaca terkait ector dan ectory menurut jenis gas dan ector, dinyatakan sebagai emisi berbasis produksi dan permintaan (tCO ₂ e)	Jumlah emisi gas rumah kaca menurut jenis gas dan sektor	-	ESDM	-	Data belum ditemukan
63	Peneliti dan teknisi di bidang penelitian dan pengembangan (per sejuta penduduk)	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
9.1	Persentase rumahtangga yang memiliki internet, menurut tipe layanan di daerah pedesaan/ perkotaan	Persentase individu dengan akses internet di pedesaan/ perkotaan	Persentase rumah tangga yang mempunyai akses internet	BPS (Susenas)	2011-2014	-
9.2	Lapangan pekerjaan di sektor industri (% dari total lapangan pekerjaan)	Persentase jumlah pekerja sektor industri terhadap jumlah tenaga kerja	-	BPS (Sakernas)	2010-2014	-
Tujuan 10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara						
64	[Indikator ketimpangan pada batas atas dan bawah distribusi pendapatan: proporsi Pendapatan Nasional Bruto dari 10% penduduk terkaya atau rasio Palma]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-

No.	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia	Proxy	Sumber	Tahun Series	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
65	Persentase rumah tangga dengan pendapatan dibawah 50% dari median pendapatan (kemiskinan relatif)	(Indikator belum tersedia)	Persentase penduduk miskin menurut daerah tempat tinggal	BPS (Susenas)	2011-2014	-
10.1	Koefisien gini	Koefisien gini	-	BPS	2010-2014	-
10.2	Persistensi pendapatan/ upah	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
10.3	Indeks Tata Kelola Mobilitas manusia	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
10.4	Persentase ODA bersih ke LDCs terhadap GNI untuk negara-negara berpenghasilan tinggi (dimodifikasi dari MDG Indikator)	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
10.5	Indikator saham perwakilan LDCs / LIC di dewan IMF / WB (dan lembaga pemerintahan lain)	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
10.6	[Biaya Transfer Remittance] - untuk dikembangkan	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
Tujuan 11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan						
66	Persentase penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh atau pemukiman informal (Indikator MDG)	Persentase penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh	-	UNSTAT	1990-2014	-
67	Persentase orang dengan 0.5km angkutan umum berjalan setidaknya setiap 20 menit	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
68	[Rasio tingkat konsumsi tanah terhadap laju pertumbuhan penduduk, pada skala yang sebanding]	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
6 cross reference	Kerugian dari bencana alam, akibat iklim dan bukan iklim (dalam US \$ dan korban hilang)	Jumlah korban bencana alam yang meninggal dunia, Kerugian akibat bencana alam dalam rupiah dan \$US	Jumlah korban meninggal, luka-luka, hilang menurut kejadian bencana, dan jumlah kerusakan rumah berat, sedang, dan ringan menurut kejadian bencana.	BNPB	2010-2015	Data kerugian tidak tercatat dengan baik sehingga didekati dengan kerusakan rumah
69	Rata-rata polusi udara dari benda-benda partikuler di perkotaan (PM10 dan PM2.5)	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
70	Proporsi luas ruang publik dan ruang hijau terhadap total ruang kota	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	Ketersediaan data belum ditemukan
71	Persentase limbah padat perkotaan yang secara rutin dikumpulkan dan dikelola dengan baik	Persentase rumah tangga di perkotaan menurut perlakuan terhadap sampah	-	BPS (SPPLH)	-	Data belum ditemukan
95 cross reference	Alokasi penerimaan dalam negeri untuk pembangunan berkelanjutan dalam persen dari PNB - berdasarkan sektor	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
11.1	Jumlah persimpangan jalan per kilometer persegi	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-

No.	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia	Proxy	Sumber	Tahun Series	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
11.2	Keberadaan dan penerapan kerangka kebijakan pemukiman perkotaan dan manusia nasional	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
11.3	Persentase kota dengan lebih dari 100.000 penduduk yang menerapkan strategi pengurangan risiko dan ketahanan diinformasikan oleh kerangka kerja internasional yang diterima (seperti forthcoming Hyogo-2 Framework)	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
11.4	Adanya kode bangunan perkotaan yang menetapkan baik penggunaan material lokal dan / atau teknologi energi baru yang efisien maupun dengan insentif yang sama	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
11.5	Indeks keanekaragaman hayati Kota (Indeks Singapore)	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
11.6	Persentase konsumsi makanan dan bahan baku dalam wilayah perkotaan yang diproduksi dan disampaikan dalam / dari daerah pedesaan dalam negeri	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
Tujuan 12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan						
72	Keterbukaan pemegang hak sumberdaya alam	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
73	Indikator Kerugian Pangan Global (atau indikator lain perlu dikembangkan untuk mengetahui proporsi kerugian pangan atau pangan yang terbuang dalam rantai nilai setelah panen)	(Indikator belum tersedia)	Kerugian pascapanen (susut hasil panen padi)	BPS (Survei Susut)	-	Data belum ditemukan
74	Konsumsi bahan perusak ozon (Indikator MDG)	Konsumsi bahan perusak ozon	-	Kemen LH	-	Data belum diperoleh
75	Kedalaman optik aerosol (AOD)	Kedalaman optik aerosol (AOD)	-	UNEP	-	Data belum ditemukan
76	[Proporsi perusahaan senilai lebih dari \$ 1000000000] yang menerbitkan laporan terintegrasi]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
12.1	[Strategi analisa dampak lingkungan dan sosial diperlukan]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
12.2	[Peran pengawasan cabang legislatif mengenai kontrak dan lisensi berbasis sumber daya]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
12.3	[Indikator polusi kimia]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
12.4	Intensitas CO2 sektor bangunan dan bangunan baru (kgCO2/m2/ tahun)	(Indikator belum tersedia)	Intensitas CO2 sektor konstruksi	Kemen ESDM	-	Data belum diperoleh
12.5	[Indikator kebijakan pariwisata berkelanjutan]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
12.6	[Indikator proses pengadaan publik yang berkelanjutan]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-

No.	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia	Proxy	Sumber	Tahun Series	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
Tujuan 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya						
77	Ketersediaan dan implementasi strategi dekarbonisasi yang transparan dan rinci, konsisten dengan anggaran karbon global 2° C atau lebih rendah dan dengan target emisi gas rumah kaca untuk tahun 2020, 2030 dan 2050	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
78	Intensitas CO2 dari kapasitas pembangkit listrik baru (gCO2 per kWh), mobil baru (gCO2/ pkm) dan truk (tCO2tkm)	Intensitas CO2 dari sektor listrik (gCO2 per kWh)	-	Kemen ESDM	-	Data belum ditemukan
79	Emisi GRK netto di Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan Lahan lainnya (AFOLU) (tCO2e)	(Indikator belum tersedia)	-	Kementerian Kehutanan	-	Data belum ditemukan
80	Pendanaan iklim resmi negara-negara maju yang menjadi tambahan untuk BPR (dalam US\$)	Indikator untuk negara maju	-	-	-	-
13.1	[Indeks Aksi Perubahan Iklim]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
13.2	Intensitas emisi rumah kaca di wilayah pengelolaan hutan (GtCO2e/ha)	(Indikator belum tersedia)	-	Kemen ESDM	-	Data belum ditemukan
Tujuan 14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan						
81	Proporsi pesisir dan luas laut yang dilindungi	(indikator belum tersedia)	proporsi luas kawasan konservasi laut terhadap luas wilayah perairan laut teritorial	KKP	2011-2014	-
82	Persentase tonase ikan yang mendarat dengan Maximum Sustainable Yield (MSY)	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
14.1	Eutrofikasi muara utama	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
14.2	Keasaman Laut (pH diukur di permukaan)	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
14.3	[Indikator pelaksanaan strategi perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan laut]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
14.4	Daerah ekosistem terumbu karang dan persentase tutupan terumbu karang hidup	Daerah ekosistem terumbu karang dan persentase tutupan terumbu karang hidup	-	KKP	2010-2014	-
14.5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (Indikator MDG)	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	-	Bappenas	2011-2014	-
14.6	Persentase perikanan dengan sertifikasi berkelanjutan	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
14.7	Apakah negara memerlukan bendera Organisasi Maritim (IMO), nomor, dan transponder Internasional untuk semua kapal penangkap ikan lebih dari 24 meter atau 100 ton?	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-

No.	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia	Proxy	Sumber	Tahun Series	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
14.8	Apakah Regional Fisheries Management Organization (RFMO) mendirikan program monitoring satellite?	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
14.9	[Penggunaan teknik penangkapan ikan yang merusak]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
14.10	[Indikator akses ke sumber daya laut bagi nelayan rakyat skala kecil] - untuk dikembangkan	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
14.11	[Indikator transfer teknologi kelautan] - untuk dikembangkan	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
14.12	Area deforestasi bakau (hektar, dan persentase dari total luas hutan bakau)	(indikator belum tersedia)	-	-	-	Data belum ditemukan
Tujuan 15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati						
83	Perubahan tahunan luas kawasan hutan dan lahan budidaya [Indikator MDG yang dimodifikasi]	Perubahan tahunan luas kawasan hutan dan lahan budidaya	-	Kemehut	-	Data belum ditemukan
84	Persentase kawasan hutan lindung terhadap kawasan hutan	Persentase kawasan hutan lindung terhadap kawasan hutan	-	Kemehut	-	Data belum ditemukan
85	Perubahan tahunan lahan terdegradasi atau menjadi gurun (% atau ha)	Perubahan tahunan lahan terdegradasi atau menjadi gurun (% atau ha)	-	Kemehut	-	Data belum ditemukan
86	Red List Index (kelompok spesies utama negara dan species yang diperdagangkan untuk internasional)	Red List Index (kelompok spesies utama negara dan species yang diperdagangkan untuk internasional)	-	IUCN	2014	-
87	Daerah keanekaragaman hayati yang dilindungi	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
15.1	Peningkatan kepemilikan lahan dan tata kelola hutan	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
15.2	[Indikator konservasi ekosistem gunung]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
15.3	Indeks Vitalitas Pengetahuan Lingkungan Tradisional (VITEK)	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
15.4	[Indikator akses pada sumber daya genetik]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
15.5	Kelimpahan spesies asing yang masuk	(Indikator belum tersedia)	-	-	-	-
15.6	[Indikator sumber daya finansial untuk ekosistem dan keanekaragaman]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
15.7	[Indikator sumber daya finansial untuk pengelolaan hutan berkelanjutan]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
15.8	[Indikator dukungan global untuk memerangi perburuan dan perdagangan satwa dilindungi] - untuk dikembangkan	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
15.9	Living Planet Index	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-

No.	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia	Proxy	Sumber	Tahun Series	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
Tujuan 16. Meningkatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses terhadap Keadilan bagi Semua, dan Membangun Institusi yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan						
88	Cedera dan kematian akibat kekerasan per 100.000 penduduk	(indikator belum tersedia)	Jumlah desa menurut adanya korban perkelahian massal (meninggal dan luka-luka)	BPS (Podes)	2008, 2011, 2014 (3 Tahunan)	-
89	Jumlah Pengungsi	Jumlah Pengungsi berdasarkan jenis bencana	-	BNPB	2010-2015	-
90	Proporsi orang hukum dan perjanjian tentang kepemilikan informasi bermanfaat yang tersedia untuk umum	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
91	Pendapatan, belanja, dan pembiayaan semua entitas pemerintah pusat disajikan secara bruto dalam dokumentasi anggaran publik dan disahkan oleh legislatif	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
92	Persentase anak di bawah usia 5 yang lahir terdaftar dengan otoritas sipil	(indikator belum tersedia)	Persentase balita yang memiliki akta kelahiran	BPS (Susenas)	2010-2014	-
93	Keberadaan dan pelaksanaan hukum nasional dan / atau jaminan konstitusional tentang hak atas informasi	(indikator belum tersedia)	-	-	-	Terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan UUD pasal 28
94	Persepsi korupsi di sektor publik	Corruption Perception Index (CPI), Indeks Persepsi Korupsi	-	Transparency International Indonesia atau SPAK (BPS)	2005-2014	-
16.1	Persentase perempuan dan laki-laki yang merasa aman berjalan sendirian di malam hari di kota atau area mereka tinggal	Persentase perempuan dan laki-laki yang merasa aman berjalan sendirian di malam hari di kota atau daerah tempat tinggal mereka	-	Gallup Survei	-	data tidak ditemukan
16.2	Kepatuhan terhadap rekomendasi dari UPR dan Perjanjian PBB	Kepatuhan terhadap rekomendasi dari UPR dan Perjanjian PBB	-	UN OHCHR	-	data tidak ditemukan
16.3	Frekuensi pembayaran gaji pasukan keamanan	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
16.4	Persentase orang dan bisnis yang membayar suap kepada pejabat publik, atau diminta untuk suap oleh pejabat publik, selama 12 bulan terakhir	[Indikator perlu dikembangkan]	-	BPS (SPAK)	2013-2014	-
16.5	Persentase dari jumlah tahanan yang telah ditahan selama lebih dari 12 bulan sambil menunggu hukuman atau disposisi akhir dari kasus mereka	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
16.6	[Indikator total arus keuangan terlarang]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
16.7	[Indikator kerjasama internasional dalam mencegah kekerasan dan memerangi terorisme dan kejahatan]	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-

No.	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia	Proxy	Sumber	Tahun Series	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
16.8	Keterwakilan perempuan di antara mediator, negosiator dan ahli teknis dalam negosiasi perdamaian formal	[Indikator perlu dikembangkan]	-	-	-	-
16.9	Jumlah wartawan dan petugas media terkait yang diserang secara fisik, ditahan dan dibunuh secara tidak sah saat mengejar kegiatan resmi mereka.	[Indikator perlu dikembangkan]	-	IDI (BPS)	-	-
Tujuan 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan						
95	Pendapatan Domestik dialokasikan untuk pembangunan berkelanjutan sebagai persen dari Pendapatan Nasional Bruto	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
96	ODA dan hibah swasta netto dalam Pendapatan Nasional Bruto negara berpendapatan tinggi	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
97	Arus netto swasta untuk pembangunan berkelanjutan pada harga pasar dalam bentuk proporsi dari Pendapatan Nasional Bruto negara berpendapatan tinggi	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
98	Laporan Tahunan BIS, IASB, IFRS, IMF, WIPO, WTO [organisasi lain yang akan ditambahkan] pada hubungan antara aturan internasional dan SDGs	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
99	Proporsi Indikator SDGs yang dilaporkan setiap tahun	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
100	Kesejahteraan evaluatif dan positive mood affect	Indeks kebahagiaan	-	BPS (SPTK)	2013 - 2014	-
17.1	Jumlah bantuan resmi untuk pembangunan	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
17.2	Bantuan Programmable Country	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
17.3	[Indikator pinjaman keberlanjutan] - untuk dikembangkan	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
17.4	Pengeluaran domestik bruto untuk R & D sebagai bagian dari PDB	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
17.5	[Indikator teknologi sharing dan difusi] - untuk dikembangkan	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
17.6	[Indikator pada penciptaan / pendaftaran ke bank teknologi dan STI (Sains, Teknologi dan Inovasi) Peningkatan Kapasitas Mekanisme untuk LDCs 2017] - untuk dikembangkan	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
17.7	Rata-rata tarif yang dikenakan oleh negara-negara maju pada produk pertanian dan tekstil dan pakaian dari negara-negara berkembang (Indikator MDG)	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-

No.	Indikator Usulan SDSN	Ketersediaan Indikator di Indonesia	Proxy	Sumber	Tahun Series	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
17.8	Nilai LDC (Least Developed Countries) ekspor sebagai persentase dari ekspor global	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
17.9	[Indikator rezim promosi investasi untuk LDCs] - untuk dikembangkan	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-
17.10	Persen bantuan pembangunan resmi (ODA), hibah swasta netto, dan pembiayaan iklim resmi yang disalurkan melalui prioritas yang dikumpulkan dengan mekanisme pembiayaan multilateral	(indikator belum tersedia)	-	-	-	-

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito, W. (2007). Faktor Risiko Diare Pada Bayi dan Balita di Indonesia: Systematic Review Penelitian Akademik Bidang Kesehatan Masyarakat. *Makara Kesehatan*, 1-10.
- Alexander, H. B. (2014, Agustus 28). *Properti: Berita: Menyedihkan, Permukiman Kumuh di Indonesia Seluas 59.000 Hektar*. Diambil kembali dari Kompas.com: <http://properti.kompas.com/index.php/read/2014/08/28/083950421/Menyedihkan.Permukiman.Kumuh.di.Indonesia.Seluas.59.000.Hektar>
- Amanda, G. (2014, November 6). Indonesia Urutan Pertama Peningkatan Kecelakaan Lalu Lintas. Diambil kembali dari NEWS republika.co.id: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/4/11/06/nem9nc-indonesia-urutan-pertama-peningkatan-kecelakaan-lalu-lintas>
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Badan Pusat Statistik; Kementerian Kesehatan; MEASURE DHS ICF International. (2013). *Survei demografi dan Kesehatan Indonesia 2012*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). 2014. *Outlook Energi Indonesia 2014*. Jakarta : BPPT
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). *Perlindungan Sosial di Indonesia : Tantangan dan Arah Kedepan*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Berita Resmi Statistik : Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai (ARAM II)* . Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Analisis Sosial Ekonomi Rumah Tangga Usaha Pertanian tahun 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *PROFIL KEMISKINAN DI INDONESIA MARET 2015 (BRS)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (t.thn.). *Sosial dan Kependudukan: Kemiskinan: Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, dan Garis Kemiskinan, 1970-2013*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494>
- Balitbang Kemenkes RI. (2013). *Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013*. Jakarta: Kemenkes.
- BAPPENAS. (2015). *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2014*. Jakarta: BAPPENAS.
- Budiarto, E., & Anggraeni, D. (2003). *Pengantar Epidemiologi Edisi 2*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Gera, I. (2014, Juli 7). BPS: Jumlah Petani di Indonesia Terus Berkurang. Retrieved 12 7, 2015, from VOA : Voice of America Indonesia: <http://www.voaindonesia.com/content/bps-jumlah-petani-di-indonesia-terus-berkurang/1949152.html>
- Hardanti, Y. R. (2008). *Analisis Hubungan Antara Pembangunan Manusia Dan kemiskinan Di Indonesia*. Yogyakarta: LPPM Universitas Sanata Dharma.

- Haryanto, H. (2012). *Kemiskinan dan Permasalahan di Perdesaan*. Jakarta.
- http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_346599.pdf
- http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_329870.pdf
- <http://www.merdeka.com/uang/data-bps-2014-pendapatan-rata-rata-orang-indonesia-rp-41-jutatahun.html>
- <http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx> (diakses tanggal 15 Mei 2015).
- <http://apps.who.int/gho/data/node.imr> (diakses tanggal 23 April 2015).
- <http://www.worldbank.org/> (diakses tanggal 2 Juni 2015).
- <http://www.bps.go.id/>
- ILO. 2011. *Decent Work Country Profile : Indonesia/ILO*. Genewa : ILO.
- ILO. 2013. *Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2013*. Jakarta : ILO.
- ILO. 2015. *Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2014-2015*. Jakarta : ILO.
- Institut Teknologi Bandung. (t.thn.). *Latar Belakang*. Diambil kembali dari Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air: <http://www.tpsda.itb.ac.id/>
- Jurnal Jakarta.com. (2015, Desember 9). Home > PERTAMBANGAN > Di Berbagai Daerah PLN Siapkan Kapal Perkuat Pasokan Listrik. Diambil kembali dari Jurnal Jakarta.com: <http://jurnaljakarta.com/berita-5757-di-berbagai-daerah-pln-siapkan-kapal-perkuat-pasokan-listrik.html>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2010). *INDONESIA Energy Outlook 2010*. Jakarta: Pusat data dan Informasi energi dan Sumber daya Mineral KESDM.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (n.d.). *Berita: Konversi Minyak Tanah ke LPG : Menggerakkan Perekonomian, Menghemat Energi*. Retrieved from Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: <http://esdm.go.id/berita/56-artikel/4011-konversi-minyak-tanah-ke-lpg-menggerakkan-perekonomian-menghemat-energi.html>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2012). *Pedoman Nasioanal Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kliegman, R. M., Stanton, B. F., & Joseph W. St. Geme III, N. F. (2011). *Nelson TEXTBOOK of PEDIATRICS*. USA: ELSEVIER.
- Lubis, Z. (2011). *Pertumbuhan Janin dan Kebutuhan Gizi*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Maryono. (2007). *Menilai Aksesibilitas Air Minum di Kota Semarang* . Jurnal PRESIPITASI , 86-92.
- Masduqi, A., Endah, N., Soedjono, E. S., & Hadi, W. (2007). *CAPAIAN PELAYANAN AIR BERSIH PERDESAAN SESUAI MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS - STUDI KASUS DI WILAYAH DAS BRANTAS*. JURNAL PURIFIKASI, 115-120.
- Mason, A., & Lee, S.-H. (2004). *The demographic dividend and poverty reduction*. University of Hawaii at Manoa and the East-West Center.
- Minarto. (2011). *Rencana Aksi Pembinaan Gizi Masyarakat Tahun 2010-2014*. Jakarta: Dirjen Bina

Gizi dan KIA Kemenkes.

- Muliarta. (2012, September 11). Berita/Indonesia: Indonesia Targetkan Bebas Perilaku Buang Air Besar Sembarangan 2014. Diambil kembali dari VOA Voice of America: <http://www.voaindonesia.com/content/indonesia-targetkan-bebas-perilaku-buang-air-besar-sembarangan-2014/1505408.html>
- PP No 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional.
- Purmono, A. (2014, Juni 11). Nasional : Konversi Lahan Pertanian di Indonesia Mencemaskan. Retrieved 12 7, 2015, from Tempo.co website: <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/06/11/173584243/konversi-lahan-pertanian-di-indonesia-mencemaskan>
- Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2012). Potensi SDA Indonesia Nomor Lima Dunia.
- Pusdatin Kemenkes RI. (2014). Infodatin : Situasi dan Analisis ASI Eksklusif. Jakarta: Kemenkes RI.
- Qonita, D. (2014, Maret 1). Fungsi Protein. Retrieved Desember 17, 2015, from Academia: http://www.academia.edu/6291998/Fungsi_Protein
- Redaksi Kata Data. (2015, Februari 18). Anggaran Kesehatan Indonesia Salah Satu yang Terendah di Dunia. Retrieved Desember 21, 2015, from KataData News& Research: <http://katadata.co.id/berita/2015/02/18/anggaran-kesehatan-indonesia-salah-satu-yang-terendah-di-dunia#sthash.LGnXEpDj.dpbs>
- Samsudrajat, A. (2011, November 22). Penelitian Sebagai Ujung Tombak Pengetahuan & Solusi Kesehatan Masyarakat. Retrieved Desember 20, 2015, from Kompasiana: http://www.kompasiana.com/agus34drajat/penelitian-sebagai-ujung-tombak-pengetahuan-solusi-kesehatan-masyarakat_5509da2aa333111c682e3cbb
- Syarifah, F. (2014, September 15). Ini Alasan Obat Tambah Darah Penting untuk Ibu Hamil. Diambil kembali dari Liputan6: <http://health.liputan6.com/read/2080933/ini-alasan-obat-tambah-darah-penting-untuk-ibu-hamil>
- Tejo, A. (2014, September 10). Menteri Pertanian: Kekurangan Pangan di Depan Mata .
- Yulianti, L., Setiani, O., & D, Y. H. (2012). Faktor-Faktor Lingkungan Fisik Rumah Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pneumonia Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Pangandaran Kabupaten Ciamis. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 187-193
- Yunus, S. P. (2014). Wanita dan Hak Waris serta Hak Kepemilikan Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046,

E-mail : bpsHQ@bps.go.id Homepage : <http://www.bps.go.id>

